



KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR 2019~2024



Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan

Borong 2019



**BUPATI MANGGARAI TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2019**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2019 - 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 158);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

dan

BUPATI MANGGARAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2019-
2024.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Timur.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009-2029.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan-PD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja-PD, yang selanjutnya disebut Renja-PD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
15. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil

(*outcome*) program Perangkat Daerah.

20. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
21. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
22. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
23. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
24. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
25. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
26. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
27. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
28. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
29. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
30. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
31. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya

disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

32. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
33. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

BAB II

PENETAPAN DAN SISTEMATIKA

RPJMD

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024 yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Sistematika RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN

DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB IX. PENUTUP

Pasal 4

RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 5

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman pada RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, RPJPD Kabupaten Manggarai Timur dan RTRW Kabupaten Manggarai Timur.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
 - a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-PD;
 - b. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam menyusun RKPD dan Rancangan APBD.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Renstra-PD.

- (2) Perangkat Daerah wajib menjamin konsistensi antara Renstra - PD dengan RPJMD.
- (3) Perangkat Daerah serta masyarakat termasuk dunia usaha yang ada di Kabupaten Manggarai Timur, wajib melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya.

Pasal 7

Kepala Bappelitbangda melakukan verifikasi terhadap Renstra PD untuk memastikan kesesuaian Renstra-PD dengan rancangan awal RPJMD.

Pasal 8

Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD, dijabarkan ke dalam Renstra-PD 5 (lima) tahunan, RKPD tahunan dan Renja-PD.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 9

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD terdiri dari:

- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahun;
- b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah 5 (lima) tahun; dan
- c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah 5 (lima) tahun.

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bappelitbangda.

Pasal 11

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - b. terjadi perubahan mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra PD.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat RPJMD 2024-2028 belum tersusun maka penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RPJMN, RPJPD Kabupaten Manggarai Timur, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Visi/Misi Kepala Daerah terpilih.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Manggarai Timur. 

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 28 Agustus 2019



BUPATI MANGGARAI TIMUR,


AGAS ANDREAS

Diundangkan di Borong
pada tanggal 28 Agustus 2019

 **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, 



 **BONI HASUDUNGAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2019,
NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: NOMOR 9, NOMOR 09/
TAHUN 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
TAHUN 2019-2024

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran .

Otonomi daerah pada masa lalu hanya merupakan terminologi yang dikenal dikalangan masyarakat secara terbatas, sedangkan saat ini sudah menjadi pembicaraan umum dan berkembang dikalangan masyarakat yang lebih luas lagi, khususnya di tingkat daerah di seluruh Indonesia. Kondisi ini telah memberikan suatu kesadaran baru bagi kalangan pemerintah maupun masyarakat, bahwa kita tidak bisa lagi membiarkan gelombang otonomi mengalir begitu saja tanpa upaya untuk mengarahkan dan mengisinya dengan berbagai tindakan nyata yang lebih proaktif.

Salah satu yang harus dilakukan dan sudah menjadi kebutuhan serta tuntutan umum adalah adanya upaya untuk mempersiapkan diri, khususnya masyarakat dan aparat pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas, baik kualitas sumber daya manusia maupun kualitas sumber daya lain, yang akan berdampak bagi terciptanya kualitas program pembangunan di daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan membagi urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintahan absolut, konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Sedemikian besarnya wewenang dan tugas Pemerintah Daerah sehingga memerlukan koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan sinergi mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian pembangunan. Dengan demikian diperlukan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang efektif dan efisien.

Salah satu unsur dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah wajib adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat.

3. Prinsip-prinsip

Prinsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi:

- a. Merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional;
- b. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing masing;
- c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

4. Pendekatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menggunakan pendekatan:

- a. teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- b. Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- c. politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama DPRD.
- d. atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

5. Tahapan

Tahapan penyusunan RPJMD terdiri dari:

- a. persiapan penyusunan RPJMD;
- b. penyusunan rancangan awal RPJMD;
- c. penyusunan rancangan RPJMD;
- d. pelaksanaan musrenbang RPJMD;
- e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
- f. penetapan RPJMD

6. Muatan

Muatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terdiri dari:

- a. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- b. arah kebijakan keuangan daerah;
- c. strategi pembangunan daerah;
- d. arah kebijakan pembangunan;
- e. program pembangunan daerah;
- f. program perangkat daerah;
- g. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 159**

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Bab 1 Pendahuluan

Latar Belakang	1
Dasar Hukum Penyusunan	7
Hubungan Antar Dokumen	10
Maksud Dan Tujuan	12
Sistematika Penyusunan	12

Bab 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Aspek Geografis Dan Demografis	15
Aspek Geografis	15
Karakteristik Lokasi Dan Wilayah	15
Potensi Pengembangan Wilayah	25
Kawasan Strategis	43
Demografi	48
Jumlah Dan Persebaran Penduduk	48
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	50
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	51
Aspek Kesejahteraan Masyarakat	52
Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi	52
Pertumbuhan PDRB	52
Laju Pertumbuhan Ekonomi	56
Laju Inflasi	58
PDRB Perkapita	59
Indeks Gini Ratio	59
Jumlah Pengeluaran Perkapita	60
Angka Kemiskinan	60
Indeks Pembangunan Manusia	62

Fokus kesejahteraan Sosial	63
Angka Buta Huruf	63
Angka Rata Rata Lama Sekolah	64
Angka Partisipasi Kasar	64
Angka Partisipasi Murni	65
Harapan Lama Sekolah	66
Angka Partisipasi Sekolah	67
Angka Kelangsungan Hidup Bayi	67
Angka Kematian Ibu	68
Presentase Balita Gizi Buruk Dan Gizi Kurang	68
Usia Harapan Hidup	69
Rasio Penduduk Yang Bekerja	70
Nilai Sakip Dan Opini BPK	71
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	72
Fokus Seni Budaya Dan Olah Raga	73
Perkembangan Seni, Budaya Dan Olah Raga	73
Aspek Pelayanan Umum	73
Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib	73
Pendidikan	74
Angka Partisipasi Sekolah	74
Ratio Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah	74
Ratio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar Dan Menengah	76
Angka Putus Sekolah	76
Angka Melanjutkan Pendidikan	77
Kompetensi Guru	78
Angka Kelulusan	79
Pendidikan Luar Biasa	80
Kesehatan	80
Rasio Posyandu Per Satuan Balita	81
Rasio Prasarana Kesehatan Per Satuan Penduduk	81
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	82
Rasio Dokter Dan Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	82
Angka Kesakitan	84
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	84

Tingkat Kemantapan Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	84
Jaringan Irigasi Kabupaten	86
Sumber Air Minum Rumah Tangga	87
Presentase Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak	88
Perumahan Dan Kawasan Permukiman	89
Rumah Layak Huni	90
Rumah Tidak Layak Huni	90
Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat	91
Sosial	91
Urusan Pelayanan Wajib Non Pelayanan Dasar	93
Tenaga Kerja	93
Angkatan Kerja	94
Bukan Angkatan Kerja	94
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	95
Tingkat Pengangguran Terbuka	96
Jumlah Pekerja Migran Asal Manggarai Timur	96
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	97
Pemberdayaan Perempuan	97
Perlindungan Anak	99
Ketahanan Pangan	100
Pertanahan	101
Lingkungan Hidup	102
Kondisi Tutupan Lahan	102
Kualitas Air	103
Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	103
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	104
Presentase PPK Aktif	104
Presentase posyandu Aktif	105
Pengendalian Penduduk Dan KB	105
Laju Pertumbuhan Penduduk	105
Cakupan Presentase KB Aktif	106
Kampung KB	107
Perhubungan	108
Jumlah Pelabuhan	108

Jumlah Bandar Udara	108
Jumlah Dan Jenis Kendaraan Bermotor	109
Arus Kunjungan Dan Penumpang	109
Komunikasi Dan Informatika	109
Media Komunikasi Dan informasi Pemerintah Manggarai Timur	109
Presentase Penduduk Yang Memiliki Alat Komunukasi Dan Infromasi	111
Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	111
Presentase Koperasi Aktif	112
Jumlah UKM Non BPR/LKM Aktif	112
Posisi Kredit Usaha Kecil	112
Kredit Usaha Rakyat	113
Usaha Mikro, Kecil, Menengah	114
Penanaman Modal	114
Kepemudaan Dan Olah Raga	116
Statistik	117
Persandian	118
Kebudayaan	118
Perpustakaan	119
Kearsipan	120
Fokus Layanan Urusan Pilihan	121
Kelautan Perikanan	121
Pariwisata	122
Pertanian	124
Tanaman Pangan	125
Holtikultura	126
Perkebunan	127
Peternakan	128
Energi Sumber Daya Mineral	129
Rumah Tangga Pengguna Listrik	129
Perdagangan	130
Perindustrian	130
Transmigrasi	131
Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Penunjang	131
Perencanaan	131

Keuangan	132
Tata Kelola Keuangan	132
Realisasi PAD	133
Kepegawaian	134
Aspek Daya Saing Daerah	134
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	161
Pengeluaran Rata Rata Perkapita Perbulan	161
Fokus Fasilitas/Infrastruktur Daerah	162
Kondisi Jalan	162
Luas Wilayah Produktif	163
Jenis Dan Jumlah Bank	164
Restoran Dan Rumah Makan	164
Jumlah Akomodasi	164
Presentase Rumah Tangga Menggunakan Listrik	165
Presentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon Selular	165
Iklim Berinvestasi	166
Jumlah Kriminalitas	166
Jumlah Demonstrasi	166
Lama Proses Perizinan	166
Sumber Daya Manusia	167
Kualitas Tenaga Kerja	167
Rasio Ketergantungan	167
Evaluasi RPJMD Kabupaten Manggarai Timur 2014-2019	168
Kondisi Capaian TPB	172
Kondisi Umum Capaian TPB	172
Capaian Target TPB Pilar Sosial	173
Capaian Target Pilar Ekonomi	173
Capaian Target Pilar Lingkungan Hidup	174
Capaian Target Pilar Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan	174

Bab 3 Gambaran Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan Masa Lalu	176
Pendapatan Daerah	176
Belanja Daerah	178
Pembiayaan Daerah	180

Neraca Daerah	181
Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	183
Proporsi Penggunaan Anggaran	183
Analisis Pembiayaan	184
Kerangka Pendanaan	185
Proyeksi Pendapatan Daerah	185
Proyeksi Pendapatan Asli Daerah	186
Pajak Daerah	187
Retribusi Daerah	187
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain PAD Yang Sah	188
Proyeksi Dana Perimbangan	189
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	190
Kebijakan Dan Proyeksi Belanja Tahun 2019-2023	192
Kebijakan Dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2019-2023	195
Kerangka Pendanaan	197

Bab 4 Permasalahan Dan Isu Isu Strategis Daerah

Permasalahan Pembangunan	202
Analisis Permasalahan Pembangunan Manusia	202
Analisis Permasalahan Pembangunan Ekonomi	205
Analisis Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup	209
Analisis Permasalahan Infrastruktur Transportasi	212
Analisis Kondisi Lingkungan Permukiman	213
Analisis Kondisi Lingkungan Hidup	214
Analisis Permasalahan Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan	215
Isu Strategis	221
Isu Strategis Internal	221
Penelaahan RPJPD Kabupaten Manggarai Timur 2019-2029	221
Isu Strategis Lingkungan Eksternal	226
SDGs	226
MEA	228
Revolusi Industri 4.0	230
Masyarakat Ekonomi NTT	231
Penelaahan RPJMD Provinsi NTT Dan RPJMD Kabupaten Tetangga	232
Isu Strategis Kabupaten Manggarai Timur	235

Bab 5 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran	
Visi	241
Misi	243
Keselarsan Visi Misi RPJMD Dan Visi Misi RPJPD	247
Tujuan Dan Sasaran	249
Bab 6 Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah	
Strategi Pembangunan	255
Arah Kebijakan	258
Bab 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah	
265	
Bab 8 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
295	
Penetapan Indikator Kinerja Utama	295
Indiaktor Kinerja Utama	296
Indikator Kinerja Daerah	297
Bab 9 Penutup	
309	
Kaidah Pelaksanaan	309
Pedoman Transisi	310
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel

Tabel Bab 2

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Manggarai Timur	16
Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan Kabupaten Manggarai Timur dalam Konstelasi Regional	17
Kondisi Morfologi Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	19
Kondisi Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	20
Jenis Tanah di Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	21
Jenis Bencana Alam di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013-2018	24
Sebaran Jenis Hutan di Kabupaten Manggarai Timur Berdasarkan SK Kemen-LH	26
Luas dan Persebaran Hutan Lindung di Kabupaten Manggarai Timur	28
Kawasan Peruntukan Sempadan Pantai di Kabupaten Manggarai Timur	28
Peruntukan Kawasan Sempadan Sungai	30
Peruntukan Kawasan Sempadan Danau/Waduk	31
Peruntukan Kawasan Taman Wisata Alam	32
Kawasan Peruntukan Ekosistem Mangrove	33
Sebaran Hutan Produksi Berdasarkan SK Kemen-LH	34
Peruntukan Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Manggarai Timur	34
Peruntukan Tanaman Pangan	35
Peruntukan Kawasan Hortikultura	36
Peruntukan Kawasan Perkebunan	38
Peruntukan Kawasan Pertambangan	40
Peruntukan Kawasan Pariwisata	41
Peruntukan Permukiman Perkotaan	42
Peruntukan Permukiman Perdesaan	43
Perkembangan Penduduk Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	48
Jumlah Penduduk Kabupaten Manggarai Timur Berdasarkan Kecamatan Tahun 2015-2018	49
Jumlah Penduduk Kabupaten Manggarai Timur Berdasarkan Agama Tahun 2018	51

Jumlah Penduduk Kabupaten Manggarai Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018	51
PDRB ADHK Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018	53
PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018	55
Laju PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Manggarai Timur 2013 – 2017	55
Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2013-2017	55
Laju PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018	57
PDRB Per Kapita ADHK 2010 Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015-2018	59
Indeks Gini di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013-2017	59
Jumlah Pengeluaran per Kapita di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015-2018	60
Indikator Kemiskinan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013-2017	62
IPM Kabupaten Manggarai Timur dan Komponen-Komponen Pembentuknya Tahun 2013-2017	63
Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013-2018	64
Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	65
Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	66
Angka Putus Sekolah di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	66
Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013-2018	66
Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	67
Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Balita di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	68
Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	68
Proporsi Status Gizi Sangat Pendek dan Pendek pada Balita di Kabupaten Manggarai Timur	69
Umur Harapan Hidup di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013-2017	70
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015 dan 2017	70
Nilai SAKIP dan Opini BPK Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	72
Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013-2018	73
Perkembangan Seni, Budaya dan Olah Raga di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013-2018	73
Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	74
Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Manggarai Timur, 2014 – 2018	76

Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar dan Menengah di Kabupaten Manggarai Timur 2014-2018	76
Angka Putus Sekolah di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	77
Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Manggarai Timur 2014-2018	80
Jumlah Siswa Pendidikan Luar Biasa Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Manggarai Timur, 2018	80
Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	81
Rasio Puskesmas, Polindes, Posyandu dan Klinik/Balai Kesehatan Per Penduduk di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	82
Rasio Tenaga Kesehatan Menurut Sarana Kesehatan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	83
Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Tidak Menular di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013-2017	84
Panjang Jalan Kabupaten Manggarai Timur Berdasarkan Kewenangan Sampai Tahun 2018	86
Kondisi Jalan Kabupaten Manggarai Timur Sampai Tahun 2018	86
Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	86
Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	87
Luas Arel Tanam di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	87
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017	88
Pembangunan MCK dan Instalasi Air Limbah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	89
Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Manggarai Timur 2017-2018	90
Rasio Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Manggarai Timur	91
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	91
Indikator Sosial Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	93
Jumlah Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015-2018	94
Jumlah Bukan Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014-2018	94
Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015-2018	94
Bukan Angkatan Kerja (BAK) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	95

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	96
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	96
Sebaran Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Manggarai Timur Berdasarkan Negara Tujuan Tahun 2017 – 2018	97
Proporsi PNS Perempuan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	98
Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Dilaporkan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	98
Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Dilaporkan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	99
Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	101
Jumlah Tanah Pemda Kabupaten Manggarai Timur yang Disertifikat Tahun 2017-2018	101
Lahan Kritis dalam Kawasan dan Luar Kawasan Hutan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018	102
Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kabupaten 2014-2018	104
Persentase PKK Aktif di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	105
Jumlah Posyandu Aktif di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	105
Persentase Peserta KB Aktif di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	106
Cakupan Peserta KB Baru di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	107
Jumlah kampung KB di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016-2018	107
Jumlah dan Jenis Kendaraan Bermotor di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	109
Jenis Media Komunikasi di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018	110
Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Teknologi Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018	111
Jumlah dan Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	112
Jumlah UKM non BPR/LKM aktif di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	112
Jumlah Debitur dan Plafon KUK di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	113
Jumlah Debitur dan Plafon Kredit KUR di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	114
Perkembangan UMKM di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	114
Perkembangan PMTB Kabupaten Manggarai Timur 2013 – 2017	115
Realisasi Investasi Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	115

Capaian Pembangunan di Bidang Kepemudaan dan Olah Raga di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017-2018	117
Indikator Statistik Kabupaten Manggarai Timur 2014-2019	118
Jenis Sarana Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018	119
Jumlah Obyek Wisata yang Tertangani di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018	119
Indikator Kinerja Perpustakaan Kabupaten Manggarai Timur 2014-2018	119
Keadaan Perpustakaan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018	120
Indikator Kearsipan Kabupaten Manggarai Timur 2014-2018	121
Jumlah Produksi Perikanan Laut dan Budidaya di Kabupaten Manggarai Timur 2014-2018	121
Jumlah Rumah Tangga Usaha Perikanan Laut Kategori Usaha Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	122
Perkembangan Wisatawan dan Rata-Rata Lama Tinggal Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	123
Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (ADHB dan ADHK) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2017	124
Luas Tanam dan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016-2018	125
Luas Tanam dan Produksi Komoditi Hortikultura (Sayur-Sayuran) Tahun 2016-2018	126
Luas Tanam dan Produksi Komoditi Hortikultura (Buah-Buahan) Tahun 2016-2018	127
Luas Tanam dan Produksi Komoditi Perkebunan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016-2018	128
Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	128
Indikator Perdagangan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	130
Indikator Perindustrian di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	130
Indikator Transmigrasi di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	131
Indikator Perencanaan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	132
Indikator Tata Kelola Keuangan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	133
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	133
Jumlah ASN berdasarkan Eselon dan Jabatan Fungsional Tahun 2014-2018	134
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	134
Pengeluaran Per Kapita Penduduk Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015-2017	161

Kondisi Jalan Kabupaten Manggarai Timur Sampai Tahun 2018	162
Luas Wilayah Produktif di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018	163
Jumlah Restoran dan Rumah Makan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	164
Jumlah Akomodasi Hotel di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018	164
Capaian Target RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2019	168
Jumlah Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan di Kabupaten Manggarai Timur	172

Tabel Bab 3

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014 s.d 2018	177
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2014 s.d 2018	179
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2014 s.d 2018	180
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2014 s.d 2018	182
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014 s.d 2018	183
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Manggarai Timur	183
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Manggarai Timur	184
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Manggarai Timur	184
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Manggarai Timur	184
Tren dan Proyeksi Pertumbuhan PAD Kabupaten Manggarai Timur	186
Tren dan Proyeksi Pertumbuhan PAD Kabupaten Manggarai Timur	189
Tren dan Proyeksi Pertumbuhan PAD Kabupaten Manggarai Timur	190
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur	191
Proyeksi Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur	194
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2019-2023	194
Proyeksi Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Manggarai Timur	195
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023	198
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023	199

Tabel Bab 4

Permasalahan Pembangunan	219
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pembangunan RPJPD Kabupaten Manggarai Timur	225

Identifikasi RPJMN dan RPJMD Provinsi NTT dan RPJMD Tetangga	232

Tabel Bab 5

Keselarsan Misi, Visi RPJMD Kabupaten Manggarai Timur 2019-2024 Dengan Visi, Misi RPJPD Kabupaten Manggarai Timur 2009-2029	248
Indikator Kunci Utama RPJMD Kabupaten Manggarai Timur pada Tahun 2019-2024	249
Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah	251

Tabel Bab 6

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Manggarai Timur	256
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Manggarai Timur	260
Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Manggarai Timur	261

Tabel Bab 7

Kerangka Pendanaan Pembangunan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024	265
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Manggarai Timur	267

Tabel Bab 8

Indikator Kinerja Utama	296
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	297

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar

Gambar Bab 1

Hubungan Antar RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	11
Integrasi RTRW Dan KLHS Dalam Penyusunan RPJMD	11
Hubungan Antar Bab Dalam RPJMD	14

Gambar Bab 2

Peta Kabupaten Manggarai Timur	16
Struktur Penduduk Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018	50
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2014-2018	57
Laju Inflasi Kabupaten Manggarai Timur 2013-2017	58
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015-2018	79
Peta Jaringan Jalan di Kabupaten Manggarai Timur	85

Gambar Bab 3

Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung	180

Gambar Bab 4

Analisis Permasalahan Pengembangan Sumber Daya Manusia	203
Analisis Permasalahan Pengembangan Ekonomi Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	207
Analisis Permasalahan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	211
Analisis Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan	219

BAB 1

Pendahuluan

- Latar Belakang
- Dasar Hukum Penyusunan
- Hubungan Antar Dokumen
- Maksud dan Tujuan
- Sistematika Penyusunan





1.1. Latar Belakang

Kabupaten Manggarai Timur merupakan salah satu dari 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Manggarai Timur sebagai Daerah Otonom dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wacana pembentukannya sudah dimulai sejak tahun 1986. Pada saat itu dibicarakan supaya Kabupaten Manggarai dibagi menjadi tiga daerah otonom, yaitu Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Manggarai Timur. Pembagian ini lebih pada pembagian wilayah administratif pemerintahan, bukan pembagian wilayah kultural karena memang Manggarai – dari Selat Sape (batas bagian barat) hingga Wae Mokel (batas bagian timur) – hanya memiliki satu budaya, yaitu budaya Manggarai. Ada berbagai alasan yang mendasari wacana pemekaran wilayah Kabupaten Manggarai, di antaranya wilayah Kabupaten Manggarai terlalu luas. Topografinya berlereng-lereng; sebagian kecil saja yang rata. Isu-isu pembangunannya pun sangat kompleks, seperti keterbatasan jumlah fasilitas pendidikan dan kesehatan, kesulitan akses antarwilayah, kemiskinan, dan hal-hal serupa lainnya. Pemekaran dianggap menjadi solusi terbaik, yang harus segera direalisasikan, supaya cakupan pelayanan publik dasar dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.



Namun, hingga akhir dekade 1990-an wacana pemekaran Kabupaten Manggarai menjadi tiga daerah otonom meredup.

Sekitar tahun 2000 wacana tersebut kembali diangkat. Pada tahun 2000, DPRD Kabupaten Manggarai menyatakan dukungan terhadap rencana pemekaran Kabupaten Manggarai menjadi tiga daerah otonom. Dukungan DPRD tersebut secara resmi dituangkan dalam Surat Pernyataan Nomor 1/Perny.DPRD/2000 tanggal 29 Mei 2000. Dua tahun kemudian dukungan tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Politik DPRD Manggarai Nomor 06/DPRD/2002 tanggal 10 Agustus 2002. Dukungan DPRD dan berbagai elemen masyarakat tersebut mulai berhasil ketika pada tahun 2003 DPR RI mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi NTT. Sedangkan rencana pembentukan Kabupaten Manggarai Timur belum mendapat respon dari Pemerintahan Pusat.

Rencana pembentukan Kabupaten Manggarai Timur terus diperjuangkan oleh berbagai elemen masyarakat. Pada tahun 2006, Pemerintahan Kabupaten Manggarai dan Provinsi NTT sama-sama memperjuangkan supaya bagian timur Kabupaten Manggarai menjadi kabupaten tersendiri. Berbagai pendekatan dilakukan. Hal ini terlihat dari Surat Usulan Bupati Manggarai Nomor Pem. 135/22/I/2006; Keputusan DPRD Kabupaten Manggarai Nomor 03/DPRD/2006 tanggal 4 Februari 2006; Keputusan DPRD Kabupaten Manggarai Nomor 04/DPRD/2006 tanggal 15 Februari 2006; Keputusan Nomor 05/DPRD/2006, tanggal 17 Februari 2006; Usulan Gubernur NTT Nomor Pem. 135/04/2006 tanggal 27 Januari 2006 dan Keputusan DPRD Provinsi NTT Nomor 4/PIMP.DPRD/2006 tanggal 1 Februari 2006. Upaya bersama ini berhasil meyakinkan Pemerintahan Pusat sehingga pada tanggal 17 Juli 2007 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Nusa Tenggara Timur disahkan oleh DPR RI, sehingga dengan demikian terbentuklah Kabupaten Manggarai Timur secara resmi.

Sebagai daerah otonom, otonomi yang diterima oleh Kabupaten Manggarai Timur dari Pemerintah Pusat sejak tahun 2007 dilaksanakan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena berada dalam bingkai NKRI, maka kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mesti menjadi bagian integral dari kebijakan nasional. Hal itu berarti bahwa pemanfaatan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing dan kreativitas Kabupaten Manggarai Timur dalam pembangunan bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional pada tingkat lokal, yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Dalam Pasal 258 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa daerah melaksanakan pembangunan demi peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Dalam melaksanakan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur akan mengikuti asas dan tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa “perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan.” Perencanaan pembangunan Kabupaten Manggarai Timur berada dalam kerangka asas pembangunan nasional tersebut. Tujuannya (Pasal 2 Ayat (4)) adalah untuk: (1) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

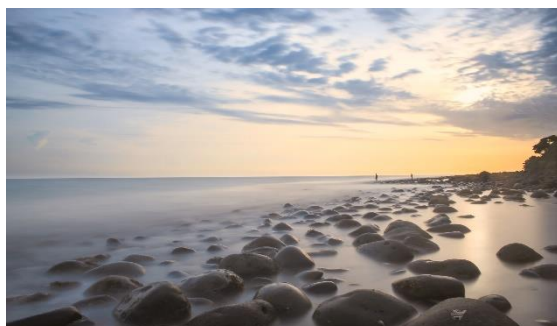
Mengikuti periodisasi perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan Kabupaten Manggarai Timur terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pelaksanaan 5 (lima) tahunan RPJPD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) sebagai pelaksanaan tahunan RPJMD. RPJMD Kabupaten Manggarai Timur 2019-2024 merupakan pelaksanaan periode 5 (lima) tahunan ketiga RPJPD Kabupaten Manggarai Timur 2009-2029. RPJPD tersebut memiliki visi: **“Manggarai Timur Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing”**. Penjabaran visi tersebut ke dalam misi-misi, strategi, arah kebijakan dan program lima tahunan bertujuan untuk menjawab secara terencana, sistematis dan berkelanjutan terhadap berbagai isu strategis pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur.

Secara umum isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur antara lain sebagai berikut: *pertama*, kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah, yang dapat dilihat dari rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Manggarai Timur di mana pada tahun 2010 IPM Kabupaten Manggarai Timur hanya 54,26 indeks, berada di bawah IPM Provinsi NTT yang sudah mencapai 59,21 indeks. Pada tahun yang sama IPM Nasional sudah mencapai 66,53 indeks. *Kedua*, tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat sangat rendah. Hal itu dapat dilihat dari nilai PDRB ADHB Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2008 hanya sebesar Rp. 599,324,873,00 dan nilai PDRB ADHK 2000 sebesar Rp. 361,215,696,00. Pada tahun 2008 jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Timur sebesar 249,654 jiwa, dan itu berarti nilai PDRB per kapita ADHB penduduk Kabupaten Manggarai Timur hanya Rp. 2,250,067,00 dan nilai PDRB Per Kapita ADHK 2000 sebesar Rp. 1,363,323,00. *Ketiga*, kebutuhan infrastruktur dasar belum terpenuhi. Pada masa awal berdirinya, sebagian besar wilayah Kabupaten Manggarai Timur masih sulit diakses karena belum banyak tersedianya jalan dan jembatan yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. *Keempat*, kemampuan keuangan daerah (celah fiskal) sangat

rendah. Sebagian besar (95 persen) kebutuhan anggaran pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur bersumber dari dana transfer pusat.

Intervensi pembangunan atas isu-isu strategis di atas melalui pelaksanaan tahap pertama dan tahap kedua lima tahunan sudah membuahkan hasil kendati belum sepenuhnya mengurai kompleksitas persoalan pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur. Pada tahun 2013 IPM Kabupaten Manggarai Timur naik menjadi 55,74, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 59,49. IPM tersebut masih lebih rendah dibandingkan IPM Provinsi NTT yang sudah mencapai 61,68 pada tahun 2013, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 64,39. Sedangkan pada tahun yang sama IPM Nasional berturut-turut 68,31 pada tahun 2013 dan 71,39 pada tahun 2018. Di bidang ekonomi, pada tahun 2013 nilai PDRB ADHB Kabupaten Manggarai Timur mencapai Rp.1,834,098.2 (juta) dan pada tahun 2018 sudah mencapai Rp. 2,991,244.95 (juta). Sementara Nilai PDRB ADHK 2010 pada tahun 2013 sebesar Rp. 1,502,450.27 (juta) dan pada tahun 2018 mencapai Rp. 1,929,472.67 (juta). Di bidang infrastruktur dasar sebagian besar sudah dibangun, namun belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan daya ungkit pembangunan di bidang ekonomi dan sektor-sektor lainnya.

Pada tahap ketiga pelaksanaan RPJPD Kabupaten Manggarai Timur diarahkan pada upaya "memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Manggarai Timur" dengan beberapa prioritas antara lain: (1) pencapaian daya saing daerah berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas; (2) pelayanan dasar yang berkualitas; (3) kelembagaan ekonomi dan kelembagaan pemerintah yang efektif dan efisien; dan (4) penerapan IPTEK. Visi, misi, strategi, arah kebijakan dan program Bupati-Wakil Bupati Manggarai Timur Periode 2019-2024, **Agas Andreas – Jaghur Stefanus**, yang dilantik oleh **Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat** pada tanggal **14 Februari 2019** di Kupang, berada dalam kerangka keberlanjutan pelaksanaan lima tahunan ketiga RPJPD Kabupaten Manggarai Timur, yang akan dijabarkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024.



Visi pembangunan Kabupaten Manggarai Periode 2019-2024: **"Mewujudkan Manggarai Timur yang Sejahtera, Berbudaya dan Berdaya (MATIM SEBER)"** merupakan kondisi yang ingin diwujudkan sebagai hasil dari intervensi pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Visi tersebut akan diwujudkan melalui beberapa misi: 1) Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat; 2) Mengembangkan

ekonomi unggulan berbasis pertanian berkelanjutan, pariwisata berbasis masyarakat, industri kecil, koperasi dan UMKM, serta mewujudkan pembangunan desa berbasis budaya lokal; 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah yang berbasis lingkungan hidup untuk memudahkan akses ke pelayanan dasar dan mendukung` prioritas ekonomi unggulan; 4) Mewujudkan kabupaten ramah perempuan dan layak anak; 5) Menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif, efisien dan terpercaya melayani masyarakat.

Karena kualitas SDM masih rendah, maka fokus pembangunan Kabupaten Manggarai Timur selama lima tahun ke depan adalah membangun manusia Manggarai Timur supaya memiliki daya saing, baik pada tingkat regional, maupun pada tingkat nasional/internasional. Pembangunan manusia akan dilakukan melalui pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, serta sosial-ketenagakerjaan. Pada bidang pendidikan akan diterapkan konsep Sekolah Bahagia (mendorong partisipasi lintas sektor, sekolah yang



ramah anak, dan pendidikan karakter kontekstual). Selain itu, di setiap kecamatan akan dibangun SD dan SMP unggulan, yang akan diikuti dengan peningkatan jumlah dan kualitas guru. Pada bidang kesehatan akan diutamakan promosi kesehatan, dan juga peningkatan akses masyarakat

terhadap sarana dan prasarana kesehatan. Hal itu akan dilakukan antara lain, melalui peningkatan Puskesmas Non-Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap; melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah di Lehong dan pemberian beasiswa bagi anak-anak Manggarai Timur di Fakultas Kedokteran. Sementara pada bidang sosial-ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan perlindungan anak, akan ada peningkatan pembinaan dan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi; optimalisasi Kampung KB, dan mendorong Kabupaten Manggarai Timur menjadi Kabupaten Layak Anak.

Pada bidang ekonomi, Pemerintah Manggarai Timur akan mendorong pertumbuhan ekonomi supaya mencapai angka maksimal. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Timur sebesar 5,20 persen. Selama lima tahun ke depan pertumbuhan ekonomi ditargetkan bertumbuh 9,91 persen. Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi tersebut adalah infrastruktur. Pemerintah berkomitmen untuk membangun jalan lapen sepanjang 200 Km per tahun rinciannya, 100 Km jalan kabupaten, 100 Km jalan desa), atau 10 Km jalan lapen per Kecamatan setiap tahun. Kemudian dalam rangka untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, koperasi dengan konsep Koperasi Likang Telu (koperasi produsen, koperasi konsumen, dan koperasi simpan-pinjam) akan

dibentuk. Prinsip kerja koperasi akan diterapkan dalam pengelolaan BUMDes dengan pola melibatkan masyarakat dalam kepemilikan modal. Dengan begitu, koperasi diharapkan akan benar-benar menjadi "soko guru" perekonomian Manggarai Timur. Pemerintah Manggarai Timur juga akan memberi perhatian lebih pada sektor pariwisata yang kini menjadi primadona kebijakan Pemerintah Provinsi NTT. Konsep *Community Based Tourism* akan diterapkan untuk memastikan masyarakat lokal menjadi pelaku utama dalam pengelolaan pariwisata. Pemerintah Desa akan didorong pada konsep Desa Bahagia, yakni adanya partisipasi semua elemen masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta pengembangan desa berbasis potensi desa berdasarkan penentuan tipologi desa dan kawasan perdesaan. Dalam menunjang konsep Desa Bahagia, Pemerintah juga akan melaksanakan Kegiatan "Perempuan Desa Berdaya" berbasis keterampilan dan Kegiatan Pembangunan Rumah Tuntas. Pemerintah berkomitmen untuk menguatkan peran dan fungsi lembaga adat dengan mendorong pembentukan Peraturan Desa. Peran *tua golo*, *tua teno*, *tua panga*, dan *tua kilo* akan dimaksimalkan dengan merevitalisasi nilai-nilai hukum adat.

Dalam rangka pencapaian pelaksanaannya, RPJMD Kabupaten Manggarai Timur 2019-2024 akan mengikuti kaidah-kaidah pelaksanaan yang mengacu pada tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terutama keterkaitannya dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bagaimana pun juga, selain menjabarkan visi, misi, arah kebijakan, strategi dan program Bupati-Wakil Bupati Manggarai Timur Periode 2019-2024, RPJMD Kabupaten Manggarai Timur perlu juga memperhatikan dan menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sesuai dengan potensi dan keunggulan wilayah Nusa Tenggara (Bali, NTB, dan NTT), yang di dalamnya tentu saja termasuk Kabupaten Manggarai Timur, Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pembangunan untuk wilayah Nusa Tenggara sebagai: (a) pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industri *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE)*; (b) penopang pangan nasional dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis pertanian dan maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut; (c) pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung. Kebijakan Pemerintah Pusat yang lain antara lain penentuan program atau kegiatan dan pengalokasian anggaran harus mengikuti prinsip *money follow programme priority* (hanya program yang menjadi dasar penetapan anggaran, bukan tugas dan fungsi), serta penggunaan paradigma Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial (HTIS) dalam perencanaan pembangunan. Sementara kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di antaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan pariwisata, pembangunan infrastruktur,

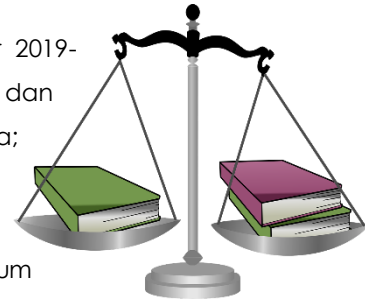


pembangunan sumber daya manusia, mencegah dan menangani *stunting*.

RPJMD Kabupaten Manggarai Timur 2019-2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang kemudian akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Manggarai Timur 2019-2024 memiliki landasan ideal, landasan konstitusional dan landasan operasional. Pancasila adalah landasan idealnya; dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah landasan konstitusionalnya. Di bawah ini adalah beberapa regulasi yang menjadi landasan hukum operasionalnya:



1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi dan Misi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

- 
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 12. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
 25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 90);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011-2031 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2012 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

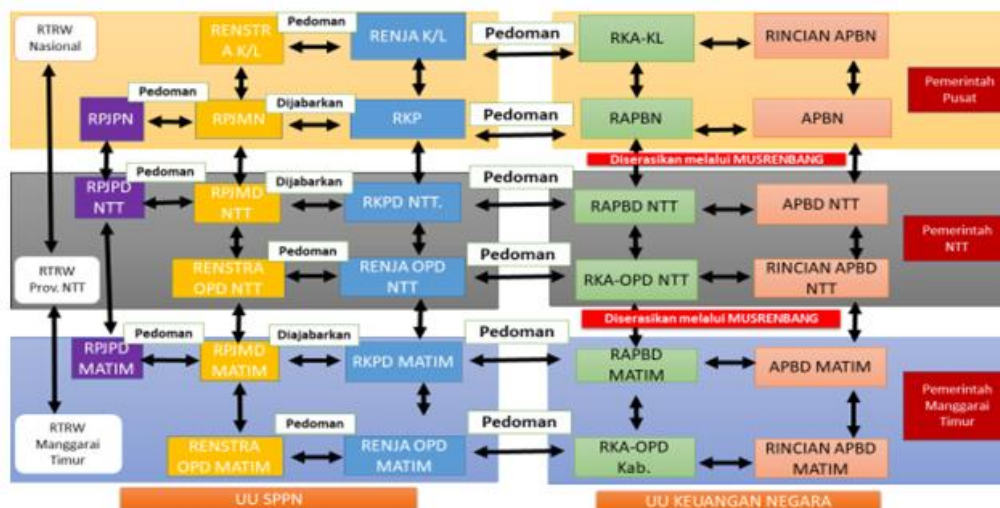
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD merupakan bagian dari satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPJMD harus terintegrasi dengan dokumen lain sehingga diharapkan mampu mendukung terwujudnya koordinasi antarurusan pemerintahan, dan antarperiode perencanaan baik dengan perencanaan di tingkat provinsi dan regional, maupun dengan perencanaan di tingkat nasional. Selain itu, dokumen RPJMD juga harus mampu memastikan keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

RPJMD Kabupaten Manggarai Timur 2019-2024 telah berpedoman pada RPJPD Kabupaten Manggarai Timur 2009-2029, serta telah mempertimbangkan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan RPJMN sebagai landasan dalam penyusunan arah kebijakan dan program pembangunan. Dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai Timur ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan secara tahunan dan juga sebagai acuan bagi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD yang dilaksanakan selama lima

tahun. Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. di bawah ini:

Gambar 1.1. Hubungan antar RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya



RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018-2024 juga mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). RPJMD, RTRW dan KLHS menjadi dokumen yang sinergis dan terpadu, agar kebijakan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan.

Gambar 1.2. Integrasi RTRW dan KLHS dalam Penyusunan RPJMD



1.4.

Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Manggarai Timur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Timur Periode 2019-2024 selama 5 (lima) tahun ke depan, serta menjadi tolok ukur pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya. Tujuannya adalah untuk menentukan strategi dan kebijakan umum serta program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Manggarai Timur selama lima tahun kedepan. Penetapan strategi dan kebijakan umum serta penentuan program pembangunan dilakukan atas dasar hasil evaluasi pembangunan lima tahun sebelumnya serta dengan memperhatikan kondisi empiris, kemampuan, dan kewenangan daerah.

Sasaran penyusunan RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi, misi, Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Timur ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.
2. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan melalui sumber dana APBD Kabupaten Manggarai Timur, APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, APBN dan sumber dana lainnya;
3. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar-Perangkat Daerah, antar Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat, serta lembaga usaha/lembaga bisnis;
4. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur;
5. Menciptakan iklim pemerintahan yang amanah dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
6. Mengoptimalkan kerja sama dan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, swasta dan masyarakat.

1.5.

Sistematika Penyusunan

Sistematika RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024 disusun dengan mengacu pada pedoman operasional penyusunan RPJMD dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai Permendagri dimaksud RPJMD ini terdiri atas IX Bab seperti yang dirincikan di bawah ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menjelaskan gambaran umum penyusunan RPJMD yang memuat sub-bab mengenai latar belakang, dasar hukum, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab II menyajikan kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek pelayanan umum.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab III memaparkan tentang kondisi pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab IV berbicara tentang permasalahan dan isu strategis pembangunan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam 5 (lima) tahun ke depan.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab V memuat uraian tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disepakati, dan penjelasan keterkaitan antar elemen-elemen perencanaan tersebut.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab VI memuat uraian strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, penjelasan hubungan setiap strategi dengan serangkaian arah kebijakan untuk menyelesaikan masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap melalui program prioritas yang terintegrasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab VII memuat uraian program prioritas beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

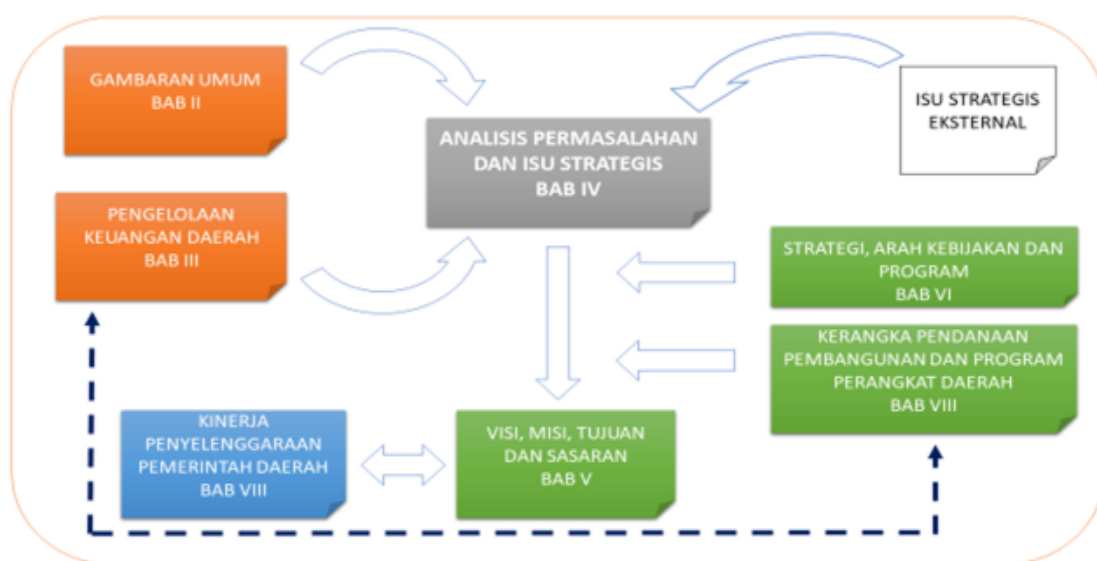
Bab VIII memuat uraian mengenai gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Bab IX memuat penjelasan dukungan yang diperlukan untuk menyempurnakan RPJMD Kabupaten Manggarai Timur 2019-2024 dan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Manggarai Timur 2019-2024.

Setiap Bab di atas memiliki keterkaitan satu sama lain. Keterkaitannya dapat dilihat pada Gambar 1.3. di bawah ini:

Gambar 1.3. Hubungan Antar Bab dalam RPJMD



BAB 2

Gambaran Umum Kondisi Daerah



Aspek Geografis dan Demografis

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Pelayanan Umum



GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



2.1 ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

2.1.1 Aspek Geografis

2.1.1.1

Karakteristik Lokasi dan wilayah

1. Luas dan Batas Administrasi

Kabupaten Manggarai Timur terletak di bagian barat pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara administratif batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ngada;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Manggarai.

Berdasarkan Penjelasan UU Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur, luas wilayah Kabupaten Manggarai Timur sebesar 264,293 Ha, yang terdiri atas luas wilayah daratan sebesar 251.955 Ha dan luas wilayah lautan sebesar 12,438 Ha.

Kondisi saat ini Kabupaten Manggarai Timur terdiri atas 9 kecamatan, 17 kelurahan dan 159 desa. Pusat pemerintahannya ada di Borong, Kecamatan Borong. Pembagian wilayah Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.1. di bawah ini.

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Manggarai Timur

NO	KECAMATAN	IBU KOTA	LUAS WILAYAH DARATAN (HA)
1	Borong	Borong	28.202
2	Rana Mese	Golo Mongkok	20.824
3	Poco Ranaka	Mano	10.601
4	Poco Ranaka Timur	Lawir	10.423
5	Lamba Leda	Benteng Jawa	35.943
6	Sambi Rampas	Pota	40.009
7	Elar	Lengko Elar	32.825
8	Elar Selatan	Wukir	23.934
9	Kota Komba	Wae Lengga	49.194
Kabupaten Manggarai Timur			251.955

Sumber: Bappeda Kabupaten Manggarai Timur, 2013

Gambar 2.1.
Peta Kabupaten Manggarai Timur



Sumber: Bappeda Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2. Letak dan Kondisi Geografis

a) Posisi Astronomis

Secara astronomis wilayah Kabupaten Manggarai Timur terletak di antara 08° 14' Lintang Selatan s.d. 09°00' Lintang Selatan dan 120°20' Bujur Timur s.d. 120°55' Bujur Timur.



b) Posisi Geostrategis

Kabupaten Manggarai Timur merupakan salah satu dari 22 Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dimekarkan dari Kabupaten Manggarai pada tahun 2007. Kedudukan Kabupaten Manggarai Timur pada jalur strategis Nasional Lintas Flores memiliki kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan tantangan, baik yang berasal dari faktor eksternal, maupun faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor lingkungan yang berasal dari luar *domain* kewenangan Kabupaten Manggarai Timur yang memberikan pengaruh dalam pengaturan dan pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Manggarai Timur.

Aspek-aspek yang diidentifikasi sebagai faktor peluang dan ancaman bagi Kabupaten Manggarai Timur adalah aspek sosial ekonomi, politik, hukum, teknologi dan demografi. Sedangkan faktor internal merupakan faktor lingkungan yang dimiliki oleh Kabupaten Manggarai Timur dan berpengaruh langsung terhadap pengaturan dan pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Manggarai Timur. Aspek-aspek yang diidentifikasi sebagai kekuatan dan kelemahan dari Kabupaten Manggarai Timur meliputi potensi dan masalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Jika semua aspek tadi dikelola dengan baik akan menjadi sebuah keunggulan dalam membangun wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan Kabupaten Manggarai Timur dalam konstelasi regional wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada Tabel 2.2. di bawah ini.

Tabel 2.2
Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan
Kabupaten Manggarai Timur dalam Konstelasi Regional

EKSTERNAL	Opportunity (Peluang):	Threat (Tantangan):
	• Posisi geografis strategis • Kawasan yang diminati untuk investasi • Kebijakan devolusi dan desentralisasi fiskal • Keberadaan kawasan-kawasan yang berperan secara regional • Permintaan pasar regional dan domestik atas produk unggulan • Kebijakan nasional pengembangan pesisir dan kelautan	• Distribusi sarana dan prasarana yang belum merata • Sebaran sumber daya manusia di wilayah utara dan selatan • Bencana alam (tanah longsor, gunung berapi)

INTERNAL	Strength (Kekuatan):	Weakness (Kelemahan):
	• Potensi produktif faktor produksi lahan • Potensi pesisir dan kawasan pantai • Potensi sektor pertambangan • Potensi sektor perhubunganPotensi • sejarah dan budayaProduktivitas SDM	• Disparitas wilayah utara dan selatan • Imbas stabilitas sosial politik nasional • Kesiapan perangkat dan kebijakan penunjang pelayanan publik

Sumber: Naskah Akademik RTRW Kabupaten Manggarai Timur, 2018

c) Kondisi Kawasan

1) Pedalaman dan Terpencil

Kabupaten Manggarai Timur memiliki kawasan pedalaman yang masih sulit diakses, baik dari aspek transportasi, maupun aspek komunikasi. Karena keterbatasan akses tersebut daerah pedalaman identik dengan daerah terpencil. Wilayah pedalaman dan terpencil tersebut menyebar di Kecamatan Lamba Leda bagian tengah, Sambi Rampas bagian tengah, Elar dan Elar Selatan bagian perbatasan dengan Kabupaten Ngada, serta Kecamatan Rana Mese bagian perbatasan dengan Kabupaten Manggarai.

2) Pesisir

Daerah pesisir di Kabupaten Manggarai Timur menyebar di Kecamatan Sambi Rampas (Desa Nampar Sepang, Nanga Mbaur, Kelurahan Pota dan Kelurahan Nanga Baras), Kecamatan Lamba Leda (Desa Satar Padut, Satar Kampas, Haju Wangi, Satar Punda dan Satar Punda Barat), Kecamatan Rana Mese (Desa Lidi dan Bea Ngencung), Kecamatan Borong (Desa Compang Ndejing, Nanga Labang, Kelurahan Kota Ndora, dan Kelurahan Rana Loba) dan Kecamatan Kota Komba (Kelurahan Tanah Rata dan Watu Nggene, serta Desa Bamo), Kecamatan Elar (Desa Kaju Wangi dan Desa Golo Lijun). Luas daerah pesisir di Kabupaten Manggarai Timur sebesar 609,78 Km².

3) Pegunungan

Secara geografis, wilayah Kabupaten Manggarai Timur terdiri atas pegunungan bagian dari Pegunungan Mando Sawu yang terbentang dari timur ke barat. Wilayah pegunungan ini melewati Kecamatan Poco Ranaka, Poco Ranaka Timur, Lamba Leda, Sambi Rampas bagian selatan, Elar, Elar Selatan, Kota Komba bagian utara, Borong bagian utara dan Kecamatan Rana Mese.



3. Kondisi Morfologi dan Topografi

Kondisi morfologi dan topografi Kabupaten Manggarai Timur lebih dominan kawasan berbukit karena wilayah Kabupaten Manggarai Timur sebagian besar merupakan kawasan pegunungan. Kondisi geomorfologi dan topografi di wilayah Kabupaten Manggarai Timur sebagian besar berada di atas 100 meter di atas permukaan laut (m/dpl). Kawasan <100 meter dpl hanya 31.352 Ha dengan persentase 12.44% dari total luas wilayah Kabupaten Manggarai Timur.



Secara morfologi wilayah Kabupaten Manggarai Timur dapat dikelompokkan mulai dari dataran 0-100 mdpl, 100-500 mdpl, 500-1000 mdpl dan >1000 mdpl dengan satuan morfologi, yaitu dataran tinggi, delta sungai, rawa dan perbukitan gelombang sedang. Umumnya membentuk delta sungai di hilir tersebut dan pada

umumnya berupa material mediteran. Menilik dari bentuk morfologi dan penyebaran batuanannya, maka orientasi ke tengah Kabupaten Manggarai Timur akan ditemui kondisi morfologi yang tinggi (sebagian Kecamatan Lamba Leda, sebagian Kecamatan Sambi Rampas dan sebagian Kecamatan Elar). Sedangkan arah Barat (Kabupaten Manggarai Induk) dan Selatan (Kabupaten Ngada) akan dijumpai juga morfologi yang lebih tinggi (morfologi perbukitan halus sampai sedang).

Kondisi ini tentunya berpengaruh terhadap penyebaran sumberdaya alam dan sebagai pertimbangan dalam penentuan lokasi Ibu Kota Kabupaten masa yang akan datang karena berdampak pada aksesibilitas antarwilayah. Kondisi morfologi Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.3. di bawah ini.

Tabel 2.3.
Kondisi Morfologi Wilayah Kabupaten Manggarai Timur

Kecamatan		Luas (Ha)			
		Datar	Bukit/Perbukitan	Gunung/Pegunungan	Total
1	Borong	6,228.05	4,289.64	7,208.29	17,725.99
2	Elar	6,746.71	9,911.65	17,851.23	34,509.60
3	Elar Selatan	4,281.11	4,247.10	8,566.56	17,094.77
4	Kota Komba	17,243.47	14,222.50	19,679.04	51,145.02
5	Lamba Leda	9,855.90	11,056.13	18,556.58	39,468.61
6	Poco Ranaka	2,369.92	3,676.56	6,323.83	12,370.32
7	Poco Ranaka Timur	5,434.66	2,748.98	2,082.88	10,266.53

8	Rana Mese	6,139.04	5,080.34	9,595.91	20,815.29
9	Sambi Rampas	10,837.55	8,691.06	17,306.22	36,834.83
Jumlah		69,136.41	63,923.96	107,170.54	240,230.96

Sumber: Naskah Akademik RTRW Kabupaten Manggarai Timur, 2018

Sedangkan kondisi kemiringan lereng pada wilayah Kabupaten Manggarai Timur sebagian besar didominasi wilayah berkemiringan lereng >40% dengan persentase 81,57% dari luas total Kabupaten Manggarai Timur. Untuk luas wilayah dengan kondisi kemiringan terkecil adalah 2 – 15% dengan persentase 2,61% dari total luas wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Kondisi kemiringan lereng di Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.4. di bawah ini.

Tabel 2.4
Kondisi Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Manggarai Timur

Kecamatan		Luas (Ha)					
		0 - 3%	3 - 8%	8 - 15%	15 - 25%	25 - 40%	> 40%
1	Borong	840.23	2,228.41	3,159.41	4,289.64	4,642.62	2,565.68
2	Elar	752.68	1,647.85	4,346.18	9,911.65	13,168.77	4,682.46
3	Elar Selatan	807.34	1,135.38	2,338.39	4,247.10	5,972.76	2,593.80
4	Kota Komba	842.39	5,351.60	11,049.47	14,222.50	13,324.04	6,355.00
5	Lamba Leda	963.91	2,904.83	5,987.16	11,056.13	13,465.82	5,090.76
6	Poco Ranaka	39.93	535.90	1,794.09	3,676.56	4,503.93	1,819.90
7	Poco Ranaka Timur	27.11	341.16	1,411.28	3,304.55	3,818.42	1,364.01
8	Rana Mese	155.75	1,889.50	4,093.79	5,080.34	5,634.65	3,961.26
9	Sambi Rampas	1,369.90	2,118.77	5,202.39	10,837.55	12,589.70	4,716.52
Jumlah		5,799.24	18,153.40	39,382.16	66,626.02	77,120.71	33,149.39

Sumber: Naskah Akademik RTRW Kabupaten Manggarai Timur, 2018

4. Jenis Tanah

Kabupaten Manggarai Timur mempunyai kondisi tanah datar dan bergunung-gunung. Jenis tanahnya bervariasi. Pada umumnya ditemukan jenis tanah mediteran, litosol, dan latosol.

- Latosol

Tanah latosol semula tergolong tanah mineral yang sudah mempunyai perkembangan profil dalam horizon terselubung merah hingga kuning, liat, lemah hingga gumpal. Jenis tanah ini meliputi 3 golongan yaitu : latosol coklat, latosol coklat merah dan latosol merah kuning. Golongan latosol coklat memiliki kemampuan dan potensi yang baik, karena kadar NPK cukup tersedia. Jenis latosol coklat merah dan latosol merah kuning memiliki kemampuan untuk pertanian sangat kecil, karena terdapat indikasi kekurangan sulfur.

- Mediteran

Tanah mempunyai lapisan solum yang tebal. Kadar unsur basa yang terkandung

umumnya tinggi, daya menahan airnya sedang, sehingga kepekaan terhadap erosi juga sedang. Sifat-sifat fisik dan kimianya baik sehingga nilai produksinya cukup tinggi dan apabila persediaan air cukup untuk pengolahan/tumbuh tanam, maka jenis tanah ini dapat dimanfaatkan untuk persawahan.

- Litosol

Merupakan tanah mineral dengan sedikit perkembangan diatas batuan kukuh, dengan kedalaman profil kurang dari 50 cm. Jenis tanah ini mempunyai hambatan kedangkalan profil disertai kadang-kadang kurang air, kemungkinan digunakan sebagai lahan pertanian sangat terbatas. Penyebaran untuk jenis tanah litosol banyak dijumpai di Kecamatan Poco Ranaka dan Kecamatan Borong. Jenis tanah mediteran banyak dijumpai menyebar, khususnya banyak dijumpai di kawasan bagian utara.

Tabel 2.5
Jenis Tanah di Wilayah Kabupaten Manggarai Timur

Kecamatan		Luas (Ha)				Total
		Argiudolls	Eutrudepts	Haplustalfs	Dystrudepts	
1	Borong	6,253.84	1,870.71	9,601.44	-	17,725.99
2	Elar	15,078.12	10,222.92	5,957.84	3,250.72	34,509.60
3	Elar Selatan	9,071.54	1,389.42	6,633.80	-	17,094.76
4	Kota Komba	13,005.33	6,447.37	31,692.32	-	51,145.02
5	Lamba Leda	10,871.57	-	27,908.79	688.25	39,468.61
6	Poco Ranaka	392.31	7,287.93	489.07	4,201.00	12,370.31
7	Poco Ranaka Timur	-	6,027.92	1,120.11	3,118.49	10,266.52
8	Rana Mese	12,090.32	2,159.66	5,576.73	988.58	20,815.29
9	Sambi Rampas	4,897.39	3,183.81	25,446.24	3,307.39	36,834.83
Jumlah		71,660.42	38,589.74	114,426.34	15,554.43	240,230.93

Sumber: Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, 1993

5. Geologi

Keadaan geologi Kabupaten Manggarai Timur mempunyai kondisi geologi yang cukup kompleks. Satuan geologi yang dijumpai dalam wilayah ini dibagi dalam 4 jenis yaitu:

1. *Intermediate basic* (basa menengah)
2. *Neogen*
3. *Alluvium terrace deposits and coral reefs* (alluvium undak dan terumbu coral)
4. *Silific efusives* (efisiva berasam kersik)

Wilayah Manggarai Timur bagian selatan sepanjang arah Barat – Timur banyak ditemukan jenis *Intermediate Basic* (basa menengah). Sedangkan pada bagian utara banyak ditemukan batuan kapur pada formasi neogen.

6. Kondisi Hidrologi

Kondisi dan potensi hidrologi dapat dilihat dari potensi air permukaan dan air tanah. Mengetahui kondisi dan potensi hidrologi tersebut bertujuan untuk mengetahui kemungkinan pendistribusian air di suatu wilayah.

a) Daerah Aliran Sungai

Daerah aliran sungai (DAS) di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 507 DAS yang terdiri atas sungai besar dan sungai kecil dan tersebar di 9 kecamatan. Sebagian besar daerah aliran sungai digunakan sebagai kawasan lindung dan pertanian. Di bawah ini adalah beberapa DAS besar yang ada di Kabupaten Manggarai Timur:

- DAS Wae Bobo di wilayah perbatasan Kecamatan Borong dan Kota Komba;
- DAS Wae Reca di Wilayah Kecamatan Borong;
- DAS Wae Mokel berada di wilayah perbatasan bagian selatan antara Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada;
- DAS Wae Pesi berada di wilayah perbatasan bagian utara antara Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai;
 - DAS Wae Togong berada di perbatasan bagian utara Kecamatan Lamba Leda dan Sambu Rampas;
- DAS Wae Mbaling di Kecamatan Sambu Rampas;
- DAS Wae Laku di Kecamatan Borong;
- DAS Wae Musur di Kecamatan Rana Mese.

b) Sungai, Danau dan Rawa-Rawa

Beberapa sungai besar yang terdapat di Kabupaten Manggarai Timur:

- Kecamatan Borong: Wae Reca, Wae Nampe, Wae Laku, Wae Lur, Wae Bobo, Wae Mao, Wae Boko, Wae Mau;
- Kecamatan Rana Mese: Wae Musur, Wae Nangis;
- Kecamatan Sambu Rampas: Wae Wera, Wae Tiwu Roang, Wae Tiwu Sengit, Wae Mbaling, Wae Wau, Wae Lenge, Wae Reno, Wae Larik;
- Kecamatan Kota Komba: Wae Nawu, Wae Ghera, Wae Lengga, Wae Mangu, Wae Munting, Wae Mokel, Wae Satar Beleng, Wae Neka, Wae Mobos Hulu Kanan, Wae Rana, Wae Sik, Wae Rungen, Wae Tija, Wae Mokel;
- Kecamatan Poco Ranaka: Wae Kembung, Wae Wina, Wae Nunung, Wae Lamba;
- Kecamatan Elar: Wae Gising, Wae Muli, Wae Watu, Wae Rebus, Wae Wuang, Wae Buntal;
- Kecamatan Lamba Leda: Wae Satar Teu, Wae Molot, Wae Loe, Wae Dampek, Wae Waso.

Danau yang terdapat di Kabupaten Manggarai Timur:

- Danau Rana Mese di Kecamatan Rana Mese;
- Danau Rana Kulan di Kecamatan Elar; dan
- Danau Rana Tonjong di Kecamatan Sambu Rampas.

c) Debit Air

Debit air bawah tanah yang terdapat di Kabupaten Manggarai Timur:

- Debit mata air sangat beragam setempat mencapai 10 liter/detik yang meliputi seluruh wilayah Kecamatan Borong, Kecamatan Kota Komba (kecuali Desa Komba dan Bamo bagian barat) dan Elar bagian timur;
- Akuifer dengan produksi sedang meliputi wilayah utara seperti Kecamatan Elar (kecuali Buntal), Kecamatan Sambu Rampas (kecuali Pota dan Nanga Rema), Kecamatan Lamba Leda bagian timur; dan
- Akuifer dengan produksi kecil setempat meliputi Kecamatan Lamba Leda bagian barat, Poco Ranaka dan Sambu Rampas bagian selatan.

7. Kondisi Klimatologi

a) Tipe Iklim

Iklim Kabupaten Manggarai Timur bertipe "moonsonal" atau bertipe satu puncak hujan. Tipe ini dipengaruhi oleh angin kering dari Australia yang menyebabkan konvergensi awan tidak seintens. Tipe ini bercirikan musim kemarau berlangsung cukup lama hingga 8 bulan, sementara rata-rata musim hujan hanya berlangsung 4 bulan.

b) Curah Hujan

Tingkat curah hujan memiliki hubungan erat dengan tingkat ketersediaan air, terutama dalam penentuan musim tanam dan pilihan jenis usaha tani di suatu wilayah. Wilayah Kabupaten Manggarai Timur pada umumnya mempunyai iklim dan curah hujan yang tidak merata. Pada sebagian wilayah curah hujannya cukup tinggi, namun pada wilayah lainnya relatif rendah. Besarnya curah hujan tahunan rata-rata 716,3 mm/tahun dan pada tahun 2015-2017 rata-rata hari hujan 111,3 hari hujan. Curah hujan yang tertinggi terdapat di daratan yang mempunyai ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan air laut, sedangkan curah hujan pada daerah-daerah lain relatif rendah.

c) Suhu

Suhu di Kabupaten Manggarai Timur berkisar antara 24°C-32°C pada wilayah pesisir (Kecamatan Borong, Kota Komba, Sambu Rampas dan Lamba Leda) dan 16°C-28°C pada wilayah pegunungan (Kecamatan Poco Ranaka, Poco Ranaka Timur, Elar dan Elar Selatan).

d) Kelembaban

L.R. Oldeman membagi wilayah dalam zona-zona agroklimatik yang berdasarkan kriteria bulan basah (lebih dari 200 mm/bulan) dan bulan kering (kurang dari 100 mm/bulan). Berdasarkan pembagian tersebut, Kabupaten Manggarai Timur cenderung termasuk dalam wilayah basah. Pada wilayah pegunungan dengan ketinggian di atas 1.000 m dpl, bulan basah terjadi antara bulan Oktober s.d. Mei (8 bulan), sedangkan pada wilayah pantai, bulan basah terjadi antara bulan Desember s.d. Maret (4 bulan).

8. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Manggarai Timur memiliki risiko bencana yang tinggi untuk jenis-jenis bencana geologis (gempa, tsunami, letusan gunung api dan longsor) serta hidrometeorologis (kekeringan, banjir, kebakaran lahan dan hutan). Kabupaten Manggarai Timur berisiko mengalami bencana geologis yang tinggi karena berada dalam wilayah patahan aktif Pulau Flores. Di pulau Flores terdapat 13 gunung berapi aktif, dan satu di antaranya ada di Kabupaten Manggarai Timur, yaitu Gunung Poco Ranaka. Sementara risiko bencana hidrometeorologis di Kabupaten Manggarai Timur seringkali terjadi pada wilayah-wilayah berlereng curam dan sekitar sungai. Bencana hidrometeorologis yang sangat parah di Kabupaten Manggarai terjadi pada tahun 2007, yaitu bencana tanah longsor yang melanda enam kecamatan. Bencana ini terjadi karena pada saat itu curah hujan dan intensitasnya sangat tinggi. Perilaku manusia yang membabat hutan secara besar-besaran juga menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor.

Beberapa kawasan rawan bencana di Kabupaten Manggarai Timur antara lain: a) wilayah selatan Kabupaten Manggarai Timur, terutama di wilayah pinggir pantai dan muara sungai, yaitu Kecamatan Borong dan Kecamatan Rana Mese. Pada wilayah ini sering terjadi bencana longsor; 2) wilayah Kabupaten Manggarai Timur bagian barat, yaitu Kecamatan Poco Ranaka dan Kecamatan Rana Mese. Dua kecamatan tersebut rawan sekali mengalami bencana gunung berapi karena Gunung Poco Ranaka berada pada dua kecamatan tersebut; 3) wilayah Kecamatan Lamba Leda, Poco Ranaka, Poco Ranaka Timur, Elar dan Elar Selatan rawan sekali terhadap bencana pergerakan tanah; 4) wilayah Kecamatan Rana Mese, Borong, Kota Komba, Elar dan Elar Selatan rawan sekali terhadap bencana angin topan; 5) Hampir di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur rawan terhadap bencana kebakaran. Beberapa jenis bencana alam yang terjadi di Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.6 di bawah ini.

Tabel 2.6
Jenis Bencana Alam di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013-2018

NO	JENIS BENCANA	TAHUN					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tanah longsor	12	16	11	32	15	20

2	Angin Topan	16	1	5	-	-	25
3	Banjir	4	4	26	15	13	15
4	Kekeringan	-	27	4	1	8	11
5	Kebakaran	13	28	27	11	9	11

Sumber: BPBD Kabupaten Manggarai Timur, 2018

Bencana hidrometeorologis merupakan jenis bencana yang dipengaruhi oleh kondisi iklim. Perubahan iklim, selain membawa akibat-akibat langsung seperti kenaikan muka dan suhu air laut, juga menyebabkan perubahan pola bencana hidrometeorologis. Ini bisa berdampak pada makin panjangnya kekeringan ataupun makin seringnya terjadi banjir maupun kebakaran hutan dan lahan.

Salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim adalah naiknya suhu udara, dimana panas matahari yang diserap bumi tidak dapat dilepaskan kembali ke atmosfer karena terhalang oleh Gas Rumah Kaca (GRK), sehingga terpantul kembali ke bumi. Peningkatan GRK disebabkan oleh kegiatan manusia (*antropogenic*) yang melepaskan GRK terlalu banyak seperti CO², N₂O dan CH⁴. Gas karbon dioksida yang paling banyak dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil pada skala industri, pembakaran dalam mesin kendaraan dan akibat penebangan pohon.

Selain berdampak pada kekerapan dan intensitas bencana-bencana hidrometeorologis, menghangatnya suhu juga mengubah habitat serangga, seperti nyamuk, sehingga terjadi perubahan pola insiden dan penyebaran penyakit malaria dan dengue. Perubahan iklim juga menyebabkan pulau-pulau kecil terancam hilang karena naiknya muka air laut, serta terjadi pemutihan terumbu karang karena kenaikan suhu air laut. Ini mengganggu keanekaragaman hayati laut dan pesisir, serta produktivitas hasil-hasil laut.

Pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur perlu mewaspada dampak perubahan iklim, terutama karena sektor pertanian, termasuk perikanan, merupakan sektor yang rentan terkena dampak perubahan iklim. Apalagi sebagian petani Kabupaten Manggarai Timur merupakan petani lahan kering yang tergantung pada variabel iklim seperti hujan, angin dan suhu udara untuk memproduksi pangan. Dengan karakteristik iklim, topografi dan tanah Kabupaten Manggarai Timur, maka perlu dikembangkan inovasi-inovasi pertanian dan perikanan yang memiliki daya adaptasi terhadap perubahan iklim.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah di atas dan pedoman rencana tata ruang wilayah Kabupaten Manggarai Timur, di bawah ini adalah wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya dan lindung di Kabupaten Manggarai Timur. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 yang menjadi acuan Pedoman Penyusunan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, pola ruang kawasan lindung terdiri atas: a) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi: kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air; b) kawasan perlindungan setempat, meliputi: kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, dan kawasan sempadan danau/waduk; c) kawasan konservasi berupa kawasan suaka alam; d) kawasan rawan bencana, meliputi: kawasan rawan bencana gerakan tanah (termasuk tanah longsor), kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan angin puting beliung; e) kawasan cagar budaya; dan f) kawasan ekosistem mangrove.

a. Kawasan Lindung

Kawasan peruntukan lindung yang berada di wilayah Kabupaten Manggarai Timur di antaranya Hutan Lindung, Sempadan Pantai, Sempadan Sungai, Sempadan Danau, Taman Wisata Alam, dan Ekosistem Mangrove sebagaimana secara detail dijelaskan di bawah ini.

1. Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan-kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah. Penetapan kawasan ini ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria di atas, dan berdasarkan peta skoring dan fungsi lahannya. Kawasan hutan lindung sepenuhnya diperuntukkan bagi konservasi hidrologis. Kawasan lain di luar kawasan hutan, juga dimungkinkan ditetapkan menjadi kawasan lindung asalkan sesuai dengan kriteria yang ada.

Kawasan yang termasuk dalam kategori kawasan hutan lindung di Kabupaten Manggarai Timur tersebar pada:

- a. kawasan hutan Puntu II RTK 19 Kecamatan Lamba Leda;
- b. kawasan hutan Pota RTK 101 Kecamatan Sambi Rampas;
- c. kawasan hutan Ndeki Komba RTK 115 Kecamatan Kota Komba;
- d. kawasan hutan Sawe Sange RTK 141 Kecamatan Elar;
- e. kawasan hutan Ngada Wolo Merah RTK 142 Kecamatan Elar.

Berdasarkan Kepmen LH dan Kehutanan nomor SK.357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016 sebaran hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi konversi, kawasan suaka alam dan area penggunaan lainnya yang berada di Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.7. di bawah ini.

Tabel 2.7.
Sebaran Jenis Hutan di Kabupaten Manggarai Timur Berdasarkan SK Kemen-LH

No	KECAMATAN	KETERANGAN	LUAS (Ha)
1	Borong		17,729.17
		Area Penggunaan Lain	13,024.03
		Hutan Lindung	904.43

		Hutan Produksi	827.32
		Kawasan Suaka Alam	2,973.38
2	Elar		27,675.77
		Area Penggunaan Lain	16,050.71
		Hutan Lindung	10,214.33
		Kawasan Suaka Alam	1,410.74
3	Elar Selatan		23,929.76
		Area Penggunaan Lain	21,680.57
		Hutan Lindung	241.97
		Kawasan Suaka Alam	2,007.22
4	Kota Komba		51,105.79
		Area Penggunaan Lain	40,915.88
		Hutan Lindung	3,554.11
		Hutan Produksi	4,961.88
		Kawasan Suaka Alam	1,673.93
5	Lamba Leda		39,529.97
		Area Penggunaan Lain	26,844.11
		Hutan Lindung	4,433.20
		Hutan Produksi	8,252.66
6	Poco Ranaka Timur		10,423.71
		Area Penggunaan Lain	7,033.12
		Kawasan Suaka Alam	3,390.59
7	Poco Ranaka		12,201.07
		Area Penggunaan Lain	9,425.82
		Kawasan Suaka Alam	2,775.25
8	Rana Mese		20,823.26
		Area Penggunaan Lain	12,397.96
		Hutan Produksi Konversi	971.61
		Kawasan Suaka Alam	7,453.69
9	Sambi Rampas		36,895.07
		Area Penggunaan Lain	19,381.62
		Hutan Lindung	13,983.96
		Hutan Produksi	1,547.42
		Kawasan Suaka Alam	1,982.07
	Grand Total		240,313.56

Sumber: Kepmen LH dan Kehutanan nomor SK.357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016

Peruntukan kawasan hutan lindung berdasarkan rencana, yaitu luasan yang terluas terdapat pada Kecamatan Sambi Rampas seluas 13,450.1266 Ha, sedangkan luas yang terkecil terdapat di Kecamatan Borong seluas 904.4350 Ha. Untuk lebih jelasnya peruntukan kawasan hutan lindung diperinci berdasarkan kecamatan yang ada di Kabupaten

Manggarai Timur sebagai berikut.

Tabel 2.8
Luas dan Persebaran Hutan Lindung di Kabupaten Manggarai Timur

Kecamatan		Kawasan Peruntukan Lindung
		a.1.
		Hutan Lindung (Ha)
1	Rana Mese	-
2	Borong	904.44
3	Kota Komba	3,541.63
4	Poco Ranaka	-
5	Poco Ranaka Timur	-
6	Sambi Rampas	13,450.13
7	Elar	9,941.32
8	Elar Selatan	241.99
9	Lamba Leda	4,244.84
Total		32,324.34

Sumber: Naskah Akademik RTRW Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2. Sempadan Pantai

Kawasan Sempadan Pantai adalah kawasan sepanjang pantai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai terhadap daratan dari bahaya abrasi dan intrusi air laut ke darat, juga terhadap keragaman biota yang ada di kawasan pantai. Tujuannya adalah untuk melindungi wilayah pantai dari usikan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.

Lokasi sempadan pantai di Kabupaten Manggarai Timur berada di Kecamatan Borong, Kecamatan Kota Komba, Kecamatan Elar, Kecamatan Sambi Rampas, dan Kecamatan Lamba Leda. Luasan sempadan pantai terluas berada di Kecamatan Kota Komba. Kecamatan Poco Ranaka, Poco Ranaka Timur, dan Elar Selatan merupakan wilayah yang tidak memiliki sempadan pantai karena semuanya berada jauh dari pantai. Wilayah sempadan pantai di Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.9. di bawah ini.

Tabel 2.9
Kawasan Peruntukan Sempadan Pantai di Kabupaten Manggarai Timur

Kecamatan		Kawasan Peruntukan Lindung
		a.2.
		Sempadan Pantai (Ha)
1	Rana Mese	34.1985
2	Borong	94.3781
3	Kota Komba	274.9111

4	Poco Ranaka	-
5	Poco Ranaka Timur	-
6	Sambi Rampas	196.7933
7	Elar	63.0690
8	Elar Selatan	-
9	Lamba Leda	263.0830
Total		926.4330

Sumber: Naskah Akademik RTRW Kabupaten Manggarai Timur, 2018

Pengaturan pemanfaatan pesisir untuk pengembangan perikanan keramba dapat dilakukan secara ketat dengan tetap mengedepankan aspek pelestarian pantai dan sungai, dengan terlebih dahulu mengarahkan pada arahan lokasi yang telah ditetapkan.

Arahan pengelolaan kawasan sempadan pantai di Kabupaten Manggarai Timur sebagai berikut:

- Kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di sepanjang garis pantai adalah kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah. Kegiatan-kegiatan seperti di atas di antaranya adalah penanaman tanaman keras, tanaman perdu, pemasangan batu beton untuk melindungi pantai dari abrasi.
- Pada kawasan sempadan pantai, usaha-usaha yang berkaitan dengan kelautan, seperti misalnya dermaga, pelabuhan, atau kegiatan perikanan lain, dapat terus dilakukan.
- Kegiatan lain yang dikhawatirkan dapat mengganggu atau mengurangi fungsi lindung kawasan tidak diperbolehkan.

3. Sempadan Sungai

Kawasan Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Tujuan perlindungan ini adalah untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai.

Lokasi Sempadan Sungai di Kabupaten Manggarai Timur berada di seluruh wilayah kecamatan, dan kawasan sekitar danau (Kecamatan Borong dan Kecamatan Elar). Spesifikasi ketetapan pada setiap lokasi sempadan sungai adalah sebagai berikut:

- Sungai bertanggung:** Garis Sempadan Sungai yang bertanggung di dalam kawasan perkotaan adalah 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul dan garis sempadan Sungai yang bertanggung di luar kawasan perkotaan adalah 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

b. **Sungai Tidak Bertanggul**: Garis Sempadan Sungai yang tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan adalah sebagai berikut:

- Sungai yang berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah 10 (sepuluh) meter.
- Sungai yang berkedalaman 3 (tiga) sampai dengan 20 (dua puluh) meter adalah 15 (lima belas) meter.
- Sungai yang berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter adalah 30 (tiga puluh) meter.

Garis Sempadan Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan adalah sebagai berikut: sungai Besar, adalah 100 (seratus) meter; dan sungai kecil, adalah 50 meter.

Peruntukan Sempadan Sungai berdasarkan perencanaan 2018 tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur. Luasan sempadan sungai terluas, yaitu berada pada Kecamatan Sambu Rampas seluas 1,373.5889 Ha, sedangkan luasan sempadan sungai terendah, yaitu berada pada Kecamatan Poco Ranaka dengan luasan hanya 446.8702 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.10. di bawah ini.

Tabel 2.10
Peruntukan Kawasan Sempadan Sungai

Kecamatan		Kawasan Peruntukan Lindung
		a.3.
		Sempadan Sungai (ha)
1	Rana Mese	493.0685
2	Borong	595.0177
3	Kota Komba	736.0007
4	Poco Ranaka	446.8702
5	Poco Ranaka Timur	192.3243
6	Sambu Rampas	1,373.5889
7	Elar	556.0438
8	Elar Selatan	473.1726
9	Lamba Leda	1,075.8642
Total		5,941.9509

Sumber: Naskah Akademik RTRW Kabupaten Manggarai Timur, 2018

Arahan Pengelolaan sempadan sungai adalah sebagai berikut:

- Pada kawasan sempadan sungai yang belum dibangun, pendirian bangunan tidak diizinkan (IMB tidak diberikan).
- Pada kawasan sempadan sungai yang belum terbangun, masih diperbolehkan kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang diizinkan.

- Kegiatan lain yang tidak memanfaatkan lahan secara luas seperti misalnya pemasangan papan reklame/pengumuman, pemasangan pondasi dan rentangan kabel listrik, pondasi jembatan, dan sebagainya masih bisa diperbolehkan.
- Kegiatan atau bentuk bangunan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air sama sekali tidak diperbolehkan.

Kegiatan lain yang justru memperkuat fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai tetap boleh dilaksanakan tetapi dengan pengendalian agar tidak mengubah fungsi kegiatannya di masa mendatang.

4. Sempadan Waduk/Danau

Sempadan danau/waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling waduk atau bendungan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk atau bendungan.

Lokasi Sempadan danau/waduk meliputi kawasan sekitar danau terdapat hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur kecuali Kecamatan Lamba Leda dan Poco Ranaka. Luasan sempadan danau/waduk yang terluas terdapat pada Kecamatan Elar, yaitu seluas 61.9812 Ha, sedangkan untuk luasan terendah terdapat pada Kecamatan Kota Komba yaitu hanya seluas 6.0832 Ha. Rincian luas sempadan waduk/danau per kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.11. di bawah ini.

Tabel 2.11
Peruntukan Kawasan Sempadan Danau/Waduk

Kecamatan		Kawasan Peruntukan Lindung
		a.4.
		Sempadan Danau (Ha)
1	Rana Mese	20.5207
2	Borong	11.2853
3	Kota Komba	6.0832
4	Poco Ranaka	-
5	Poco Ranaka Timur	14.6929
6	Sambi Rampas	32.7648
7	Elar	61.9812
8	Elar Selatan	7.9770
9	Lamba Leda	-
Total		155.3052

Sumber: Naskah Akademik RTRW Kabupaten Manggarai Timur, 2018

Arahan pengelolaan kawasan danau/waduk ini adalah sebagai berikut:

- Kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk medan atau pembangunan bangunan fisik yang dapat mengakibatkan tertutupnya sumber mata air, dilarang dilakukan di kawasan ini. Dengan kata lain, semua kegiatan yang dapat mengganggu keberadaan dan kelestarian mata air dilarang.

- Kegiatan persawahan, perikanan, atau kegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentu yang diizinkan diperbolehkan. Demikian pula dengan kegiatan lain yang secara langsung tidak terkait dengan pemanfaatan sumber mata air.
- Kegiatan lain yang sudah ada di kawasan ini dan dapat mengganggu fungsi kawasan dipindahkan dengan penggantian yang layak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Taman Wisata Alam

Lokasi taman wisata alam yang terdapat di Kabupaten Manggarai Timur terletak hampir di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Lamba Leda. Luasan TWA terbesar terdapat di Kecamatan Rana Mese seluas 7,552.0218 Ha, sedangkan terkecil terdapat di Kecamatan Elar, yaitu hanya seluas 1,409.7360 Ha, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.12. di bawah ini.

Tabel 2.12
Peruntukan Kawasan Taman Wisata Alam

Kecamatan		Kawasan Peruntukan Lindung
		a.5.
		Taman Wisata Alam (Ha)
1	Rana Mese	7,552.0218
2	Borong	2,966.6430
3	Kota Kamba	1,673.9266
4	Poco Ranaka	2,776.1296
5	Poco Ranaka Timur	3,385.8988
6	Sambi Rampas	1,982.0726
7	Elar	1,409.7360
8	Elar Selatan	1,997.6312
9	Lamba Leda	-
Total		23,744.0596

Sumber: Naskah Akademik RTRW Kabupaten Manggarai Timur, 2018

Arahan pengelolaan kawasan sekitar mata air, danau/embung ini adalah sebagai berikut:

- Pada kawasan sekitar mata air ini, jenis kegiatan yang diutamakan adalah kegiatan penghutanan dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon.
- Kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk medan atau pembangunan bangunan fisik yang dapat mengakibatkan tertutupnya sumber mata air, dilarang dilakukan di kawasan ini. Dengan kata

lain, semua kegiatan yang dapat mengganggu keberadaan dan kelestarian mata air dilarang.

- Kegiatan persawahan, perikanan, atau kegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentu yang diijinkan diperbolehkan. Demikian pula dengan kegiatan lain yang secara langsung tidak terkait dengan pemanfaatan sumber mata air.
- Kegiatan lain yang sudah ada di kawasan ini dan dapat mengganggu fungsi kawasan dipindahkan dengan penggantian yang layak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Ekosistem Mangrove

Ekosistem mangrove yang ada di Kabupaten Manggarai Timur terdapat hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur kecuali Kecamatan Poco Ranaka, Poco Ranaka Timur, dan Elar Selatan. Ekosistem mangrove terluas terdapat di Kecamatan Elar yaitu seluas 115.8657, sedangkan terkecil terdapat di Kecamatan Kota Komba yaitu hanya seluas 0.9720 Ha.

Tabel 2.13
Kawasan Peruntukan Ekosistem Mangrove

No	Kecamatan	Kawasan Peruntukan Lindung
		a.6.
		Ekosistem Mangrove (Ha)
1	Rana Mese	10.4515
2	Borong	26.3197
3	Kota Komba	0.9720
4	Poco Ranaka	-
5	Poco Ranaka Timur	-
6	Sambi Rampas	10.0294
7	Elar	115.8657
8	Elar Selatan	-
9	Lamba Leda	22.2517
Total		185.8900

Sumber: Naskah Akademik RTRW Kabupaten Manggarai Timur, 2018

b. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya didefinisikan sebagai bagian wilayah yang secara langsung digunakan atau diambil manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pengelolaan kawasan budidaya bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya serta untuk menghindari konflik pemanfaatan ruang dan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan pemanfaatan ruang yang optimal, maka alokasi pemanfaatan ruang memperhatikan asas kelestarian,

kesesuaian dan kemanfaatan. Asas kelestarian dimaksudkan agar pemanfaatan ruang tidak mengurangi nilai manfaat pada masa yang akan datang dengan memberikan perlindungan terhadap kualitas ruang. Asas kesesuaian bertujuan untuk memanfaatkan ruang sesuai dengan potensi yang dikandungnya sedangkan asas kemanfaatan ditujukan agar nilai manfaat ruang dapat memberikan dampak bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat secara optimal.

1. Hutan Produksi

Kawasan Hutan Produksi pada Kabupaten Manggarai Timur diatur oleh SK SK.357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016. Sebarannya terdapat di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Borong, Kota Komba, dan Sambi Rampas sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.14. di bawah ini.

Tabel 2.14
Sebaran Hutan Produksi Berdasarkan SK Kemen-LH

KECAMATAN	HUTAN PRODUKSI (Ha)
Borong	827.3183649
Kota Komba	4961.876474
Lamba Leda	8252.663063
Sambi Rampas	1547.419845
Grand Total	15.589,27775

Sumber: SK SK.357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016

Peruntukan hutan produksi berdasarkan perencanaan yang luasannya terluas terdapat pada Kecamatan Lamba Leda, yaitu seluas 7,947.3002 Ha.

Tabel 2.15
Peruntukan Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Manggarai Timur

NO	KECAMATAN	HUTAN PRODUKSI (Ha)
1	Rana Mese	-
2	Borong	827.3184
3	Kota Komba	4,939.2455
4	Poco Ranaka	-
5	Poco Ranaka Timur	-
6	Sambi Rampas	1,531.1370
7	Elar	-
8	Elar Selatan	-
9	Lamba Leda	7,947.3002
Total		15,245.0011

Sumber: Naskah Akademik RTRW Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2. Hutan Produksi Konversi

Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi diperuntukkan bagi permukiman, fasilitas umum pemerintah, dan pengembangan budidaya tanaman pangan dan hortikultura. Lokasi hutan produksi yang dapat dikonversi adalah Kecamatan Rana Mese seluas 958.0090 Ha.

Arahan pemanfaatan hutan yang dapat dikonversi adalah untuk pengembangan permukiman baru dan perluasan areal tanam tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura tidak diperbolehkan sebelum mendapat persetujuan atau perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Untuk menjaga kelestarian hutan produksi, upaya pengembangan usaha tani konservasi perlu dilakukan pada setiap daerah penyangga hutan.

3. Tanaman Pangan

Peruntukan kawasan tanam pangan di Kabupaten Manggarai Timur terdapat di hampir seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Poco Ranaka. Tanaman pangan di Kabupaten Manggarai Timur seluas 1,022.4968 Ha. Luasan terbesar terdapat pada Kecamatan Kota Komba yaitu seluas 331.9269 Ha, sedangkan luasan terkecil terdapat pada Kecamatan Lela Leda hanya seluas 2.4128 Ha. Luasan tanaman pangan di Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.16. di bawah ini.

Tabel 2.16
Peruntukan Tanaman Pangan

NO	KECAMATAN	TANAMAN PANGAN (Ha)
1	Rana Mese	60.1987
2	Borong	321.6567
3	Kota Komba	331.9269
4	Poco Ranaka	-
5	Poco Ranaka Timur	88.3450
6	Sambi Rampas	142.7173
7	Elar	6.1865
8	Elar Selatan	69.0530
9	Lela Leda	2.4128
Total		1,022.4968

Sumber: Naskah Akademik RTRW Kabupaten Manggarai Timur, 2018

4. Kawasan Hortikultura

Pengembangan tanaman hortikultura bertujuan untuk memenuhi kebutuhan buah-buahan dan sayur-sayuran baik bagi masyarakat Manggarai Timur maupun kabupaten sekitarnya, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Secara umum, potensial pengembangan hortikultura di Kabupaten Manggarai Timur lebih diarahkan pada pengembangan buah-buahan dan sayur-sayuran. Rencana pengembangan buah-buahan di kabupaten ini adalah sebagai berikut:

- a. Rambutan: Kecamatan Borong (Desa Goloni, Desa Sita, Desa Golo Meleng, Desa Gurung Liwut), Kecamatan Kota Komba (Desa Lembur, Desa Golo Tolang, Desa Ketang, Desa Mbengan), Kecamatan Sambi Rampas (Kelurahan Golo Wangkung, Desa Satar Nawang), Kecamatan Elar (Desa Rana Kulan, Desa Sisir, Desa Lengko Namut).
- b. Pisang: di seluruh kecamatan Kabupaten Manggarai Timur;
- c. Mangga: di seluruh kecamatan Kabupaten Manggarai Timur;
- d. Jeruk: Kecamatan Poco Ranaka, Kecamatan Kota Komba, Kecamatan Elar, dan seluruh kecamatan Kabupaten Manggarai Timur;
- e. Nanas: di seluruh kecamatan Kabupaten Manggarai Timur;
- f. Dan pengembangan buah-buahan lainnya di seluruh kecamatan Kabupaten Manggarai Timur;

Rencana pengembangan sayur-sayuran untuk memenuhi kebutuhan sayur bagi masyarakat yang berpotensi untuk dikembangkan terletak pada semua kecamatan melalui pemilihan jenis komoditi sayur-sayuran yang sesuai dengan kondisi agroklimat masing-masing kecamatan. Khusus untuk pengembangan bawang merah, diarahkan di Kecamatan Lamba Leda bagian utara dan Kecamatan Sambi Rampas bagian utara. Sebaran luasan peruntukan kawasan hortikultura di Kabupaten Manggarai Timur per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.17. di bawah ini. Luasan terbesar terdapat di Kecamatan Kota Komba yaitu seluas 36,218.6503 Ha, sedangkan luasan terkecil terdapat di Kecamatan Poco Ranaka Timur seluas 6,299.7877 Ha.

Tabel 2.17
Peruntukan Kawasan Hortikultura

NO	KECAMATAN	Kawasan Hortikultura (Ha)
1	Rana Mese	11,243.4588
2	Borong	7,066.1013
3	Kota Komba	36,218.6503
4	Poco Ranaka	7,423.7087
5	Poco Ranaka Timur	6,299.7877
6	Sambi Rampas	14,574.2660
7	Elar	14,311.4243
8	Elar Selatan	18,163.3415
9	Lamba Leda	16,200.0692
Total		131,500.8077

Sumber: Naskah Akademik RTRW Kabupaten Manggarai Timur, 2018

5. Kawasan Perkebunan

Kawasan Tanaman Tahunan/Perkebunan di Kabupaten Manggarai Timur berdasarkan kriteria dan kondisi lahannya secara umum dapat diarahkan pada seluruh wilayah kecamatan. Upaya pemanfaatan dan penanganan kawasan perkebunan di Kabupaten Manggarai Timur dilaksanakan sesuai dengan potensi lahan yang tersedia berikut ini:

- a. Mengembangkan industri pengolahan hasil komoditi;
- b. Pengembangan fasilitas sentra produksi dan pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi;
- c. Pengembangan perkebunan, misalnya, merehabilitasi tanaman perkebunan yang rusak atau pada area yang telah mengalami kerusakan, yaitu mengembalikan fungsi perkebunan yang telah berubah menjadi area pertanian tanaman pangan;
- d. Pengembangan kawasan-kawasan yang berpotensi untuk tanaman perkebunan sesuai dengan rencana, seperti kelapa, cengkeh, tembakau, kopi, jahe, kapas, dan jambu mente;
- e. Diversifikasi tanaman perkebunan sebagai upaya untuk optimalisasi pemanfaatan lahan kering;
- f. Pengembangan pasar produksi perkebunan; dan
- g. Pengolahan hasil perkebunan terutama dengan meningkatkan kualitas bahan baku untuk memperoleh nilai tambah.

Upaya penanganan/pengelolaan kawasan perkebunan, meliputi :

- a. Kawasan perkebunan tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan yang lain, dan dapat ditingkatkan perannya sebagai penunjang pariwisata dan penelitian;
- b. Peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan masing-masing; dan
- c. Penetapan komoditi tanaman tahunan selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air, juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi, keindahan/estetika dan keuangan.

Peruntukan kawasan perkebunan di Kabupaten Manggarai Timur seluas 6,855.4184 Ha tersebar di seluruh kecamatan. Luasan kawasan perkebunan terluas terdapat di Kecamatan Kota Komba, yaitu seluas 2,534.0658 Ha. Sedangkan untuk luasan terkecil terdapat pada kecamatan Poco Ranaka Timur 137.4145 Ha.

Tabel 2.18
Peruntukan Kawasan Perkebunan

NO	KECAMATAN	KAWASAN PERKEBUNAN (Ha)
1	Rana Mese	235.5420
2	Borong	456.6994
3	Kota Komba	2,534.0658
4	Poco Ranaka	369.0476
5	Poco Ranaka Timur	137.4145
6	Sambi Rampas	498.1421
7	Elar	915.8229
8	Elar Selatan	1,461.4882
9	Lamba Leda	247.1959
Total		6,855.4184

Sumber: Naskah Akademik RTRW Kabupaten Manggarai Timur, 2018

6. Kawasan Pertambangan

Kawasan Pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan, baik wilayah yang sedang, maupun yang akan segera dilakukan tahapan eksplorasi. Jadi selain kawasan tersebut, kawasan yang mempunyai potensi tambang harus melakukan tahap investigasi dan eksplorasi terlebih dahulu.

a. Peruntukan Mineral

Wilayah pertambangan Kabupaten Manggarai Timur meliputi:

- **Mineral logam sebagaimana meliputi:**
 - Mangan, terletak di Kecamatan Lamba Leda (Desa Satar Punda, Desa Satar Teu, Desa Nampar Tabang, Desa Goreng Meni, Desa Tengku Lawar, Desa Necak, Desa Golo Munga), Kecamatan Elar (Kelurahan Tiwu Kondo, Desa Rana Kulan), Kecamatan Sambi Rampas (Kelurahan Nanga Baras, Desa Nanga Mbaur, Desa Nanga Mbaling).
 - Pasir Besi terletak di Kecamatan Kota Komba (Desa Bamo);
 - Besi terletak di Kecamatan Lambaleda (Desa Lencur);
 - Barit terletak di Kecamatan Kota Komba (Kelurahan Tanah Rata);
 - Tembaga terletak di Kecamatan Poco Ranaka (Desa Benteng Rampas, Desa Ngkiong Dora, Desa Rende Nau), Kecamatan Sambi Rampas (Desa Nanga Mbaur, Desa Satar Nawang), Kecamatan Elar (Desa Golo Lijun, Desa Golo Lebo);
 - Emas terletak di Kecamatan Poco Ranaka (Desa Benteng Rampas, Desa Ngkiong Dora, Desa Rende Nau), Kecamatan

- Sambi Rampas (Desa Nanga Mbaur, Desa Satar Nawang), Kecamatan Elar (Desa Golo Lijun, Desa Golo Lebo);
- Seng terletak di Kecamatan Poco Ranaka (Desa Benteng Rampas, Desa Ngkiong Dora, Desa Rende Nau), Kecamatan Sambi Rampas (Desa Nanga Mbaur, Desa Satar Nawang), Kecamatan Elar (Desa Golo Lijun, Desa Golo Lebo);
 - Timbal terletak di Kecamatan Poco Ranaka (Desa Benteng Rampas, Desa Ngkiong Dora, Desa Rende Nau), Kecamatan Sambi Rampas (Desa Nanga Mbaur, Desa Satar Nawang), Kecamatan Elar (Desa Golo Lijun, Desa Golo Lebo);
 - Perak terletak di Kecamatan Poco Ranaka (Desa Benteng Rampas, Desa Ngkiong Dora, Desa Rende Nao), Kecamatan Sambi Rampas (Desa Nanga Mbaur dan Satar Nawang), Kecamatan Elar (Desa Golo Lijun dan Golo Lebo).
- **Mineral non logam meliputi:**
 - Batu Gamping: terletak di Kecamatan Lamba Leda (Desa Satar Punda, Desa Satar Teu, Nampar Tabang, Goreng Meni, Tengku Lawar, Compang Necak, Golo Munga), Kecamatan Elar (Kelurahan Tiwu Kondo dan Desa Rana Kulan), Kecamatan Sambi Rampas (Kelurahan Naga Baras, Desa Nanga Mbaur dan Desa Nanga Mbaling);
 - Oker: terletak di Kecamatan Poco Ranaka (Desa Pocong);
 - Toseki: terletak di Desa Nanga Mbaur Kecamatan Sambi Rampas dan Desa Golo Lijun Kecamatan Elar;
 - Zeolit terletak di Kecamatan Poco Ranaka (Desa Benteng Rampas);
 - Kaolin terletak di Desa Haju Ngendong Kecamatan Elar;
 - Dolomit terletak di Desa Golo Munga Kecamatan Lamba Leda;
 - Dasit terletak di Desa Golo Munga Kecamatan Lamba Leda.
 - **Mineral batuan meliputi:**
 - Marmer: terletak di Desa Nanga Mbaur Kecamatan Sambi Rampas;
 - Tras: terletak di Desa Sita dan Nanga Labang Kecamatan Borong;
 - Pasir: terletak di Kecamatan Borong (Wae Laku, Wae Bobo, Wae Musur), Kecamatan Poco Ranaka (Wae Togong), Kecamatan Kota Komba (Wae Moke), Kecamatan Sambi Rampas (Wae Togong, Wae lampang, Wae Pota, Wae Tiwu Sengit), Kecamatan Elar (Wae Reno, Wae Larik);

- Batu : terletak di Kecamatan Borong (Wae Laku, Wae Bobo, Wae Musur), Kecamatan Poco Ranaka (Wae Togong dan Wae Reno), Kecamatan Kota Komba (Wae Mokel), Kecamatan Sambi Rampas (Wae Togong, Wae Lampang, Wae Pota, Wae Tiwu Sengit), Kecamatan Elar (Wae Reno, Wae Larik).

Luas wilayah pertambangan Mineral Logam di Kabupaten Manggarai Timur adalah 9,908.8487 Ha. Wilayah pertambangan terluas terdapat di Kecamatan Lamba Leda, yaitu seluas 8,458.7937 Ha, sedangkan luas terkecil terdapat di Kecamatan Poco Ranaka, yaitu hanya 136.4983 Ha.

Tabel 2.19
Peruntukan Kawasan Pertambangan

No	KECAMATAN	PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM (Ha)
1	Rana Mese	-
2	Borong	-
3	Kota Komba	-
4	Poco Ranaka	136.4983
5	Poco Ranaka Timur	-
6	Sambi Rampas	-
7	Elar	-
8	Elar Selatan	1,313.5566
9	Lamba Leda	8,458.7937
Total		9,908.8487

Sumber: Naskah Akademik RTRW Kabupaten Manggarai Timur, 2018

7. Kawasan Pariwisata

a. Peruntukan Pariwisata Budaya

Kawasan peruntukkan pariwisata budaya di Kabupaten Manggarai Timur meliputi:

- Wisata Budaya: Kecamatan Elar (Kubur Ngiung di Kampung Wuntu, Kedu Kobor di Ulayat, Nggong Leda Liur, Kampung Tuwit, Compang Biting dan Rempa Ndiwal), Kecamatan Kota Komba (Arca Watu Embu Poco Ndeki, Kubur Meka Nggene), Kecamatan Sambi Rampas (Compang Pembe, Situs Raja Sepang di desa Nampar Sepang), Kecamatan Poco Ranaka (Compang Mano, Compang Bangka Kuleng, Compang Bangka Ajang), Lamba Leda (Compang Necak, Kampung Wae Lawas, Compang Deru, Liang Wusu dan Liang Bone, Gua Wara Witu), Kecamatan Borong (Kampung Teber dan Compang Teber, Kampung Riwu Lama).

- Wisata Religius: Kecamatan Lamba Leda (Gua Cincoleng), Kecamatan Poco Ranaka (Gunung Ranaka), Kecamatan Sambu Rampas (Gereja St. Theresia Lengko Ajang/Gereja Tua).

b. Peruntukan Pariwisata Alam

Kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi :

- **Kawasan wisata alam meliputi:**
 - Taman Wisata Alam di Kecamatan Poco ranaka, Borong, Sambu Rampas, Kota Komba dan Elar;
 - Wisata Danau Rana Mese di Kecamatan Rana Mese, Danau Rana Tonjong di Kecamatan Sambu Rampas, Danau Rana Kulan dan Rana Ngandong di Kecamatan Elar;
 - Wisata Fauna: Binatang Kalong di Kecamatan Sambu Rampas, Biawak Raksasa (Rugu) di Kecamatan Sambu Rampas dan Elar, Burung Lawe Lujang di Poco Ndeki Kecamatan Kota Komba;
 - Wisata Flora: Tratai Raksasa (Tratai Tonjong) di Kecamatan Sambu Rampas.
 - Danau Rana Ngandong di desa Nampar Sepang, Kecamatan Sambu Rampas.
- **Kawasan wisata alam pantai dan bahari meliputi:**
 - Kawasan Pantai Mbolata dan Nanga Rawa di Kecamatan Kota Komba;
 - Kawasan Pantai Cepi Watu di Kecamatan Borong;
 - Kawasan pantai pesisir utara di Dampak Kecamatan Lamba Leda, Pota di Kecamatan Sambu Rampas dan Buntal Kecamatan Elar;
 - Wisata Taman Laut Wae Wole di Kecamatan Kota Komba;
- **Kawasan pariwisata minat khusus meliputi:**
 - Wisata Pendaki Gunung (*Tracking*) di Kecamatan Kota Komba;
 - Wisata Air Terjun Cunca Rede dan Cunca Ngkuang di Kecamatan Borong;
 - Wisata air panas Rana Roko di Kecamatan Borong;

• Peruntukan Pariwisata Buatan

Peruntukkan pariwisata buatan di Kabupaten Manggarai Timur terletak di Kecamatan Sambu Rampas, yaitu pada bangunan Gereja St. Theresia Lengko Ajang/Gereja Tua. Luas Kawasan pariwisata di Kabupaten Manggarai Timur sebesar 33.5435 Ha. Ukuran terbesar terdapat di Kecamatan Borong, sedangkan terkecil terdapat di Kecamatan Sambu Rampas, yaitu 9.6400 Ha.

Tabel 2.20
Peruntukan Kawasan Pariwisata

NO	KECAMATAN	PARIWISATA (Ha)
1	Rana Mese	-
2	Borong	14.1212
3	Kota Komba	-

NO	KECAMATAN	PARIWISATA (Ha)
4	Poco Ranaka	-
5	Poco Ranaka Timur	-
6	Sambi Rampas	9.6400
7	Elar	9.7823
8	Elar Selatan	-
9	Lamba Leda	-
Total		33.5435

Sumber: Naskah Akademik RTRW Kabupaten Manggarai Timur, 2018

8. Permukiman Perkotaan

Pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Manggarai Timur diarahkan pada kawasan pemukiman yang berada di Kecamatan Borong, Kota Komba, Poco Ranaka, dan Sambi Rampas. Peruntukan permukiman perkotaan terluas terdapat di Pusat Kota yaitu Kecamatan Borong dengan ukuran seluas 4,211.9272 Ha. Sedangkan untuk luasan terkecil terdapat di Kecamatan Kota Komba, yaitu hanya sebesar 410.9004 Ha.

Tabel 2.21
Peruntukan Permukiman Perkotaan

NO	KECAMATAN	PERMUKIMAN PERKOTAAN (Ha)
1	Rana Mese	-
2	Borong	4,211.9272
3	Kota Komba	410.9004
4	Poco Ranaka	719.2781
5	Poco Ranaka Timur	-
6	Sambi Rampas	2,473.1270
7	Elar	-
8	Elar Selatan	-
9	Lamba Leda	-
Total		7,815.2327

Sumber: Naskah Akademik RTRW Kabupaten Manggarai Timur, 2018

9. Permukiman Pedesaan

Pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Manggarai Timur diarahkan pada kawasan pemukiman yang berada di seluruh kecamatan.

- Pengembangan permukiman pesisir, yang selain berorientasi pada perikanan juga berorientasi pada perkebunan kelapa. Pengembangan permukiman diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana bagi permukiman di

- pesisir, sekaligus meningkatkan akses transportasi ke pusat pemasaran sebagai pusat permukiman untuk memperlancar perekonomian masyarakat desa;
- Pengembangan permukiman di sekitar kawasan pariwisata yang ditujukan untuk menunjang kegiatan wisata;
 - Kawasan permukiman yang berorientasi pertanian diarahkan pada perhatian pelayanan transportasi untuk mempermudah aliran arus komoditi pertanian;
 - Pengembangan permukiman *hinterland* yang diarahkan untuk kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung. Pengembangan ini dilakukan dalam rangka pengembangan pelayanan yang sinergis terhadap pertumbuhan SWP.
 - Pengembangan pusat pelayanan permukiman pada tiap pusat pelayanan ibu kota kecamatan.

Tabel 2.22
Peruntukan Permukiman Perdesaan

NO	KECAMATAN	PERMUKIMAN PERDESAAN
1	Rana Mese	244.3203
2	Borong	132.8596
3	Kota Komba	333.9187
4	Poco Ranaka	272.2930
5	Poco Ranaka Timur	279.2350
6	Sambi Rampas	351.1346
7	Elar	156.5176
8	Elar Selatan	146.3951
9	Lamba Leda	811.7494
Total		2,728.4235

Sumber: Naskah Akademik RTRW Kabupaten Manggarai Timur, 2018

Peruntukan permukiman perdesaan dengan ukuran terbesar terdapat di Kecamatan Lamba Leda, yaitu sebesar 811.7494 Ha. Sedangkan terkecil yaitu berada pada Kecamatan Borong seluas 132.8596 Ha.

2.1.1.3 Kawasan Strategis

Kawasan strategis kabupaten merupakan wilayah yang diprioritaskan untuk ditata ruangnya karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis. Fungsi kawasan strategis kabupaten antara lain sebagai berikut: a) mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kota; b) sebagai

alokasi ruang untuk berbagi kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kabupaten bersangkutan; c) untuk memwadahi penataan ruang kawasan yang tidak terakomodasi di dalam rencana struktur dan rencana pola ruang; d) sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kabupaten; dan f) sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.

Kawasan strategis wilayah kabupaten ditetapkan berdasarkan: 1) kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; 2) nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan; 3) kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan terhadap tingkat kestrategian nilai ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan pada kawasan yang akan ditetapkan; 4) daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten; dan 5) ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ada tiga kawasan strategis di Kabupaten Manggarai Timur, yaitu Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP), dan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota.

a. Kawasan Strategis Nasional

Kawasan strategis nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur No. 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Manggarai Timur 2012-2032, pada pasal 37 dikemukakan bahwa Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Kabupaten Manggarai Timur ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan ekonomi, yaitu terdapat di kawasan Ruteng – Bajawa.

b. Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di Kabupaten Manggarai Timur ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan ekonomi. Dalam RTRW Manggarai Timur 2012-2032 KSP Provinsi NTT yang terdapat di Manggarai Timur berada di kawasan percepatan pertumbuhan kawasan tertinggal Lamba Leda, Sambi Rampas, serta Elar.

c. Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Penetapan KSK Manggarai Timur dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan, kriteria, dan arahan penanganan di masing-masing KSK yang ditetapkan. KSK Manggarai

Timur ditetapkan sebanyak 7 KSK yang memiliki sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, serta sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

1. Kawasan Strategis Kabupaten Berdasarkan Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kawasan yang terdapat di Kabupaten Manggarai Timur meliputi:

- a. **Kawasan Buntal**, sebagai daerah yang berpotensi dalam menampung kegiatan yang berskala regional yang sudah merupakan strategi atau kebijakan regional.
- b. **Kawasan Perkotaan Borong**, sebagai kawasan yang memegang peran penting di bagian selatan dengan sektor pertanian, industri dan perdagangan, jasa-jasa. Memiliki fasilitas yang berskala regional seperti pendidikan, kawasan pariwisata, dan menjadi titik penting pertumbuhan kawasan serta penghubung transportasi Ruteng-Ende melalui wilayah selatan.
- c. **Kawasan Mano dan sekitarnya**, sebagai kawasan di bagian barat yang secara lokasi berperan strategis sebagai simpul distribusi, mempunyai wilayah belakang cukup luas juga, selain itu bila kawasan ini berkembang akan dapat mempersempit perbedaan perkembangan jalur utara dan selatan. Sektor-sektor yang cukup berkembang adalah agroindustri di samping pertanian dan pariwisata.
- d. **Kawasan Watu Nggong dan sekitarnya**, sebagai kawasan di bagian tengah yang secara lokasi berperan strategis sebagai simpul distribusi, mempunyai wilayah belakang cukup luas juga. Selain itu, bila kawasan ini berkembang akan dapat mempersempit perbedaan perkembangan jalur utara dan selatan. Sektor-sektor yang cukup berkembang adalah agroindustri di samping pertanian dan pariwisata.
- e. **Kawasan Bahari Terpadu Pota dan Dampek**, memiliki kekuatan pada sektor industri, perdagangan dan jasa serta perikanan. Mempunyai fasilitas pelabuhan, dan berada pada koridor jalur Pantura sehingga mempunyai kesempatan aglomerasi sebagai akibat dari faktor pendorong dari dalam wilayah dan faktor penarik dari wilayah di sekitarnya. Pengembangan kawasan bahari terpadu Pota dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi kelautan yang terdapat di wilayah utara yang pemanfaatannya relatif tertinggal. agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pantai pada khususnya dan masyarakat pada khususnya.
- f. **Kawasan Bahari Terpadu Kota Komba**, upaya pengembangan kawasan bahari terpadu di Kabupaten Manggarai Timur dilatarbelakangi oleh keberadaan potensi perikanan laut yang cukup besar, potensi wisata pantai serta letak kawasan di sekitar jalur distribusi/transportasi utama, namun potensi-potensi tersebut belum terkelola secara baik akibat belum memadainya/tersedianya infrastruktur yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi kawasan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- g. **Kawasan Strategis Perbatasan**, yaitu kawasan strategis antarkabupaten. Kawasan perbatasan tersebut terletak pada batas wilayah antara Kabupaten Manggarai



Timur dengan Kabupaten Ngada dan antara Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Manggarai. Pengembangan kawasan perbatasan bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dalam kegiatan pembangunan dan pemanfaatan potensi-potensi pembangunan yang terletak di wilayah perbatasan. Sektor-sektor unggulan yang dapat dikembangkan dalam kegiatan kerja sama pengembangan kawasan perbatasan adalah sektor wisata, industri, perikanan dan pertanian. Beberapa kawasan prioritas pengembangan wilayah perbatasan adalah sebagai berikut: a) Golo Lijun-Riung antara Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada; b) Wukir, Gising, Kalang Mahit – Lindi antara Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada; c) Wae Wole-Aimere antara Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada; d) Dampek-Reo antara Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Manggarai; e) Benteng Jawa-Cibal antara Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Manggarai; f) Mano-Ruteng antara Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Manggarai; g) Iteng-Borong antara Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Manggarai.

Selain kawasan strategis di atas, ditetapkan pula Wilayah Pembangunan (WP) berdasarkan RTRW Kabupaten Manggarai Timur. Penetapan ini dilakukan dengan mempertimbangkan pola keterkaitan dan kesamaan (homogenitas) setiap kawasan. Wilayah Pembangunan dibagi atas beberapa wilayah, yang dibuat dalam rangka pengembangan wilayah Kabupaten Manggarai Timur.

a. Wilayah Pembangunan Selatan (I)

Pusat pengembangan dan pelayanan WP Selatan ada di Kecamatan Borong dengan daerah pelayanannya meliputi wilayah Kecamatan Rana Mese dan sebagian Kecamatan Kota Komba. Wilayah Pembangunan Selatan mempunyai sektor prioritas, yaitu sektor listrik, gas dan air bersih, sektor angkutan dan komunikasi, serta sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Sektor pendukungnya antara lain sektor penggalian, sektor industri dan sektor perdagangan.

b. Wilayah Pembangunan Tengah-Barat (II)

Pusat pengembangan dan pelayanan WP Barat ada di Mano dengan daerah pelayanannya meliputi Kecamatan Poco Ranaka dan Kecamatan Poco Ranaka Timur, serta beberapa desa di Kecamatan Lamba Leda. Wilayah Pembangunan Barat mempunyai prioritas di sektor penggalian, sektor industri dan sektor perdagangan. Sektor pendukungnya adalah sektor listrik, gas dan air bersih, serta sektor angkutan dan komunikasi.

c. Wilayah Pembangunan Tengah-Timur (III)

Pusat pengembangan dan pelayanan WP Timur ada di Lengko Elar dengan daerah pelayanannya meliputi Kecamatan Elar Selatan dan sebagian desa di Kecamatan Sambi rampas. Wilayah Pembangunan Timur mempunyai prioritas di sektor penggalian

dan sektor perdagangan. Sektor pendukungnya adalah sektor industri, sektor listrik, gas dan air bersih, serta sektor angkutan dan komunikasi.

d. Wilayah Pembangunan Utara (IV)

Pusat pengembangan dan pelayanan WP Utara ada di Pota dengan daerah pelayanannya meliputi sebagian wilayah Kecamatan Lamba Leda. Wilayah Pembangunan Utara mempunyai prioritas di sektor pertanian, sektor penggalian, sektor industri dan sektor perdagangan. Sektor pendukungnya adalah sektor listrik, gas dan air bersih, serta sektor angkutan dan komunikasi. Pembagian wilayah pengembangan di atas bertujuan agar mampu mempengaruhi perkembangan daerah di sekitarnya, baik perkembangan secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Perkembangan tersebut kemudian diharapkan dapat diikuti oleh pemerataan pembangunan, baik berupa penambahan dan peningkatan akses, maupun ketersediaan fasilitas-fasilitas pendukung sehingga kebutuhan-kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di wilayah tersebut dan sekitarnya terpenuhi.

2. Kawasan Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain adalah kawasan pelindungan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia. Di Kabupaten Manggarai Timur kawasan strategis penyelamatan lingkungan hidup meliputi:

a. Kawasan Konservasi TWA Ruteng

Upaya pengelolaan lingkungan kawasan konservasi ditujukan untuk menjamin kelestarian ekosistem yang memiliki nilai ekonomi, sosial dan ekologis melalui kegiatan pengembangan masyarakat, pengelolaan sumber daya air dan pengendalian sedimentasi serta koordinasi program dan penguatan kelembagaan. Kawasan yang cenderung mengalami degradasi lingkungan sebagai akibat eksploitasi ekonomi namun mempunyai potensi besar. Kawasan ini mempunyai bentang lahan berupa gunung berapi dengan variasi morfologi landai sampai curam ini dikembangkan sebagai sentra produksi perkebunan dan peternakan.

b. Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Pengelolaan Kawasan DAS dilakukan terutama dengan tujuan untuk menangani permasalahan banjir dan bahaya-bahaya lingkungan lainnya yang terjadi pada wilayah sekitar DAS melalui upaya peningkatan daya tahan air dan mempercepat proses pembuangan air ke laut. Sebagai kawasan DAS, penanganannya dilakukan secara terpadu dengan mempertimbangkan aspek administratif, ekologis, ekonomis, sosial maupun fisik pada ruang wilayah yang terletak di sepanjang jalur sungai.

2.1.2

Demografi

2.1.2.1

Jumlah dan Persebaran Penduduk

Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang, serta kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Timur terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Perubahan ini dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, kematian dan migrasi.

Data kependudukan dalam dokumen ini disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur terdiri atas dua versi, yaitu versi manual dan versi *by system* yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Karena ada perbedaan yang sangat mencolok dari kedua versi tersebut, maka kami sajikan keduanya di sini. Menurut UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 ayat (4) menyatakan bahwa "Data Kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan: a) pelayanan publik; b) perencanaan pembangunan; c) alokasi anggaran; d) pembangunan demokrasi; e) penegakan hukum dan pencegahan kriminal." Data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri ini merupakan data kependudukan yang memberikan informasi penduduk *by name by address*. Data kependudukan pada Tabel 2.23 di bawah ini merupakan data kependudukan versi manual, yang digunakan dalam dokumen LKPJ dan LPPD Manggarai Timur.

Tabel 2.23
Perkembangan Penduduk Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

No	Kecamatan	Perkembangan Jumlah Penduduk Per Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Kota Komba	53.777	53.936	54.129	54.390	56.294
2	Borong	39.297	40.478	41.528	41.999	43.179
3	Lamba Leda	34.465	35.020	35.933	36.520	36.944
4	Poco Ranaka	33.997	34.628	35.083	35.305	35.417
5	Rana Mese	30.360	31.092	31.373	31.706	31.816
6	Sambi Rampas	28.775	29.739	29.796	29.857	29.997
7	Poco Ranaka Timur	27.659	28.487	29.078	29.083	29.334
8	Elar Selatan	18.070	18.358	18.923	19.212	19.775
9	Elar	16.685	16.551	17.188	17.552	16.671

Jumlah	283.085	288.289	293.031	295.624	299.427

Sumber: Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Manggarai Timur, 2018 (Versi Manual)

Jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Timur versi manual lebih besar dibandingkan versi by system dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Manggarai versi Kementerian Dalam Negeri sebanyak 267,310 jiwa. Selisihnya dengan versi manual sebanyak 32,117 jiwa. Selisih itu terjadi karena ada data ganda. Jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Timur versi by system dari Kementerian Dalam Negeri RI dapat dilihat pada Tabel 2.24. di bawah ini.

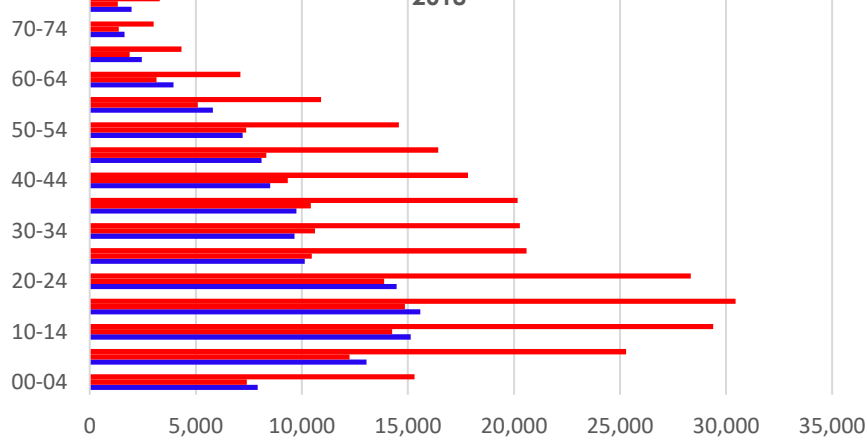
Tabel 2.24
Jumlah Penduduk Kabupaten Manggarai Timur Berdasarkan Kecamatan Tahun 2015-2018

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)				JUMLAH KK 2018		
	2015	2016	2017	2018	L	P	TOTAL
Borong	39,486	36,301	39,113	39,701	8,736	1,346	10,082
Poco Ranaka	33,183	31,592	33,245	33,377	7,308	1,187	8,495
Lamba Leda	30,850	30,595	31,268	31,989	7,243	957	8,200
Sambi Rampas	23,201	24,269	25,373	26,404	6,216	847	7,063
Elar	13,616	14,049	14,479	14,876	3,424	405	3,829
Kota Komba	44,209	47,105	49,438	49,031	10,719	1,476	12,195
Rana Mese	24,890	26,160	27,520	27,134	5,810	845	6,655
Poco Ranaka Timur	24,293	25,336	26,421	27,099	6,116	827	6,943
Elar Selatan	16,514	16,392	16,782	17,699	3,915	458	4,373
Total	250,242	251,799	263,639	267,310	59,487	8,348	67,835

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur, 2018 (Versi By System dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia)

Struktur penduduk Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2018 dapat dilihat di bawah ini. Jumlah terbanyak adalah penduduk yang berumur 15-19 tahun, yaitu sebanyak 30,440 jiwa, diikuti dengan penduduk yang berumur 10-14 tahun, yaitu sebanyak 29,390 jiwa. Sedangkan jumlah terendah ialah penduduk yang berumur > 75 tahun, yaitu sebanyak 3,300 jiwa. Dari total jumlah penduduk, penduduk usia produktif di Kabupaten Manggarai Timur (15-64 tahun) sebanyak 186,674 jiwa, sedangkan jumlah penduduk nonproduktif sebanyak 80.634 jiwa, yang terdiri atas penduduk berusia 0-14 tahun sebanyak 70,003 jiwa, dan berumur > 64 tahun sebanyak 10,633 jiwa.

Gambar 2.2. Struktur Penduduk Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018



	00-04	05-09	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	> 75
JUMLAH	15,3	25,2	29,3	30,4	28,3	20,5	20,2	20,1	17,8	16,4	14,5	10,9	7,10	4,32	3,00	3,30
PEREMPUAN	7,39	12,2	14,2	14,8	13,8	10,4	10,6	10,4	9,34	8,32	7,37	5,09	3,14	1,87	1,36	1,32
LAKI	7,91	13,0	15,1	15,5	14,4	10,1	9,65	9,74	8,50	8,10	7,20	5,80	3,95	2,44	1,64	1,97

■ JUMLAH ■ PEREMPUAN ■ LAKI

2.1.2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Agama merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Ada 6 agama yang dianut oleh penduduk Kabupaten Manggarai Timur, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, dan Hindu. Sedangkan penganut agama Budha, Konghucu dan aliran kepercayaan belum ada penganutnya di Kabupaten Manggarai Timur. Pada tahun 2018 agama Katolik memiliki penganut yang paling banyak, yaitu 92,84% atau sebanyak 248,174 jiwa, diikuti oleh penganut agama Islam sebanyak 6,80% atau sebanyak 18,176 jiwa. Penganut agama Islam yang paling banyak terdapat di Kecamatan Sambi Rampas, Borong, Lamba Leda dan Elar. Penganut agama Kristen Protestan sebanyak 0,34% atau sebanyak 899 jiwa tersebar di berbagai kecamatan. Jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Borong dan Kecamatan Kota Komba. Penganut agama Hindu memiliki penganut yang paling kecil di Kabupaten Manggarai Timur, yaitu sebanyak 0,02% atau sebanyak 61 jiwa saja. Jumlah penduduk Manggarai Timur berdasarkan agama pada tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.24. di bawah ini.

Tabel 2.25
Jumlah Penduduk Kabupaten Manggarai Timur Berdasarkan Agama Tahun 2018

KECAMATAN	TAHUN 2018					
	PENDUDUK	ISLAM	KRISTEN	KATOLIK	HINDU	JUMLAH
Borong	39,701	3,918	374	35,384	25	39,701
Poco Ranaka	33,377	36	35	33,303	3	33,377
Lamba Leda	31,989	2,358	144	29,485	2	31,989
Sambi Rampas	26,404	8,715	44	17,635	10	26,404
Elar	14,876	2,361	10	12,503	2	14,876
Kota Komba	49,031	295	234	48,497	5	49,031
Rana Mese	27,134	474	29	26,624	7	27,134
Poco Ranaka Timur	27,099	11	17	27,065	6	27,099
Elar Selatan	17,699	8	12	17,678	1	17,699
Jumlah	267,310	18,176	899	248,174	61	267,310

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.1.2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk yang dicapai oleh suatu daerah akan memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia yang tinggal di daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk di suatu daerah, maka kualitas sumber daya manusianya juga relatif bagus. Sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan penduduk di suatu daerah, maka kualitas sumber daya manusianya juga relatif rendah. Mayoritas penduduk Kabupaten Manggarai Timur adalah tamatan pendidikan menengah ke bawah. Jumlah yang paling banyak adalah tamatan Sekolah Dasar (SD), yaitu sebanyak 40,23% atau sebanyak 107,547 jiwa dari total jumlah seluruh penduduk sebanyak 299,427 jiwa. Tamatan S-1 sebanyak 3,12% atau sebanyak 8,333 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Timur berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.26. di bawah ini.

Tabel 2.26
Jumlah Penduduk Kabupaten Manggarai Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

KECAMATAN	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018 (Jiwa)										JUMLAH
	TIDAK/ BELUM SEKOLAH	BLM TAMT SD	TAMAT SD	TAMAT SMP	TAMAT SLTA	TAM AT D- 1/D- 2	TAMAT D-3	TAMA T S-1	TAMT S- 2	TAM T S-3	
Borong	6,958	5,901	13,181	4,395	6,053	263	694	2,200	56	0	39,701
Poco Ranaka	6,129	5,623	13,318	3,476	3,629	114	235	844	8	1	33,377
Lamba Leda	5,666	5,162	12,977	3,197	3,686	119	231	945	6	0	31,989

Sambi Rampas	5,091	3,867	10,484	2,557	3,169	147	221	858	10	0	26,404
Elar	2,713	2,185	6,550	1,365	1,506	69	121	365	2	0	14,876
Kota Komba	8,227	7,389	19,736	5,143	6,205	304	504	1,505	16	2	49,031
Rana Mese	5,236	4,228	11,616	2,421	2,802	81	174	566	6	4	27,134
Poco Ranaka Timur	4,739	4,143	12,136	2,670	2,583	96	182	546	3	1	27,099
Elar Selatan	2,895	2,789	7,549	1,837	1,865	102	157	504	1	0	17,699
JUMLAH	47,654	41,287	107,547	27,061	31,498	1,295	2,519	8,333	108	8	267,310

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1

Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Nilai PDRB ADHK Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Manggarai Timur dari tahun 2014 s.d. 2018 terus mengalami peningkatan seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pada tahun 2016 nilai PDRB ADHK sebesar Rp. 1,747,252.89 (Juta Rupiah) dan pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 1,836,270.27 (Juta Rupiah), dan pada tahun 2018 menjadi Rp. 1,929,472.67 (Juta Rupiah). Peningkatan nilai PDRB ADHK Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha tersebut pada tahun 2018 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2018 sebesar 5,08% (yoy). Nilai PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 nilai PDRB ADHB sebesar Rp. 2,991,244.95 (Juta),-, naik dari Rp. 2,732,006.18 (Juta),-

pada tahun 2017, atau naik sebesar 9.49% pada tahun 2018. Sektor yang paling besar berkontribusi terhadap pertumbuhan nilai PDRB adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pertumbuhan nilai PDRB tersebut selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.27. s.d. 2.28. di bawah ini.

Tabel 2.27
PDRB ADHK Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018

Kategori Lapangan Usaha	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	720,462.75	744,224.48	768,590.12	800,201.02	828,713.54
Pertambangan dan Penggalian	86,566.43	85,732.39	87,632.04	83,283.75	81,203.86
Industri Pengolahan	8,514.73	8,723.46	9,053.29	9,411.82	9,890.26
Pengadaan Listrik dan Gas	354.25	410.86	474.65	483.54	544.98
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	78.49	81.25	85.27	89.06	93.85
Konstruksi	79,614.41	85,174.22	91,265.45	97,951.10	106,022.21
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	170,860.23	184,509.78	199,112.78	214,293.10	230,767.93
Transportasi dan Pergudangan	11,478.97	12,034.07	12,648.46	13,371.70	14,140.95
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,591.76	1,694.86	1,816.00	1,955.97	2,139.59
Informasi dan Komunikasi	182,966.87	196,317.75	209,560.48	223,523.56	237,425.88
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,011.89	7,441.16	7,830.90	8,334.61	8,535.87
Real Estate	23,139.67	24,699.71	25,958.26	27,464.89	28,929.17
Jasa Perusahaan	-	-	-	-	-
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	209,058.69	225,841.19	241,953.87	258,663.73	277,606.10
Jasa Pendidikan	38,188.96	40,751.26	43,575.81	46,401.18	49,148.94
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	36,663.35	39,414.48	42,218.27	45,151.10	48,387.22
Jasa lainnya	5,097.25	5,275.77	5,477.24	5,690.12	5,922.32
PDRB	1,581,648.71	1,662,326.70	1,747,252.89	1,836,270.27	1,929,472.67

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur, 2019

Tabel 2.28
PDRB ADHB Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018

Kategori Lapangan Usaha	PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	968,180.60	1,058,591.02	1,151,184.06	1,242,517.76	1,346,582.65
Pertambangan dan Penggalian	104,021.29	102,575.25	105,025.80	98,728.95	94,290.61
Industri Pengolahan	11,476.73	12,542.30	13,696.67	15,077.28	16,534.36
Pengadaan Listrik dan Gas	269.14	347.36	481.30	549.86	639.46
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	93.61	100.19	108.75	116.77	125.48
Konstruksi	110,146.40	127,010.69	145,351.71	164,424.67	184,019.90
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	227,318.42	262,513.05	296,708.55	330,362.73	369,389.09
Transportasi dan Pergudangan	13,804.46	15,194.03	17,002.00	19,210.05	21,211.58
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,175.10	2,496.20	2,848.55	3,233.32	3,674.71
Informasi dan Komunikasi	192,632.87	206,674.00	231,682.83	258,228.42	278,106.80
Jasa Keuangan dan Asuransi	9,239.22	10,390.92	11,636.90	13,127.25	14,246.15
Real Estate	29,418.53	32,819.48	36,146.57	39,259.63	42,280.86
Jasa Perusahaan	-	-	-	-	-
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	263,194.08	302,405.60	345,155.20	393,028.97	447,412.34
Jasa Pendidikan	51,367.90	57,943.07	65,587.38	74,525.67	83,816.48
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	48,355.41	55,417.11	63,072.56	70,857.60	79,489.86
Jasa lainnya	6,661.91	7,243.46	7,918.31	8,757.26	9,424.64
PDRB	2,038,355.68	2,254,263.73	2,493,607.12	2,732,006.18	2,991,244.95

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur, 2019

Tabel 2.29
PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018

Komponen Pengeluaran	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Konsumsi Rumah Tangga	1.594.901.3	1.739.956.1	1.945.143.2	2.118.876	2.283.792.4
Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	26.579.73	30.052.01	33.795.2	39.710.26	45.547.37
Konsumsi Pemerintah	701.929.87	785.655.97	863.972.56	949.154.56	1.044.113
Pembentukan Modal Tetap Bruto	562.286.31	719.649	899.721.09	1.060.054.6	1.149.481.1
Perubahan Inventori	23.050.32	17.854.79	9.986.01	12.344.72	19.846.26
Ekspor	403.302.97	551.341.48	372.540.94	379.810.14	438.581.72
Impor	1.273.694.9	1.590.245.7	1.631.551.9	1.827.944.2	1.990.116.9
PDRB	2.038.355.7	2.254.263.7	2.493.607.1	2.732.006.2	2.991.245

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur, 2019

Tabel 2.30
Laju PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Manggarai Timur 2013 – 2017

Komponen Pengeluaran	2013	2014	2015	2016*	2017*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,34	4,69	4,19	4,43	4,91
1.a Makanan, Minuman, dan Rokok	0,54	0,05	2,69	4,96	5,26
1.b Pakaian dan alas kaki	6,62	3,71	11,59	6,15	4,31
1.c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,31	7,96	3,77	-0,55	3,91
1.d Kesehatan dan Pendidikan	8,48	16,95	9,64	8,59	4,55
1.e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	10,78	8,99	4,14	6,10	5,35
1.f Hotel dan Restoran	-6,55	14,91	11,42	8,10	5,28
1.g Lainnya	6,68	28,96	12,61	6,68	3,54
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	5,47	12,12	7,01	5,23	8,80
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10,19	9,76	6,93	6,18	5,74
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	18,44	17,74	22,71	1,62	3,75
4.a Bangunan	4,41	32,54	41,16	12,20	13,53
4.b Non - Bangunan	3,06	3,48	-0,05	-16,65	-19,16
5. Perubahan Inventori	-77,00	-51,36	-35,31	-43,21	21,55
6. Ekspor	21,67	-3,28	27,23	-6,54	16,10
7. Impor	1,08	6,79	17,98	-0,76	7,87
P D R B (1+2+3+4+5+6-7)	5,34	5,27	5,10	5,16	5,14

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur, 2018

Tabel 2.31
Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2013-2017

Kategori	Lapangan Usaha	Persentase Distribusi PDRB ADHB (%)				
		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	48,20	47,50	46,96	46,02	45,39
B	Pertambangan dan Penggalian	5,18	5,10	4,55	4,21	3,60
C	Industri Pengolahan	0,58	0,56	0,56	0,55	0,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02

E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Konstruksi	5,32	5,40	5,63	5,84	6,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,67	11,15	11,65	12,05	12,31
H	Transportasi dan Pergudangan	0,68	0,68	0,67	0,68	0,70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12
J	Informasi dan Komunikasi	9,64	9,45	9,17	9,27	9,35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48
L	Real Estat	1,45	1,44	1,46	1,47	1,51
M,N	Jasa Perusahaan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	12,62	12,91	13,41	13,82	14,23
P	Jasa Pendidikan	2,48	2,52	2,57	2,62	2,70
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,29	2,37	2,46	2,52	2,60
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur, 2018.

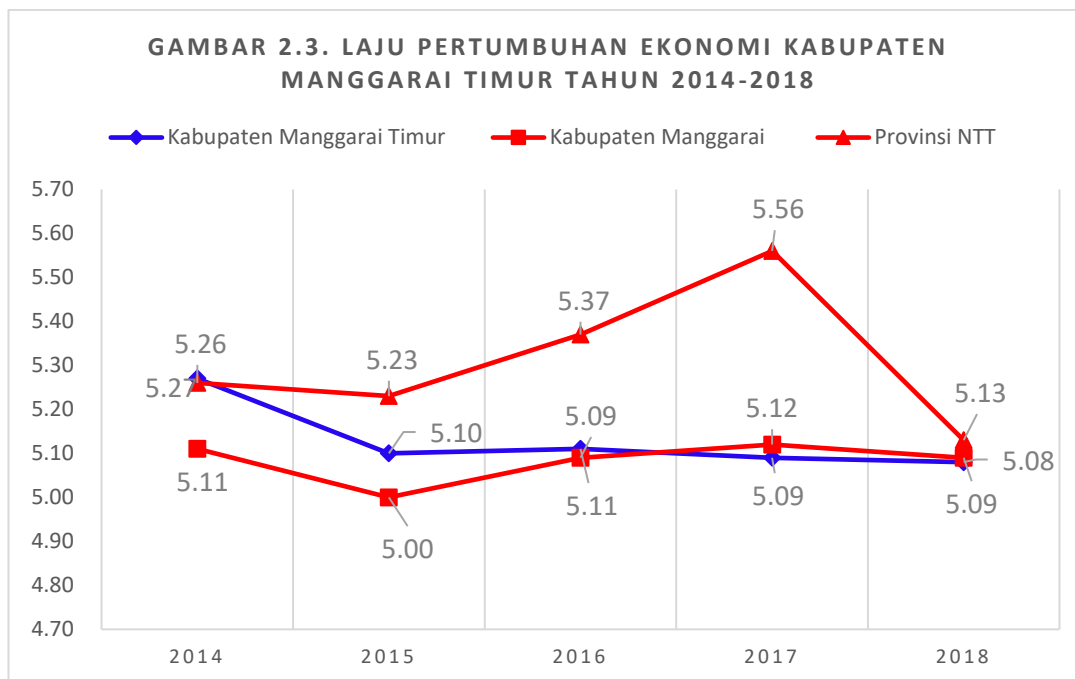
*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

2.2.1.2

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dari tahun 2015 s.d. tahun 2018 tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Timur terus menurun, namun rata-rata penurunannya relatif sangat kecil, yaitu sebesar - 0,05% (yoy). Persentase pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 sebesar 5,09%, menurun menjadi 5,08% pada tahun 2018. Pada lima tahun terakhir (2014-2018) rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Timur sebesar 5,13%. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT sedikit lebih baik karena pada tahun 2017 pertumbuhannya sebesar 5,56%, naik dari 5,37% pada tahun 2016. Sementara rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT lima tahun terakhir (2013-2017) sebesar 5,37%. Namun, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Timur sedikit lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai sebesar 5,09%, meningkat menjadi sebesar 5,12% pada tahun 2017.



Sumber: BPS Provinsi NTT, 2019

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai Timur selengkapnya dapat dilihat melalui Tabel 2.32. di bawah ini.

Tabel 2.32
Laju PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018

Kategori Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen)			
	2014	2015	2016	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3	3.3	3.27	3.56
Pertambangan dan Penggalian	9.8	-0.96	2.22	-2.5
Industri Pengolahan	1.22	2.45	3.78	5.08
Pengadaan Listrik dan Gas	21.84	15.98	15.53	12.71
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.15	3.51	4.95	5.38
Konstruksi	4.42	6.98	7.15	8.24
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.54	7.99	7.91	7.69
Transportasi dan Pergudangan	4.56	4.84	5.11	5.75
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.86	6.48	7.15	9.39
Informasi dan Komunikasi	6.75	7.3	6.75	6.22
Jasa Keuangan dan Asuransi	6.47	6.12	5.24	2.41
Real Estate	5.68	6.74	5.1	5.33

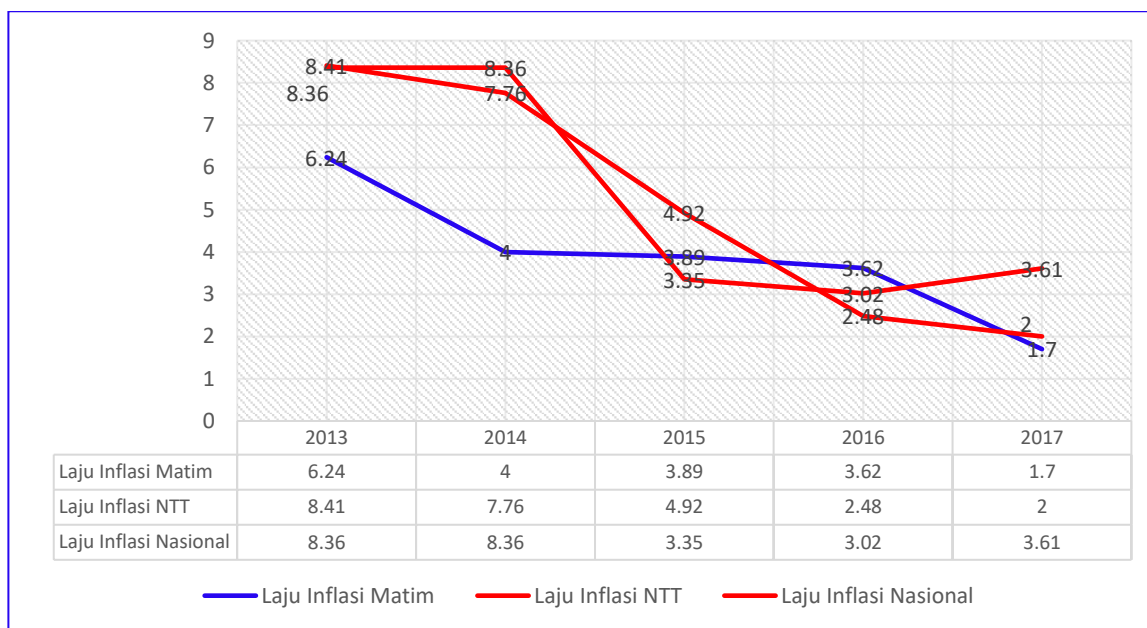
Jasa Perusahaan	0	0	0	0
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.71	8.03	7.13	7.32
Jasa Pendidikan	6.21	6.71	6.93	5.92
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.72	7.5	7.11	7.17
Jasa lainnya	3.83	3.5	3.82	4.08
PDRB	5.27	5.1	5.11	5.08

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur, 2019.

2.2.1.2 Laju Inflasi

Penghitungan laju inflasi dipakai untuk mengetahui gambaran kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur. Laju Inflasi Kabupaten Manggarai Timur dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 laju inflasi Kabupaten Manggarai Timur sebesar 3,62%, dan pada tahun 2017 menurun menjadi 1,7%. Laju inflasi tersebut berada di kisaran laju inflasi Provinsi NTT dan Nasional. Pada tahun 2016 laju inflasi Provinsi NTT sebesar 2,48% dan pada tahun 2017 sebesar 2,0%; sementara nasional 3,02% pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 sebesar 3,61%. Laju Inflasi Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Gambar 2.4. di bawah ini.

Gambar 2.4. Laju Inflasi Kabupaten Manggarai Timur 2013-2017



Sumber: TPID Kabupaten Manggarai Timur dan Badan Pusat Statistik, 2018

2.2.1.3 PDRB Per Kapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan menghasilkan PDRB Per Kapita. PDRB Per Kapita atas dasar harga konstan menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2018 PDRB Per Kapita Kabupaten Manggarai Timur atas dasar harga konstan tahun 2010 sebesar Rp. 6,81 (Juta), naik dari Rp. 6,55 (Juta) pada tahun 2017. Nilai PDRB Per Kapita tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata PDRB Per Kapita Provinsi NTT karena pada tahun 2017 PDRB Per Kapita Provinsi NTT sebesar Rp. 11,87 (Juta). Nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Manggarai Timur selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.33. di bawah ini.

Tabel 2.33
PDRB Per Kapita ADHK 2010 Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015-2018

No.	Uraian	PDRB ADHK 2010 PER KAPITA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR (Juta Rupiah)			
		2015	2016	2017	2018
1	PDRB ADHK 2010 (Rp.)	1,662,326.70	1,747,252.89	1,836,270.27	1,929,472.67
2	Jumlah Penduduk*	272,514	276,620	280,118	283,313
3	Pendapatan Per Kapita Kab. Manggarai Timur (Rp.)	6.09	6.31	6.55	6.81
4	Pendapatan Per Kapita Provinsi NTT (Rp.)	11,13	11,47	11,87	

* Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur dan BPS Provinsi NTT, 2019

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur, 2019

2.2.1.4 Indeks Gini Ratio

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Indeks Gini Kabupaten Manggarai Timur selama ini belum dilakukan penghitungan, sehingga belum diketahui tentang ketimpangan antarwilayah. Hal ini terjadi karena data PDRB tingkat kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur belum dilakukan pengukuran.

Tabel 2.34
Indeks Gini di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013-2017

INDIKATOR	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Gini Manggarai Timur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rasio Gini NTT	0,35	0,36	0,34	0,36	0,36

Sumber: BPS NTT, 2018

2.2.1.5

Jumlah Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Jumlah pengeluaran per kapita di Kabupaten Manggarai Timur terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan rata-rata peningkatannya dalam kurun waktu tahun 2015-2018 sebesar 8,47%. Pada tahun 2015 pengeluaran per kapita di Kabupaten Manggarai Timur sebesar Rp. 8.27 (Juta), meningkat menjadi Rp. 9.75 (Juta) pada tahun 2017, dan terus meningkat menjadi Rp. 10.56 (Juta) pada tahun 2018. Jumlah pengeluaran per kapita di Kabupaten Manggarai Timur selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.35. di bawah ini.

Tabel 2.35
Jumlah Pengeluaran per Kapita di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015-2018

Komponen Pengeluaran	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)			
	2015	2016	2017	2018
PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran	2,254,263.73	2,493,607.12	2,732,006.18	2,991,244.95
Jumlah Penduduk*	272,514	276,620	280,118	283,313
Jumlah Pengeluaran Per Kapita Manggarai Timur	8.27	9.01	9.75	10.56
Jumlah Pengeluaran Per Kapita Provinsi NTT	7,00	7,12	7,35	7,56
Jumlah Pengeluaran Per Kapita Nasional	10,14	10,42	10,66	11,05

* Sumber: BPS Provinsi NTT dan BPS Kabupaten Manggarai Timur 2019
Sumber: BPS, 2019

2.2.1.6

Angka Kemiskinan

Salah satu indikator sosial-ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah perkembangan penduduk miskin. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu wilayah dapat diukur dengan beberapa indikator. Pertama, lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang diperoleh dari perbandingan angka persentase penduduk dan pendapatan riil tahunan. Kedua, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Ketiga, garis atau batas kemiskinan. Meskipun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Manggarai Timur cenderung menurun dari tahun ke tahun, namun penurunannya belum signifikan. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 77,670 jiwa atau sebesar 28,64% dari total jumlah penduduk. Jumlah tersebut sedikit menurun pada tahun 2016 sebanyak 76,370 jiwa, dan pada tahun 2017 menurun menjadi 74,850 jiwa atau sebesar 26,80% dari total jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Timur sebesar 263,639 jiwa. Jika persentase penduduk

miskin Kabupaten Manggarai Timur dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi NTT dan Nasional, maka persentase penduduk miskin Kabupaten Manggarai Timur jauh lebih tinggi.

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi. BPS mencatat bahwa Garis Kemiskinan (GK) penduduk Indonesia pada Maret 2018 sebesar Rp.401.220/kapita/bulan. Artinya, angka tersebut merupakan batas minimum pendapatan yang harus dipenuhi untuk memperoleh standar hidup, baik untuk kebutuhan makanan dan non-makanan di suatu wilayah. Jika di bawah angka tersebut, maka masuk kategori penduduk miskin. Garis kemiskinan tersebut terdiri dari GK makanan Rp.294.806 /kapita/bulan ditambah GK non makanan Rp.106.414 /kapita/bulan. Setiap semester, garis kemiskinan yang dikeluarkan BPS mengalami kenaikan dan sepanjang Maret 2015-Maret 2018 rata-rata mengalami kenaikan 3,27% setiap semester. Garis kemiskinan di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2017 sebesar Rp. 299,530,- meningkat dari Rp. 276,703,- pada tahun 2017. Pada tahun yang sama garis kemiskinan NTT sudah mencapai Rp. 322,947, meningkat menjadi Rp 346,737,- pada tahun 2017. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Manggarai Timur 4,72, meningkat menjadi 5,14 pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2017 menurun menjadi 4,39. Pada tahun yang sama indeks kedalaman kemiskinan Provinsi NTT lebih rendah, yaitu 4,06 pada tahun 2015, meningkat menjadi 4,69 pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 menurun menjadi 4,34.

Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) merupakan suatu indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Dalam perkembangannya indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Manggarai Timur mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 indeks keparahan kemiskinan 1,09, meningkat menjadi 1,35 pada tahun 2016, kemudian menurun menjadi 1,17 pada tahun 2017. Pada tahun yang sama indeks keparahan kemiskinan Provinsi NTT mengalami perkembangan yang fluktuatif dan tidak jauh berbeda dengan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Manggarai Timur. Pada tahun 2015 indeks keparahan kemiskinan di NTT 1,07, meningkat menjadi 1,29 pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 menurun menjadi 1,17. Angka kemiskinan Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.36. di bawah ini.

Tabel 2.36
Indikator Kemiskinan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013-2017

INDIKATOR	ANGKA KEMISKINAN (%)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah penduduk miskin (jiwa)	66,100	64,720	77,670	76,370	74,850
Garis Kemiskinan (Rp./Kapita/Bulan)	161,358.00	260,411	260,411	276,703	299,530
Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	3.36	3.3	4.72	5.14	4.39
Indeks keparahan kemiskinan (P2)	0.68	0.69	1.09	1.35	1.17
Persentase Penduduk Miskin Manggarai Timur	24.38	24.01	28.64	27.71	26.8
Persentase Penduduk Miskin NTT	20.24	19.6	22.58	22.01	21.38
Persentase Penduduk Miskin Indonesia	11.47	10.96	11.13	10.7	10.12

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2018

2.2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index (HDI)* menempatkan manusia sebagai *tujuan akhir* penyelenggaraan pembangunan; sedangkan penyelenggaraan pembangunan dipandang sebagai *sarana* untuk mencapai *tujuan akhir*. IPM merupakan perhitungan indeks komposit, yaitu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas manusia.

Pada tahun 2018 IPM Kabupaten Manggarai Timur sebesar 59,49, meningkat sebesar 0,98 dari 58,51 pada tahun 2017. Pada tahun yang sama IPM Provinsi NTT lebih tinggi daripada IPM Kabupaten Manggarai Timur, yaitu sebesar 63,73 pada tahun 2017, meningkat menjadi 64,39 pada tahun 2018. Jika dibandingkan dengan IPM Nasional, IPM Kabupaten Manggarai Timur lebih rendah lagi. Pada tahun 2017 IPM Nasional sudah mencapai 70,81 poin dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 71,39. Hal tersebut

menggambarkan masih rendahnya kualitas SDM Kabupaten Manggarai Timur. IPM Kabupaten Manggarai Timur selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.37. di bawah ini:

Tabel 2.37
IPM Kabupaten Manggarai Timur dan Komponen-Komponen Pembentuknya
Tahun 2013-2017

INDIKATOR	TAHUN					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Usia Harapan Hidup (thn)	67.26	67.27	67.27	67.39	67.4	67.62
Harapan Lama Sekolah (thn)	9.91	10.15	10.3	10.58	11.04	11.34
Rata-rata Lama Sekolah (thn)	6.04	6.42	6.43	6.44	6.45	6.65
Pengeluaran per Kapita (Rp.000)	5,170	5,208	5,246	5,396	5,643	8,219
IPM Manggarai Timur	55.74	56.58	56.83	57.5	58.51	59.49
IPM Provinsi NTT	61.68	62.26	62.67	63.13	63.73	64.39
IPM Nasional	68.31	68.90	69.55	70.18	70.81	71.39

Sumber: BPS, 2019

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1

Angka Buta Huruf

Angka Buta Huruf (ABH) merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. ABH di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2017 sebesar 4,01%, meningkat dari 3,61% pada tahun 2016, dan 2,56% pada tahun 2015. Persentase terbesar adalah ABH kaum perempuan. Pada tahun 2015 ABH kaum perempuan sebesar 3,12%, meningkat menjadi 4,35% pada tahun 2016 dan 5,14% pada tahun 2017. Meskipun persentase rata-rata ABH Provinsi NTT lebih tinggi dibandingkan ABH di Kabupaten Manggarai Timur, namun ABH Provinsi NTT cenderung menurun, yaitu pada tahun 2015 sebesar 7,27%, menurun menjadi 7,25% pada tahun 2017. ABH di Kabupaten Manggarai Timur selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.38. di bawah ini.

Tabel 2.38
Angka Buta Huruf di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015-2017

WILAYAH	PERSENTASE BUTA HURUF (%)								
	LAKI-LAKI			PEREMPUAN			JUMLAH		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Manggarai Timur	1,97	2,84	2,84	3,12	4,35	5,14	2,56	3,61	4,01

Nusa Tenggara Timur	6,11	6,07	5,87	8,39	8,69	8,58	7,27	7,40	7,25

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2018

2.2.2.2

Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Manggarai Timur terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2017 rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Manggarai Timur mencapai 6,45 tahun, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 6,65 tahun. Hal itu menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Manggarai Timur hanya tamatan Sekolah Dasar. Angka rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Manggarai Timur berada di bawah rata-rata Provinsi NTT dan Nasional seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.39. di bawah ini.

Tabel 2.39
Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013-2018

WILAYAH	RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK KABUPATEN MANGGARAI TIMUR (TAHUN)					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Manggarai	6,76	6,79	6,81	6,97	6,98	7,26
Manggarai Timur	6,04	6,42	6,43	6,44	6,45	6,65
Nusa Tenggara Timur	6,76	6,85	6,93	7,02	7,15	7,30
Nasional	7,61	7,73	7,84	7,95	8,1	8,17

Sumber: BPS, 2019

2.2.2.3

Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Dari perkembangan angka partisipasi kasar di Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah APK. APK jenjang pendidikan SD/MI/Paket A sangat tinggi pada tahun 2018, yaitu sebesar 138, naik dari 98,00 pada tahun 2014. Sementara APK pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket C pada tahun 2018 sebesar 108, naik dari 80,66 pada tahun 2014. Hal itu berarti terjadi perbaikan aksesibilitas penduduk terhadap jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama. Sejak tahun 2016 urusan pendidikan SMA/SMK/MA sudah menjadi wewenang pemerintahan provinsi sesuai dengan amanat

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. APK di Kabupaten Manggarai Timur selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.40. di bawah ini.

Tabel 2.40
Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

JENJANG PENDIDIKAN	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) MENURUT JENJANG PENDIDIKAN				
	2014	2015	2016	2017	2018
SD/MI/Paket A	98,00	98,18	99,92	99,93	138,00
SMP/MTs/Paket B	80,66	91,56	95,54	96,87	108,00
SMA/SMK/MA/Paket C	57,22	57,87	59,21	-	-
Angka Partisipasi Kasar	75,96	94,03	89,08	98,92	122,06

Sumber: SIPD Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.2.2.4 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APM di Kabupaten Manggarai Timur mengalami peningkatan walau masih berada di bawah rata-rata nasional. APM di Kabupaten Manggarai Timur pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA mengalami kenaikan dari 49,38% pada tahun 2014 menjadi 56,23% pada tahun 2016. Jika dibandingkan dengan rata-rata APM di Provinsi NTT, pada tahun 2014 APM Provinsi NTT sebesar 52,15% lebih tinggi dibandingkan APM Kabupaten Manggarai Timur, namun pada tahun 2016 APM Provinsi NTT sebesar 52,87% lebih rendah dibandingkan APM Kabupaten Manggarai Timur. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs, APM di Kabupaten Manggarai Timur terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 APM Kabupaten Manggarai Timur sebesar 76,90%, naik menjadi 84,69% pada tahun 2018. Pada tahun yang sama terjadi Angka Putus Sekolah (APS) sebesar 0,44% dan pada tahun 2018 sebesar 0,22%. APM pada jenjang pendidikan SD/MI juga terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2014 sebesar 94,58%, meningkat menjadi 98,38 pada tahun 2018. Namun pada tahun yang 2014 terjadi angka putus sekolah di Kabupaten Manggarai Timur sebesar 0,31%, dan sebesar 0,25% pada tahun 2018. APM Kabupaten Manggarai Timur selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.41. dan 2.42. di bawah ini.

Tabel 2.41
Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

JENJANG PENDIDIKAN	APM PENDUDUK KABUPATEN MANGGARAI TIMUR MENURUT JENJANG PENDIDIKAN				
	2014	2015	2016	2017	2018
SD/MI/Paket A	94,58	95,10	97,10	97,23	98,38
SMP/MTs/Paket B	76,90	81,17	83,29	83,84	84,69
SMA/SMK/MA/Paket C	49,38	53,12	56,23	-	-

Sumber: SIPD Kabupaten Manggarai Timur, 2018

Tabel 2.42
Angka Putus Sekolah di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

JENJANG PENDIDIKAN	APS PENDUDUK KABUPATEN MANGGARAI TIMUR MENURUT JENJANG PENDIDIKAN				
	2014	2015	2016	2017	2018
SD/MI	0,31	0,27	0,25	0,26	0,25
SMP/MTs	0,44	0,28	0,25	0,26	0,22
SMA/SMK/MA	0,94	0,61	0,44	-	-

Sumber: SIPD Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.2.2.5 Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah di Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan tren peningkatan, namun berada di bawah rata-rata angka harapan lama sekolah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional. Pada tahun 2017 harapan lama sekolah di Kabupaten Manggarai Timur mencapai 11,04 tahun, meningkat menjadi 11,34 pada tahun 2018. Demikian pula, jika dibandingkan dengan Kabupaten Manggarai, angka harapan lama sekolah Kabupaten Manggarai Timur masih lebih rendah seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.43. di bawah ini.

Tabel 2.43
Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013-2018

WILAYAH	HARAPAN LAMA SEKOLAH PENDUDUK KABUPATEN MANGGARAI TIMUR (TAHUN)					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Manggarai	10,90	11,29	11,60	11,92	12,32	12,71
Manggarai Timur	9,91	10,15	10,30	10,58	11,04	11,34

Nusa Tenggara Timur	12,27	12,65	12,84	12,97	13,07	13,10
Nasional	12,1	12,39	12,55	12,72	12,85	12,91

Sumber: BPS, 2019

2.2.2.6

Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) memaksudkan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap jumlah penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak tahun 2009, pendidikan non-formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS di Kabupaten Manggarai Timur mengalami peningkatan pada tiga tahun terakhir. Pada tahun 2016 APS di Kabupaten Manggarai Timur sebesar 97,09%, pada tahun 2017 naik menjadi 97,16%, dan pada tahun 2018 naik menjadi 98,37%. Sementara pada jenjang pendidikan SMP/MTs kondisinya lebih rendah dibandingkan dengan jenjang pendidikan SD/MI. Pada tahun 2016 sebesar 83,68%, naik menjadi 83,83% pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 naik menjadi 84,68%. Jika dirata-ratakan, maka APS di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2016 sebesar 84,69%, naik menjadi 89,00% pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 naik menjadi 90,82%. APS Kabupaten Manggarai Timur selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.44. di bawah ini.

Tabel 2.44
Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

JENJANG PENDIDIKAN	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PENDUDUK KABUPATEN MANGGARAI TIMUR MENURUT JENJANG PENDIDIKAN				
	2014	2015	2016	2017	2018
SD/MI	-	-	97,09	97,16	98,37
SMP/MTs	-	-	83,68	83,83	84,68
SMA/SMK/MA	-	-	57,90	-	-
Angka Partisipasi Sekolah	-	96,12	84,69	89,00	90,82

Sumber: SIPD Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.2.2.7

Angka kelangsungan hidup bayi

Tren jumlah kasus kematian bayi, anak balita dan balita di Kabupaten Manggarai Timur cenderung fluktuatif. Jumlah kasus kematian bayi tertinggi terjadi pada tahun 2014. Dari 1,000 kelahiran hidup terdapat 9,94 bayi meninggal. Pada tahun 2018 menurun menjadi 8,1 per 1,000 Kelahiran Hidup. Demikian pula jumlah kasus kematian Balita cenderung fluktuatif. Jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2017. Dari 1,000 kelahiran hidup terdapat 2,4 Balita yang meninggal. Pada tahun 2018 kasus kematian Balita menurun menjadi 0,3 per 1,000 Kelahiran Hidup. Sedangkan jumlah kasus kematian neonatal tertinggi terjadi pada tahun 2014, yaitu 7 kasus per 1,000 Kelahiran Hidup. Jumlah kasus terendah terjadi pada

tahun 2017, yaitu 5 kasus per 1,000 Kelahiran Hidup. Jumlah kasus kematian bayi dan Balita di Kabupaten Manggarai Timur selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.45. di bawah ini.

Tabel 2.45
Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Balita di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

INDIKATOR	KASUS KEMATIAN BAYI DAN BALITA DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR				
	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Kematian Bayi Per 1,000 Kelahiran Hidup	9,94	8,49	8,17	8,17	8,1
Angka Kematian Balita Per 1,000 Kelahiran Hidup	1,5	0,35	0,55	2,4	0,3
Angka Kematian Neonatal Per 1,000 Kelahiran Hidup	7	6	6	5	6,05

Sumber: SIPD Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.2.2.8 Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Manggarai Timur cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Angka kematian ibu tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebanyak 208 kasus dari 100,000 per kelahiran hidup. Pada tahun 2018 menurun menjadi 169 kasus. AKI di Kabupaten Manggarai Timur selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.46. di bawah ini.

Tabel 2.46
Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

INDIKATOR	AKI DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR				
	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Kematian Ibu Per 100,000 Kelahiran Hidup	187,6	162	208	186	169

Sumber: SIPD Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.2.2.9 Persentase Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang

Status gizi Balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara menilai status gizi pada Balita adalah dengan pengukuran anthropometri, yaitu menghitung Indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U) atau Berat Badan terhadap Tinggi Badan (BB/TB). Kategori yang digunakan adalah: gizi lebih (z-score $>+ 2$ SD); gizi baik (z-score -2 SD sampai $+2$ SD); gizi kurang (z-score <-2 SD sampai -3 SD); dan gizi buruk (z-score <-3 SD). Gizi kurang (Kurang Energi Protein/KEP) merupakan suatu kondisi kekurangan protein, karbohidrat dan kalori. Tingkat yang lebih parah dari kondisi gizi kurang adalah gizi buruk.

Gizi buruk dan gizi kurang merupakan salah satu masalah yang masih terjadi pada Balita di Kabupaten Manggarai Timur. Menurut Riset Kesehatan Dasar Nasional pada tahun

2018, proporsi status gizi buruk dan gizi kurang pada Balita di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2018 sebesar 31,20%. Kondisi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi Provinsi NTT dan Nasional. Pada tahun 2018 proporsi status gizi buruk dan gizi kurang di Provinsi NTT sudah mencapai 29,5%, dan Nasional sudah mencapai 17,7%. Sebagai akibat dari gizi kurang dan gizi buruk pada Balita adalah *stunting* (tubuh sangat pendek dan pendek), yaitu pertumbuhan tinggi badan Balita lebih rendah dibandingkan dengan tinggi yang seharusnya menurut umurnya. Pada tahun 2018, terdapat 47,80% Balita di Kabupaten Manggarai Timur yang berstatus gizi sangat pendek dan pendek. Proporsi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Ngada, juga Provinsi NTT dan Nasional. Seperti yang dilihat pada Tabel 2.47. di bawah ini, proporsi status gizi sangat pendek dan pendek pada Balita di Kabupaten Manggarai pada tahun 2018 sudah mencapai 43,10%, dan Kabupaten Ngada sudah mencapai 33%. Pada tahun yang sama proporsi status gizi sangat pendek dan pendek pada Balita di Provinsi NTT sudah mencapai 42,6% dan Nasional sudah mencapai 29,90%.

Tabel 2.47
Proporsi Status Gizi Sangat Pendek dan Pendek pada Balita di Kabupaten Manggarai Timur

Wilayah	Proporsi Status Gizi Sangat Pendek dan Pendek pada Balita (%)	
	2013	2018
Kabupaten Manggarai Timur	55.4	47.8
Kabupaten Manggarai	55.1	43.1
Kabupaten Ngada	41.3	33
Provinsi NTT	51.7	42.6
Nasional	N/A	29.9

Sumber: Riskesdas, 2018

2.2.2.10 Umur Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) dapat digunakan untuk menilai status derajat kesehatan dan menjadi salah satu indikator yang diperhitungkan dalam menilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). AHH penduduk Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2018 sebesar 67,62 yang berarti bahwa anak-anak yang lahir pada tahun 2018 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 67 tahun 6 bulan. Jika dibandingkan dengan angka harapan hidup penduduk Kabupaten Manggarai, dan rata-rata angka harapan hidup Provinsi NTT, maka angka harapan hidup penduduk Kabupaten Manggarai Timur lebih tinggi, namun lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata umur harapan hidup Nasional. Umur harapan hidup penduduk Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.48. di bawah ini.

Tabel 2.48
Umur Harapan Hidup di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013-2017

WILAYAH	USIA HARAPAN HIDUP PENDUDUK KABUPATEN MANGGARAI TIMUR (TAHUN)					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Manggarai	64,75	64,78	65,48	65,66	65,84	66,23
Manggarai Timur	67,26	67,27	67,27	67,39	67,40	67,62
Nusa Tenggara Timur	65,82	65,91	65,96	66,04	66,07	66,38
Nasional	70,40	70,59	70,78	70,90	71,06	71,2

Sumber: BPS, 2019

2.2.2.11 Ratio Penduduk yang Bekerja

Pada tahun 2015 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 122,713 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 120,033 yang bekerja, sedangkan sebanyak 2,680 jiwa yang menganggur. Berdasarkan jumlah tersebut, maka ratio penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2015 sebesar 97,82%. Pada tahun 2017 ratio angkatan kerja di Kabupaten Manggarai Timur naik menjadi 99,50%, yaitu dari total 152,029 jiwa angkatan kerja di Kabupaten Manggarai Timur, sebanyak 151,273 jiwa yang bekerja, dan sebanyak 756 jiwa yang menganggur. Jika dibandingkan dengan ratio angkatan kerja di Provinsi NTT, ratio angkatan kerja di Kabupaten Manggarai Timur lebih tinggi karena pada tahun 2015 ratio angkatan kerja Provinsi NTT sebesar 96,17%, dan pada tahun 2017 naik menjadi 96,73%. Sementara tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Manggarai Timur lebih tinggi dibandingkan TPAK Provinsi NTT. Pada tahun 2015 TPAK Kabupaten Manggarai Timur sebesar 72,32%, naik menjadi sebesar 86,44% pada tahun 2017. Sedangkan TPAK Provinsi NTT pada tahun 2015 sebesar 69,25%, naik menjadi 69,09 pada tahun 2017. Ratio penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja di Kabupaten Manggarai Timur selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.49. di bawah ini.

Tabel 2.49
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015 dan 2017

NO.	KEGIATAN UTAMA	MANGGARAI TIMUR		PROVINSI NTT	
		2015	2017	2015	2017
A.	Angkatan Kerja	122,713	152,029	2,307,737	2,398,609
1	Bekerja	120,033	151,273	2,219,291	2,320,061
2	Pengangguran Terbuka	2,680	756	88,846	78,548
B.	Bukan Angkatan Kerja	46,963	23,854	1,024,663	1,073,247
1	Sekolah	20,596	10,259	406,687	377,245
2	Mengurus Rumah Tangga	19,839	9,832	479,617	562,544
3	Lainnya	6,528	3,763	138,359	133,458
Rasio penduduk yang berkerja terhadap Angkatan Kerja (%)		97,82	99,50	96,17	96,73

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,18	0,5	3,83	3,27
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	72,32	86,44	69,25	69,09

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur dan BPS Provinsi NTT, 2018

2.2.2.12

Nilai SAKIP dan Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) merupakan produk akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. SAKIP disusun berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan SAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari SAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran. Dalam penilaian SAKIP, materi yang dievaluasi meliputi 5 komponen. Komponen pertama adalah perencanaan kinerja, terdiri atas perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan dengan bobot 30. Komponen kedua yang diukur adalah kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran dengan bobot 20. Komponen ketiga adalah pelaporan kinerja, yang terdiri atas pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja dengan bobot 15. Komponen keempat adalah evaluasi kinerja, yang terdiri atas pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi dengan bobot 10. Komponen kelima adalah pencapaian kinerja dengan bobot 20. Komponen pencapaian kinerja terdiri atas kinerja yang dilaporkan (output dan outcom) dan kinerja lainnya.

Nilai tertinggi dari evaluasi SAKIP adalah AA (Sangat Memuaskan) dengan skor 90-100; A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan skor 80-90; BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki manajemen kinerja yang andal) dengan skor 70-80; B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan) dengan skor 60-70; CC (Cukup Baik, Memadai) dengan skor 50-60; C (Agak Kurang) dengan skor 30-50, dan nilai D (Kurang) dengan skor 0-30. Nilai SAKIP Kabupaten Manggarai Timur dari tahun 2014-2017 cenderung mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, namun masih berkisar pada nilai C (Agak Kurang) dan CC (Cukup Baik). Pada tahun 2014 nilai SAKIP Kabupaten Manggarai Timur sebesar 35,35 atau nilai C (Agak Kurang), meningkat menjadi 52,16 atau CC (Cukup Baik) pada tahun 2017.

Sementara Opini BPK adalah pernyataan profesional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai kesimpulan BPK mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan Pasal 16 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ada 4 jenis Opini BPK,

yaitu: Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*), Tidak Wajar (*Adverse Opinion*), dan Menolak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*). Secara tersirat urutan pada klasifikasi opini di atas dapat menjadi refleksi stratafikasi kualitas kewajaran atas laporan keuangan dari tahun ke tahun belum menunjukkan kinerja yang memuaskan. Nilai SAKIP dan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.50. di bawah ini.

Tabel 2.50
Nilai SAKIP dan Opini BPK Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

INDIKATOR	NILAI SAKIP DAN OPINI BPK KABUPATEN MANGGARAI TIMUR				
	2014	2015	2016	2017	2018
SAKIP	35,35 (C)	46,22 (C)	50,11 (CC)	52,16 (CC)	-
Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP

Sumber: SIPD Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.2.2.13

Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan. Tujuan utama penyusunan PPH adalah untuk membuat suatu rasionalisasi pola konsumsi pangan yang dianjurkan, yang terdiri atas kombinasi aneka ragam pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan sesuai cita rasa. Skor PPH di Kabupaten Manggarai Timur belum stabil dari tahun ke tahun. Selama enam tahun terakhir di Kabupaten Manggarai Timur capaian skor PPH tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 86% dan skor terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 72,10%. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 76,50%. Jika dibandingkan dengan skor PPH Provinsi NTT, skor PPH Kabupaten Manggarai Timur lebih tinggi. Pada tahun 2016 skor PPH Provinsi NTT sebesar 73,00%, pada tahun yang sama skor PPH Kabupaten Manggarai Timur sudah sebesar 79,80%. Skor PPH Provinsi NTT terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 65,00% saja. Skor PPH di Kabupaten Manggarai Timur selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.51. di bawah ini.

Tabel 2.51
Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013-2018

INDIKATOR	SKOR POLA PANGAN HARAPAN (%)					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Skor PPH Kabupaten Manggarai Timur	82	86	73,80	79,80	72,10	76,50
Skor PPH Provinsi NTT	66,2	65,0	71,3	73,0	-	-

Sumber : SIPD Kabupaten Manggarai Timur dan BPS Provinsi NTT, 2018

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.2.3.1

Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga

Salah satu komitmen pemerintah daerah dalam membangun masyarakat adalah melalui pembangunan bidang seni, budaya dan olah raga. Namun, hingga saat ini pendataan terkait pembangunan bidang seni, budaya dan olah raga belum dilakukan karena ungkapan seni dan budaya, serta kegiatan olah raga masyarakat belum terlembagakan secara resmi.

Tabel 2.52
Perkembangan Seni, Budaya dan Olah Raga di Kabupaten Manggarai Timur, 2013-2018

INDIKATOR	TAHUN					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: SIPD Kabupaten Manggarai Timur dan BPS Provinsi NTT, 2018

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, baik pada urusan wajib, maupun urusan pilihan. Bidang-bidang yang termasuk urusan wajib antara lain bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, perpustakaan, kearsipan,

kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, perencanaan pembangunan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar.

2.3.1.1 Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan di Kabupaten Manggarai Timur diselenggarakan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Manggarai Timur melalui perluasan, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan di Kabupaten Manggarai Timur adalah sebagai berikut:

2.3.1.1.1 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan menggambarkan penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. APS di Kabupaten Manggarai Timur tahun 2016-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.53. di bawah ini.

Tabel 2.53
Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

USIA/JENJANG PENDIDIKAN	APS PENDUDUK KABUPATEN MANGGARAI TIMUR (%)			APS NTT (%)	APS NASIONAL (%)
	2016	2017	2018	2017	2017
7 – 12 tahun Sekolah Dasar (SD/MI)	97,09	97,16	98,37	98,27	99,14
13-15 tahun Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	83,68	83,83	84,68	94,76	95,08
16-18 tahun Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	57,90	-	-	74,65	71,42

Sumber: SIPD Kabupaten Manggarai Timur, 2018

Tabel 2.53. di atas memperlihatkan bahwa APS di Kabupaten Manggarai Timur terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 penduduk berumur 7-12 tahun sebanyak 97,09%

mengenyam pendidikan SD/MI, meningkat menjadi 97,16% pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 98,37%. Hal itu berarti bahwa masih ada penduduk berusia SD/MI di Kabupaten Manggarai Timur tidak berada di sekolah. Demikian pula penduduk berusia 13-15 tahun di Kabupaten Manggarai Timur tidak semuanya berada di sekolah menengah. Pada tahun 2016 APS Kabupaten Manggarai Timur hanya 83,68%, naik menjadi 83,83 pada tahun 2017 dan naik menjadi 84,68% pada tahun 2018. Sementara APS dari penduduk Kabupaten Manggarai Timur yang berusia 16-18 tahun hanya sebesar 57,90% pada tahun 2016. Itu berarti hampir separuh penduduk berusia 16-18 tahun di Kabupaten Manggarai Timur tidak mengenyam pendidikan SMA/SMK/MA.

Seperti yang diperlihatkan pada Tabel 2.50. di atas, pada semua jenjang usia atau pendidikan APS di Kabupaten Manggarai Timur lebih rendah daripada APS NTT dan APS Nasional. Pada usia 7-12 tahun atau jenjang SD/MI, APS Provinsi NTT berada di atas 98 persen, artinya hampir semua penduduk usia sekolah SD atau yang berusia 7-12 tahun sedang mengenyam pendidikan di SD/MI. Pada usia 13-15 atau jenjang SMP/MTs, APS sebesar 94,76% dan pada usia 16-18 tahun atau SMA, APS hanya sebesar 74,65%. Pada umur 7-12 tahun atau jenjang SD/MI, APS Nasional pada tahun 2017 sebesar 99,14%. Sementara pada tahun yang sama pada umur 13-15 tahun atau jenjang SMP/MTs, APS Nasional sebesar 95,08%, dan jenjang SMA/SMK/MA sebesar 71,42.

2.3.1.1.2

Ratio Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio sekolah terhadap penduduk usia sekolah mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Rasio ketersediaan sekolah ini dihitung untuk tiap 10.000 penduduk. Semakin rendah rasio sekolah dengan murid, semakin baik pelayanan pendidikan suatu daerah. Hal ini terjadi karena peningkatan jumlah murid sebanding dengan peningkatan jumlah sekolah. Ratio sekolah terhadap penduduk usia sekolah di Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.54. di bawah ini. Pada jenjang pendidikan dasar (SD + SMP) pada tahun 2014 rasio ketersediaan sekolah terhadap siswa 1: 92 atau satu sekolah melayani 92 siswa. Pada tahun 2015 s.d. 2017 jumlah murid bertambah cukup signifikan tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah ketersediaan sekolah, sehingga dari tahun 2015 s.d. 2017 rata-rata 1 sekolah melayani 129 siswa. Sementara pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) pada tahun 2014 rasio ketersediaan sekolah terhadap siswa 1: 52 atau 1 sekolah melayani 52 siswa. Pada tahun 2015-2016 terjadi peningkatan jumlah siswa di Kabupaten Manggarai Timur, sehingga 1 sekolah melayani rata-rata 346 siswa.

Tabel 2.54
Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah
di Kabupaten Manggarai Timur, 2014 – 2018

RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TERHADAP PENDUDUK USIA SEKOLAH	2014	2015	2016	2017	2018
Pendidikan Dasar (SD/MI + SMP/MTs)	1: 92	1: 132	1: 132	1:125	1: 92
Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA)	1:52	1: 347	1: 345	-	-

Sumber : SIPD Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.1.1.3

Ratio Guru terhadap Murid Sekolah Dasar dan Menengah

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 1,000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar, serta untuk mengukur jumlah ideal murid per satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Angka Rasio Guru Terhadap Murid di Sekolah Dasar dan Menengah di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.55. di bawah ini. Pada jenjang pendidikan SD rasio guru terhadap murid SD 1: 14,88 pada tahun 2015, yang berarti 1 guru melayani 14-15 siswa. Jumlah murid pada tahun 2016 bertambah, yang tidak diimbangi dengan jumlah guru, sehingga pada tahun 2016 rasio guru terhadap murid 1: 65 atau 1 guru melayani 65 siswa.

Tabel 2.55
Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar dan Menengah
di Kabupaten Manggarai Timur 2014-2018

JENJANG PENDIDIKAN	JENIS RATIO	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
SD/MI	Ratio Guru terhadap Murid SD	-	1: 14,88	1: 65	-	-
	Ratio Guru terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata Pendidikan SD	-	-	-	-	-
SMP/MTs	Ratio Guru terhadap Murid SD	-	1: 9,24	1: 9,40	-	-
	Ratio Guru terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata Pendidikan SD	-	1: 2,75	-	-	-

Sumber: SIPD Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.1.1.4

Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APS) merupakan proporsi penduduk menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang

pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk yang pernah/sedang bersekolah pada kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun (SD atau sederajat), 13-15 tahun (SMP atau sederajat), 16-18 tahun (SMA atau sederajat) dan 19-24 tahun (Perguruan Tinggi). APS di Kabupaten Manggarai Timur terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun, baik pada jenjang pendidikan dasar, maupun pada jenjang pendidikan menengah. Pada tahun 2014 APS di Kabupaten Manggarai Timur pada jenjang pendidikan dasar sebesar 0,31%, menurun menjadi 0,25% pada tahun 2018. Sementara APS pada jenjang pendidikan menengah sebesar 0,44% pada tahun 2014, menurun menjadi 0,22%. Hal itu berarti hampir semua anak usia sekolah di Kabupaten Manggarai Timur, baik pada jenjang pendidikan dasar, maupun pada jenjang pendidikan menengah menamatkan pendidikannya. APS di Kabupaten Manggarai Timur lebih baik dibandingkan rata-rata APS di Provinsi NTT. Pada tahun 2014-2017 APS jenjang pendidikan dasar di Provinsi NTT berkisar pada 0,84%, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah pertama berkisar pada 3,08%. APS di Kabupaten Manggarai Timur selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.56. di bawah ini.

Tabel 2.56
Angka Putus Sekolah di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

WILAYAH	URAIAN	ANGKA PUTUS SEKOLAH (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
Manggarai Timur	Sekolah Dasar (SD/MI)	0,31	0,27	0,25	0,26	0,25
	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	0,44	0,28	0,25	0,26	0,22
Provinsi NTT	Sekolah Dasar (SD/MI)	1,32	0,69	0,30	1,04	-
	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	1,31	1,23	6,02	3,77	-

Sumber: SIPD Kabupaten Manggarai Timur dan Provinsi NTT, 2018

2.3.1.1.5 Angka Melanjutkan Pendidikan

Angka melanjutkan pendidikan adalah persentase siswa yang melanjutkan pendidikan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan tertentu. Angka melanjutkan pendidikan dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Angka melanjutkan pendidikan di Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.57. di bawah ini.

Tabel 2.57
Angka Melanjutkan Pendidikan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

WILAYAH	URAIAN	ANGKA MELANJUTKAN PENDIDIKAN (%)			
		2015	2016	2017	2018
Manggarai Timur	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	94,87	91,49	92,33	90,57

	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	68,26	99,83	76,56	76,74
Provinsi NTT	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	85,34	84,61	91,33	-
	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	86,97	74,38	85,45	-

Sumber: SIPD Kabupaten Manggarai Timur dan Provinsi NTT, 2018

Berdasarkan Tabel 2.57. di atas, angka melanjutkan pendidikan jenjang sekolah dasar (SD/MI) ke tingkat pendidikan sekolah menengah pertama (SMP/MTs) di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2015 sebesar 94,87%, namun pada tahun 2018 menurun menjadi 90,57%. Sementara angka melanjutkan pendidikan dari jenjang pendidikan SMP/MTs ke jenjang pendidikan SMA/SMK/MA pada tahun 2015 sebesar 68,26%, naik menjadi 76,74% pada tahun 2017. Tren angka melanjutkan pendidikan di Provinsi NTT cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 angka melanjutkan pendidikan dari jenjang SD/MI di Provinsi NTT sebesar 85,34%, naik menjadi 91,33% pada tahun 2017. Sedangkan dari jenjang pendidikan SMP/MTs ke jenjang SMA/SMK/MTs pada tahun 2015 sebesar 86,97%, menurun menjadi 85,45%.

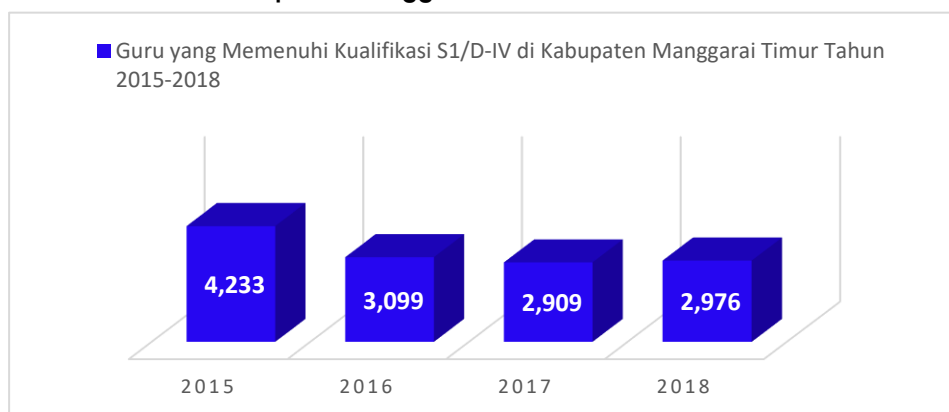
2.3.1.1.6 Kompetensi Guru

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Melalui arahan dan bimbingan guru yang profesional, peserta didik bisa berkembang menjadi sosok yang cerdas dan terpelajar. Peserta didik diharapkan dapat menjadi generasi yang handal dan berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk dapat menghadapi persaingan yang semakin ketat, agar kelak dapat bersaing di pasar tenaga kerja, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Guru merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan proses pendidikan. Betapa pentingnya peran guru, maka kualifikasi dan kompetensi guru perlu dievaluasi. Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani. Kualifikasi akademik diperoleh melalui tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, sedangkan kompetensi diperoleh melalui standar pendidikan profesi. Menurut Permendiknas RI No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah sebagai berikut:

1. Guru pada SD/MI atau bentuk lain sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau Psikologi yang diperoleh dari Program studi yang terakreditasi.
2. Guru pada SMP/MTs/ Sederajat, SMA/MA/ Sederajat dan SMK/MAK/ Sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

Gambar 2.5. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015-2018



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur, 2018

Kondisi jumlah guru di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2015 sebanyak 4.233, menurun menjadi 3.099 pada tahun 2016. Penurunan ini terjadi karena pada tahun 2016 urusan pendidikan menengah atas sudah menjadi kewenangan provinsi. Dengan demikian, guru-guru yang mengajar di sekolah menengah atas menjadi kewenangan provinsi. Selain itu, penurunan jumlah guru terjadi karena banyak guru yang pensiun.

2.3.1.1.7 Angka Kelulusan

Pengendalian mutu pendidikan di Indonesia dilakukan melalui Ujian Nasional, yaitu sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antardaerah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak berkepentingan. Angka kelulusan baik pada jenjang pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah di Kabupaten Manggarai Timur dari tahun 2014-2018 hampir 100%. Angka kelulusan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.58. di bawah ini.

Tabel 2.58
Angka Kelulusan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Manggarai Timur 2014-2018

JENJANG PENDIDIKAN	ANGKA KELULUSAN (%)				
	2014	2015	2016	2017	2018
SD/MI	100	100	100	99,51	99,90
SMP/MTs	99,86	99,54	100	99,44	99,63
SMA/SMK/MA	99,03	99,68	99,45	-	-

Sumber: SIPD Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.1.1.8 Pendidikan Luar Biasa

Pendidikan luar biasa adalah pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental. Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa, tujuan Pendidikan Luar Biasa adalah untuk membantu peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan lanjutan. Sampai saat ini hanya ada 1 (satu) lembaga Pendidikan Luar Biasa di Kabupaten Manggarai Timur. Sekolah tersebut berada di Kecamatan Borong. Sekolah tersebut didirikan pada tahun 2012 untuk memenuhi kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus. Seperti yang diperlihatkan pada Tabel 2.59, di bawah ini, jumlah siswa pendidikan luar biasa di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2018 sebanyak 63 siswa, yang terdiri atas 17 siswa berumur 7-12 tahun, 20 siswa berumur 13-15 tahun, 18 siswa berumur 16-18 tahun, dan 8 siswa berumur lebih dari 18 tahun.

Tabel 2.59
Jumlah Siswa Pendidikan Luar Biasa Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Manggarai Timur, 2018

JENJANG	< 7		7 – 12		13 – 15		16 – 18		> 18 TAHUN		TOTAL
	TAHUN		TAHUN		TAHUN		TAHUN				
	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML
Pendidikan Luar Biasa (PLB)	0	0	17	26.98	20	31.75	18	28.57	8	12.70	63

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur 2018

2.3.1.2 Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk memelihara kesehatan masyarakat agar masyarakat dapat hidup lebih lama dan produktif. Pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan pelayanan kesehatan perorangan (kuratif dan rehabilitatif) dan pelayanan kesehatan masyarakat (preventif dan promotif). Pelayanan kesehatan

dilakukan melalui fasilitas-fasilitas kesehatan maupun Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) agar mampu menjangkau semua elemen masyarakat. Karena kondisi geografis Kabupaten Manggarai Timur yang masih sulit diakses, maka cara yang ditempuh adalah melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Lebih khusus terkait peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, hal yang dilakukan adalah melalui akreditasi, yaitu standardisasi mutu pelayanan di fasilitas kesehatan.

2.3.1.2.1 Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat. Posyandu dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Tujuannya adalah untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Rasio idealnya adalah 10 Posyandu melayani 1,000 Balita.

Pada tahun 2014-2018 rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kabupaten Manggarai Timur mengalami perubahan yang cenderung menurun. Pada tahun 2014 rasionya sebesar 31,10%, menurun menjadi 21,07% pada tahun 2018. Jika dirata-ratakan, maka rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kabupaten Manggarai Timur selama tahun 2014-2018 sebesar 28,14%. Hal itu berarti bahwa dari 1,000 Balita di Kabupaten Manggarai Timur dilayani dengan 28 Posyandu. Kondisi tersebut sudah berada di atas standar ideal. Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kabupaten Manggarai Timur selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.60. di bawah ini.

Tabel 2.60
Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

URAIAN	Rasio Posyandu Per Satuan Balita				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Posyandu	553	553	559	559	566
Jumlah Balita	25,229	20,606	22,441	27,541	26.862
Rasio Posyandu Per Satuan Balita (per seribu/ per mil)	31,10	47,93	20,54	20,08	21,07

Sumber : SIPD Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.1.2.2 Rasio Prasarana Kesehatan Per Satuan Penduduk

Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Karena belum ada Rumah Sakit Umum Daerah, maka pada saat ini Puskesmas menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur. Semakin banyak jumlah

ketersediaannya, semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Manggarai Timur dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 jumlahnya sebanyak 29 unit, meningkat dari 22 unit pada tahun 2014. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2018 sebesar 10,85‰, meningkat dari 8,79‰ pada tahun 2014. Hal itu berarti dari 1,000 penduduk Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2018 dilayani dengan rata-rata 10-11 Puskesmas.

Tidak seperti jumlah Puskesmas yang terus meningkat, jumlah Puskesmas Pembantu di Kabupaten Manggarai Timur trennya menurun. Pada tahun 2014 jumlahnya sebanyak 46 unit, kemudian menurun menjadi 42 unit pada tahun 2018. Penurunan tersebut terjadi karena pada tahun 2016 ada tiga Pustu (Pustu Lebi, Wae Nenda dan Mombok) yang naik status menjadi Puskesmas, sementara 1 Pustu (yaitu, Pustu Buntal) roboh total sehingga tidak dapat digunakan sama sekali. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka rasio Puskesmas Pembantu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2018 sebesar 15,34‰, menurun dari 18,38‰ pada tahun 2014. Sementara jumlah Polindes dari tahun ke tahun di Kabupaten Manggarai Timur tidak mengalami perubahan, jumlahnya tetap 11 unit. Rasio prasarana kesehatan per 1,000 penduduk di Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.61. di bawah.

Tabel 2.61
Rasio Puskesmas, Polindes, Posyandu dan Klinik/Balai Kesehatan
Per Penduduk di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

Uraian	Rasio Puskesmas, Polindes, Posyandu dan Klinik/Balai Kesehatan Per 1,000 Penduduk di Kabupaten Manggarai Timur			
	2015	2016	2017	2018
Jumlah Puskesmas	22	25	25	29
Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk	8.79	9.93	9.48	10.85
Jumlah Puskesmas Pembantu	46	42	42	41
Rasio puskesmas pembantu	18.38	16.28	15.93	15.34
Jumlah Polindes	11	11	11	11
Rasio Polindes	4.396	4.369	4.172	4.115
Jumlah Klinik/Balai kesehatan	5	5	7	5
Rasio Klinik/Balai kesehatan	2.00	1.99	2.66	1.87
Jumlah penduduk	250,242	251,799	263,639	267,310

Sumber: SIPD Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.1.2.3

Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Manggarai Timur sedang dalam proses pembangunan. Ditargetkan dalam periode 2019-2024 RSUD Kabupaten Manggarai Timur sudah bisa dimanfaatkan.

2.3.1.2.4

Rasio Dokter dan Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Pembangunan kesehatan harus didukung dengan ketersediaan tenaga medis dan prasarana kesehatan. Tanpa ketersediaan tenaga medis, fasilitas dan prasarana kesehatan, capaian pembangunan di bidang kesehatan tidak bisa berjalan sukses. Pada tahun 2018 rasio tenaga medis (dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi) per 100.000 penduduk sebesar 7,48 atau 100.000 penduduk di Kabupaten Manggarai Timur dilayani oleh 7 orang dokter. Rasio tersebut lebih rendah dibandingkan pada tahun 2015 karena pada tahun 2015 rasionya sebesar 9,59. Secara umum ketersediaan dokter di Kabupaten Manggarai Timur masih sangat minim, padahal standarnya 62 dokter melayani 100.000 penduduk. Sementara rasio bidan terhadap 100.000 penduduk terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 rasio bidan 115,88 per 100.000 penduduk atau 115 bidan melayani 100.000 penduduk, meningkat menjadi 129,81 per 100.000 penduduk pada tahun 2018. Ketersediaan bidan di Kabupaten Manggarai Timur sudah berada di atas standar. Ketersediaan tenaga perawat di Kabupaten Manggarai Timur juga sudah berada di atas standar. Pada tahun 2018 rasio perawat per satuan penduduk 290,67 per 100.000 penduduk atau 290 perawat di Kabupaten Manggarai Timur melayani 100.000 penduduk. Tenaga kesehatan lainnya di Kabupaten Manggarai Timur belum memenuhi standar. Data lengkap tentang rasio dokter dan tenaga medis per 100.000 penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.62. di bawah ini.

Tabel 2.62
Rasio Tenaga Kesehatan Menurut Sarana Kesehatan
di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

Jenis Tenaga Kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Manggarai Timur Per 100,000 Penduduk				Standar
	2015	2016	2017	2018	
Jumlah Tenaga Medis/Dokter	24	21	11	20	
Rasio Tenaga Medis terhadap 100.000 Penduduk	9,59	8,33	4,17	7,48	62
Bidan	290	450	273	347	
Rasio Bidan terhadap 100.000 Penduduk	115,88	178,71	103,55	129,81	100
Perawat	727	791	683	777	
Rasio Perawat terhadap 100.000 Penduduk	290,51	314,13	259,06	290,67	173
Tenaga Kesehatan Lainnya	182	207	197	168	

Rasio Tenaga Kesehatan Lainnya terhadap 100.000 Penduduk	72,72	82,20	74,72	62,84	83
Jumlah Penduduk	250,242	251,799	263,639	267,310	

Sumber: SIPD Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.1.2.5 Angka kesakitan

Angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular di Kabupaten Manggarai Timur umumnya cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Namun, penyakit menular yang cenderung meningkat adalah HIV. Pada tahun 2018 jumlah kasus HIV sebanyak 20 kasus, naik dari 10 kasus pada tahun 2017, dan 3 kasus pada tahun 2017. Angka kesakitan diare pada tahun 2018 sangat tinggi, yaitu sebanyak 2,422 kasus pada tahun 2018, naik dari 270 kasus pada tahun 2017. Angka kesakitan yang paling tinggi adalah penyakit hipertensi. Pada tahun 2014 jumlah kasus hipertensi di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 17,393 kasus, dan pada tahun 2018 menurun menjadi 1,498 kasus. Angka kesakitan di Kabupaten Manggarai Timur secara detail dapat dilihat pada Tabel 2.63. di bawah ini.

Tabel 2.63
Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Tidak Menular
di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2013-2017

INDIKATOR	Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Tidak Menular				
	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Kesakitan Malaria (Annual Paracite Inciden -API) per 1.000 Penduduk	0,5 (139 kasus)	0,56 (162 kasus)	0,14 (39 kasus)	0,17 (5 kasus)	0,1
Prevalensi Tuberukulosis per 100.000 Penduduk	0,53 (151 kasus)	0,60 (174 kasus)	0,49 (138 kasus)	0,16 (46 kasus)	0,63 (179 kasus)
Prevalensi HIV (%) pada Populasi Penduduk Dewasa Usia (15-49 Tahun)	0,001 (3 kasus)	0,002 (5 kasus)	0,002 (4 kasus)	10 kasus	20 kasus
Angka Kesakitan Diare per 1.000 Penduduk	0,75 (214 kasus)	0,74 (214 kasus)	0,77 (214 kasus)	0,96 (270 kasus)	8,54 (2422 kasus)
Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk	8,5 (24 kasus)	4,2 (12 kasus)	10,8 (30 kasus)	0	0,21 (62 kasus)
Prevalensi Kusta Per 1.000 Pddk	0	0	0,014 (4 kasus)	0	0,003 (1 kasus)
Angka kesakitan Filariasis per 1.000 pddk	0,007 (2 kasus)	0	0,92 (256 kasus)	0	0
Persentase penduduk dengan hipertensi	51,44 (17.393 kasus)	1,64 (3.402 kasus)	(2.294 kasus)	(2.909 kasus)	(1.498 Kasus)
Persentase penduduk obesitas	36,76 (25 kasus)		0,76 (53 kasus)	0,17 (178 kasus)	0,007 (18 kasus)
Persentase IVA positif pada perempuan usia 30-50 tahun	6,25 (2 kasus)		15,41 (110 kasus)	0,68 (7 kasus)	0,41 (6 kasus)

Sumber: SIPD Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.1.3.1 Tingkat Kemantapan Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Gambar 2.6
Peta Jaringan Jalan di Kabupaten Manggarai Timur



Jalan sebagai penghubung antarwilayah di Kabupaten Manggarai Timur perlu diketahui kondisinya untuk mengidentifikasi kelancaran mobilisasi barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang dalam rangka peningkatan kegiatan perekonomian. Berdasarkan kewenangan pengelolaan, sampai dengan tahun 2018 status jalan di Kabupaten Manggarai Timur terdiri atas: Jalan Strategis Nasional (kewenangan Pemerintah Pusat), Jalan Provinsi (kewenangan Pemerintah Provinsi NTT), dan Jalan Kabupaten (kewenangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur). Pembagian status kewenangan jalan seperti ini memang menimbulkan sedikit kerancuan dalam pemahaman ketika kondisi jalan mengalami kerusakan. Total panjang jalan di Manggarai Timur adalah 1,484.24 km yang terbagi atas: jalan Strategis Nasional 85.95 km, jalan Provinsi 113 km, dan jalan Kabupaten 1281.29 km. Jika dicermati panjang jalan Kabupaten Manggarai Timur, maka dibutuhkan investasi dan alokasi dana yang sangat besar agar kemantapan jalan mencapai harapan pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, saat ini sedang disusun regulasi yang bisa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola jalan yang menjadi kewenangannya, supaya pembiayaan pembangunan dan rehabilitasi jalan yang menjadi kewenangan desa dapat dialokasikan dari Dana Desa.

Tabel 2.64
Panjang Jalan Kabupaten Manggarai Timur Berdasarkan Kewenangan Sampai Tahun 2018

No	Identitas Jalan	Kewenangan	Panjang (km)	Regulasi
1.	Strategis Nasional	Pusat	85,95	SK
2.	Strategis Provinsi	Provinsi	113,00	SK Gubernur Provinsi NTT Nomor 256/KEP/HK/2017
3.	Jalan Kabupaten	Kabupaten	1281,29	SK Bupati Manggarai Timur Nomor HK/89.A/2013
4.	Jalan Desa	Desa	N/A	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Timur, 2018

Sampai dengan tahun 2017-2018 kondisi jalan Kabupaten Manggarai Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 2.65
Kondisi Jalan Kabupaten Manggarai Timur Sampai Tahun 2018

Tahun	Kondisi Jalan							
	Baik (km)	%	Sedang (km)	%	Rusak Ringan (km)	%	Rusak Berat (km)	%
2017	469,429	36,64	237,601	18,54	280,194	21,87	294,067	22,95
2018	490,548	38,29	220,132	17,18	278,371	21,73	292,237	22,81

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Timur, 2018

Peningkatan kualitas jalan dilakukan melalui program pembangunan dan rehabilitasi jalan yang dilakukan tiap tahun. Dalam lima tahun terakhir (2014-2018) panjang jalan yang dibangun dan direhabilitasi tiap tahunnya dapat dilihat pada Tabel 2.66. di bawah ini.

Tabel 2.66
Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

No	Uraian	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
1.	HRS	Km	0	4,18	19,27	6,723	0
2.	Asphalt/Penetrasi/Macadam	Km	463,080	580,360	582,691	590,869	634,89
3.	Perkerasan rigid/beton	Km	0	0	0	0	0
4.	Telford/kerikil	Km	513,740	384,196	381,865	374,818	351,40
5.	Tanah/Belum Tembus	Km	304,470	316,735	316,735	315,604	316,17

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.1.3.2 Jaringan Irigasi Kabupaten

Sebagai kabupaten agraris, sektor pertanian memiliki kontribusi paling besar terhadap pertumbuhan PDRB Manggarai Timur. Oleh karena itu, pembangunan sektor pertanian tentu memperoleh perhatian yang sangat serius. Jaringan irigasi sebagai salah

satu pendukung utama dalam pembangunan sektor pertanian tentu mendapat perhatian yang cukup besar. Berdasarkan kewenangan pengurusannya, daerah Irigasi di Kabupaten Manggarai Timur terdiri atas tiga, yaitu kewenangan Pusat (DI Wae Beleng, DI Wae Dingin dan DI Wae Musur) dengan total luas DI sebesar 10.407 Ha; kewenangan Provinsi NTT (DI Wae Mokol dan DI Wae Rana) dengan total luas DI sebesar 2.029 Ha; dan kewenangan Kabupaten Manggarai Timur (sebanyak 335 DI) dengan total luas DI sebesar 14.934 Ha. Total luas DI di Kabupaten Manggarai Timur sebesar 27.370 Ha, dan luas areal tanamnya sebesar 21.689 Ha sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.67. di bawah ini.

Tabel 2.67
Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kabupaten Manggarai Timur
Tahun 2014-2018

Jumlah Daerah Irigasi (DI)	Luas Daerah Irigasi (DI) (Ha)	Luas Areal Tanam (Ha)
Kewenangan Pusat (3 Daerah Irigasi)	10,407	
1.Wae Beleng	3,000	
2. Wae Dingin	4,016	
3. Wae Musur	3,391	
Kewenangan Propinsi (2 Daerah Irigasi)	2,029	
1. Wae Mokol	1,007	
2. Wae Rana	1,022	
Kewenangan Kabupaten	14,934	
335 Daerah Irigasi	14,934	
Total	27,370	21,689

Sumber: Dinas PUPR dan Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur, 2018

Daerah Irigasi di Kabupaten Manggarai Timur, baik DI yang menjadi kewenangan Pusat, Provinsi NTT, maupun kewenangan Kabupaten Manggarai Timur dimanfaatkan untuk mengairi areal tanam di Kabupaten Manggarai Timur. Luas areal tanam di Kabupaten Manggarai Timur dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Hal ini terjadi karena faktor iklim yang tidak menentu dari tahun ke tahun, yang menyebabkan kondisi DI mengalami penurunan debit air. Selain itu, fluktuatifnya luas areal tanam dipengaruhi juga oleh kondisi jaringan irigasi yang rusak dan juga karena pengelolaan air yang tidak berjalan dengan baik. Luas areal tanam di Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.68. di bawah ini.

Tabel 2.68
Luas Arel Tanam di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

Jumlah Daerah Irigasi	Luas Total Daerah Irigasi	Luas Areal Tanam TA.2014	Luas Areal Tanam TA.2015	Luas Areal Tanam TA.2016	Luas Areal Tanam TA.2017	Luas Areal Tanam TA.2018
340.0	27,370.0	21,960.0	17,889.0	23,795.0	21,127.0	21,689.0
		80.2	65.4	86.9	77.2	79.2

Sumber: Dinas PUPR dan Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.1.3.3

Sumber Air Minum Rumah Tangga

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Manggarai Timur memanfaatkan air dari berbagai sumber. Jika dilihat dari sumber air minum rumah tangga, sampai dengan tahun 2017 sumber air utama masyarakat Manggarai Timur adalah Mata Air Terlindungi (53,98 persen) dan Sumur Mata Air yang tidak Terlindungi (31,09 persen), serta Sumur Terlindungi (5,08 persen). Sementara layanan air ledeng sebesar 2,25 persen diikuti dengan sumber dari Sumur Bor/pompa 2,20 persen, sedangkan sumber dari Air Kemasan sebesar 0,27 persen.

Tabel 2.69.
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017

No	Sumber Air Minum	Persentase (2017)
1.	Air Kemasan/Isi Ulang	0,27
2.	Ledeng	2,25
3.	Sumur Bor/Pompa	2,20
4.	Sumur Terlindungi	5,08
5.	Mata Air Terlindungi	53,98
6.	Sumur/Mata Air Tidak Terlindungi	31,09
7.	Sumber Lainnya	5,13

Sumber: Manggarai Timur Dalam Angka, 2018

Mengingat pentingnya air bersih dalam kehidupan manusia, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dari tahun ke tahun berupaya menyediakan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya bagi masyarakat perdesaan. Pembangunan jaringan air bersih di perdesaan dalam lima tahun terakhir (2014-2018) ditunjukkan dalam Tabel 2.70. di bawah ini.

Tabel 2.70.
Pembangunan Sarana/Prasarana Air Bersih Perdesaan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pembangunan Sarana/Prasarana Air Bersih Perdesaan (RT)	2,850	12,860	14.269	15,988	16.405

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.1.3.4

Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak

Rumah tangga dengan sanitasi layak adalah rumah tangga dengan fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain. Perhatian Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terhadap pembangunan sanitasi sangat besar karena didasari oleh kesadaran bahwa layanan air minum yang berkualitas buruk dan sistem yang kurang memadai pembuangan air limbah dan sampahnya menimbulkan dampak buruk pada lingkungan dan menimbulkan endemik penyakit di rumah tangga.

Sebagaimana kabupaten yang berkembang lainnya, Kabupaten Manggarai Timur pada saat ini juga menghadapi masalah di bidang sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat. Sejak diterapkan otonomi daerah pada Januari 2001, masalah sanitasi bukan lagi menjadi urusan Pemerintah Pusat, melainkan menjadi urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai UU No. 32/2004 tentang Otonomi Daerah. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih banyak pemerintah kabupaten/kota yang belum atau kurang mampu mengurus dan memecahkan masalah di bidang sanitasi dan higiene. Seringkali bidang sanitasi dan higiene lebih merupakan isu pinggiran (*marginal*) yang tidak memperoleh prioritas dalam pembangunan. Pembangunan sanitasi kemudian menjelma menjadi masalah yang relatif kompleks. Kompleksitas masalah yang dihadapi bukan hanya menyangkut banyaknya variabel yang berpengaruh terhadap kinerja dan keberlanjutan pembangunan sanitasi dan higiene, tetapi juga adanya perbedaan masalah, bobot, serta cara penanganan antara satu daerah dengan lainnya, sehingga sangat sulit dan tidak relevan untuk membuat sebuah model yang sama untuk diterapkan di semua kabupaten/kota. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur telah membangun sebanyak 2.793 MCK dan Instalasi Air Limbah seperti yang terlihat pada Tabel 2.71. di bawah ini. Jumlah pembangunan yang dilakukan dalam kurun waktu lima tahun ini menunjukkan peningkatan yang sangat besar dibandingkan dengan target yang ditetapkan, yakni sebanyak 55 unit MCK dan Instalasi Air Limbah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memang serius dalam menangani masalah sanitasi.

Tabel 2.71

Pembangunan MCK dan Instalasi Air Limbah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pembangunan MCK dan Instalasi Air Limbah	12	15	10	237	2.546

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Timur, 2018

Pada tahun 2015 rumah tangga dengan sanitasi layak sebesar 23,4%. Jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi sebesar 45,31% (2017) dan rata-rata nasional

sebesar 67,89%, maka tentunya masih berada jauh di bawah rata-rata baik provinsi maupun nasional.

2.3.1.4

Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Pencapaian agenda prioritas nasional dan rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyediaan perumahan mengarahkan peran dan partisipasi aktif Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah sangat penting. Peran tersebut meliputi pendataan, perencanaan, dan pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, perlu dioptimalkan. Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur perlu memberikan dukungan dalam bentuk kesiapan sarana dan prasarana serta pembebasan tanah bagi pembangunan perumahan. Dukungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur tersebut perlu ditingkatkan dalam kerangka sinergi pusat dan daerah.

2.3.1.4.1

Rumah Layak Huni

Penyediaan perumahan layak huni bagi masyarakat kurang mampu merupakan agenda prioritas, baik di tingkat nasional, maupun daerah. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur berusaha agar masyarakat kurang mampu bisa memiliki rumah layak huni melalui berbagai program dan kebijakan serta pembiayaan di sektor perumahan dan permukiman. Perhatian besar Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terhadap perumahan yang layak bagi masyarakat kurang mampu dimulai dengan melakukan reorganisasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2016 yang menempatkan Dinas Perumahan sebagai salah satu OPD tersendiri yang bertugas untuk mengurus masalah perumahan bagi masyarakat di Manggarai Timur. Dalam dua tahun terakhir (2017-2018) pembangunan pada sektor perumahan menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Dari 56,247 unit rumah pada tahun 2017 terdapat 75,32% rumah layak huni atau sebanyak 42,363 unit rumah layak huni. Rasio tersebut meningkat pada tahun 2018, yaitu dari 56,247 unit rumah sebanyak 76,60% rumah layak huni atau sebanyak 43,088 unit rumah layak huni. Peningkatan rasio ini menggambarkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur untuk menyediakan perumahan layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu di Manggarai Timur.

Tabel 2.72
Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Manggarai Timur 2017-2018

Uraian	Tahun	
	2017	2018
Jumlah Rumah	56,247	56,247

Jumlah Rumah Layak Huni	42,363	43,088
Rasio Rumah Layak Huni	75.32%	76.60%

Sumber: SIPD Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.1.4.2 Rumah Tidak Layak Huni

Seiring dengan meningkatnya Rasio Rumah Layak Huni, sebaliknya Rasio Rumah Tidak Layak Huni perlahan menurun dari 24,68% pada tahun 2017 menjadi 23,40% pada tahun 2018. Dalam lima tahun ke depan diharapkan Rasio Rumah Tidak Layak Huni menurun secara lebih signifikan melalui perencanaan program dan kegiatan yang menjawab kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.73
Rasio Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Manggarai Timur

Uraian	Tahun	
	2017	2018
Jumlah Rumah	56,247	56,247
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	13,884	13,159
Rasio Rumah Tidak Layak Huni	24.68%	23.40%

Sumber: SIPD Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Prosentase Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada Tabel 2.74. di bawah ini. Dari tabel tersebut persentase cakupan petugas perlindungan masyarakat mengalami peningkatan dimana pada tahun 2014 sebesar 3,44 % dan meningkat sebesar 3,72 % pada tahun 2018, Tingkatan penyelesaian pelanggaran K3 dan persentase penegakan perda dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mencapai 100%. Cakupan pelayanan bencana kebakaran pada tahun 2014-2016 belum dijalankan dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 14,44% dari 0,02 % tahun 2017.

Tabel 2.74.
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

Indikator	Capaian				
	2014	2015	2016	2017	2018
Cakupan petugas perlindungan masyarakat	3,44%	3,44%	3,67%	3,72%	3,72%
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	N/A	N/A	N/A	0,02%	13,44%
Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time rate) daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

layanan wilayah management kebakaran					
Persentase Penegakan Perda	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.1.6 Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti anak terlantar, anak jalanan, anak cacat, anak nakal, wanita rawan sosial-ekonomi, penyandang cacat dan komunitas adat terpencil. Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Yang dimaksudkan dengan PMKS adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan oleh karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial ada 26 jenis PMKS, yaitu anak Balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan Kedisabilitas (ADK), anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia telantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP), orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban Penyalahgunaan NAPZA, korban trafficking, korban tindak kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS), korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis, dan komunitas adat terpencil.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2014-2018) ada beberapa jenis PMKS yang cukup menonjol di Kabupaten Manggarai Timur antara lain anak Balita terlantar, Lansia terlantar, wanita rawan sosial-ekonomi, penyandang cacat, penyandang HIV/AIDS, keluarga fakir miskin, korban bencana alam, keluarga bermasalah sosial-psikologis, dan anak berhadapan dengan hukum. Tentang PMKS di Kabupaten Manggarai Timur selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.75. di bawah ini.

Tabel 2.75
Indikator Sosial Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

No	Jenis PMKS	Jumlah PMKS (Jiwa)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Anak Balita Terlantar	-	-	323	323	323
2	Korban Tindak Kekerasan	-	-	4	5	-
3	Lansia Terlantar	-	-	-	-	1.135
4	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	-	-	-	-	125
5	Penyandang Cacat	-	2.496	2.496	2.496	2.496
6	Penyandang HIV/AIDS	-	32	32	32	32
7	Keluarga Fakir miskin	-	16.438	16.438	16.438	16.438
8	Korban Bencana Alam	4.415	67.384	7.492	45	-
9	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	-	-	40	20	-
10	Anak Berhadapan dengan Hukum	-	-	-	3	5

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.2

Urusan Pelayanan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1

Tenaga Kerja

Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri, maupun untuk masyarakat. Di Indonesia batas usia kerja yang berlaku ialah berumur 15 – 64 tahun. Menurut pengertian tersebut, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Sedangkan bukan tenaga kerja ialah penduduk yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, bukan tenaga kerja ialah penduduk di luar usia tenaga kerja, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun (0-14 tahun) dan berusia di atas 64 tahun (>65 tahun). Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.

Tabel 2.76
Jumlah Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Manggarai Timur
Tahun 2015-2018

AK Menurut Jenis Kelamin	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%
	2015		2016		2017		2018	
Laki - Laki	85,646	50.34	88,137	50.57	90,890	50.31	93,158	49.90
Perempuan	84,502	49.66	86,140	49.43	89,785	49.69	93,516	50.10
L + P	170,148	100.00	174,277	100.00	180,675	100.00	186,674	100.00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur, 2018

Tabel 2.77
Jumlah Bukan Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014-2018

BAK Menurut Jenis Kelamin	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%
	2015		2016		2017		2018	
Laki - Laki	41,429	51.73	40,580	52.35	43,218	52.09	42,171	52.30
Perempuan	38,665	48.27	36,942	47.65	39,746	47.91	38,465	47.70
L + P	80,094	100.00	77,522	100.00	82,964	100.00	80,636	100.00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.2.1.1 Angkatan Kerja (AK)

Angkatan kerja atau *labour force* adalah jumlah penduduk dengan usia produktif, yaitu penduduk yang berumur 15-64 tahun yang sedang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Manggarai Timur dari tahun ke tahun terus meningkat seperti yang diperlihatkan pada Tabel 2.78. di bawah ini. Pada tahun 2015 jumlah angkatan kerja sebanyak 122,713 jiwa yang terdiri atas 68,716 jiwa laki-laki dan 53,997 jiwa perempuan. Jumlah angkatan kerja tersebut meningkat menjadi 152,029 pada tahun 2017, yang terdiri atas 76,903 jiwa laki-laki dan 75,126 perempuan. Angkatan kerja tersebut pada tahun 2015 terdiri atas 120,033 jiwa yang bekerja dan sebanyak 2,680 jiwa yang pengangguran terbuka. Pada tahun 2017 angkatan kerja yang bekerja sebanyak 151,273 jiwa, dan pengangguran terbuka sebanyak 756 jiwa.

Tabel 2.78
Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Manggarai Timur
Tahun 2015-2018

Uraian	Manggarai Timur					
	2015			2017		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	68,716	53,997	122,713	76,903	75,126	152,029
□ Bekerja	66,771	53,262	120,033	76,348	74,925	151,273

□ Pengangguran Terbuka	1,945	735	2,680	555	201	756

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.2.1.2 Bukan Angkatan Kerja (BAK)

Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang tidak bersedia bekerja atau belum bekerja. Penduduk bukan angkatan kerja terdiri atas penduduk yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan kategori lainnya. Jumlah penduduk bukan angkatan kerja di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2015 sebanyak 46,963 jiwa, yang terdiri atas 13,793 jiwa laki-laki dan 33,170 jiwa perempuan. Pada tahun 2017 jumlah penduduk bukan angkatan kerja menurun menjadi 23,854 jiwa yang terdiri atas 8,755 jiwa laki-laki dan 15,099 jiwa perempuan. Sebagian besar penduduk bukan angkatan kerja ini adalah pengurus rumah tangga, sedang bersekolah dan kategori lainnya. Jumlah penduduk bukan angkatan kerja Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.79. di bawah ini.

Tabel 2.79
Bukan Angkatan Kerja (BAK) menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

Uraian	Manggarai Timur					
	2015			2017		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Bukan Angkatan Kerja	13,793	33,170	46,963	8,755	15,099	23,854
Sekolah	-	-		4,599	5,660	
Mengurus Rumah Tangga	-	-		2,544	7,288	
Lainnya	-	-		1,612	2,151	

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.2.1.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja, dihitung dari banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia 15 tahun ke atas. Angkatan kerja sendiri adalah penduduk usia kerja berumur 15-64 tahun yang melakukan kegiatan bekerja secara aktif atau sedang mencari pekerjaan. TPAK adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Rasio ini menggambarkan partisipasi angkatan kerja pada tiap kelompok umur dan jenis kelamin. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Manggarai Timur disajikan pada Tabel 2.80. di bawah ini.

Tabel 2.80
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

Uraian	Manggarai Timur					
	2015			2017		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	68,716	53,997	122,713	76,903	75,126	152,029
• Bekerja	66,771	53,262	120,033	76,348	74,925	151,273
• Pengangguran Terbuka	1,945	735	2,680	555	201	756
Jumlah Tenaga Kerja/Penduduk Usia Kerja	85,646	84,502	170,148	90,890	89,785	180,675
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	80.23%	63.90%	72.12%	84.61%	83.67%	84.15%

Sumber: BPS dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur, 2018 (Data Diolah)

Dari Tabel 2.80. di atas dapat dilihat bahwa TPAK di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2015 sebesar 72,12%. TPAK laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, yaitu berturut-turut 80,23% dan 63,90%. TPAK di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2017 meningkat menjadi 84,15%, yang terdiri atas 84,61% laki-laki dan 83,67% perempuan.

2.3.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (berumur 15 – 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Manggarai Timur cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017, TPT sebesar 0,50%, menurun dari 2,18% pada tahun 2015. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Manggarai Timur selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.81. di bawah ini.

Tabel 2.81
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

Uraian	Kabupaten Manggarai Timur					
	2015			2017		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	68,716	53,997	122,713	76,903	75,126	152,029
• Pengangguran Terbuka	1,945	735	2,680	555	201	756
• Tingkat Pengangguran Terbuka	2.83%	1.36%	2.18%	0.72%	0.27%	0.50%

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.2.1.5

Jumlah Pekerja Migran Asal Manggarai Timur

Pekerja migran adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Pekerja migran Kabupaten Manggarai Timur tersebar di Malaysia dan Singapura. Pada tahun 2017 sebanyak 62 pekerja migran Kabupaten Manggarai Timur bekerja di Malaysia, dan 1 orang bekerja di Singapura. Jumlah tersebut pada tahun 2018 kemudian menurun menjadi 34 orang dan semuanya bekerja di Malaysia. Sebaran pekerja migran Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.82. di bawah ini.

Tabel 2.82
Sebaran Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Manggarai Timur
Berdasarkan Negara Tujuan Tahun 2017 – 2018

No.	Negara Tujuan	2017	2018
1.	Malaysia	62	34
2.	Singapura	1	-
Total		63	34

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.2.2

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.3.2.2.1

Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah upaya pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial. Posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Ada dua jenis pemahaman tentang pemberdayaan perempuan. *Pertama*, sebagai refleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan. *Kedua*, sebagai proses pelibatan diri individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran dan pengorganisasian kolektif, sehingga mereka dapat berpartisipasi. Berpangkal pada kedua pemahaman tersebut dalam tataran kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu cara strategis untuk mengaktualisasikan dan meningkatkan potensi dan peran perempuan, baik pada domain publik, maupun pada domain domestik.

Capaian pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dapat dilihat antara lain melalui bidang ketenagakerjaan, yaitu tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan, proporsi perempuan di lembaga-lembaga publik (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Di bidang ketenagakerjaan pada tahun 2015, dari 170,148 jiwa penduduk usia kerja, sebanyak 84,502 perempuan dan dari 122,713 Angkatan Kerja, sebanyak 53,997

perempuan. Hal itu berarti tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan sebesar 63,90%, lebih kecil dibandingkan TPAK laki-laki (80,23%). Pada tahun 2017 TPAK perempuan mengalami peningkatan menjadi 83,67%, tetapi masih lebih kecil dibandingkan TPAK laki-laki (84,61%). Dari 180,675 penduduk usia kerja, sebanyak 89,785 perempuan. Sementara dari 152,099 Angkatan Kerja pada tahun 2017, angkatan kerja perempuan sebanyak 75,126 jiwa. Proporsi perempuan di Kabupaten Manggarai Timur yang berada di lembaga publik masih lebih kecil dibandingkan laki-laki. Dari 30 orang anggota DPRD Periode 2014-2019, hanya 1 orang perempuan. Di lembaga eksekutif (pemerintahan), pada tahun 2014 jumlah perempuan yang bekerja di lembaga pemerintahan sebagai Pegawai Negeri Sipil berjumlah 1,460 orang, sedangkan laki-laki berjumlah 2,560 orang. Pada tahun 2018 jumlah PNS perempuan meningkat menjadi 1,557 orang, namun masih lebih kecil dibandingkan jumlah PNS laki-laki sebanyak 2,324 orang. Jumlah perempuan di Kabupaten Manggarai Timur yang bekerja di lembaga publik dapat dilihat pada Tabel 2.83. di bawah ini.

Tabel 2.83
Proporsi PNS Perempuan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

No	PNS	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Laki-laki	2,560	2,775	2,016	N/A	2,324
2	Perempuan	1,460	1,622	1,640	N/A	1,557
Proporsi PNS Laki-laki		63.68%	63.11%	46.27%	N/A	59.88%
Proporsi PNS Perempuan		36.32%	36.89%	37.64%	N/A	40.12%
Jumlah		4,020	4,397	4,357	N/A	3,881

Sumber: Dinas P2KBP3A Kabupaten Manggarai Timur, 2018

Capaian pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dapat pula dilihat melalui jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan memiliki beberapa bentuk, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran dan trafficking. Kelima bentuk kekerasan tersebut terjadi di Kabupaten Manggarai Timur selama tahun 2014-2018. Kasus kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kasus kekerasan fisik dan seksual. Pada tahun 2014 kasus kekerasan fisik terhadap perempuan sebanyak 23 kasus, meningkat menjadi 27 kasus pada tahun 2015, tetapi pada tahun 2018 menurun menjadi 5 kasus. Sementara kasus kekerasan seksual pada tahun 2014 sebanyak 16 kasus, meningkat menjadi 21 kasus pada tahun 2016, dan pada tahun 2018 menurun menjadi 4 kasus. Kasus kekerasan terhadap perempuan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.84. di bawah ini.

Tabel 2.84
Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Dilaporkan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

Jenis Kasus Kekerasan	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Manggarai Timur				
	2014	2015	2016	2017	2018
Fisik	23	27	8	9	5

Psikis	2	1			
Seksual	16	11	21	5	4
Penelantaran	1	6	1	3	1
Trafficking	2				

Sumber: Dinas P2KBP3A Kabupaten Manggarai Timur, 2018

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Manggarai Timur relatif kecil. Meskipun demikian, hal itu belum dianggap sebagai gambaran riil kondisi di Kabupaten Manggarai Timur karena masih banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan.

2.3.2.2.2 Perlindungan Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa. Tumbuh kembang anak sejak dini merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara. Dalam proses tumbuh kembang anak, hak-hak anak mesti dipenuhi secara maksimal. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibentuk untuk menjamin hak-hak anak, agar anak dapat hidup, bertumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabatnya, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 di atas menyebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: "diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya". Anak juga berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11). Ideal tersebut belum sepenuhnya terwujud di Kabupaten Manggarai Timur karena masih terjadi kasus kekerasan terhadap anak-anak. Kasus kekerasan yang paling banyak adalah kasus kekerasan seksual. Pada tahun 2014 kasus kekerasan seksual terhadap anak ada 2 kasus, meningkat menjadi 10 kasus pada tahun 2016. Pada tahun 2018 kasus kekerasan terhadap anak menurun menjadi 1 kasus. Diharapkan ke depannya tidak terjadi laku kasus kekerasan apa pun terhadap anak di Kabupaten Manggarai Timur. Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.85. di bawah ini.

Tabel 2.85
Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Dilaporkan
di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

No	Jenis Kasus Kekerasan	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Manggarai Timur				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Fisik					2
2	Psikis					

3	Seksual	2		10	3	1
4	Penelantaran					
5	Trafficking					

Sumber: Dinas P2KBP3A Kabupaten Manggarai Timur, 2018

Sama seperti hal kasus kekerasan terhadap perempuan, kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Manggarai Timur relatif kecil. Data yang tersedia merupakan kasus yang dilaporkan, sementara kenyataannya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Manggarai Timur dianggap cukup tinggi.

2.3.2.3 Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Ketahanan pangan merupakan ukuran kelentingan terhadap gangguan pada masa depan atau ketiadaan suplai pangan penting akibat berbagai faktor seperti kekeringan, gangguan perkapalan, kelangkaan bahan bakar, ketidakstabilan ekonomi, peperangan, dan sebagainya. Penilaian ketahanan pangan dibagi menjadi keswadayaan atau keswasembadaan perorangan (*self-sufficiency*) dan ketergantungan eksternal yang membagi serangkaian faktor risiko. Perlu disadari bahwa keswadayaan perorangan yang tinggi tanpa perekonomian yang memadai akan membuat suatu negara memiliki kerawanan produksi.

World Health Organization (WHO) mendefinisikan tiga komponen utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan memiliki sumber daya, secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Pemanfaatan pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional. FAO menambahkan komponen keempat, yaitu kestabilan dari ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu yang panjang.

Perlu diakui bahwa pemenuhan pangan sebagai hak dasar masih merupakan salah satu permasalahan mendasar di Kabupaten Manggarai Timur. Permasalahan tersebut terlihat dari pertumbuhan permintaan pangan yang relatif lebih cepat daripada pertumbuhan penyediaan. Permintaan yang meningkat merupakan resultante dari peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat, dan perubahan selera. Data pada Tabel 2.82. di bawah ini memperlihatkan bahwa ketersediaan pangan utama di Kabupaten Manggarai Timur masih rawan kendati terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 ketersediaan pangan di Kabupaten

Manggarai Timur sebesar 103%, yang berarti cadangan pangan di Kabupaten Manggarai Timur hanya 3% atau 3 bulan setelah dikonsumsi selama 12 bulan (1 tahun). Jika terjadi gagal panen atau bencana alam, maka penduduk Kabupaten Manggarai Timur akan menderita kelaparan karena hanya memiliki cadangan pangan 3%. Pada tahun 2018 ketersediaan pangan di Kabupaten Manggarai Timur meningkat menjadi 158% dan itu berarti cadangan pangan tersedia untuk 6 bulan. Jumlah cadangan pangan di Kabupaten Manggarai Timur selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.86. di bawah ini.

Tabel 2.86
Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	130%	130%	130%	130%	130%
Pengutan Cadangan Pangan	48,4%	48,21%	73%	81%	36%
Ketersediaan Informasi, Pasokan Harga dan Akses Pangan di Daerah	78%	84,24%	84%	93,58%	91,85%
Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	88%	87,86%	84%	97%	96,15%
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86%	73,80%	79,80%	72,10%	76,50%
Pengawasan dan Pembinaan Pangan	60%	89%	79,18%	97,89%	100%
Penanganan Daerah Rawan Pangan	35%	50%	75%	100%	100%
Ketersediaan Pangan Utama	103%	102%	118%	137%	158%

Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.2.4 Pertanahan

Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Timur tersebar hampir di setiap kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur. Data di bawah ini menunjukkan jumlah tanah Pemerintah Daerah Manggarai Timur yang sudah disertifikat.

Tabel 2.87
Jumlah Tanah Pemda Kabupaten Manggarai Timur yang Disertifikat Tahun 2017-2018

No	Kecamatan	2017		2018	
		Jumlah Bidang	Luas Bidang (M ²)	Jumlah Bidang	Luas Bidang (M ²)
1	Borong	6	318,54	17	68,799
2	Rana Mese	5	47,397	12	63,287
3	Poco Ranaka	1	6,715	N/A	N/A

4	Poco Ranaka Timur	6	43,354	8	14,704
5	Lemba Leda			5	21,795
6	Sambi Rampas			5	47,234
7	Elar				
8	Elar Selatan				
9	Kota Komba	5	67,781	25	215,732
Total		23	483,087	72	431,551

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan meliputi aspek pengendalian pencemaran lingkungan air, udara, dan tanah. Kualitas lingkungan hidup idealnya ditunjukkan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan hutan. Namun, Kabupaten Manggarai Timur belum mampu melakukan pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup karena keterbatasan sumber daya. Di bawah ini adalah data yang menggambarkan kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai Timur.

2.3.2.5.1 Kondisi Tutupan Lahan

Hutan dan lahan merupakan salah satu media lingkungan yang sedang bermasalah di Kabupaten Manggarai Timur. Permasalahannya berupa deforestasi, kebakaran, dan lahan kritis. Kondisi tutupan lahan di Kabupaten Manggarai Timur secara detail dapat dilihat pada Tabel 2.88. di bawah ini.

Tabel 2.88
Lahan Kritis dalam Kawasan dan Luar Kawasan Hutan Kabupaten Manggarai Timur 2018

No	Kondisi	s.d. 2018 (Ha)	Persentase (%)
A	DALAM KAWASAN HUTAN		
	Sangat Kritis	74	0.10
	Kritis	3.406	4.54
	Agak Kritis	33.406	44.53
	Potensial Kritis	35.000	46.66
	Tidak Kritis	3.127	4.17
	Jumlah	75.013	
B	LUAR KAWASAN HUTAN		
	Sangat Kritis	672	0.39
	Kritis	76.007	43.58
	Agak Kritis	73.683	42.22
	Potensial Kritis	7.403	4.24

	Tidak Kritis	16.677	9.56
	Jumlah	174.442	

Sumber: UPT Dinas Kehutanan Provinsi NTT, 2018

2.3.2.5.2.

Kualitas Air

Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya. Kualitas air juga menunjukkan ukuran kondisi air relatif terhadap kebutuhan biota air dan manusia. Kualitas air seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum. Salah satu sumber air baku bagi penduduk Manggarai Timur diperoleh dari sungai. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan upaya pemantauan terhadap kualitas air sungai yang ada. Dalam lima tahun terakhir Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Manggarai Timur. Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur, jumlah sungai penyedia air baku masyarakat yang telah dilakukan pengukuran Indeks Kualitasnya selama lima tahun (2014-2018) sebanyak 3 sungai.

2.3.2.6

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Tabel 2.90. di bawah ini memperlihatkan Rasio Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk di Kabupaten Manggarai Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 rasionya sebesar 0,92%, naik dari 0,62% pada tahun 2014. Hal itu berarti dari 100 orang penduduk yang berusia >17 tahun atau sudah menikah terdapat 92 orang yang sudah memiliki KTP. Rasio Bayi berakte kelahiran mengalami penurunan dari 0,99% pada tahun 2017 menjadi 0,51% pada tahun 2018. Hal itu berarti pada tahun 2018 dari 100 orang bayi hanya 51 orang yang sudah memiliki Akta Kelahiran. Rasio yang paling rendah adalah rasio pasangan yang berakta nikah. Pada tahun 2018 rasio pasangan yang memiliki Akta Nikah hanya sebesar 0,09% artinya dari 100 pasangan yang menikah, hanya 9 pasangan yang sudah memiliki Akta Nikah. Ketersediaan data base kependudukan skala Kabupaten Manggarai Timur selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.89. di bawah ini.

Tabel 2.89
Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Kabupaten 2014-2018

Indikator	Capaian				
	2014	2015	2016	2017	2018
Rasio Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk	0,62	0,67	0,76	0,78	0,92
Rasio Bayi berakte kelahiran	0,04	0,58	0,85	0,99	0,51
Rasio pasangan berakta nikah	0,020	0,014	0,016	0,025	0,09
Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	62%	74%	76%	78%	92%
Cakupan penerbitan akta kelahiran	22%	24%	85%	99,48 %	53,36 %

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan suatu strategi untuk membangun masyarakat dan desa supaya menjadi mandiri, berswadaya dalam menggali dan memanfaatkan semua potensi yang ada di desa demi kesejahteraan masyarakat dan desa itu sendiri. Pemberdayaan tidak hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata sosial yang ada dalam masyarakat. Melalui strategi pemberdayaan ini, partisipasi masyarakat dan desa dalam melaksanakan pembangunan akan semakin meningkat.

2.3.2.7.1 Persentase PKK Aktif

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. PKK memiliki 10 program pokok yang terkait erat dengan kebutuhan dasar manusia. Kesepuluh program tersebut adalah: penghayatan dan pengamalan pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tatalaksana rumah tangga, pendidikan dan ketrampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Jumlah PKK di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018 sebanyak 186 dan semuanya aktif (100%). Dari 186 PKK tersebut sebanyak 159 PKK Desa, 17 PKK Kelurahan, 9 PKK Kecamatan, dan 1 PKK Kabupaten. Persentase PKK aktif di Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.90. di bawah ini.

Tabel 2.90
Persentase PKK Aktif di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah PKK	186	186	186	186	186
Jumlah PKK Aktif	186	186	186	186	186
Persentase PKK Aktif	100	100	100	100	100

Sumber: DPMD Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.2.7.2 Persentase Posyandu Aktif

Menurut Departemen Kesehatan RI Tahun 2016, Posyandu merupakan wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing oleh petugas kesehatan terkait. Posyandu bertujuan: (1) untuk menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas; (2) membudayakan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKBS); (3) meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera; dan (4) Berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera. Di Kabupaten Manggarai Timur terdapat 526 Posyandu pada tahun 2014, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 559 Posyandu dan semuanya masih aktif (100%) seperti yang diperlihatkan pada Tabel 2.91. di bawah ini.

Tabel 2.91
Jumlah Posyandu Aktif di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Posyandu	526	526	526	526	559
Jumlah Posyandu Aktif	526	526	526	526	559
Persentase Posyandu Aktif	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: DPMD Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan KB

Secara garis besar pembangunan pengendalian penduduk dan KB meliputi 5 aspek penting, yaitu: (1) kuantitas penduduk, antara lain jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk; (2) kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan; (3) mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antarwilayah, baik antarpulau maupun antarperkotaan dan perdesaan; (4) data dan informasi penduduk; dan (5) penyerasian

kebijakan kependudukan. Melalui pembangunan kependudukan dan KB, Kabupaten Manggarai Timur sebagai bagian dari Indonesia harus benar-benar dapat memanfaatkan jendela peluang demografi untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3.2.8.1

Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Manggarai Timur tahun 2014-2018 berdasarkan hasil Susenas Tahun 2017 sebesar 1,48%, lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan penduduk Provinsi NTT sebesar 2,07%, namun lebih sedikit lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan nasional (1,21%).

2.3.2.8.2

Cakupan Peserta KB Aktif

Sasaran pelaksanaan program KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS). PUS adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang isterinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun. Peserta KB Aktif adalah PUS yang saat ini menggunakan salah satu dari alat-alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. Jumlah PUS di Kabupaten Manggarai Timur dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut diikuti pula dengan meningkatnya jumlah peserta KB aktif. Pada tahun 2014 jumlah pasangan usia subur di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 41.839 Keluarga. Dari jumlah PUS tersebut sebanyak 66% atau sebanyak 27,620 peserta KB aktif. Pada tahun 2018 jumlah PUS di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 44,408 Keluarga dan dari jumlah tersebut sebanyak 79% atau sebanyak 35,095 peserta KB aktif. Sebaliknya sebanyak 9,313 Keluarga pada tahun 2018 yang tidak termasuk peserta KB aktif. Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk seharusnya semua PUS mesti menjadi peserta KB aktif. Cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.92. di bawah ini.

Tabel 2.92
Persentase Peserta KB Aktif di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah PUS	41.839	42.635	43.204	44.161	44.408
Jumlah Peserta KB Aktif	27.620	30.677	34.885	33.624	35.095
Cakupan Peserta KB Aktif (%)	66	72	80,7	76,1	79

Sumber: Dinas P2KBP3A Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.2.8.3 Cakupan Peserta KB Baru

Peserta KB baru adalah jumlah orang yang pertama kali menggunakan metode kontrasepsi dalam suatu periode tertentu. Indikator ini mengukur kemampuan program untuk menarik peserta KB baru dari segmen masyarakat yang belum memanfaatkan Program KB. Cakupan peserta KB baru Kabupaten Manggarai Timur tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.93. di bawah ini.

Tabel 2.93
Cakupan Peserta KB Baru di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah PUS Baru					
Jumlah Peserta KB Baru	6,590	5,588	7,570	5,743	5,997
Cakupan Peserta KB Baru %	104,8	118,4	98,3	186,3	154,5

Sumber: Dinas P2KBP3A Kabupaten Manggarai Timur, 2018

Tabel 2.93. di atas memperlihatkan bahwa selama tahun 2014-2018 jumlah peserta KB baru di Kabupaten Manggarai Timur paling banyak pada tahun 2016 sebanyak 7,570 Keluarga.

2.3.2.8.4 Kampung KB

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW atau dusun yang memiliki kriteria tertentu di mana terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistematis. Pembentukan kampung KB bertujuan untuk meningkatkan partisipasi keluarga, masyarakat, peran pemerintah, lembaga non-pemerintah, serta swasta dalam melaksanakan program KKBPK sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah. Pada tahun 2016 dicanangkan sebuah Kampung KB di Kabupaten Manggarai Timur, yaitu di Kecamatan Borong. Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur membentuk 15 Kampung KB baru di 9 kecamatan, dan pada tahun 2018 membentuk 44 Kampung KB baru. Jadi, jumlah Kampung KB di Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan tahun 2018 sudah sebanyak 61 Kampung KB. Jumlah Kampung KB yang sudah dibentuk di Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.94. di bawah.

Tabel 2.94
Jumlah kampung KB di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016-2018

No	Kecamatan	Tahun Pencanangan			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Borong	1	1	4	6
2	Rana Mese	-	2	9	11
3	Poco Ranaka	-	2	3	5
4	Poco Ranaka Timur	-	2	3	5
5	Sambi Rampas	-	2	6	8
6	Lamba Leda	-	2	7	9

7	Kota Komba	-	1	2	3
8	Elar	-	1	8	9
9	Elar Selatan	-	2	2	4
Total		1	15	44	61

Sumber: Dinas P2KBP3A Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.2.9 Perhubungan

2.3.2.9.1 Jumlah Terminal

Sebagai simpul transportasi darat yang berfungsi sebagai tempat perpindahan orang, barang dan jasa diperlukan adanya terminal. Pengembangan terminal penumpang di Kabupaten Manggarai Timur merupakan Terminal Penumpang Tipe C. Sampai pada tahun 2018 telah dibangun 3 buah terminal penumpang tipe C di Kabupaten Manggarai Timur. Ketiga terminal tersebut dibangun pada tahun 2014. Berdasarkan hasil pemetaan wilayah, maka ke depan diharapkan dibangun tambahan terminal penumpang di simpul-simpul transportasi antara lain di Paan Leleng, Mano, Watu Nggong, Pota, Elar, dan Benteng Jawa.

2.3.2.9.2 Jumlah Pelabuhan

Pelabuhan yang terdapat di Kabupaten Manggarai Timur merupakan pelabuhan pengumpan dan terminal khusus. Pelabuhan Pengumpan (Regional dan Lokal) adalah pelabuhan yang berfungsi melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas. Pelabuhan dimaksud merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pengumpul dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Provinsi. Pelabuhan pengumpan yang ada di Manggarai Timur meliputi: Pelabuhan Wae Wole di Kecamatan Kota Komba; Pelabuhan Borong di Kecamatan Borong; Pelabuhan Pota di Kecamatan Sambi Rampas; dan Pelabuhan Nanga Baras di Kecamatan Sambi Rampas. Sedangkan untuk terminal khusus terdapat di Wae Wole di Kecamatan Kota Komba. Sedangkan alur pelayaran yang terdapat di Kabupaten Manggarai Timur meliputi: Wae Wole – Bima – Benoa/Denpasar; Wae Wole – Labuan Bajo – Makassar; Wae Kelambu – Reo – Labuan Bajo – Makassar; Wae Kelambu – Reo – Labuan Bajo – Bima – Benoa/Denpasar – Surabaya; Borong – Bima – Benoa/Denpasar; Borong – Labuan Bajo – Makassar; Wae Kelambu – Makassar; Wae Wole – Tenau/Kupang; Wae Wole – Waingapu/Sumba Timur; dan Borong – Waingapu /Sumba Timur. Tataunan Kepelabuhanan harus menjaga fungsi pertahanan dan keamanan Negara, dengan tidak menutup akses pelabuhan dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan TNI AL.

2.3.2.9.3

Jumlah Bandar Udara

Bandar udara di Kabupaten Manggarai Timur belum ada, tetapi masih berada dalam tahap perencanaan. Rencana lokasi bandar udara di Kabupaten Manggarai Timur adalah Tanjung Bendera Desa Bamo Kecamatan Kota Komba, dengan azimuth runway 178' 40' 9.435" – 358' 40' 9.435.

2.3.2.9.4

Jumlah dan Jenis Kendaraan Bermotor

Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi yang baik ialah meningkatnya daya beli masyarakat baik untuk pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder maupun kebutuhan tersier. Salah satu jenis kebutuhan tersier adalah kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang berfungsi sebagai alat transportasi privat maupun umum. Jumlah dan jenis kendaraan bermotor di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 2.95. di bawah ini. Jumlah mobil penumpang dan truck/pick up mengalami peningkatan selama tahun 2017-2018. Pada tahun 2018 jumlah mobil penumpang sebanyak 116, meningkat dari 48 unit pada tahun 2017. Sementara truck/pick meningkat dari 187 unit pada tahun 2017 menjadi 326 unit pada tahun 2018.

Tabel 2.95
Jumlah dan Jenis Kendaraan Bermotor di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

Uraian	Jumlah Kendaraan Bermotor				
	2014	2015	2016	2017	2018
Mobil Penumpang	N/A	N/A	N/A	48	116
Bus/Micro Bus	N/A	N/A	N/A	15	15
Truck/Pick Up	N/A	N/A	N/A	187	326
Sepeda Motor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah	N/A	N/A	N/A	250	447

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.2.9.5

Arus Kunjungan dan Penumpang

Arus kunjungan kapal laut ke pelabuhan pengumpan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur relatif sangat rendah dan bahkan cenderung tidak teridentifikasi sama sekali. Hal ini diperkirakan terjadi karena dua hal: *pertama*, status pelabuhan dan sarana/prasarana pelabuhan yang belum memenuhi ketentuan dan peraturan dalam pengangkutan laut; *kedua*, alur pelayaran yang ada tidak dimanfaatkan secara maksimal karena tidak ada kapal yang melewati alur pelayaran tersebut. Sedangkan arus penumpang angkutan umum meningkat dari 10.351 orang pada tahun 2014 menjadi 30.960 orang pada tahun 2018.

2.3.2.10

Komunikasi dan Informatika

2.3.2.10.1

Media Komunikasi dan Informasi Pemerintah Manggarai Timur

Dalam upaya peningkatan penyebarluasan informasi mengenai penyelenggaraan pembangunan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur kepada masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memiliki beberapa media komunikasi, yaitu website, Youtube, Radio milik Pemerintah Daerah Manggarai Timur, dan media lainnya seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.96. di bawah ini.

Tabel 2.96
Jenis Media Komunikasi di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018

No.	Jenis Media	Nama Media	Tujuan
1	Website	www.manggaraitimurkab.go.id	Penyebarluasan informasi mengenai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur kepada publik.
2	YouTube	manggaraitimurTV	
3	Lembaga Penyiaran Publik (LPPL) Radio Kabupaten Manggarai Timur	Radio Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, dengan Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 890 Tahun 2013.	
4	Facebook	- Media Center - Diskominfo Matim	
5	Media Luar Ruangan	Jenis-jenis: Baliho, Spanduk, Brosur, dll.	
6	KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)	d. Tunas Jaya (Pota, Kec. Sambi Rampas); e. Bonto Tenga (Pota, Kec. Sambi Rampas); f. Usaha Bersama (Pota, Kec. Sambi Rampas); g. Satu Hati (Benteng Raja, Kec. Borong); h. Sehati (Nanga Labang, Kec. Borong); i. Kembang Mulia (Rana Mbeling, Kec. Kota Komba); j. Mekar (Wejang Mali, Kec. Poco Ranaka Timur);	

		k. Nusa Jaya (Kota Ndora, Kec. Borong); l. Ca Nai (Tana Rata, Kec. Kota Komba)	
7	Pertunjukan Rakyat (Perjukra)	Media Tradisional	
9	Pameran	Media Konvensional	

Sumber: Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.2.10.2

Persentase Penduduk yang Memiliki Alat Komunikasi dan Informasi

Salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga adalah adanya akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, adanya akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi mengindikasikan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan komunikasi. Beberapa indikator akses rumah tangga terhadap teknologi informasi dan komunikasi antara lain kepemilikan telepon rumah, kepemilikan telepon seluler, kepemilikan komputer, akses internet di rumah, serta akses anggota rumah tangga terhadap internet di luar rumah. Pada tahun 2018 sebanyak 32,98% penduduk Kabupaten Manggarai Timur memiliki akses terhadap telepon seluler; sebanyak 5,39% memiliki akses terhadap komputer; dan 10,84% memiliki akses terhadap internet (termasuk Facebook, Twitter, BBM, dan Whatsapp). Mayoritas yang memiliki akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi tersebut adalah laki-laki, sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.97. di bawah ini.

Tabel 2.97
Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Teknologi Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018

Jenis Alat Komunikasi dan Informasi	Manggarai Timur	NTT
	2018	2018
1. Telepon Seluler (%)	32.98	43.91
a. Laki-Laki	40.54	48.34
b. Perempuan	25.68	39.6
2. Komputer (%)	5.39	12.69
a. Laki-Laki	6.63	13.38
b. Perempuan	4.18	12.02
3. Akses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp) (%)	10.84	21.12
a. Laki-Laki	11.92	22.77
b. Perempuan	9.8	19.46

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat NTT, 2018

2.3.2.11

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.3.2.11.1

Persentase Koperasi Aktif

Koperasi memiliki peran dan manfaat yang luar biasa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai Timur. Dari tahun ke tahun jumlah koperasi di Kabupaten Manggarai Timur terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014-2016 jumlah koperasi di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 54 unit dan dari jumlah tersebut pada tahun 2014 sebanyak 48 koperasi (88,89%) yang beroperasi secara aktif, meningkat menjadi 51 koperasi (94,44%) pada tahun 2015-2016. Pada tahun 2017-2018 jumlah koperasi di Kabupaten Manggarai Timur meningkat secara signifikan menjadi 291 koperasi, namun dari jumlah tersebut hanya 95 koperasi aktif. Perkembangan jumlah koperasi di Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.98. di bawah ini.

Tabel 2.98
Jumlah dan Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	Omset (Rp. Juta)
2014	54	48	88,89	N/A
2015	54	51	94,44	N/A
2016	54	51	94,44	N/A
2017	291	95	32,65	N/A
2018	291	95	32,65	N/A

Sumber: SIPD Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.2.11.2

Jumlah UKM non-BPR/LKM Aktif

Tabel 2.99. di bawah ini memperlihatkan bahwa jumlah UKM non-BPR/LKM Aktif di Kabupaten Manggarai Timur terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 terdapat 1.430 UKM non-BPR/LKM dan sebanyak 97,34% yang aktif. Jumlah tersebut meningkat dari 755 UKM non-BPR/LKM aktif pada tahun 2014. Jadi dari tahun 2014-2018 persentase peningkatan UKM non-BPR/LKM aktif di kabupaten Manggarai Timur sebesar 21%.

Tabel 2.99
Jumlah UKM non BPR/LKM aktif di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah UKM non BPR/LKM Aktif	755	1.380	1.404	1.380	1.392
Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM	986	1404	1.467	1.404	1.430

Persentase	76,57	98,29	95,71	98,29	97,34

Sumber: SIPD Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.2.11.3

Posisi Kredit Usaha Kecil

Kredit Usaha Kecil (KUK) merupakan kredit atau pembiayaan dari bank untuk investasi dan atau modal kerja, yang diberikan dalam rupiah dan atau valuta asing kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit keseluruhan maksimal Rp.500 (juta) untuk membiayai usaha yang produktif. Sejak tahun 2014 jumlah debitur dan plafon KUK di Kabupaten Manggarai Timur terus meningkat. Pada tahun 2018 jumlah debitur KUK sebanyak 34 debitur dengan jumlah plafon kredit sebesar Rp. 7,035 (milyar), meningkat dari 11 debitur dengan plafon kredit sebesar Rp. 985 (juta) pada tahun 2015. Perkembangan KUK di Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.100. di bawah ini.

Tabel 2.100
Jumlah Debitur dan Plafon KUK di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

TAHUN	BANK BRI		BANK BNI		BANK NTT	
	Kredit Usaha Kecil		Kredit Usaha Kecil		Kredit Usaha Kecil	
	Debitur	Plafon Kredit	Debitur	Plafon Kredit	Debitur	Plafon Kredit
2014	0	-	N/A	N/A	N/A	N/A
2015	11	985,000,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	24	3,650,000,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A
2017	38	7,465,000,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A
2018	34	7,035,000,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: BRI, BNI dan Bank NTT di Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.2.11.4

Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu tipe pinjaman uang yang ditujukan kepada usaha rakyat seperti usaha mikro kecil sampai koperasi. Pinjaman tersebut sangat berguna untuk usaha kecil para pengusaha pemula, maupun yang sudah berjalan dan dijamin oleh Pemerintah. Pemerintah mengeluarkan kebijakan KUR ini untuk mendukung dan meningkatkan sumber pendanaan usaha rakyat dengan memberikan pinjaman atau kredit kepada UMKM dan koperasi. Jumlah masyarakat Manggarai Timur yang memanfaatkan KUR ini dari tahun ke tahun terus bertambah seiring dengan semakin luasnya penyebaran informasi tentang KUR ini. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah debitur KUR di BRI. Pada tahun 2014 jumlah debitur KUR di BRI sebanyak 226 debitur dengan plafon kredit sebesar Rp. 3,183 (milyar), pada tahun 2016 meningkat menjadi 470 debitur dengan jumlah plafon kredit sebesar Rp. 9,141 (milyar). Pada tahun 2018 sedikit mengalami penurunan menjadi 422 debitur, tetapi jumlah plafon kredit lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp. 9,476 (milyar), seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.101. di bawah.

Tabel 2.101
Jumlah Debitur dan Plafon Kredit KUR di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

Tahun	BANK BRI		BANK BNI		BANK NTT	
	Kredit Usaha Rakyat		Kredit Usaha Rakyat		Kredit Usaha Rakyat	
	Debitur	Plafon Kredit	Debitur	Plafon Kredit	Debitur	Plafon Kredit
2014	226	3,183,000,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A
2015	257	4,632,000,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A
2016	470	9,141,000,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A
2017	364	7,545,000,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A
2018	422	9,476,000,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: BRI, BNI dan Bank NTT di Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.2.11.5 Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

Perkembangan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu indikator yang menunjukkan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur. Hal itu terjadi karena UMKM merupakan usaha ekonomi yang dikelola langsung oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. Persentase rata-rata pertumbuhan UMKM di Kabupaten Manggarai Timur selama tahun 2014-2018 sebesar 20%. Pada tahun 2018 jumlah UMK di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 1,430 unit, tetapi jumlah yang aktif sebanyak 1,392 unit. Jumlah tersebut meningkat dari 1,380 unit UMKM aktif pada tahun 2015-2017, dan 755 unit pada tahun 2014. Perkembangan UMKM di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018 dapat ditunjukkan pada Tabel 2.102. di bawah ini.

Tabel 2.102
Perkembangan UMKM di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah UMK	755	1.380	1.380	1.380	1.392
Jumlah seluruh UKM	986	1.404	1.467	1.404	1.430
Persentase	76,57	98,29	94,07	98,29	97,34
Omset (Rp. Juta)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: SIPD Kabupaten Manggarai Timur, 2018.

2.3.2.12 Penanaman Modal

Dalam konsep ekonomi investasi merupakan sumber terpenting dari pertumbuhan ekonomi, melalui investasi akan tercipta barang dan jasa di satu sisi dan terciptanya lapangan pekerjaan pada sisi lainnya. Lapangan kerja yang tercipta tentu menciptakan penghasilan yang selajutnya akan menjadi pendorong konsumsi yang akan kembali mendorong pengusaha untuk berinvestasi kembali. Investasi dapat berupa investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks perekonomian makro aktivitas inestasi fisik tercermin

pada komponen Pembentuk Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventory. Dalam konteks kinerja mikro pemerintah daerah, investasi ini hanya mencatat pada kinerja nilai investasi yang baru. Artinya untuk mendeteksi tingkat investasi di suatu daerah dapat menggunakan data PMTB dan investasi yang keduanya dapat saling melengkapi, walaupun sesungguhnya nilai investasi baru itu sudah masuk dalam komponen PMTB. PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (fixed asset) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap diklasifikasikan menurut jenis barang modal seperti : bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya. PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (financial leasing) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidayakan (Cultivated Biological Resources/CBR). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (financial leasing) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan (BPS).

Tabel 2.103.
Perkembangan PMTB Kabupaten Manggarai Timur 2013 – 2017

Tahun	Nilai PMTB (Rp Juta)	Persentase Terhadap PDRB
2013	455.917	24,86
2014	562.286	27,59
2015	719.649	31,92
2016	766.520	30,68
2017	862.798	31,25

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur, 2018

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan investasi, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan berbagai usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia. Realisasi investasi Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2014-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.104. di bawah ini.

Tabel 2.104
Realisasi Investasi Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Realisasi Proyek PMDN dan Tenaga Kerja Penanaman Modal					
- Proyek	317	374	499	439	122

- Tenaga Kerja	446	316	702	1.136	141
Nilai Investasi Proyek PMDN (Juta Rupiah)	35.828.471.338	446.899.100.345	49.684.000.000	39.123.000.000	23.876.679.485
Jumlah Realisasi Proyek PMA dan Tenaga Kerja					
- Proyek	-	-	-	-	1
- Tenaga Kerja	-	-	-	-	3
Nilai Investasi Proyek PMA (Juta Rupiah)	-	-	-	-	9.000.000.000

Sumber: SIPD Kabupaten Manggarai Timur, 2018

Dari Tabel 2.104. di atas diketahui bahwa jumlah realisasi proyek di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2018 sebanyak 122 proyek dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 141 orang, menurun dari 439 proyek pada tahun 2017 dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1.136 orang. Sementara nilai PMDN selama kurun waktu 2014-2018 cenderung fluktuatif. Nilai PMDN yang paling tinggi terjadi pada tahun 2015, yaitu sebesar Rp 446,899,100,345,-, pada tahun 2018 nilai investasi tersebut menurun menjadi Rp. 23.876.679.485,-.

2.3.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan di bidang kepemudaan dan olah raga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkan budaya olah raga dan prestasi pada diri pemuda. Ada beberapa indikator yang menggambarkan capaian pembangunan di bidang kepemudaan dan olah raga di antaranya jumlah atlet berprestasi, jumlah wirausahawan muda, dll. Pembangunan kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Manggarai Timur belum maksimal diintervensi. Pada Tabel 2.105. di bawah ini diperlihatkan capaian pembangunan di bidang kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Manggarai Timur selama tahun 2017-2018.

Tabel 2.105.
Capaian Pembangunan di Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017-2018

No	Uraian	Tahun		Ket
		2017	2018	
1	Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif	4	4	OMK, OSIS, GMI, REMAS, KARANG TARUNA
2	Jumlah cabang olah raga yang dibina	Bola Voli (Volley Ball), Bola Kaki	Volley Ball, Bola Kaki, dan Sepeda Dayung	
3	Jumlah atlet bersertifikat	N/A	9 orang atlet Sepeda Dayung	
4	Jumlah pelatih bersertifikat	N/A	6 orang Pelatih Football	
5	Jumlah sarana dan prasarana olahraga	N/A	143 unit	

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Manggarai Timur, 2018

Tabel 2.105. di atas memperlihatkan bahwa jumlah organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Manggarai Timur selama tahun 2017-2018 sebanyak 4 organisasi kepemudaan, yaitu Organisasi Muda Mudi Katolik (OMK), Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Pemuda Gereja Masehi Injili di Timor (GMTI), dan Remaja Masjid (Remas). Sementara jumlah cabang olah raga yang dibina masih sangat terbatas. Pada tahun 2017 hanya ada satu cabang olah raga yang dibina, yaitu volley ball, dan pada tahun 2018 bertambah satu cabang olah raga sehingga menjadi 2 cabang olah raga, yaitu volley ball dan Sepeda Dayung. Pada tahun 2018 jumlah atlet bersertifikat di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 9 orang atlet Sepeda Dayung. Sementara jumlah sarana dan prasarana olah raga di Kabupaten Manggarai Timur hingga tahun 2018 sebanyak 143 unit dan umumnya berupa lapangan football, volleyball, badminton dan takraw.

2.3.2.14 **Statistik**

Dalam penyusunan rencana pembangunan pemerintah (kebijakan dan program/kegiatan) diperlukan data yang akurat supaya perencanaan pembangunan benar-benar terukur, efektif, efisien dan tepat sasaran. Oleh karena itu, ketersediaan data statistik merupakan sesuatu yang mutlak ada dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan juga untuk keperluan lainnya Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memiliki dokumen statistik yang menyediakan data-data terkait pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur. Dokumen statistik tersebut disediakan oleh BPS Kabupaten Manggarai Timur, yang biasa disebut "Manggarai Timur dalam Angka/BPS Kabupaten Manggarai Timur" dan "PDRB Kabupaten

Manggarai Timur". Kedua buku tersebut tersedia setiap tahun. Sedangkan Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi baru mulai dilaksanakan pada tahun 2018, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.106. di bawah ini.

Tabel 2.106
Indikator Statistik Kabupaten Manggarai Timur 2014-2019

No	Indikator	Capaian				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
2.	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: SIPD Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.2.15 Persandian

Fungsi persandian ialah mengatur, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan hubungan persandian secara tertutup dan rahasia antara aparaturnegara, baik di Pusat maupun di daerah dan hubungan persandian luar negeri. Tugas-tugas persandian antara lain: a) memelihara keamanan dan mengadakan tindakan-tindakan pengamanan terhadap pemberitaan rahasia pemerintah yang disalurkan melalui perhubungan sandi; b) mengorganisasi/membentuk bagian-bagian sandi pada instansi pemerintah, yang membutuhkan perhubungan pemberitaan rahasia dengan jalan sandi-menyandi; c) mengatur penggunaan alat-alat sandi, memikirkan dan menyempurnakan cara pemakaiannya dalam lapangan keteknikan mesin-mesin sandi. Tugas persandian di Kabupaten Manggarai Timur belum terlalu Nampak. Selama tahun 2014-2018 dari 23 OPD di Kabupaten Manggarai Timur hanya ada 2% yang menggunakan persandian dalam komunikasi Perangkat Daerah.

2.3.2.16 Kebudayaan

Jenis sarana kebudayaan di Kabupaten Manggarai Timur terdiri atas cagar budaya, desa adat, museum, rumah budaya nusantara, sanggar dan komunitas dan warisa budaya tak benda. Namun, di Kabupaten Manggarai Timur belum memiliki museum dan rumah budaya nusantara. Sementara jumlah obyek wisata yang tertangani di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 2 obyek dari 11 obyek wisata, seperti yangdapat kita lihat pada Tabel 2.107. dan 2.108. di bawah ini.

Tabel 2.107
Jenis Sarana Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018

NO	JENIS	JUMLAH
1	Cagar Budaya	11
2	Desa Adat	5
3	Museum	0
4	Rumah Budaya Nusantara	0
5	Sanggar dan Komunitas	9
6	Warisan Budaya Tak Benda	1
Jumlah		26

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manggarai Timur, 2018

Tabel 2.108
Jumlah Obyek Wisata yang Tertangani di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018

URAIAN	2018
Jumlah Obyek Budaya	11
Jumlah Obyek Budaya yang Tertangani	2
Persentase Obyek Budaya yang Tertangani	18.18%

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.2.17 Perpustakaan

Perpustakaan merupakan tempat untuk mengakses informasi dalam format apapun, apakah informasi itu disimpan dalam gedung perpustakaan tersebut ataupun tidak. Seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, dalam perpustakaan modern dewasa ini selain tersedia buku-buku tercetak, juga tersedia buku-buku dalam perpustakaan digital. Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.109. di bawah ini, sampai tahun 2018 perpustakaan di Kabupaten Manggarai Timur telah mengoleksi sebanyak 11,752 buku dengan 5,644 judul. Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Manggarai Timur 2 tahun terakhir mengalami penurunan dari 20,055 pengunjung pada tahun 2016 menjadi 11,593 pengunjung pada tahun 2017, dan terus menurun menjadi 5,644 pengunjung pada tahun 2018. Penurunan ini terjadi karena banyak masyarakat beralih ke bacaan-bacaan digital yang tersedia pada smartphone android yang mereka miliki. Pada tahun 2018 Kabupaten Manggarai Timur telah memiliki e-perpustakaan dengan nama e-perpusda Manggarai Timur.

Tabel 2.109
Indikator Kinerja Perpustakaan Kabupaten Manggarai Timur 2014-2018

No.	Bidang urusan/Indikator	Capaian Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun	16.938	17.299	20.055	11.593	5.644
2.	Koleksi Buku Yang Tersedia	10.251	10.251	10.251	11.251	11.752

3.	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	-	-	-	-	1,84%
4.	Jumlah rata – rata pengunjung Perpustakaan Per Tahun	1.411,50	1.411,58	1.671,25	966,08	470,33
5.	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	5.244	5.244	5.244	5.744	5.644
6.	Jumlah Pustakawan (Pelaksana/Fungsional)	1	1	1	1	1
7.	Jumlah Tenaga Teknis	0	0	0	0	0
8.	Jumlah Penilai yang memiliki sertifikat	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Manggarai Timur, 2018

Ada beberapa jenis perpustakaan di Kabupaten Manggarai Timur, yaitu perpustakaan umum sebanyak 1 unit, perpustakaan sekolah terdiri atas 318 unit perpustakaan SD/MI, 133 unit perpustakaan SMP/MTs, dan 45 unit perpustakaan SMA/SMK/MA. Selain itu, ada 40 unit perpustakaan desa/kelurahan dan 2 unit perpustakaan Taman Bacaan Masyarakat, yaitu di Colol dan Desa Compang Kempo. Jenis perpustakaan di Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.110. di bawah ini.

Tabel 2.110
Keadaan Perpustakaan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018

No	Jenis Perpustakaan	Jumlah
1	Umum	1
2	Sekolah:	
a.	SD/MI	318
b.	SMP/MTS	133
c.	SMA/SMK/MA	45
3	Desa/Kelurahan	40
4	Taman Bacaan Masyarakat	2

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.2.18 Kearsipan

Fungsi pengelolaan arsip mencakup pengelolaan arsip secara baku dan peningkatan pengelolaan SDM arsip. Dari tahun 2014-2018 belum ada OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur yang mengelola arsipnya secara baku. Pada tahun 2014 ada 3 OPD yang arsipnya didata dan ditata, kemudian pada tahun 2015-2017 tiap-tiap tahunnya terdapat 2 OPD yang arsipnya didata dan ditata, dan pada tahun 2018 ada 4 OPD yang arsipnya didata dan ditata.

Tabel 2.111
Indikator Kearsipan Kabupaten Manggarai Timur 2014-2018

No	Indikator	Capaian				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara baku	0%	0%	0%	0%	0%
2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	0	0	1	0	1
3.	Jumlah OPD yang arsipnya didata dan ditata	3	2	2	2	4

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.3

Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah Kabupaten Manggarai Timur. Urusan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, serta transmigrasi.

2.3.3.1

Kelautan dan Perikanan

Urusan kelautan dan perikanan merupakan salah satu urusan yang berfungsi untuk meningkatkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Produksi perikanan laut di Kabupaten Manggarai Timur cenderung fluktuatif. Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.112. di bawah ini pada tahun 2014 produksinya sebesar 2,595,07 ton, meningkat menjadi 3,968,92 ton pada tahun 2015. Produksi perikanan laut terus bertambah pada tahun 2016-2017 di mana pada tahun 2016 jumlah produksinya sebesar 4,017,90 ton, sedikit meningkat pada tahun 2017 menjadi 4,074,38, dan pada tahun 2018 menjadi 4,060,43 ton. Jumlah rumah tangga perikanan budidaya di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2018 sebanyak 3,957 RT, menurun dari 4,097 RT pada tahun 2017. Penurunan tersebut diikuti dengan penurunan jumlah produksi. Hal itu dapat dilihat dari hasil produksi perikanan budidaya pada tahun 2018 lebih rendah daripada produksi tahun-tahun sebelumnya. Produksi yang paling tinggi terjadi pada tahun 2015, yaitu sebesar 2,514,30 ton, sedangkan pada tahun 2018 produksinya hanya 232,24 ton.

Tabel 2.112.
Jumlah Produksi Perikanan Laut dan Budidaya di Kabupaten Manggarai Timur 2014-2018

Perikanan Laut		Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Produksi Perikanan Laut	Ton	2.595,07	3.968,92	4.017,90	4.074,38	4.060,43

Rumah Tangga Perikanan Budidaya	-	4.505	4.730	4.097	4.097	3.957
Produksi Perikanan Budidaya	Ton	596,59	2.514,30	1.153,06	333,96	232,24
PDRB Menurut Lapangan Usaha						
Sektor Perikanan (PDRB-ADHB)	Miliar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sektor Perikanan (PDRB-ADHK)	Miliar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Timur, 2018

Secara umum jumlah rumah tangga usaha perikanan laut kategori usaha di Kabupaten Manggarai Timur dari tahun 2014-2018 cenderung meningkat. Pada tahun 2014 terdapat 985 RT, yang terdiri atas 243 RT yang berusaha tanpa perahu, 332 RT yang berusaha dengan perahu tanpa motor, 61 RT yang berusaha dengan motor tempel, sebanyak 347 RT yang menggunakan perahu motor berkapasitas <5 GT, dan >5 GT hanya 2 orang. Pada tahun 2018 jumlah rumah tangga usaha perikanan laut kategori usaha meningkat menjadi 1.003 RT, yang terdiri atas 14 RT menggunakan perahu motor berkapasitas >5 GT dan sebanyak 263 RT yang menggunakan perahu motor berkapasitas <5 GT. Sedangkan RT yang menggunakan motor tempel sebanyak 237 RT, perahu tanpa motor sebanyak 214 RT, dan RT tanpa menggunakan perahu sebanyak 275 RT.

Tabel 2.113
Jumlah Rumah Tangga Usaha Perikanan Laut Kategori Usaha
Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

Kategori Usaha	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Tanpa Perahu	243	302	302	302	275
Perahu Tanpa Motor	332	268	269	264	214
Motor Tempel	61	179	178	190	237
Kapal Motor					
<5 GT	347	246	243	253	263
5 GT ke atas	2	1	6	10	14
Jumlah	985	996	998	1019	1003

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.3.2 Pariwisata

Pariwisata dapat menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Kabupaten Manggarai Timur di masa yang akan datang karena di Kabupaten Manggarai Timur ada banyak potensi pariwisata, namun hingga kini belum dikelola dengan baik. Destinasi-destinasi wisata di Kabupaten Manggarai Timur umumnya masih sulit diakses karena

terbatasnya ketersediaan infrastruktur dasar, serta sarana dan prasarana. Akibatnya jumlah wisatawan di Kabupaten Manggarai Timur dari tahun ke tahun, terutama wisatawan manca negara, tidak menunjukkan peningkatan yang besar. Hal itu dapat dilihat pada Tabel 2.114. di bawah ini. Pada tahun 2014-2015 tidak ada wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Manggarai Timur. Namun, pada tahun 2016 terdapat 182 wisman dan pada tahun 2017 menurun menjadi 145 orang. Penurunan terjadi lagi pada tahun 2018 menjadi 55 orang saja. Sedangkan wisatawan domestik mengalami peningkatan dari tahun 2014-2018. Pada tahun 2014 jumlah wisatawan domestik sebanyak 5.905, bertambah 8.935 orang pada tahun 2018 sehingga menjadi 14.840 orang. Pada tahun 2018 baik wisman maupun wisatawan domestik rata-rata lama tinggalnya di Kabupaten Manggarai Timur hanya 2 hari saja.

Tabel 2.114
Perkembangan Wisatawan dan Rata-Rata Lama Tinggal
Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Wisatawan Manca Negara	-	-	182	145	55
Wisatawan Nusantara (Domestik)	5.905	10.844	12.657	14.290	14.840
Total	5.905	10.844	12.657	14.435	14.895
Rata-Rata Lama Menginap					
Tamu Asing					2 hari
Tamu Domestik					2 hari
Tingkat Penghunian Kamar					
Hotel Bintang					
Hotel Non Bintang					42 %

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur, 2018

Sektor akomodasi kepariwisataan di Kabupaten Manggarai Timur memiliki kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Manggarai Timur kendati pertumbuhannya dari tahun ke tahun masih cukup kecil. Dari total PDRB ADHK 2010 Kabupaten Manggarai Timur sebesar Rp. 1.837,998,80 (Juta) pada tahun 2017, kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 0,11% atau setara dengan Rp. 1.955,97 (Juta), naik dari Rp. 1.591,76 (Juta) pada tahun 2014. Sedangkan kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB ADHB pada tahun 2017 sebesar 0,12% atau setara dengan Rp. 3.343,32 (Juta), naik dari Rp. 2.175,10 pada tahun 2014. Kontribusi sektor penyediaan akomodasi terhadap PDRB (ADHK 2010 dan ADHB) Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.115. di bawah ini.

Tabel 2.115
Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (ADHB dan ADHK)
Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2017

Lapangan Usaha PDRB	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB ADHK 2010 (Juta Rupiah)	1,591.76	1,694.86	1,816.00	1,955.97
Persentase Kontribusi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB ADHK 2010	0.10%	0.10%	0.10%	0.11%
PDRB ADHK 2010 Kabupaten Manggarai Timur (Juta Rupiah)	1,581,648.71	1,662,326.70	1,748,162.89	1,837,998.80
Kontribusi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB ADHB	2,175.10	2,496.20	2,878.55	3,343.32
Persentase Kontribusi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB ADHB	0.11%	0.11%	0.12%	0.12%
PDRB ADHB Kabupaten Manggarai Timur	2,038,355.68	2,254,263.73	2,498,760.12	2,761,215.18

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur, 2018.

2.3.3.3 Pertanian

Pertanian merupakan salah satu urusan penting terkait dengan perannya dalam pembinaan petani yang jumlahnya sebagian besar dari angkatan kerja yang bekerja. Pertanian juga merupakan penyumbang terbesar bagi pembentukan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Manggarai Timur yang mencapai 43,25% pada tahun 2017, PDRB ADHB mencapai 45,39%. Perkembangan kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.116. di bawah ini.

Tabel 2.116
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pembentukan PDRB
Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2017

Lapangan Usaha PDRB	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB ADHB (Juta Rupiah)	968,180.60	1,058,591.02	1,149,984.06	1,253,197.76
Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB ADHB (Juta Rupiah)	47.50%	46.96%	46.02%	45.39%
PDRB ADHB Kabupaten Manggarai Timur (Juta Rupiah)	2,038,355.68	2,254,263.73	2,498,760.12	2,761,215.18

Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB ADHK 2010 (Juta Rupiah)	720,462.75	744,224.48	768,900.12	799,829.55
Persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB ADHK 2010 (Juta Rupiah)	45.55%	44.77%	43.98%	43.52%
PDRB ADHK 2010	1,581,648.71	1,662,326.70	1,748,162.89	1,837,998.80

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.3.3.1

Tanaman Pangan

Tanaman pangan merupakan segala jenis tanaman yang di dalamnya terdapat karbohidrat dan protein sebagai sumber energi manusia. Tanaman pangan juga dapat dikatakan sebagai tanaman utama yang dikonsumsi manusia sebagai makanan untuk memberikan asupan energi bagi tubuh. Umumnya tanaman pangan adalah tanaman yang tumbuh dalam waktu semusim. Tanaman pangan utama di Kabupaten Manggarai Timur adalah padi. Luas tanam padi di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2016 sebesar 23,795 Ha dengan produksi 89,807 ton. Pada tahun 2017 luas tanam padi meningkat menjadi 81,905, namun produksinya hanya 21,689 ton, jauh lebih rendah dibandingkan pada tahun 2016. Hal itu terjadi karena petani mengalami gagal panen akibat cuaca yang tidak menentu. Produksi padi kembali meningkat pada tahun 2018, yaitu sebanyak 82,919 ton dari luas tanam sebesar 21,127 Ha. Tanaman pangan berikutnya adalah jagung. Produksi jagung di Kabupaten Manggarai Timur merupakan terbesar kedua setelah padi. Dari luas tanam sebesar 10,112,16 Ha pada tahun 2017 produksi jagungnya sebanyak 7,085 ton. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan produksi jagung pada tahun 2018. Dari luas tanam sebesar 5,712 Ha pada tahun 2018 produksi jagungnya sebanyak 27,161,47 ton. Luas tanam dan produksi tanaman pangan di Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.117. di bawah ini.

Tabel 2.117
Luas Tanam dan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Manggarai Timur
Tahun 2016-2018

NO	JENIS KOMODITI	LUAS TANAM (HA)			PRODUKSI (TON)		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	Padi sawah	23.795	81.905	21.127	89.807	21.689	82.919
2	Padi Lahan Kering	1.909	1.840	1.527,5	2.044	1.384	2.019
3	Jagung	6.787	10.112,16	5.712	18.581,8	7.085	27.161,47
4	Kacang Kedelai	83	43,8	165	240,1	2.066,70	1.332,53
5	Kacang Hijau	299	127,1	120	207,4	181,1	113,4
6	Kacang Tanah	46	10,8	10,8	55,5	65	182

7	Ubi Kayu	1.289	6.577,53	6.577,53	8.095,86	1.439,70	8.667,53
8	Ubi Jalar	654	2.757,3	2.757,3	2.469,9	485,4	2.399,20

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.3.3.2 Hortikultura

Komoditas hortikultura merupakan kelompok komoditas yang terdiri atas buah-buahan, sayur-sayuran, bunga, tanaman hias dan tanaman biofarmaka. Luas tanam dan produksi komoditas hortikultura di Kabupaten Manggarai Timur cenderung fluktuatif. Namun, secara umum bertumbuh positif.

Pada tahun 2016 luas tanam tanaman hortikultura sayur-sayuran sebesar 1,112 Ha dengan produksi sebanyak 1,996. Peningkatan produksi terjadi pada tahun 2018. Dari luas tanam sebesar 1,191 Ha produksinya sebanyak 6,438 ton. Luas tanam dan produksi tanaman hortikultura di Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.118. di bawah ini.

Tabel 2.118
Luas Tanam dan Produksi Komoditi Hortikultura (Sayur-Sayuran) Tahun 2016-2018

No	Jenis Komoditi	Tahun					
		2016		2017		2018	
		Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)
1.	Bawang Merah	103	390	172	729	265	556
2.	Bawang Putih	3	1	10	10	2	-
3.	Kubis	18	95	38	15	10	160
4.	Petsai/ Sawi	49	150	81	104	67	315
5.	Kacang Merah	35	71	86	86	35	105
6.	Kacang Panjang	99	278	158	78	134	446
7.	Buncis	198	235	127	137	136	145
8.	Tomat	34	163	43	82	31	5
9.	Labu Siam	415	458	388	480	349	4,583
10.	Kangkung	46	86	74	97	29	48
11.	Bayam	55	41	68	60	64	36
12.	Cabe Rawit	57	29	60	40	68	38
Jumlah		1,112	1,996	1,304	1,916	1,191	6,438

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur, 2018

Tanaman hortikultura buah-buahan secara umum mengalami peningkatan selama tahun 2014-2018. Pada tahun 2018 jumlah produksinya sebanyak 15,140 ton, meningkat dari 2,705 ton pada tahun 2016. Peningkatan produksi tersebut terjadi karena peningkatan jumlah luas tanam di mana pada tahun 2018 luas tanam sebesar 4,237 Ha, meningkat dari 2,428 Ha pada tahun 2016. Luas tanam dan produksi komoditas hortikultura buah-buahan di Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.119. di bawah ini.

Tabel 2.119
Luas Tanam dan Produksi Komoditi Hortikultura (Buah-Buahan) Tahun 2016-2018

No	Jenis Komoditi	Tahun					
		2016		2017		2018	
		Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)
1.	Mangga	425	27	258	636	911	677
2.	Alpukat	222	18	156	331	404	886
3.	Rambutan	311	143	131	634	333	1,875
4.	Durian	25	7	33	3	92	210
5.	Jambu Biji	25	159	25	18	67	73
6.	Jeruk Keprok	82	138	82	108	342	272
7.	Jeruk Nangka/ Cempedak	316	385	122	90	737	120
8.	Nenas	9	82	15	239	126	26
9.	Pepaya	84	236	131	634	380	402
Total		2,428	2,705	1,872	9,659	4,237	15,140

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.3.3.3 Perkebunan

Perkebunan merupakan segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai. Selain aktivitas tersebut, perkebunan juga mencakup kegiatan mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.120. di bawah ini, jenis komoditas perkebunan yang memiliki produksi tinggi di Kabupaten Manggarai Timur antara lain kopi robusta, kakao, kemiri, dan kopi arabika. Beberapa komoditi tersebut produksinya cenderung meningkat setiap tahunnya dibandingkan dengan kelapa, jambu mete, kapuk, cengkeh, pinang, vanili, lada/marica, asam, aren/lontar dan kayu manis. Komoditi yang paling kecil produksinya antara lain jarak pagar, tembakau dan pala.

Tabel 2.120.
Luas Tanam dan Produksi Komoditi Perkebunan di Kabupaten Manggarai Timur
Tahun 2016-2018

No	Jenis Komoditi	2016		2017		2018	
		Luas Tanah (Ha)	Produksi	Luas Tanah (Ha)	Produksi	Luas Tanah (Ha)	Produksi
1	Kelapa	2.027,16	689,52	1.353,30	954,35	1.315,11	845,11
2	Jambu Mete	2.129,92	662,12	2.004,78	388,35	1.804,48	462,43
3	Kopi Arabika	6.227,58	1.476,74	5.832,34	1.415,06	6.887,28	1.860,27
4	Kopi Robusta	12.991,40	3.921,15	12.674,87	3.255,90	14.388,05	4.865,80
5	Kakao	2.950,54	1.042,78	5.633,02	1.081,56	6.233,24	1.133,91
6	Kemiri	10.263,25	1.792,21	6.300,22	2.217,56	6.696,08	6.476,80
7	Kapuk	302,65	90,07	152,55	79,23	197,05	680,66
8	Cengkeh	3.712,70	882,63	3.603,50	78,43	3.832,43	974,39
9	Pinang	285,23	111,75	408,83	107,53	401,81	138,7
10	Vanili	54,48	4,6	93,7	0,68	122,05	9,8
11	Lada/Marica	23,25	3,26	69,24	11,69	52,07	6,6
12	Asam	24,72	11,35	32,3	25,38	25,96	14,51
13	Jarak Pagar	7	0,14	7	0,14	6	-
14	Tembakau	56	32,68	50,5	28,87	72,8	7,5
15	Aren/Lontar	39,16	-	103,87	99,9	91,38	32,88
16	Kayu Manis/Cassivera	40,26	18,6	40,5	18,6	4	-
17	Pala	21,3		17,55	-	25,3	0,54

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.3.3.4 **Peternakan**

Peternakan merupakan kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak, yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Ada beberapa jenis ternak yang sangat populer dalam masyarakat Manggarai Timur, yaitu kerbau, sapi, kuda, kambing, domba, babi, ayam kampung, ayam buras dan itik. Jenis ternak di Kabupaten Manggarai Timur dan jumlah populasinya dapat dilihat pada Tabel 2.121. di bawah ini.

Tabel 2.121.
Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

Jenis Ternak	Jumlah Populasi (Ekor)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Sapi	14.662	13.792	13.792	15.062	13.552
Kerbau	10.805	10.227	10.227	7.807	8.666
Kuda	4.673	4.590	4.590	3.296	3.319

Kambing	27,194	30,753	30,753	29,227	29,354
Domba	14	14	14	0	0
Babi	56,626	61,115	61,115	52,232	61,730
Ayam Kampung	259,465	279,205	279,205	225,328	524.348
Ayam Ras	7.016	6.741	6.741	8.029	0
Itik	5.890	6.528	6.528	12.851	0

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Timur, 2018

Tabel 2.121. di atas memperlihatkan bahwa secara umum jumlah populasi jenis ternak besar (kerbau, sapi, kuda) di Kabupaten Manggarai Timur cenderung fluktuatif. Selama tahun 2014-2017 populasi sapi di Kabupaten Manggarai Timur terus meningkat, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1.110 ekor atau 7,6 %. Populasi kerbau dan kuda cenderung menurun dari tahun 2014-2018. Sementara populasi kambing pada tahun 2018 sebanyak 29,354 ekor, sedikit naik dari 29,227 ekor pada tahun 2017. Tampaknya ternak domba kurang cocok di Kabupaten Manggarai Timur karena dari tahun 2014-2016 jumlah domba di Kabupaten Manggarai Timur hanya 14 ekor saja, tidak berkembang, dan pada tahun 2017-2018 sudah tidak ada. Jumlah populasi ternak yang paling banyak ialah ayam kampung dan babi. Pada tahun 2018 jumlah populasi ayam kampung sebanyak 524,348 ekor, naik dari 225,328 ekor pada tahun 2017; sementara jumlah babi pada tahun 2018 sebanyak 61,730 ekor, naik dari 52,232 ekor pada tahun 2017.

2.3.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

2.3.3.4.1 Rumah Tangga Pengguna Listrik

Penyediaan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik merupakan indikator yang diperlukan untuk memantau kecenderungan rumah tangga yang memiliki akses terhadap listrik penerangan. Diharapkan dengan adanya akses terhadap listrik maka keluarga tersebut mempunyai kesempatan untuk meningkatkan produktivitas, pendidikan, kesehatan dan akses terhadap informasi.

Pada tahun 2018 total pelanggan listrik di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 17,365 pelanggan, yang terdiri atas 13,509 pelanggan listrik PLN; 116 pelanggan listrik seken; 3,740 pelanggan listrik EBTB. Jika dibandingkan antara jumlah KK di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 67,835 KK dengan jumlah pelanggan listrik, maka rasio elektrifikasi di Kabupaten Manggarai Timur baru mencapai 25,60%. Hal itu berarti bahwa sampai dengan tahun 2018 terdapat 74,40% atau sebanyak 50,470 KK yang belum memiliki penerangan listrik.

2.3.3.5 Perdagangan

Aktivitas perdagangan di kabupaten manggarai Timur cenderung meningkat setiap tahun. Hal itu dapat dilihat dari jumlah kelompok pedagang/usaha yang informal yang meningkat dari 1,285 kelompok pada tahun 2013 meningkat menjadi 1.853 kelompok pada tahun 2018. Jumlah kelompok usaha yang mendapat bantuan dari Pemda juga meningkat, yang dapat dilihat dari cakupan bina kelompok pedagang/usaha dari 60,16 % pada tahun 2013 menjadi 72,10 % pada tahun 2018. Indikator perdagangan di Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.122. di bawah ini.

Tabel 2.122
Indikator Perdagangan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Ekspor bersih perdagangan					
-Nilai ekspor	-	-	-	-	-
-Nilai impor	-	-	-	-	-
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	60,16%	65,65%	69,62%	66,38%	72,10%
-Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yg mendapatkan bantuan pemda	773	950	1.068	1.224	1.336
-Jumlah kelompok pedagang/usaha informal seluruhnya	1.285	1.447	1.534	1.844	1.853

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.3.6 Perindustrian

Industri merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Manggarai Timur. Jumlah kelompok pengrajin di Kabupaten Manggarai Timur terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 jumlahnya sudah mencapai 605 kelompok, naik dari 410 pada tahun 2014. Dari jumlah tersebut terdapat 37 kelompok yang memperoleh bantuan dari Pemda dan persentase kelompok yang dibina sebanyak 6,12% dari total seluruh kelompok pengrajin. Perkembangan perindustrian di Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.123 di bawah ini.

Tabel 2.123
Indikator Perindustrian di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Cakupan bina kelompok pengrajin	3,41	3,46	6,08	4,13	6,12
Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan Pemda tahun	14	16	32	24	37
Jumlah kelompok pengrajin	410	462	526	581	605

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.3.7 Transmigrasi

Transmigrasi merupakan program pemerintah untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di suatu wilayah, memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di wilayah lainnya. Agar program ini berjalan lancar, maka pemerintah berkewajiban memfasilitasi penduduk yang berminat untuk bertransmigrasi. Pada tahun 2014 terdapat 477 jiwa berhasil difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk bertransmigrasi ke Desa Nanga Meze Kecamatan Elar Selatan, yang terdiri atas 71 KK, dengan rincian 246 jiwa laki-laki dan 231 jiwa perempuan. Ada 100 unit rumah yang dibangun di lokasi transmigrasi, yang diberikan kepada transmigran. Luas lahan sebesar 93,2 Ha, yang terdiri atas lahan garapan seluas 66 Ha, pekarangan rumah 22 Ha, BLK/Balai Latihan Kerja 0,7 Ha, Pekarangan BLK 0,23 Ha, Kompleks Pustu 0,5 Ha, dan Kompleks SMP 7.500 m². Pada tahun 2015-2018 kegiatan transmigrasi tidak dilaksanakan karena dokumen perencanaan belum rampung dibuat dan kelengkapan dokumen perencanaan belum tersedia.

Tabel 2.124
Indikator Transmigrasi di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Peminat Transmigrasi yang Berhasil Difasilitasi	477 jiwa	-	-	-	-
Jumlah KK	77				
Lokasi Tujuan	Desa Nanga Meze, Kec. Elar Selatan				
Jumlah Rumah	100 unit				
Total Luas Lahan:	93,2 Ha				
o Lahan garapan	66 Ha				
o Pekarangan rumah	22 Ha				
o BLK	0,7 Ha				
o Pekarangan BLK	0,23 Ha				
o Kompleks Pustu	0,5 Ha				
o Kompleks SMP	7,500 M ²				

Sumber: Dinas Nakertrans Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.4 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Penunjang

2.3.4.1 Perencanaan

Pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur diselenggarakan melalui tahapan-tahapan perencanaan. Ada beberapa dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur, yaitu dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, dan RTRW. Semua dokumen perencanaan pembangunan tersebut tersedia di Kabupaten Manggarai Timur.

Dokumen RPJPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009-2029 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009-2029. Dokumen RPJPD tersebut setiap lima tahunan dijabarkan ke dalam RPJMD, terakhir RPJMD 2009-2014 dan RPJMD 2014-2019. Kemudian dokumen RPJMD tersebut dijabarkan ke dalam RKP, yaitu rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur berada dalam ruang tertentu, yaitu wilayah Kabupaten Manggarai Timur, sehingga dalam merencanakan pembangunan perlu memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Hal yang perlu diperhatikan oleh fungsi perencanaan ke depannya adalah antardokumen perencanaan mesti semakin baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.125
Indikator Perencanaan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

No	Uraian	Capaian				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPd yang telah ditetapkan dengan PERDA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
4.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	65,68%	80,88%	91,67%	83,33%	76,96%
5.	Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW					

Sumber: SIPD Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.4.2 Keuangan

2.3.4.2.1 Tata Kelola Keuangan

Tata kelola keuangan daerah yang baik merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan *good governance*. Audit rutin tata kelola keuangan dilaksanakan setiap akhir pelaksanaan pembangunan. Hasil audit BPK akan menghasilkan opini terkait pelaporan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Berdasarkan Opini BPK pada tahun 2014-2018, LKPD Kabupaten Manggarai Timur mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tabel 2.126. di bawah ini menggambarkan indikator tata kelola keuangan Kabupaten Manggarai Timur.

Tabel 2.126
Indikator Tata Kelola Keuangan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

No	Indikator	Capaian				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase PAD terhadap pendapatan	3,70 %	5,78 %	5,11 %	9,36 %	4,29 %
2	Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
3	Persentasi SILPA terhadap APBD	3,07 %	10,51 %	7,66 %	6,65 %	4,64 %
4	Persentase program/ kegiatan yang tidak terlaksana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Persentase belanja pendidikan (%)	37,25 %	34,38 %	29,68 %	25,18 %	22,76 %
6	Persentase belanja kesehatan (%)	8,47 %	8,73 %	10,60 %	14,12 %	3,66 %
7	Perbandingan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung	49,16% : 50,84%	49,22 % : 50,78%	46,25 %:53,75%	47,60 % :52,40 %	45,22 %:54,78 %
8	Bagi hasil kabupaten dan desa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber: SIPD Kabupaten Manggarai Timur, 2018.

2.3.4.2.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber dana untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur berasal dari dana transfer pusat, dana bagi hasil dari provinsi dan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Timur dari tahun ke tahun bertumbuh fluktuatif (naik-turun). Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 PAD Kabupaten Manggarai Timur bertumbuh positif, namun pada tahun 2018 kembali menurun. Pada tahun 2017 jumlah PAD Kabupaten Manggarai Timur sebesar 85.878.937.144,71, tetapi pada tahun 2018 menurun menjadi 44.007.083.306.37. Realisasi PAD Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.127. di bawah ini.

Tabel 2.127
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

Uraian	Realisasi PAD (Juta Rupiah)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2014	2015	2016	2017	2018	
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	22.053.5	41.465.7	44.112.08	85.878.9	44.007,08	35,08%

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.3.4.3 Kepegawaian

Keberadaan kepegawaian dalam pemerintahan merupakan faktor penunjang yang tidak tergantikan dalam penyelenggaraan pembangunan. Tanpa kepegawaian pembangunan tidak mungkin bisa berjalan. Namun, keberadaan kepegawaian tidak bisa sekedar ada, melainkan mesti berfungsi dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Pada tahun 2018 jumlah ASN di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 3,865 orang, yang terdiri atas 2,308 orang laki-laki, dan 1,557 orang perempuan. Dari 752 jabatan struktural pada tahun 2018, yang sudah diisi sebanyak 573, dan yang belum diisi sebanyak 179 jabatan. Komposisi ASN Kabupaten Manggarai Timur berdasarkan eselon dan jabatan fungsional dapat dilihat pada Tabel 2.128. di bawah ini.

Tabel 2.128
Jumlah ASN berdasarkan Eselon dan Jabatan Fungsional Tahun 2014-2018

NO	URAIAN	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah ASN berdasarkan Eselon	371	387	662	587	573
2	Jumlah ASN Jabatan Fungsional Tertentu	2,847	3,136	3,046	2,811	2,720
3	Jumlah ASN Jabatan Fungsional Umum	802	874	647	613	572
4	JUMLAH TOTAL	4,020	4,397	4,355	4,011	3,865

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan SDM Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Hasil penyelenggaraan pemerintahan Daerah Manggarai Timur selama lima tahun dalam RPJMD 2014-2019 terhadap pelaksanaan aspek dan urusan pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 2.129. di bawah ini:

Tabel 2.129.
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

Misi I Membangun SDM Kabupaten Manggarai Timur Yang Produktif Dan Berdaya Saing

Indikator Kinerja		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke- (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
Sasaran : Meningkatnya akses pendidik usia dini, pendidikan dasar dan menengah yang merata kepada masyarakat						
Angka Melek Huruf	%	102%	103%	103%	102%	103%
Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	214%	214%	215%	9%	215%
Angka partisipasi kasar	%	223%	241%	207%	206%	244%

Angka pendidikan yang ditamatkan	%	36%	40%	40%	100%	100%
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	96%	102%	99%	98%	92%
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	96%	90%	86%	88%	90%
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	149%	192%	147%	153%	166%
Pendidikan Dasar						
Angka Partisipasi Sekolah	%	90%	96,12%	84,69%	89,00%	90,82%
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	rasio	31%	30%	29%	90%	100%
Rasio guru/murid	rasio	91%	94%	97%	109%	113%
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD)	rasio	100%	106%	112%	123%	130%
Pendidikan Menengah						
Angka Partisipasi Sekolah	%	65%	66%	66%	103%	124%
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	rasio	33%	33%	33%	95%	119%
Rasio guru/murid	rasio	97%	106%	100%	98%	99%
Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	rasio	100%	100%	100%	100%	100%
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	2351%	100%	100%	99%	98%
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Jumlah	101%	96%	90%	114%	100%
Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Jumlah	43%	41%	45%	76%	60%
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	29%	28%	27%	77%	71%
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	1440%	90%	86%	7%	100%
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	1440%	67%	63%	5%	59%
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	99%	66%	66%	100%	102%
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100%	100%	100%	4%	100%
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	-	100%	100%	4%	100%
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	100%	100%	99%	4%	99%
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	95%	95%	91%	4%	91%
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	81%	68%	100%	3%	77%
Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	%	100%	100%	100%	100%	100%

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis	%	122%	133%	100%	68%	70%
Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	%	111%	77%	67%	76%	70%
Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya, dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	%	30%	21%	18%	82%	70%
Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan	%	100%	100%	100%	82%	70%
Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	%	100%	100%	100%	82%	65%
Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	%	82%	57%	100%	71%	65%
Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	%	100%	88%	100%	71%	65%
Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA	%	100%	100%	100%	100%	100%

Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi	%	100%	100%	100%	100%	100%
Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : a. Kelas I – II : 18 jam per minggu b. Kelas III : 24 jam per minggu c. Kelas IV – VI : 27 jam per minggu d. Kelas VII – IX : 27 jam per minggu	%	100%	100%	100%	100%	100%
Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku	%	100%	100%	100%	100%	100%
Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	%	100%	100%	100%	100%	100%
Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	%	100%	100%	100%	100%	100%
Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	%	100%	100%	100%	100%	100%
Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik	%	100%	100%	100%	100%	100%
Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota pada setiap akhir semester	%	100%	100%	100%	100%	100%
Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	%	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran : Meningkatnya mutu pendidikan, dan tenaga kependidikan						
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Guru	98	96,56	95	96	95

Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	%	156	107,7	93	75	75
Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	%	70	70,0	70	70	70
Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris	%	100	100,0	100	71	65
Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	%	133	92,3	80	71	65
Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	%	100	115,4	100	105	90
Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	%	93	86,2	87	96	90
Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	%	100	100,0	100	100	100
Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	%	100	100,0	100	100	100
Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan	%	122	84,6	100	93	100
Jumlah Perpustakaan	Unit	0	0,0	0	1	1

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	100	100,0	100	100	100
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Judul	68	100,0	41	45	47
Sasaran : Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan dan Meningkatnya prestasi olah raga						
Jumlah Grup Olah Raga	Grup	112,00	107,14	100,00	0	0
Jumlah Gedung Olah Raga						
GOR	Unit	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Stadion	Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gedung Pemuda	Unit	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Lapangan Futsal	Unit	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Kolam Renang	Unit	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Cakupan pemuda yang telah dilatih dalam kewirausahaan dan kecakapan hidup	Orang	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan pemuda yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat dasar (Jumlah pemuda yang bergabung dalam organisasi pramuka)	Orang	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kabupaten (Sepak bola dan Bola Volley)	Kali	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan organisasi cabang olahraga yang sudah terbentuk	Cabang	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00
Cakupan atlet berprestasi	Orang	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Cakupan Klub Olahraga yang terdaftar dan berpartisipasi dalam setiap kompetisi olahraga	Klub	133	133	133	133	133
Cakupan pemuda yang dibina dan dilatih sebagai PASKIBRAKA	Orang	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kabupaten (Sepak bola dan Bola Volley)	Kali	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
Cakupan organisasi cabang olahraga yang sudah terbentuk	Cabang	140,00	100,00	78,00	58,00	50,00
Cakupan Klub Olahraga yang terdaftar dan berpartisipasi dalam setiap kompetisi olahraga	Klub	56,25	50,00	45,00	40,91	37,50
Sasaran : Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau						
Angka Usia harapan Hidup	Tahun	101,3	100,7	100,9	99,4	99,1
Persentase Balita Gizi Buruk	%	46,2	48,0	166,7	147,8	127,3
Rasio dokter per satuan penduduk (per 1000 Penduduk)	%	100,0	71,4	100,0	88,9	80,0
Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	%	0,0	274,0	208,3	92,7	149,6
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100,0	100,0	100,0	104,0	100,0
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	129,9	128,2	100,0	125,0	123,5

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	80,0	83,3	85,7	75,0	66,7
Cakupan kunjungan bayi	%	105,9	95,0	100,0	96,9	95,0
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	%	100,0	108,7	100,0	103,1	100,0
Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	81,8	100,0	100,0	89,5	87,0
Cakupan peserta KB Aktif	%	107,7	110,8	100,0	142,9	162,9
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	%	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Acute Flacid Paralysis (AFP) rate/100.000 penduduk < 15 Tahun	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Penemuan Penderita Pneumonia Balita	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	%	129,9	125,0	100,0	105,3	100,0
Penderita DBD yang di tangani	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Penemuan Penderita Diare	%	75,0	74,0	77,0	96,0	85,4
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100,4	73,7	0,0	33,8	40,0
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	40,0	27,0	30,0	30,0	40,0
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	%/Unit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rasio posyandu per satuan balita	%	119,6	171,2	68,5	62,8	62,0
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu, poskesdes per satuan penduduk	%	55,7	63,3	48,2	43,1	37,3
Jumlah Poskesdes	Unit	0,0	0,0	100,0	33,3	100,0
Jumlah Polindes	Unit	0,0	40,0	43,7	46,4	51,4
Jumlah Puskesmas	Unit	0,0	22,0	25,0	25,0	29,0
Jumlah Puskesmas Pembantu	Unit	0,0	46,0	25,0	42,0	41,0
Cakupan Puskesmas Perkecamatan	Puskesmas	244,0	128,0	138,0	161,0	322,0
Cakupan Pembantu Puskesmas Per Desa	Unit	0,0	28,0	27,0	23,0	22,0
Sasaran : Menurunnya kematian ibu baru melahirkan dan anak baru lahir						
Angka Kelangsungan Hidup bayi	%	99%	84%	81%	82%	81%
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	95%	68%	100%	4%	150%
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	98%	92%	88%	96%	97%

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	96%	64%	100%	77%	86%
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	96%	91%	100%	104%	61%
Cakupan Ibu Hamil dengan Komplikasi yang ditangani	%	127%	10769%	107%	94%	94%
Cakupan Pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	94%	92%	100%	96%	97%
Cakupan pelayanan Ibu Nifas	%	88%	94%	100%	64%	98%
Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	%	92%	146%	100%	115%	94%
Cakupan pelayanan anak balita	%	1,0642788	83%	100%	4%	77%
Sasaran : Meningkatnya kesadaran masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan						
Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	100	100	100
Jumlah desa siaga	Desa	0	260	290	250	100
Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	%	100	100	100	100	100
Sasaran : Terkendalinya Jumlah penduduk						
Rata-rata anak per keluarga	Orang	100	100	124	124	124
Rasio Akseptor KB	%	100	111	100	138	132
Cakupan peserta KB aktif	%	102	111	124	117	122
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	100	101	100	112	113
Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun 3,5 %	%	100	100	100	117	114
Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 65%	%	100	89	80	138	132
Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5%	%	100	108	118	100	111
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70%	%	100	100	100	109	109
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%	%	100	100^	100	115	115
Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan	Desa/Petugas	100	100	100	100	100
Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan	Petugas/Desa	100	100	100	100	100
Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Di Setiap Desa/Kelurahan 100% Setiap Tahun	%	100	100	100	100	100
Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	%	100	100	100	100	100

Cakupan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	100	101	103	112	113
Sasaran : Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak						
Rasio KDRT	%	100,0	100	100	33	33
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan	%	100,0	100	100	100	100
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu 100%	%	100,0	100	100	100	100
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum 50 %	%	100,0	100	100	100	100
Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	103,8	102	102	99	103
Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	100,0	100	99	100	100
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	98,6	97	96	109	106
Sasaran : Meningkatnya pemahaman anggota keluarga terhadap bahaya narkoba						
Cakupan media penyebaran informasi upaya penanggulangan narkoba dan HIV/AIDS	Media (cetak, visual dan audio)	0%	0%	0%	33%	13%
Cakupan masyarakat yang mendapat penyuluhan narkoba, PMS, dan HIV/AIDS	Orang	0%	0%	0%	100%	100%
Cakupan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pemuda sebagai pelopor penggerak anti narkoba	Orang	0%	0%	0%	18%	18%
Sasaran : Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin						
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Unit	0,0	0,0		0,0	0,0
PMKS yg memperoleh bantuan sosial	%	74,5	65,5	55,4	0,0	0,0
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	50,0	52,0	54,0	0,0	0,0
Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	134,3	115,6	0,0	0,0	0,0
Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	285,7	100,0	0,0	0,0	0,0
Presentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	114,3	140,0	0,0	0,0	0,0

Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat	%	100,0	100,0		100,0	100,0
Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	125,0	125,0	100,0	100,0	100,0
Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	7,5	125,0	17,5	0,0	0,0
Persentase peningkatan kerukunan Hidup dan kerjasama antar Umat Beragam	%	90,0	92,0	94,0	105,4	105,4
Persentase peningkatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam rangka pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	%	92,0	92,0	92,0	100,0	100,0
Sasaran VIII : Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat pedesaan						
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM)	LPM	0,0	0,0		50,0	50,0
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	0,0	0,0		185,0	200,0
Jumlah LSM	LSM	0,0	0,0	0,0	333,0	333,0
LPM berprestasi	%	0,0	0,0	0,0	1,2	1,0
PKK Aktif	%	159,0	135,8	117,7	111,1	100,0
Posyandu Aktif	%	404,7	221,0	152,0	115,9	100,0
Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	0,0	0,0	0,0	125,0	100,0
Pembentukan Wilayah Desa baru	Desa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pembentukan Wilayah Kelurahan baru/perubahan status desa menjadi kelurahan	Kelurahan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sasaran : Sinergisnya program program penanggulangan kemiskinan						
Prosentase penyalura bantuan RASKIN kepada RTS-PM sesuai target 6 (enam) tepat yaitu : Tepat sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas selama 5 tahun	%	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran : Meningkatnya pelestarian seni budaya						
Jumlah Grup Kesenian	Sanggar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jumlah Gedung	Gedung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cakupan Kajian Seni 50%	%	100,0	30,3	0,0	0,0	0,0
Cakupan Fasilitasi Seni 30%	%	56,0	31,1	18,7	0,0	0,0
Cakupan Gelar Seni 75%	%	71,4	50,0	0,0	0,0	0,0

Misi Kesenian 100%	%	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 25%	%	65,0	32,5	21,7	16,3	13,0
Cakupan Tempat 100%	%	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cakupan Organisasi 34%	%	111,1	0,0	0,0	55,6	50,0

Misi II Membuka Isolasi Daerah dan Membangun Infrastruktur Secara Merata

Sasaran Dan Indikator Kinerja	Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke- (%)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Terwujudnya Infrastruktur Jalan yang berkualitas dan merata					
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	101,73	110,40	87,04	113,44	110,56
Panjang jalan dilalui roda 4	0,00	0,02	0,03	0,00%	0,00%
Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	102,42	96,59	100	83,49	89,00
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/jam)	91,88	89,14	100	70,33	43,00
Prosentase Jumlah akses jalan pada sarana kesehatan	44,44	181,82	0,00	49,72	100
Prosentase Jumlah akses jalan pada fasilitas umum	134,27	100	0,00	82,21	75,00
Prosentase Jumlah akses jalan pada sarana pendidikan	0	0	0	0	0
Prosentase Jumlah akses air bersih pada sarana kesehatan	37,71	100	0,00	64,11	13,00
Prosentase Jumlah akses air bersih pada fasilitas umum	0,00	0,00	0,00	86,96	65,00
Prosentase Jumlah akses air bersih pada sarana pendidikan	110	100	0,00	15,56	150,00
persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang	102	100	100	117,34	110,00
Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/kota	101,73	100	100	117	113
Meningkatnya kualitas peralatan kebina margaan					
Presentase Tersedianya serta Terpeliharanya Sarana Kebinamargaan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Terwujudnya infrastruktur air bersih, drainase dan sanitasi yang berkualitas dan merata					

Presentase rumah tinggal bersanitasi	102,53	100,00	95,48	93,26	99,04
Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	1,79	0,16	0,54	0,14	0,23
persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	88,61	71,46	75,05	59,40	94,84
Presentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	121,11	106,95	100,00	87,09	80,00
Presentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	96,23	100,00	100,00	0,00	0,00
Terwujudnya pengelolaan irigasi yang optimal					
Rasio Jaringan Irigasi	21,74	20,76	31,94	32,49	37,69
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	26,09	15,38	100,00	1,79	145,35
Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	126,66	117,01	100,00	72,00	75,97
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	142,22	112,79	92,14	71,52	78,68
persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	5,91	1,00	0,00	9,80	10,53
Presentase penduduk yang terlayani sistim jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan lebih dari 30 cm selama 2 jam lebih dari 2 kali setahun	102,39	117,01	100,00	60,77	70,13
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh					
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0,000	1,120	1,130	0,000	0,000
Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk					
Rasio rumah layak huni	0,185	0,208	0,232	91,686	89,361
Rasio permukiman layak huni	92,76	0,01	0,01	0,00	0,00%

Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	100	100	100	0	0
Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	150,62	0,00	0,00	0,00	3,00
Lingkungan Permukiman	0,077	0,072	0,068	0,000	0,00%
Rumah tangga pengguna air bersih	0	0	0	0	0
Rumah tangga pengguna listrik	0	0	0	0	38,00
Rumah tangga ber Sanitasi	0	0	0	0	0
Lingkungan Permukiman Kumuh	0	0	0	0	0
Rumah layak huni	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	88,00
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	0	100	100	100	0
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	15,83	8,03	0,00	0,00	0,00
Presentase pengurangan sampah perkotaan	0,00	15,91	17,39	104,17	0,00
presentase pengangkutan sampah	33,73	90,91	92,39	0,00	0,00
Presentase jumlah izin mendirikan bangunan (IMB) yang diterbitkan	1,10	0,87	0,75	0,62	0,58
Presentase tersediannya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten/kota pada sistem informasi pembina jasa konstruksi (SIPJAKI)	0,00	87,69	28,57	125,00	111,11
Presentase tersediannya layanan ijin usaha jasa konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap	105,26	100,00	100,00	100,00	100,00
Presentase tersediannya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	83,33	100,00	100,00	133,33	0,00
Presentase tersediannya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	0,00	0,00	71,43	0,00	0,00
Seluruh kawasan dapat diakses oleh sarana transportasi publik yang nyaman dan lancar					
Jumlah pelabuhan udara/terminal bis/tambatan perahu :					
Pelabuhan Udara	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terminal	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Tambatan Perahu	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Halte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Angkutan Darat	100,0	0,0	100,0	0,0	250,0
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	50,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	0	0	0	0	0
Tersediannya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	80,7	0,0	0,0	63,6	52,0

Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota	80,7	0,0	0,0	63,6	52,0
Tersedianya terminal pada setiap Kabupaten/Kota untuk melayani angkutan umum	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0
Rasio ijin Trayek	93,3	0,0	264,7	100,0	250,0
Jumlah uji kir Angkutan umum	246,2	0,0	160,0	100,0	0,0
Kepemilikan KIR Angkutan Umum	113,0	0,0	136,2	100,0	225,8
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	130,0	0,0	100,0	100,0	100,0
	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Pemasangan Rambu-Rambu					
Jumlah rambu-rambu yang terpasang	8,0	0,0	0,0	100,0	66,0
Jumlah traffic light yang terpasang	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jumlah pagar pengaman jalan yang terpasang	45,6	0,0	35,2	0,0	0,0
Jumlah traffic con yang tersedia	0,0	76,0	0,0	0,0	0,0
Panjang pengecatan marka jalan	0,0	0,0	0,0	100,0	460,0
Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) pada jalan Kabupaten/Kota	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	0,0	0,0	0,0	181,8	0,0
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota	100,0	0,0	0,0	133,3	50,0
Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota tersebut	80,73	0,00	75,00	181,82	100,00
Meningkatnya infrastruktur energy dan ketersediaan energi					
Jumlah detail desain dan studi kelayakan untuk pembangunan dan perluasan jaringan PLTMH	0,00%	100	100	100	100
Terlaksananya monitoring dan evaluasi bidang energi (9 kec)	100	100	100	100	100
Manggarai Timur menjadi Kabupaten yang hijau yang bersih, sehat dan ramah lingkungan					
Prosentase Penanganan Sampah	96,42	93,55	99,64	116,73	116,76
Pencemaran Status Mutu Air	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan Penghijauan Wilayah Rawan Longsor dan sumber mata air	100,00	100,78	101,56	1562,50	267,81

Pengawasan terhadap pengawasan amdal	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tempat pembuangan sampah persatuan penduduk	100,00	181,82	100,00	0,00	112,90
Penegakan hukum lingkungan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	0	0	0	0	0
Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	300,00	150,00	0,00	125,00	0,00
Prosentase luasan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	0,00	0,00	0,00	125,00	100,00
Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Rasio Ruang Terbuka Hijau	100,00	100,00	100,00	233,97	100,00
Tertanggulangnya bencana secara dini dan konferhensif					
Prosentase penanganan korban bencana	100	100	100	100	100
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	100	100	100	100	100
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00
Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang					
Ketaatan terhadap RTRW	1%	0%	0%	1%	1%
Luas wilayah produktif	0,01	0,00	0,01	1,00	100%
Luas wilayah industri	0,50	50%	48%	0,47	0,44
Luas wilayah kebanjiran	5	0%	0%	0%	0%
Luas wilayah kekeringan	0,11	0,92	0,92	1,01	1,10
Luas wilayah perkotaan	1,04	0%	0%	0%	0%

Misi III Menumbuhkembangkan Ekonomi Rakyat Melalui Optimalisasi Keunggulan Lokal

Sasaran Dan Indikator Kinerja		Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPd Kabupaten/kota Tahun Ke- (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan)						
Luas Tanam Komoditi Tanaman Pangan:	Ton/ha					
Padi Sawah	ha	116%	92%	120%	105%	106%
Jagung	ha	98%	63%	84%	69%	84%
Produktifitas Komoditi Tanaman Pangan						

Padi sawah	Ton/ha	92%	92%	99%	98%	78%
Padi ladang	Ton/ha	99%	97%	108%	101%	103%
Jagung	Ton/ha	99%	87%		67%	85%
Kedelai	Ton/ha	42%	8%	32%	39%	38%
Kacang Hijau	Ton/ha	112%	11%	71%	71%	72%
Ubi Kayu	Ton/ha	101%	92%	59%	53%	58%
Ubi Jalar	Ton/ha	103%	86%	62%	56%	57%
Sorghum	Ton/ha	63%	0%	0%	100%	35%
Luas lahan intensifikasi tanaman padi sawah	ha	100%	100%	333%	100%	167%
Luas lahan pengembangan tanaman pangan (non padi) :	%					
Jagung Hibrida	ha	100%	100%	100%	0%	0%
Jagung Komposit	ha	0%	0%	600%	100%	150%
Kedelai	ha	0%	0%	1052%	100%	0%
Kacang Hijau	ha	0%	0%	50%	100%	80%
Jelai	ha	0%	0%	0%	100%	0%
Luas lahan pengembangan perbenihan :	ha					
Padi	ha	100%	100%	190%	100%	110%
Jagung	ha	100%	100%	333%	100%	133%
Luas Lahan Pengembangan buah-buahan	ha	96%	100%	43%	0%	25%
Luas Lahan Pengembangan sayuran dan biofarmaka :	ha					
Luas lahan pengembangan jahe	ha	80%	200%	50%	100%	0%
Luas Lahan pengembangan sayur-sayuran :		73%	122%	56%	100%	150%
Prosentase lahan terserang organisme pengganggu tanaman yang ditangani	%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Pengamat Hama Pertanian/POPT	Org	100%	100%	0%	1100%	380%
Dokumen RDKK :	Desa/Kel	100%	100%	100%	100%	100%
Pembangunan Damparit dan salurannya, PID serta JITUT	Unit	100%	309%	151%	100%	83%
Pembangunan Jalan Usaha Tani	Km	100%	410%	50%	100%	67%
Lahan sawah baru yang tercetak	ha	0%	100%	900%	100%	0%

Petugas Pengamat Hama Pertanian/POPT yang mengikuti pelatihan	Org	100%	100%	100%	100%	32%
Jumlah Alsintan yang diserahkan ke masyarakat	Unit	150%	1325%	3525%	100%	8475%
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	64%	69%	0%	100%	0%
Peningkatan Harga Komoditi Kopi dari Rp. 18.000 per kg tahun 2013 menjadi Rp.47.000 per kg tahun 2019 (Rp/Kg)	Rp.	0%	200%	100%	112%	100%
Minimal 25 % dari total produksi kopi dan kakao memenuhi standart mutu ekspor pada tahun 2019 (dari mutu asalan menjadi mutu standart ekspor)	%	220%	100%	100%	100%	120%
Perluasan Perkebunan Pada Lahan Kering (Ekstensifikasi) (Ha)	%					
Kopi	H/ton	NA	70%	20%	100%	0%
Cengkeh	H/ton	111%	45%	100%	100%	0%
Kakao	H/ton	100%	20%	100%	100%	0%
Kelapa	H/ton	0%	0%	0%	100%	0%
Pala	H/ton	0%	0%	0%	0%	0%
Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan (Intensifikasi, Rehabilitasi, dan Peremajaan), (Ha)	H/ton					
Kopi	H/ton	200%	100%	100%	100%	5%
Cengkeh	H/ton	0%	0%	100%	200%	40%
Kakao	H/ton	63%	43%	100%	83%	4%
Kelapa	H/ton	277%	46%	100%	143%	0%
Jumlah Kelompok Tani Yang Mengikuti SL-PTT Kopi/Kakao (Kelompok/Orang)	Klpg/Org	0%	100%	100%	0%	0%
Populasi ternak :						
Sapi	Ekor	92%	79%	78%	85%	76%
Kerbau	Ekor	88%	80%	79%	61%	67%
Kuda	Ekor	70%	69%	68%	49%	49%

Kambing	Ekor	87%	90%	89%	84%	85%
Babi	Ekor	88%	87%	86%	73%	87%
Distribusi bibit ternak kepada masyarakat:						
Sapi	Ekor	73%	145%	112%	0%	21%
Kerbau	Ekor	0%	0%	0%	0%	0%
Kambing	Ekor	50%	100%	135%	0%	153%
Babi	Ekor	17%	100%	166%	0%	0%
Luas areal HMT Golo Mongkok yang digarap.	ha	100%	NA	100%	0%	NA
Pengembangan ternak di Golo Mongkok :						
Sapi Penggemukan	Ekor	100%	100%	100%	100%	100%
Babi pejantan	Ekor	100%	0%	100%	0%	0%
Cakupan Vaksinasi Anthrax (% dari Populasi)	%	57%	54%	41%	100%	16%
Cakupan Vaksinasi SE (% dari Populasi)	%	49%	57%	17%	100%	16%
Persentase HPR yang divaksin (dari total populasi)	%	100%	101%	106%	100%	102%
Pengawasan perdagangan ternak antar pulau	Kali	100%	100%	250%	100%	250%
Produksi Perikanan	Ton	122%	198%	141%	136%	123%
Konsumsi Ikan	Kg/Kap/Thn	147%	180%	141%	5849%	122%
Cakupan bina kelompok nelayan	Klpk	60%	60%	194%	100%	56%
Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	131%	171%	143%	100%	124%
Jumlah petani yang mengikuti pelatihan SL-PHT	Org	100%	100%	100%	100%	20%
Jumlah petugas lapangan yang mengikuti pelatihan	Org	100%	100%	100%	100%	21%
Jumlah kelompok P3A yang dilatih	Klpk	40%	100%	250%	100%	350%
Dokumen data produksi tanaman pangan dan hortikultura	Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan pasca panen	Klpk	67%	100%	100%	100%	100%

Dokumen data potensi pertanian dan peternakan	Dokumen	0%	100%	200%	0%	200%
Jumlah Kelompok tani penerima bantuan bidang sarana dan prasarana yang dibina	Klpk	60%	600%	860%	100%	5640%
Jumlah Kelompok tani penerima bantuan bidang peternakan yang dibina	Klpk	100%	200%	150%	100%	2000%
Petugas yang mengikuti pelatihan	Org	0%	0%	100%	100%	3000%
Peternak yang mengikuti pelatihan	Org	0%	100%	100%	2%	220%
Jumlah petugas keswan yang mengikuti pelatihan	Org	0%	120%	120%	100%	100%
Cakupan Bina Kelompok Tani	%	100%	71%	105%	100%	93%
Prosentase Kelulusan SMK-PP Negeri I Poco Ranaka	%	100%	100%	100%	100%	0%
Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan)						
Rumah Potong Hewan Yang Dibangun	Unit	0	0	0	0	0%
Jumlah Puskesmas yang dibangun	Unit	100%	100%	100%	100%	100%
Pembangunan laboratorium keswan	Unit	0	0	0	0	0%
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	%	100%	81%	82%	0%	78%
Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB	%	100%	0%	0%	171%	0%
Nilai Tukar Petani	%	0%	0%	0%	0%	0%
Meningkatkan ketahanan pangan						
Regulasi Ketahanan Pangan	Dok	0	0	0	0	0%
Ketersediaan Pangan Utama	%	369%	222%	182%	211%	198%
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	%	100%	100%	100%	118%	103%
Penguatan cadangan pangan	%	56%	51%	174%	180%	60%
Ketersediaan Informasi Pasokan,Harga dan Akses Pangan di Daerah	%	100%	105%	101%	103%	102%
Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan.	%	113%	110%	104%	108%	107%

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	100%	83%	75%	75%	77%
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	148%	114%	119%	122%	125%
Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	0%	100%	100%	0%	0%
Meningkatnya jumlah pengunjung objek wisata						
Kunjungan Wisata	Org	187%	156%	0%	0%	0%
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	0%	0%	100%	9%	0%
Meningkatnya Daya saing koperasi dan UMKM						
Prosentase Koperasi aktif	%	100%	108%	73%	35%	36%
Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	Unit	100%	100%	100%	100%	0%
Jumlah BPR/LKM	Unit	100%	100%	100%	100%	0%
Usaha Mikro kecil dan Menengah	%	0%	100%	100%	100%	649%
Meningkatnya usaha industri kecil dengan mengoptimalkan penggunaan produk unggulan daerah dan bahan baku lokal						
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	0%	0%	0%	0%	0%
Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	%	0%	0%	0%	0%	0%
Pertumbuhan Industri	%	100%	100%	93%	72%	11%
Cakupan bina kelompok pengrajin	%	0%	0%	0%	0%	0%
Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kemudahan berinvestasi						
Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	0%	0%	100%	0%	0%
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	M	400%	700%	125%	0%	342%
Rasio daya serap tenaga kerja	%	0%	0%	18%	0%	143%
Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar)	%	0%	0%	0%	0%	0%
Lama Proses Perizinan	Hari	99%	100%	100%	0%	116%

Prosentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berdasarkan Jumlah Permohonan Yang Dimasukkan	%	100%	100%	100%	0%	100%
Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	Sektor	100%	900%	0%	0%	200%
Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan :						
Antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) tingkat kab/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	Kali	0%	0%	100%	0%	100%
Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota	Kali	0%	0%	0%	0%	33%
Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	tidak					
Pendaftaran penanaman modal daerah dalam negeri, izin prinsip penanaman modal dalam negeri, izin usaha penanaman modal dalam negeri, tanda daftar perusahaan (TDP) surat ijin usaha perdagangan (SIUP), perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang bekerja di satu kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota	%	100%	83%	100%	0%	100%
Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	Kali	0%	0%	100%	0%	100%
Terimplementasikannya sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi secara elektronik (SPIPISE)	Kali	0%	0%	100%	0%	100%
Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	Kali	100%	22%	56%	0%	0%
Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja						
Transmigran swakarsa	%	-	-	-	-	-
Angka partisipasi angkatan kerja	%	-	-	-	-	-
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun		-	-	-	-	-
Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	-	81%			
Pencari kerja yang ditempatkan	%					
Tingkat pengangguran terbuka	%	-	2,18			
Keselamatan dan perlindungan	%	-	-	-	-	-

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	-	-	-	-	-
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	-	-	-	-	-
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	-	-	-	-	-
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	-	-	-	-	-
Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	-	-	-	-	-
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	-	-	-	-	-
Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	-	-	-	-	-
Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	-	-	-	-	-
Meningkatnya pembinaan usaha pertambangan dan pelestarian lingkungan pada daerah tambang						
Pertambangan tanpa ijin	%	-	-	-	-	-
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	-	-	-	-	-
Tersedianya data jumlah hasil produksi usaha pertambangan dari 2 IUP Produksi	MT	-	-	-	-	-
Jumlah peta detail potensi tambang mineral	WP	-	-	-	-	-
Jumlah Reklamasi Lahan Bekas Tambang pada 2 IUP produksi	Ha	-	-	-	-	-
Terlaksananya Pengawasan Pengangkutan Hasil Tambang di 2 IUP Produksi dan 17 SIPR	Kali	-	-	-	-	-
Tersedianya regulasi tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Batubara sebanyak 1 perda	Perda	-	-	-	-	-
Terlaksananya pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat yang belum memiliki SIPR sebanyak 17 lokasi	SIPR	-	-	-	-	-
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Akibat Kegiatan Usaha Pertambangan Umum dan Pertambangan Rakyat		-	-	-	-	-
	SIPR	-	-	-	-	-

Tersedianya master plan pengembangan energi	Dokumen	-	-	-	-	-
Jumlah penerangan jalan umum bagi masyarakat di 9 Kec	Unit	-	-	-	-	-
Jumlah SHS terpelihara	Unit	-	-	-	-	-
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Yang Bergerak di Bidang Bahan Bakar Minyak (BBM Bersubsidi) untuk 9 kecamatan		-	-	-	-	-
	SPBU	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
Jumlah pengembangan energi biogas	Unit	-	-	-	-	-
Jumlah data potensi mineral untuk 9 Kecamatan	Kec	-	-	-	-	-
Jumlah data potensi air tanah untuk 9 kecamatan	Lokasi	-	-	-	-	-
Jumlah Pembangunan Solar Water Pump	Lokasi/Ke c	-	-	-	-	-
Jumlah Septic Tank dan Sumur Resapan	Unit	-	-	-	-	-

Misi IV Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel yang Berkarakter Melayani

Sasaran Dan Indikator Kinerja	Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten/kota Tahun Ke- (%)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terarah					
Tersedianya Dokumen Perencanaan Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA					
RPJPD	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
RPJMD	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
RKPD	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Renstra SKPD	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Renja SKPD	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
KUA	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
PPAS	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
RTRW	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
PWTJP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PWTJM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD	105,9	100,0	94,7	100,0	100,0
Penjabaran Program dan Kegiatan RKPD Kedalam KUA dan PPAS	105,9	100,0	94,7	100,0	100,0
Penjabaran Program dan Kegiatan KUA dan PPAS Kedalam APBD	111,8	105,6	100,0	100,0	100,0
Prosentase Pelaksanaan Program /Kegiatan Yang Tepat Waktu	105,9	100,0	94,7	99,0	99,0
Frekuensi Penyelenggaraan Forum Perencanaan Interaktif dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat					

Musrenbang Desa/Kelurahan	193,0	176,0	176,0	176,0	176,0
Musrenbang Kecamatan	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Musrenbang Kabupaten	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Forum SKPD	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Prosentase Program Kegiatan Renja Yang Diakomodir Dalam RKA-SKPD	106,3	100,0	100,0	100,0	100,0
Tersedianya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Tersedianya Sistem Informasi Pengolahan Data (Jenis)	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Prosentase Aparatur Perencana Yang Telah Memiliki Kemampuan Teknis Perencana	0,0	100,0	135,2	106,6	97,8
Sistim Informasi Manajemen Pemda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prosentase kegiatan pembangunan fisik yang diselesaikan tepat waktu (%)	90,0	90,0	90,0	93,0	92,0
Prosentase penerapan pengadaan barang dan jasa system elektronik	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Prosentase pengaduan masyarakat yg terselesaikan	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Cakupan Desa yang mendapatkan Desiminasi Informasi	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Prosentase Desa Yang menerapkan STBM (Jlh Desa STBM / Total Desa/Kel x 100 %	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Prosentase Desa yang menyampaikan laporan tepat waktu (Jlh Desa STBM / Total Desa/Kel x 100 % Jlh Desa	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
Prosentase kegiatan Musrenbang Kecamatan	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Cakupan PKK aktif Kecamatan	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi					
Persentase ketepatan waktu rata-rata penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D)	100	100	100	100	100
Persentase SKPD yang menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang online dan terintegrasi	100	100	100	100	100
Pelaksanaan laporan keuangan daerah tepat waktu	100	100	100	100	100
Cakupan SKPD yang menyampaikan surat pertanggungjawaban tepat waktu	100	100	100	100	100
Opini audit BPK terhadap laporan keuangan daerah	100	100	0	0	100
Persentase Aset yang diinventarisasi secara akurat dan up-to-date	0	0	0	100	100
Cakupan Sertifikat tanah milik pemerintah dan Masyarakat	100	100	100	105	300
Cakupan kecamatan yang batas wilayahnya sesuai Peta Rupa Bumi		0	0	0	0
Pemekaran wilayah kecamatan dari 9 Kecamatan tahun 2013 menjadi 12 Kecamatan pada tahun 2019	0	0	0	0	0
Cakupan Persehatian Tapal Batas Wilayah Kecamatan	0	0	0	0	0
Persentase Data Sarana Ekonomi Daerah Yang Tersedia terhadap 18 unit jenis sarana ekonomi daerah	0	0	0	0	0
Pertumbuhan Ekonomi					
Kemiskinan	50	61	60	58	58
Prosentase Koordinasi dan Pembinaan Pembangunan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100	100	100	0	0

Persentase Data Produksi Daerah Yang Tersedia terhadap 96 Buah Data Produksi Daerah	0	0	0	0	0
Persentase SKPD yang menyampaikan Dokumen LAKIP yang terintegrasi dan tepat waktu	100	100	100	100	100
Prosentase Pejabat Negara (Pejabat Daerah) yang menyampaikan LHKPN terhadap jumlah pejabat yang diwajibkan	100	100	100	100	100
Prosentase partisipasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah melalui APKASI	100	100	100	100	100
Persentase SKPD yang memperoleh penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan dan pertauran lebih tinggi	100	100	100	100	100
Persentase Aparatur Yang Lulus Diklat Penjurangan (Prajabatan dan PIM)	100	100	100	100	100
Prosentase Aparatur Yang Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)	100	100	95	88	88
Rasio PNSD Terhadap Jumlah Penduduk	70	53	1	0	0
Persentase Jabatan Struktural Yang Terisi Sesuai Dengan Persyaratan dan Standar Kebutuhan	55	69	72	76	80
Prosentase Jumlah PNS Yang Ditingkatkan Pendidikan Terakhir (Dari SLTA ke Diploma, dari Diploma ke Sarjana dan Dari Sarjana ke Pasca Sarjana)	15	15	10	119	0
Prosentase PNS Yang Terlayani Kenaikan Pangkatnya	100	100	85	122	121
Cakupan PNS yang mendapatkan penghargaan Satya Lencana	100	100	93	130	130
Cakupan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	100	100	100	100	250
Persentase aparatur yang lulus dan memiliki sertifikat Diklat Teknis dan Fungsional sesuai bidangnya	100	100	63	100	100
Jumlah SKPD yang Arsipnya Didata dan ditata	100	50	50	50	100
Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	0	0	0	0	0
Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Arsip	0	0	25	0	25
Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	0	100	104	98	92
Rasio bayi berakte kelahiran	9	100	121	122	55
Rasio pasangan berakte nikah	17	100	100	139	450
Kepemilikan KTP	87	100	103	99	96
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	110	100	108	100	118
Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	100	100	100	100	100
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100	100	100	100	100
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	62	74	76	78	92
Cakupan penerbitan akta kelahiran	22	24	85	99	53
Jumlah Tenaga Aparatur Pengawasan Terlatih	100	100	140	100	320
Jumlah Tenaga Auditor Fungsional Terlatih	100	200	50	100	180
Jumlah Obyek Pemeriksaan Internal Secara Berkala	100	110	217	100	62

Jumlah Obyek Pemeriksaan Khusus	100	67	20	100	27
Jumlah Kegiatan Pengendalian Manajemen pelaksanaan Kebijakan KDH	100	83	100	100	100
Jumlah Obyek Pemeriksaan Kasus	100	67	20	100	3
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang Didistribusikan ke OP	100	88	100	100	100
Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	100	100	100	100	76
Meningkatnya kapasitas pembiayaan pembangunan daerah					
Meningkatnya PAD	129,7	224,1	210,1	357,9	183,4
Meningkatnya Pendapatan Daerah	104,0	116,4	129,6	120,2	132,4
Jumlah Potensi obyek pajak dan Retribusi					
Hotel	133,3	100,0	400,0	100,0	0,0
Restoran	1500,0	100,0	300,0	100,0	0,0
Reklame	1120,0	100,0	50,0	100,0	0,0
PBB	100,0	2,0	100,0	100,0	0,0
Retribusi	516,7	100,0	100,0	100,0	0,0
Cakupan Koordinasi dan evaluasi penerimaan daerah dari komponen PAD bersama 15 SKPD pengelola PAD	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Jenis dan jumlah bank dan cabang	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jenis, kelas, dan jumlah restoran	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terbukanya aksesibilitas bagi warga terhadap informasi pembangunan					
Jumlah jaringan komunikasi	0	0	100	100	100
Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0	0	0	100	0
Jumlah surat kabar nasional/lokal	100	100	100	100	40
Jumlah penyiaran radio/TV lokal	100	100	100	100	100
Web site milik pemerintah daerah	100	100	100	100	100
Pameran/expo	0	0	100	100	100
Rasio ketersediaan daya listrik	0	0	0	100	0
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	0	0	0	100	0
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	0	0	0	100	0
Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui :					
Media massa seperti majalah, radio, dan televisi	100	100	100	100	100
Media baru seperti website (media online)	0	0	0	0	0
Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	0	0	0	0	0
Media interpersonal seperti sarasehan,ceramah/diskusi, dan lokakarya	0	0	0	0	0
Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho	0	0	0	100	8
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	0	0	0	100	44

Cakupan Penerimaan Kunjungan Kerja Penjabat Negara /Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen Dalam / Luar Negeri.	0	17	0	100	100
Cakupan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	100	92	100	50
Cakupan Rapat Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	100	100	34	100	100
Cakupan Pelayanan Keprotokolan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pejabat Pemerintah	268	321	100	99	273
Cakupan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dengan media massa	0	0	0	200	300
Cakupan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah	167	143	125	1000	1000
Prosentase pengelolaan dan penyajian data informasi	0	0	0	0	0
Cakupan pelaksanaan Dialog / Audensi dengan Tokoh - tokoh Masyarakat Pimpinan /Anggota Organisasi sosial & Kemasyarakatan	100	100	100	100	67
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis					
Kegiatan pembinaan terhadap LSM,Ormas dan OKP :					
Ormas	0	40	20	20	20
LSM	100	17	8	100	100
OKP	0	200	100	100	100
Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	2	4	2	100	100
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga situasi ketentraman dan keterlibatan umum					
Jumlah Penegakan Perda	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Cakupan patroli petugas Satpol PP	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	19,5	19,5	100,0	100,0	97,4
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Meningkatnya penataan produk hukum daerah					
Prosentase penyelesaian kasus hukum yang melibatkan pemda	100	100	100	100	0%
Jumlah Perda dan Perbub yang dihasilkan					
Peraturan Daerah	0	807	67	100	67%
Peraturan Bupati	0	233	213	100	347%
Cakupan Desa Binaan Sadar HUKum	0	200	78	100	100%
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan berdemokrasi					
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	13110%	12147%	12079%	10000%	621%
Prosentase Kegiatan DPRD yang dilaksanakan tepat waktu (Pembahasan Perda, Pansus)	10000%	10000%	10000%	10000%	10000%

Prosentase Jumlah Perda yang dibahas tepat waktu	10000%	10000%	10000%	10000%	10000%

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1 Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Per Bulan

Pengeluaran rata-rata per kapita menunjukkan tingkat konsumsi rumah tangga. Semakin besar tingkat konsumsi berarti semakin baik kondisi perekonomian masyarakat suatu daerah. Sebaliknya, semakin kecil tingkat konsumsi berarti tingkat kesejahteraan perekonomian masyarakat di suatu daerah juga pasti rendah. Pengeluaran konsumsi dihitung berdasarkan pengeluaran untuk bahan makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Semakin tinggi persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran berarti semakin buruk kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Karena makanan adalah prioritas pengeluaran rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan ekonomi rendah, maka tidak banyak pendapatan yang tersisa untuk kebutuhan non makanan.

Pengeluaran per kapita untuk makanan per bulan di Kabupaten Manggarai Timur tidak banyak berubah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, dan hanya terjadi sedikit peningkatan. Jumlahnya pun lebih rendah dibandingkan dengan pengeluaran per kapita Provinsi NTT dan Nasional. Pada tahun 2015 dari total pengeluaran (Rp. 426,410), sebesar 61,30% (Rp. 261,375) dialokasikan untuk pengeluaran bahan makanan, dan sebesar 38,70% (Rp. 165,035) digunakan untuk pengeluaran bahan nonmakanan. Sementara pada tahun 2016 dari total pengeluaran (Rp. 451,068), sebesar 59,12% (Rp. 266,666) dialokasikan untuk pengeluaran makanan, dan sisanya (40,88%) dialokasikan untuk pengeluaran nonmakanan. Perkembangan pengeluaran per kapita menurut kelompok makanan penduduk Kabupaten Manggarai Timur bisa dilihat pada Tabel 2.130. di bawah ini.

Tabel 2.130.
Pengeluaran Per Kapita Penduduk Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015-2017

No	Uraian	Kabupaten Manggarai Timur		Nusa Tenggara Timur			Nasional		
		2015	2016	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kelompok Makanan (Rp.)	261,375	266,666	298,180	312,312	399,251	412,462	460,639	527,956
2	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan	165,035	184,402	235,710	264,315	282,232	456,361	485,619	508,541

	Kelompok Non Makanan (Rp.)								
3	Total Pengeluaran (Rp.)	426,410	451,068	533,890	576,627	681,483	868,823	946,258	1,036,497
4	Persentase makanan terhadap total pengeluaran (%)	61.30	59.12	55.85	54.16	58.59	47.47	48.68	50.94
5	Persentase makanan terhadap total pengeluaran (%)	38.70	40.88	44.15	45.84	41.41	52.53	51.32	49.06

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2018 dan BPS Kabupaten Manggarai Timur, 2018.

2.4.2.

Fokus Fasilitas/Infrastruktur Daerah

2.4.2.1.

Kondisi Jalan

Salah satu fasilitas/infrastruktur yang mendukung daya saing daerah adalah kondisi jalan dalam kondisi baik. Pada tahun 2017 kondisi jalan di Kabupaten Manggarai Timur yang berkondisi baik sepanjang 469,429 Km, meningkat menjadi 490,548 Km pada tahun 2018. Jumlah tersebut belum sampai separuh dari total panjang jalan daerah di Kabupaten Manggarai Timur, yaitu sepanjang 1,281.29 Km. Kondisi jalan di Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.131. di bawah ini.

Tabel 2.131
Kondisi Jalan Kabupaten Manggarai Timur Sampai Tahun 2018

Tahun	Kondisi Jalan							
	Baik (km)	%	Sedang (km)	%	Rusak Ringan (km)	%	Rusak Berat (km)	%
2017	469,429	36,64	237,601	18,54	280,194	21,87	294,067	22,95
2018	490,548	38,29	220,132	17,18	278,371	21,73	292,237	22,81

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.4.2.2.

Luas Wilayah Produktif

Wilayah produktif di Kabupaten Manggarai Timur dimanfaatkan sebagai kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan pariwisata. Persebaran keempat wilayah produktif tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.132. di bawah ini. Untuk kawasan tanaman pangan, luas terbesar berada di Kecamatan Kota Komba, yaitu 331.9269 Ha, dan terkecil

6,1865 di Kecamatan Elar. Sementara kawasan hortikultura terluas terdapat di Kecamatan Kota Komba sebesar 36,218.65 Ha dan terkecil 6,299.79 Ha di Kecamatan Poco Ranaka Timur. Kemudian kawasan perkebunan terluas terdapat di Kecamatan Kota Komba juga, yaitu 2,534.07 Ha, dan terkecil 137.4145 Ha di Kecamatan Poco Ranaka Timur. Untuk kawasan pariwisata terluas terdapat di Kecamatan Borong, yaitu sebesar 14.1212 Ha dan terkecil 9.64 Ha di Kecamatan Sambu Rampas.

Tabel 2.132
Luas Wilayah Produktif di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018

N o	Kecamatan	Kawasan Tanaman Pangan (Ha)	Kawasan Hortikultura (Ha)	Kawasan Perkebunan (Ha)	Kawasan Pariwisata (Ha)
1	Rana Mese	60.1987	11,243.46	235.542	-
2	Borong	321.6567	7,066.10	456.6994	14.1212
3	Kota Komba	331.9269	36,218.65	2,534.07	-
4	Poco Ranaka	-	7,423.71	369.0476	-
5	Poco Ranaka Timur	88.345	6,299.79	137.4145	-
6	Sambu Rampas	142.7173	14,574.27	498.1421	9.64
7	Elar	6.1865	14,311.42	915.8229	9.7823
8	Elar Selatan	69.053	18,163.34	1,461.49	-
9	Lamba Leda	2.4128	16,200.07	247.1959	-
Total		1,022.50	131,500.81	6,855.42	33.5435

Sumber: Naskah Akademik RTRW Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.4.2.3. Jenis dan Jumlah Bank

Bank-bank di Kabupaten Manggarai Timur terdiri atas bank BUMN dan juga bank daerah. Bank-bank tersebut memiliki andil dalam mendukung aktivitas perekonomian di Kabupaten Manggarai Timur karena Bank-bank tersebut menyediakan kredit, terutama Kredit Usaha Kecil dan Kredit Usaha Rakyat. Bank-bank di Kabupaten Manggarai Timur antara lain BRI, BNI, dan BPD (Bank Pembangunan Daerah/Bank NTT). Bank-bank tersebut sudah memiliki cabang di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur.

2.4.2.4. Restoran dan Rumah Makan

Ketersediaan restoran dan rumah makan merupakan bagian dari fasilitas yang mendukung kenyamanan wisatawan maupun pengunjung lain ke NTT, baik penduduk nasional maupun mancanegara. Perkembangan jumlah restaurant dan rumah makan bisa dilihat di Tabel 2.133. di bawah ini.

Tabel 2.133.
Jumlah Restoran dan Rumah Makan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

Wilayah	Jumlah				
	2014	2015	2016	2017	2018
Manggarai Timur	12	12	12	12	42
Manggarai	72	72	72	72	119
Ngada	88	104	104	104	50
Nusa Tenggara Timur	959	975	976	1683	2149

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2018

Secara keseluruhan, ada peningkatan jumlah rumah makan dan restoran di Kabupaten Manggarai Timur, yaitu dari 12 unit pada tahun 2017 menjadi 42 pada tahun 2018. Namun jumlah tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah restaurant dan rumah makan di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Ngada, sebagaimana yang tunjukkan pada Tabel 2.134 di atas.

2.4.2.5. Jumlah Akomodasi

Salah satu komponen daya saing daerah, terutama terkait pariwisata, adalah ketersediaan akomodasi. Data jumlah hotel di Kabupaten Manggarai Timur dari tahun 2015-2017 tidak mengalami peningkatan, malah menurun 1 hotel pada tahun 2017 dari 7 hotel pada tahun 2016 menjadi 6 hotel pada tahun 2017. Sedangkan jumlah kamar mengalami peningkatan dari 66 tahun 2016 menjadi 71 kamar pada tahun 2017. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan jumlah akomodasi hotel dan kamar di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Ngada, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.135. di bawah ini.

Tabel 2.135
Jumlah Akomodasi Hotel di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2018

Wilayah	Hotel			Kamar		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Manggarai Timur	7	7	6	66	66	71
Ngada	23	23	27	290	290	328
Manggarai	18	18	14	299	299	282
Nusa Tenggara Timur	334	334	365	6,491	6,491	8,316

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2018

2.4.2.6. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Listrik di Kabupaten Manggarai Timur terdiri atas Listrik PLN dan Listrik Non PLN. Sampai dengan tahun 2018 total pelanggan listrik di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak

17,365 pelanggan, yang terdiri atas 13,509 pelanggan listrik PLN; 116 pelanggan listrik seken; 3,740 pelanggan listrik EBTB. Jika dibandingkan antara jumlah KK di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 67,835 KK dengan jumlah pelanggan listrik, maka rasio elektrifikasi di Kabupaten Manggarai Timur baru mencapai 25,60%. Hal itu berarti bahwa sampai dengan tahun 2018 terdapat 74,40% atau sebanyak 50,470 KK yang belum memiliki penerangan listrik.

2.4.2.7.

Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon Seluler

Pelaksanaan program pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu indikator kesejahteraan adalah kepemilikan telepon seluler dan akses internet dalam bidang pemanfaatan teknologi informasi, serta program untuk peningkatan kesejahteraan lainnya. Dari total jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2018 (267,310 jiwa), sebanyak 88,159 jiwa yang sudah memiliki telepon seluler atau sebanyak 32,98% dari total jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Timur.

2.4.3.

Iklim Berinvestasi

2.4.3.1.

Jumlah Kriminalitas

Kabupaten Manggarai Timur termasuk kabupaten yang sangat aman dengan jumlah kriminalitas yang relatif kecil dan dapat dikendalikan oleh aparat keamanan. Dalam kurun waktu lima tahun, yaitu tahun 2009-2013, angka kriminalitas yang timbul dan tertangani tercatat berbeda setiap tahunnya. Pada tahun 2013 jumlah kriminalitas di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 73 kasus, meningkat dari 10 kasus pada tahun 2009. Umumnya tindakan kriminalitas di Kabupaten Manggarai Timur merupakan kasus kriminalitas ringan.

2.4.3.2.

Jumlah Demonstrasi

Kejadian demonstrasi di Kabupaten Manggarai Timur sepanjang tahun 2014-2018 tercatat sebanyak 3 kejadian, yaitu demonstrasi bidang sosial ketenagakerjaan. Demonstrasi tersebut terjadi sebagai reaksi atas keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur dan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur atas kebijakan yang dianggap bermasalah oleh Tenaga Harian Lepas (THL) pada dua Dinas dimaksud. Selain itu, ada juga reaksi dari PKL yang ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja karena menjual di lokasi yang tidak sesuai dengan fungsinya sebagai tempat

jualan. Meskipun demikian, tidak ada kejadian demonstrasi yang cukup berarti dan mengganggu keamanan dan ketenteraman kehidupan bermasyarakat.

2.4.3.3. Lama Proses Perizinan

Pada dasarnya pelayanan publik mencakup tiga aspek, yaitu pelayanan barang, jasa dan administratif. Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, begitu halnya yang terkait dengan perizinan usaha. Proses perizinan, khususnya perizinan usaha secara langsung berpengaruh terhadap keinginan dan keputusan calon pengusaha atau investor untuk menanamkan modalnya. Menurut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai Timur, secara umum penyelesaian proses perizinan di Kabupaten Manggarai Timur memerlukan waktu antara 1 s.d. 6,24 hari, hanya beberapa jenis perizinan yang memerlukan penyelesaian maksimal lebih dari 1 minggu.

2.4.4. Sumber Daya Manusia

2.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja ditentukan oleh tingkat pendidikan tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi kualitas tenaga kerja; sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin rendah pula tingkat kualitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja yang baik akan mempengaruhi tingkat produktivitas, kesempatan untuk bekerja dan membantu berkurangnya angka pengangguran. Indikator kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari rasio lulusan D-1/D-2/D-3/S1/S2/S3 terhadap total jumlah penduduk. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur, Jumlah lulusan D1-S2 di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 12,255 jiwa, dari jumlah tersebut yang terbanyak adalah lulusan S1 (8,333). Sementara jumlah penduduk di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2018 sebanyak 267,310 jiwa. Dengan demikian, rasio lulusan D1-S2 terhadap jumlah penduduk adalah sebesar 4.59 persen. Hal itu berarti kualitas tenaga kerja di Kabupaten Manggarai Timur cukup rendah, karena sebagian besar tenaga kerjanya lulusan pendidikan menengah ke bawah.

2.4.4.2. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan

dapat dilihat menurut usia yakni Rasio Ketergantungan Muda dan Rasio Ketergantungan Tua. Rasio Ketergantungan Muda ialah perbandingan jumlah penduduk umur 0-14 tahun dengan jumlah penduduk umur 15-64 tahun, sementara Rasio Ketergantungan Tua ialah perbandingan jumlah penduduk umur 65 tahun ke atas dengan jumlah penduduk di usia 15-64 tahun.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu wilayah apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sebaliknya persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Pada tahun 2018 terdapat 70,003 jiwa penduduk yang berumur di bawah 15 tahun (tidak produktif muda), dan berumur di atas 64 tahun (tidak produktif tua) sebanyak 10,633 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk berusia 15-64 tahun sebanyak 186,674 jiwa. Berdasarkan struktur penduduk tersebut, maka Rasio Kebergantungan di Kabupaten Manggarai sebesar 43,20%. Hal itu berarti setiap 100 jiwa penduduk usia produktif di Kabupaten Manggarai Timur harus menanggung kebutuhan ekonomi kurang lebih sebanyak 43 jiwa penduduk tidak produktif. Rasio kebergantungan ini cukup tinggi, sehingga perlu ada upaya menekan laju pertumbuhan penduduk karena beban tertinggi adalah penduduk berusia di bawah 15 tahun.

2.5

Evaluasi RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2019

Pelaksanaan rencana pembangunan lima tahunan tahap ke-2 dari RPJPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009-2029, sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2019, secara umum dievaluasi capaiannya di bawah ini. Secara umum dari 24 indikator pada Misi I, terdapat 15 indikator yang sudah tercapai, 7 indikator yang akan tercapai dan 2 indikator yang perlu diusahakan, yaitu indikator 1.3. Kemudian indikator-indikator dari Misi II yang sudah tercapai sebanyak 7 indikator; 9 indikator berada dalam proses pencapaian, dan 2 indikator yang masih perlu diusahakan, yaitu indikator yang berkaitan dan pelayanan kelistrikan dan transportasi udara. Misi III memiliki 16 indikator dan terdapat 10 indikator yang sudah tercapai, 4 indikator akan tercapai, dan 2 indikator yang perlu diusahakan. Kemudian dari 13 indikator pada Misi IV, terdapat 8 indikator yang sudah tercapai, 4 indikator yang akan tercapai, dan 1 indikator yang perlu diusahakan lagi untuk mencapainya. Capaian target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.136. di bawah ini.

Tabel 2.136
Capaian Target RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014-2019

Misi	Strategi		Jumlah Indikator	Status Capaian			Ket.
				Tercapai	Akan Tercapai	Perlu Usaha	
MISI I: Membangun SDM Kabupaten Manggarai Timur yang Produktif dan Berdaya Saling	1.1.	Meningkatkan Partisipasi Pendidikan pada Setiap Jenjang Pendidikan, Pelayanan Pendidikan yang Merata dan Berkeadilan, serta Pendidikan yang Dapat Memenuhi Kebutuhan Lapangan Usaha	3	2	1		
	1.2.	Mewujudkan Mutu dan Keunggulan pendidikan serta Tata Kelola pendidikan yang baik dan Akuntabel	3	3			
	1.3.	Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan daerah, Meningkatkan kesempatan pemuda berorganisasi dan berkeasi, Pembinaan pemuda, Meningkatkan prestasi olahraga usia dini di lingkungan sekolah, Meningkatkan pembinaan atlet atlet berprestasi, dan Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga	2		1	1	
	1.4.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Akses Pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin.	3	1	1	1	
	1.5.	Pembangunan dan Peningkatan standar mutu pelayanan RSUD dan Meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan puskesmas dan jaringannya	3	1	2		
	1.6.	Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak (Revolusi KIA)	2	2			
	1.7.	Penguatan pemberdayaan masyarakat serta penyehatan lingkungan	1	1			
	1.8.	Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan KB	1	1			
	1.9.	Penanganan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan Mewujudkan Pengarusutamaan Gender dan meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan.	1	1			
	1.10.	Melindungi Remaja dan anggota keluarga dari bahaya narkoba	1	1			
	1.11.	Pengurangan Masalah Sosial dan memberikan pelayanan terhadap PMKS dan Peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial	1		1		

	1.1 2.	Penguatan Kelembagaan, Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan Peningkatan pemberdayaan social, budaya dan ekonomi masyarakat.	1	1			
	1.1 3.	Menurunkan jumlah penduduk miskin	1	1			
	1.1 4.	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan keragaman dan kekayaan budaya Manggarai Timur	1		1		
Misi	Strategi		Jumlah Indikator	Status Capaian			Ket.
				Tercapai	Akan Tercapai	Perlu Ditinjau	
MISI II Membuka Isolasi Daerah dan Membangun Infrastruktur secara Merata	2.1.	Meningkatkan Infrastruktur Jaringan Jalan yang Nyaman, Berkualitas dan Merata	2	1	1		
	2.2.	Pemeliharaan Peralatan Kebinamargaan	2	1	1		
	2.3.	Mengembangkan dan Memelihara Sumber Air Baku untuk Penyediaan Air Bersih dalam Rangka Peningkatan Cakupan dan Kontinuitas Pelayanan Air, serta Mengembangkan dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Sistem Drainase	2		2		
	2.4.	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi untuk Peningkatan Produktivitas Pertanian	3	1	2		
	2.5.	Percepatan Penyiapan Infrastruktur pada Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh	1		1		
	2.6.	Tersedianya prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang Memadai; dan Meningkatnya Keselamatan Berlalu Lintas	2		1	1	
	2.7.	Mengembangkan dan Meningkatkan Pemerataan Energi Listrik, serta Mengembangkan dan Meningkatkan Pemerataan Pasokan Listrik Pedesaan	1			1	
	2.8.	Mendorong Pengelolaan Sampah Perkotaan secara Berkelanjutan Melalui Peningkatan Pelayanan Persampahan; Pengendalian Pencemaran Lingkungan Sejak Dini; serta Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya Air dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Publik	3	2	1		
	2.9.	Mewujudkan Ketahanan Terhadap Bencana	2	2			
	2.10.	Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	2	1	1		
Misi	Strategi		Jumlah	Status Capaian			Ket.

			Tercapai	Akan Tercapai	Perlu Usaha	
MISI III Menumbuhkembangkan Ekonomi Rakyat melalui Optimalisasi Keunggulan Lokal	3.1.	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	1		
	3.2	Mengembangkan Komoditi Perkebunan sebagai Produk Unggulan Daerah	1		1	
	3.4.	Mengembangkan Jenis dan Luas Areal Tanaman Perkebunan	1			1
	3.5.	Meningkatkan Jenis dan Populasi Ternak pada Tiap Rumah Tangga	1		1	
	3.6.	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Perikanan Budidaya dan Tangkat serta Kelautan	1	1		
	3.7.	Meningkatkan SDM Pertanian yang Handal	1		1	
	3.8.	Pengembangan Akses dan Penguatan Kelembagaan Petani	1	1		
	3.9.	Peningkatan Usaha Penanganan Pasca-Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	1			1
	3.10.	Meningkatkan Stok Pangan Masyarakat	1	1		
	3.11.	Meningkatkan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	1	1		
	3.12.	Meningkatkan Penanganan Keamanan Pangan	1	1		
	3.13.	Meningkatkan Promosi Pariwisata Melalui Media Cetak dan Elektronik; Meningkatkan Aksesibilitas Menuju Obyek Wisata; Menjalin Kerja Sama antar Daerah dan Pelaku Bisnis Pariwisata; Memberi Kemudahan Berinvestasi bagi Investor Pariwisata.	1			1
	3.14.	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	1			1
	3.15.	Meningkatkan Industri Kecil Berbasis Produk Unggulan Daerah	1		1	
	3.16.	Meningkatkan Sistem dan Jaringan Distribusi Barang, serta Pengembangan Pasar Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Pasar Tradisional.	1	1		
	3.17.	Meningkatkan Pelayanan Perizinan, dan menciptakan Iklim Investasi dan Usaha yang Kondusif dalam Sektor Ekonomi Unggulan; serta Penyiapan Data tentang Potensi Investasi Sektoral Daerah	1	1		

Misi		≡ E	Status Capaian	Ket.

	Strategi			Tercapai	Akan Tercap	Perlu Ilmiah	
MISI IV Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel yang Berkarakter Melayani	4.1.	Mewujudkan Perencanaan yang Berkualitas dan Akuntabel	1	1			
	4.2.	Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah	1		1		
	4.3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1			1	
	4.4.	Mewujudkan Kelembagaan yang Profesional Didukung Aparatur yang Handal	1	1			
	4.5.	Meningkatkan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	1	1			
	4.6.	Meningkatkan Pendapatan Daerah	1		1		
	4.7.	Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi untuk Diseminasi Program Pembangunan dan Pelayanan Publik.	1	1			
	4.8.	Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Pendidikan Politik dan Perilaku Demokratis.	1		1		
	4.9.	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Melalui Penyuluhan dan Pengoptimalan Fungsi Lembaga Adat dan Lembaga Agama; Peningkatan Koordinasi dengan Penegak Hukum; serta Peningkatan Keterampilan Tenaga Keamanan Lingkungan.	3	1	2		
	4.10	Menata Produk Hukum Daerah dan Meningkatkan Budaya Taat Hukum.	1	1			

Sumber: Bappeda Kabupaten Manggarai Timur, 2018

2.6

Kondisi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

2.6.1

Kondisi Umum Capaian TPB

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berperan penting sebagai acuan dalam proses perencanaan dan pembuatan kebijakan. TPB dapat menjadi instrumen dalam perumusan isu strategis untuk penyempurnaan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan. Lagi pula pencapaian TPB menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan mulai dari tingkat nasional (antarkementerian/lembaga), provinsi, hingga tingkat kabupaten/kota. Ada 4 pilar TPB, yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan tata kelola dan 4 pilar tersebut memiliki tujuannya masing-masing. Di bawah ini adalah kondisi capaian TPB di Kabupaten Manggarai Timur.

Tabel 2.137
Jumlah Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan di Kabupaten Manggarai Timur

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Jumlah Indikator	Telah Mencapai Target Nasional	Belum Mencapai Target Nasional	Total Jumlah Indikator Yang Sudah Dilaksanakan
1	Tanpa Kemiskinan	26	1	0	1
2	Tanpa Kelaparan	11	2	1	3
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	37	2	1	3
4	Pendidikan Berkualitas	13	1	3	4
5	Kesetaraan Gender	13	2	1	3
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	12	0	3	3
7	Menjamin Akses Energi	4	0	1	1
8	Pertumbuhan Ekonomi Dan Pekerjaan Layak	15	0	1	1
9	Infrastruktur, Industri dan Inovasi	7	2	4	6
10	Mengurangi Kesenjangan	11	0	0	0
11	Kota dan Permukiman Berkelanjutan	11	0	1	1
12	Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan	4	0	0	0
13	Penanganan Perubahan Iklim	3	0	0	0
15	Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	3	0	0	0
			0	0	0
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Kokoh	21	0	0	0
17	Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	13	0	1	1
Total		204	10	17	27

Sumber: KLHS Kabupaten Manggarai Timur, 2018

Seperti yang telah ditunjukkan pada Tabel 2.137. di atas, umumnya indikator TPB belum banyak dicapai di Kabupaten Manggarai Timur. Indikator yang sudah dilaksanakan oleh Kabupaten Manggarai Timur dan mencapai target nasional sebanyak 10 indikator (7,46%) dari 134 indikator, yang menjadi kewenangan Kabupaten Manggarai Timur untuk mencapainya. Sementara indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional sebanyak 17 indikator (12,69%) dan indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 47 indikator (35,07%) dan indikator yang datanya tidak tersedia sebanyak 60 indikator (44,78%).

2.6.2

Capaian Target Indikator TPB Pilar Sosial

Pilar Sosial mencakup lima tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 1, Tujuan 2, Tujuan 3, Tujuan 4, dan Tujuan 5. Total untuk pilar sosial adalah sebanyak 100 indikator. Dari total 100 indikator, terdapat 8 indikator (8%) yang telah mencapai target, dan

6 indikator (6%) belum mencapai target. Secara umum indikator TPB Pilar Sosial yang sudah dilaksanakan sebanyak 14 indikator.

2.6.3

Capai Target Indikator TPB Pilar Ekonomi

Pilar Ekonomi mencakup lima tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 7, Tujuan 8, Tujuan 9, Tujuan 10, dan Tujuan 17. Total untuk Pilar Ekonomi adalah sebanyak 50 indikator. Dari total 50 indikator, terdapat 2 indikator (4%) telah mencapai target, dan 6 indikator (12%) belum mencapai target. Total indikator Pilar Ekonomi yang telah dilaksanakan sebanyak 8 indikator (16%). , 1 indikator perlu pendataan, 1 indikator perlu peningkatan, dan 40 indikator tidak ada data.

2.6.4

Capaian Target Indikator TPB Pilar Lingkungan Hidup

Pilar Lingkungan Hidup mencakup lima tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 6, Tujuan 11, Tujuan 12, Tujuan 13, dan Tujuan 15. Total untuk Pilar Lingkungan Hidup adalah sebanyak 33 indikator. Dari total 33 indikator, belum satu pun indikator yang telah mencapai target, dan 4 indikator (12,12%) belum mencapai target. Total indikator Pilar Lingkungan Hidup yang sudah dilaksanakan sebanyak 4 indikator.

2.6.5

Capaian Target Indikator TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan

Pilar hukum dan tata kelola pemerintahan mencakup satu tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 16. Total indikator untuk Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan adalah sebanyak 21 indikator. Dari total 21 indikator tersebut, belum terdapat indikator yang mencapai target, dan juga belum ada indikator yang belum mencapai target. Dengan demikian, tak satu pun indikator Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.

BAB 3

Gambaran Keuangan Daerah



Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kerangka Pendanaan



GAMBARAN KEUANGAN DAERAH



Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya.

Sebelum menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan Kabupaten Manggarai Timur terlebih dahulu harus dimulai dengan memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan dan susunan/struktur APBD. Data-data perkembangan realisasi anggaran selama 5 (lima) tahun, meliputi: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selain itu, dibahas juga perkembangan neraca daerah, meliputi: aset dan hutang daerah serta ekuitas dana. Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap penerimaan daerah, yaitu pendapatan dari penerimaan pembiayaan daerah. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya meningkat apabila daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Kemudian, dibuat analisis untuk mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan sebagai dasar penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

3.1

Kinerja Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD tahun sebelumnya, yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan dimasa lalu. Dari analisis kinerja beberapa tahun ke belakang dapat menjadi referensi melakukan proyeksi kinerja kondisi keuangan melalui berbagai macam metode analisa misalnya dengan melihat rata-rata pertumbuhan, menggunakan asumsi makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain), dan dapat juga dengan dasar kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta dapat melalui kebijakan bidang keuangan daerah.

3.1.1

Kinerja Pelaksanaan APBD



Pengukuran kinerja pelaksanaan APBD dilaksanakan dengan mengukur pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya.

Secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD disajikan berikut ini:

3.1.1.1

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah di bagi kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang komponennya dijelaskan sebagai berikut.

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

- Penerimaan pajak daerah
- Penerimaan retribusi daerah
- Penerimaan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan

- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Adapun pendapatan dari Dana Perimbangan-Pendapatan Transfer, terdiri dari:

- Dana bagi hasil

- Dana alokasi umum

- Dana alokasi khusus

Sedangkan pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, bersumber dari:

- Bantuan/hibah

- Dana darurat

- Lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh Pemerintah

Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1 mencerminkan Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur periode Tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2014 s.d 2018

No	Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1.	PENDAPATAN	595.254.498.000,68	717.290.747.473,64	862.639.620.622,10	867.702.081.094,82	1.036.686.443.346,73	15,21%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	22.053.561.300,68	41.465.748.921,64	44.112.094.695,10	85.887.937.144,71	49.507.713.692,00	36,69%
a.	Pajak Daerah	4.236.746.778,00	8.814.961.937,00	12.305.259.151,00	11.141.191.998,00	12.564.996.498	37,74%
b.	Retribusi Daerah	1.803.119.325,00	2.378.757.276,00	1.807.487.844,00	1.782.479.458,00	2.002.125.000	4,71%
c.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	5.683.353.055,00	6.005.131.513,00	7.756.215.361,00	7.498.720.325,00	8.762.717.194	12,09%
d.	Lain-lain PAD Yang Sah	10.330.342.142,68	24.266.898.195,64	22.243.132.339,10	65.465.545.363,71	26.177.875.000	65,22%
1.2	Dana Perimbangan	508.173.430.457,00	562.154.022.101,00	691.737.352.809,00	634.256.194.414,00	766.627.392.330,00	11,56%
a.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	10.112.603.457,00	11.192.893.101,00	10.114.133.847,00	8.363.357.473,00	11.106.156.014	4,13%
b.	Dana Alokasi Umum	421.442.287.000,00	448.559.879.000,00	502.165.245.000,00	449.269.564.000,00	507.763.405.000	5,22%
c.	Dana Alokasi Khusus	76.618.540.000,00	102.401.250.000,00	179.457.973.962,00	176.623.272.941,00	247.757.831.316	36,90%
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	65.027.506.243,00	113.670.976.451,00	126.790.173.118,00	147.557.949.536,11	220.551.337.324,73	38,05%
a.	Hibah	668.388.500,00	1.089.693.000,00	13.723.215.294	2.376.242.603,00	42.519.585.820	707,27%
b.	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0,00%
c.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	11.096.457.743,00	12.692.293.451,00	14.384.694.824,00	19.089.627.933,11	17.175.642.504,73	12,60%

d.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus Pemda Lainnya	53.262.660.000,00	99.753.990.000,00	98.520.263.000,00	126.092.079.000,00	160.856.109.000	35,40%
e.	Bantuan Keuangan Dari Propinsi/ Pemerintah Daerah Lainnya	0	135.000.000,00	162.000.000,00	0	0	-40,00%

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur Tahun, 2018

Dari tabel di atas, rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2014-2018 sebesar 15,21 persen, dengan proporsi terbesar dari Pendapatan Dana Perimbangan pertumbuhan sebesar 11,56 % dan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 73,95 persen, diikuti oleh Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 38,05 persen dan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 21,27 persen, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) pertumbuhan sebesar 36,69 persen dan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 4,78 persen. Kondisi ini berdampak pada kemandirian daerah di mana Kabupaten Manggarai Timur dinilai masih sangat bergantung terhadap Dana Perimbangan sehingga diperlukan upaya-upaya khusus untuk meningkatkan PAD dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

3.1.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kelompok Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan kelompok Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. Sementara itu Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.



Kemampuan pengelolaan belanja APBD Kabupaten Manggarai Timur 2014-2018 sangat fluktuatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan oleh perangkat daerah sebagai pengguna anggaran relatif masih labil. Fluktuatifnya realisasi belanja merupakan indikasi perencanaan yang belum berkualitas sehingga kurang sejalan

antara dokumen perencanaan dan penganggaran dengan realitas pembangunan. Hal ini juga mengindikasikan lemahnya pengelolaan kegiatan yang berdampak pada tidak terpenuhinya kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan. Persentase realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung tertera pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Tahun 2014 s.d 2018

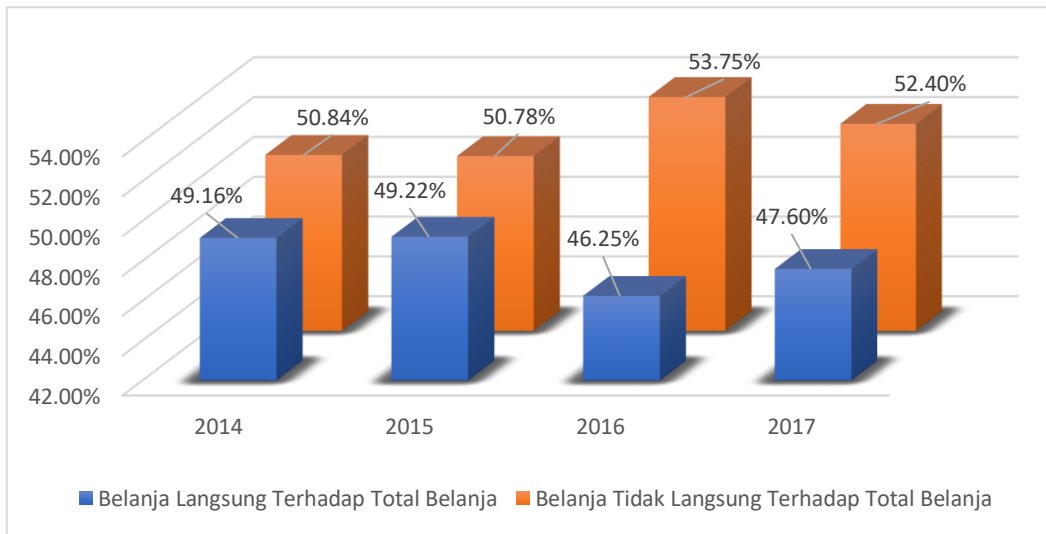
No	Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	Belanja Tidak Langsung	273.255.190.019,00	363.386.693.416,70	486.453.082.917,00	483.109.931.307,00	559.392.549.539,00	20,49%
a.	Belanja Pegawai	244.902.831.418,00	276.577.194.649,00	303.461.191.443,00	292.731.300.381,00	312.632.607.608,00	6,48%
b.	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	
c.	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	
d.	Belanja Hibah	4.600.263.149,00	5.209.344.495,50	4.961.100.000,00	9.752.641.000,00	27.121.963.749,00	70,79%
e.	Belanja Bantuan Sosial	66.900.000,00	52.645.000,00	211.717.000,00	201.055.000,00	5.919.535.000,00	780,01%
f.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota Dan Pemerintah Desa	0	0	950.859.704,00	974.918.356,00	1.429.960.553,00	18,09%
g.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	23.685.195.452,00	81.547.509.272,20	176.868.214.770	179.450.016.570,00	212.288.482.629,00	95,24%
h.	Belanja Tidak Terduga	759.730.916,00	35.362.650,00	0	0	17.349.661,00	-
2.	Belanja Langsung	264.931.640.265,00	352.288.067.767,00	396.174.945.689,00	438.886.737.410,01	554.177.707.056,03	20,62%
a.	Belanja Pegawai	38.158.939.547,00	62.312.812.500,00	74.636.263.140,00	83.629.281.091,00	91.337.401.123,00	26,09%
b.	Belanja Barang Dan Jasa	94.096.182.255,00	105.148.250.194,00	120.471.702.895,00	163.830.767.633,01	247.437.975.024,99	28,34%
c.	Belanja Modal	132.676.518.463,00	184.827.005.073,00	201.066.979.654,00	191.426.688.686,00	215.402.330.908,04	13,96%
	Belanja Daerah	538.186.830.284,00	715.674.761.183,70	882.628.028.606,00	921.996.668.717,01	1.113.570.256.595,03	20,39%

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur Tahun, 2018

Penggunaan terbesar dari Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur 2014-2017 masih terdapat pada Belanja Tidak Langsung. Dari Gambar 3.1 terlihat bahwa belanja daerah Kabupaten Manggarai Timur sejak tahun 2014 sampai 2017 masih didominasi oleh belanja tidak langsung.



Gambar 3.1



3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan Daerah, terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah. Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Analisis pembiayaan daerah dilakukan melalui Analisis sumber penutup defisit riil, yang akan memberi gambaran tentang kebijakan anggaran periode sebelumnya untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah, sebagaimana terlihat pada tabel berikut

Tabel 3.3
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah
Tahun 2014 s.d 2018

No	Uraian	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	Penerimaan Pembiayaan	18.556.886.879,85	75.094.820.618,53	66.122.068.257,47	62.455.249.078,57	49.151.661.456,38	66,05%
a.	SILPA	18.149.391.554,85	74.864.823.680,53	65.675.444.258,47	62.179.797.757,57	47.830.796.463,38	67,95%
b.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0,00%

c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0	0	0	0	0,00%
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0,00%
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	407.495.325,00	229.996.938,00	446.623.999,00	275.451.321,00	268.385.339,00	2,43%
f.	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0	0,00%
2	Pengeluaran Pembiayaan	0	11.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.750.000.000,00	-0,53%
a.	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0,00%
b.	Penyerahan Modal (Investasi) Daerah	0	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00%
c.	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0	0,00%
d.	Pemberian Pinjaman Daerah	0	1.000.000.000,00	0	0	750.000.000,00	-

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur Tahun, 2018

Pertumbuhan penerimaan pembiayaan berupa SILPa ini selama tahun 2014-2018 cenderung fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan 66,05 persen. Meskipun SILPA meningkat terus dari tahun ke tahun, namun penerimaan pembiayaan dari SILPa diproyeksikan terus berkurang di tahun-tahun mendatang, seiring meningkatnya kualitas perencanaan penganggaran dan kualitas penyerapan belanja.

Penerimaan pembiayaan berupa SILPa, tidak sepenuhnya dipergunakan untuk menutup defisit APBD, namun dikeluarkan pula dalam bentuk pengeluaran pembiayaan berupa penyerahan modal berbentuk Investasi, kedepan penyerahan modal akan pada beberapa badan usaha milik daerah yang akan dibentuk, yang jumlahnya terus akan ditingkatkan dalam upaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dalam bentuk pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca Daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen Pemerintahan Daerah, pihak Legislatif Daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Selanjutnya mengenai gambaran neraca Kabupaten Manggarai Timur dalam kurun waktu tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.4



Tabel 3.4
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Tahun 2014 s.d 2018

No	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	Aset	10,73%
1.1	Aset Lancar	-12,07%
1.1.1	Kas	-14,31%
1.1.2	Piutang	18,01%
1.1.3	Persediaan	3,19%
1.2	Aset Tetap	10,07%
1.2.1	Tanah	46,92%
1.2.2	Peralatan Dan Mesin	12,92%
1.2.3	Gedung Dan Bangunan	16,36%
1.2.4	Jalan,Irigasi dan Jaringan	25,26%
1.2.5	Aset Tetap Lainnya	-9,90%
1.2.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	170,84%
1.2.7	Akumulasi Penyusutan	34,97%
1.3	Aset Lainnya	197,05%
1.3.1	Tagihan Penjualan Anggaran	0,00%
1.3.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-101,84%
1.3.3	Kemitraan Dengan Pihak Kedua	0,00%
1.3.4	Aset Tidak Berwujud	62,51%
1.3.5	Aset Lain - lain	134,12%
Jumlah Aset Daerah		10,73%
2	Kewajiban	1497,98%
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	49599,27%
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	25836,49%
2.1.2	Uang Muka Dari Kas Daerah	0,00%
2.1.3	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00%
2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	
3	Ekuitas Dana	10,75%
3.1	Ekuitas Dana Lancar	0,00%
3.1.1	SILPA	0,00%
3.2.2	Cadangan Piutang	0,00%
3.2.3	Cadangan Persediaan	0,00%
3.2	Ekuitas Dana Investasi	10,75%
3.2.1	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	10,75%
3.2.2	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	0,00%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		10,73%

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur Tahun, 2018

Berdasarkan neraca daerah tersebut, dapat dianalisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur melalui perhitungan rasio (Tabel 3.5). Rasio

keuangan yang dianalisis yaitu Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas (Leverage), dan Rasio Aktivitas.

1. **Rasio Likuiditas** mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
 - a. Rasio Lancar = aktiva lancar : kewajiban jangka pendek
 - b. Rasio Cepat = (aktiva lancar-persediaan)/kewajiban jangka pendek
2. **Rasio Solvabilitas** mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya.
 - a. Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang : total aset
 - b. Rasio hutang terhadap modal = total hutang : total ekuitas

Tabel 3.5
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Manggarai Timur
Tahun 2014 s.d 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Likuiditas					
a.	Rasio Lancar	60,35	3141,53	51,80	218,89	57,31
b.	Rasio Cepat	0,14	0,00	0,13	0,02	0,06
2.	Solvabilitas					
a.	Rasio Hutang Terhadap Total Aset	1,66	0,03	1,93	0,46	1,74
b.	Rasio Hutang Terhadap Modal	0,14	0,00	0,13	0,02	0,06

3.2

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Terkait dengan Kebijakan Pengelolaan Keuangan kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2018, akan diuraikan ke dalam substansi Proporsi Penggunaan Anggaran untuk melihat proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur; serta Analisis Pembiayaan, yang diuraikan ke dalam analisis Sumber Penutup Defisit Riil, analisis realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

3.2.1

Proporsi Penggunaan Anggaran

Tabel 3.6
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Manggarai Timur

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1.	Tahun 2016	303.461.191.443,00	866.581.882.122,00	35,02 %

2.	Tahun 2017	292.731.300.381,00	931.996.668.717,01	31,41 %
3.	Tahun 2018	312.632.607.608,00	1.034.278.612.373,03	30,23 %

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur Tahun, 2018

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Tabel 3.7
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Manggarai Timur

No	Uraian	Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	
1	Realisasi Pendapatan Daerah	862.639.620.622,10	867.702.081.094,82	1.036.686.443.346,73	5,02%
	Dikurangi realisasi:				
2	Belanja Daerah	882.628.028.606,00	921.996.668.717,01	1.113.570.256.595,03	6,31%
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.750.000.000,00	1,88%
	Defisit riil	-29.988.407.983,90	-64.294.587.622,19	-87.633.813.248,30	37,67%

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur Tahun, 2018

Kemampuan Kabupaten Manggarai Timur untuk menutup defisit riil dapat dilihat dari hasil analisis sumber penutup defisit riil pada tabel 3.8 di bawah ini:

Tabel 3.8
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Manggarai Timur

No	Uraian	Tahun		
		2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	-219%	-96,71%	-54,58%
2	Pencairan Dana Cadangan	0%	0%	0%
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0%	0%	0%
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0%	0%	0%
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-1,49%	-0,43%	-0,31%
6	Penerimaan Piutang Daerah	0%	0%	0%

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur Tahun, 2018

Tabel 3.9
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Manggarai Timur

No	Uraian	2016		2017		2018	
		Juta Rp	% dari Silpa	Juta Rp	% dari Silpa	Juta Rp	% dari Silpa
1.	Jumlah SiLPA	65.675.444.258,47		62.179.797.757,57		47.830.796.463,38	
2.	Pelampauan penerimaan PAD	1.591.058.778,10	2,42	-4.173.982.795,29	-6,71	-5.500.630.385,63	-11,50
3.	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan	-5.715.164.913,00	-8,70	13.672.026.320,00	-21,99	-2.117.020.511,00	-4,43

4.	Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	9.006.368.899,00	13,71	581.448.457,00	0,94	2.647.368.428,73	-1,28
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	0	0	0	0	0	0
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	1.422.464.388,00	0,16	268.008.685,00	0,00	894.271.125,00	0,99
7.	Kegiatan lanjutan	0	0	0	0	0	0

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur Tahun, 2018

3.3 Kerangka Pendanaan



Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangi dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 22 ayat (1), ada 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (4) Lain-lain PAD yang sah.

Ketergantungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur yang cukup tinggi terhadap Pemerintah Pusat, menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan keuangan daerah masih belum berubah dari 5 (lima) tahun yang lalu, yaitu bersumber dari rendahnya kemampuan PAD, selain alokasi jenis belanja yang tidak produktif, pemanfaatan alokasi belanja yang tidak efisien dan efektif, serta pengelolaan administrasi yang belum optimal.

Sehubungan dengan berbagai permasalahan tersebut di atas, maka beberapa hal yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam pengelolaan keuangan ke depan, adalah menetapkan arah dan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah, termasuk akibat pengalihan kewenangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal pendapatan daerah, misalnya, masih ada potensi pendapatan yang secara kewenangan sudah menjadi urusan Pemerintah Provinsi, namun secara aturan terkait

pendapatan kewenangan untuk menarik pendapatan masih menjadi hak Kabupaten/Kota. Hal ini ke depan perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Pusat. Kebijakan terkait Pendapatan ini, akan mempengaruhi proyeksi pendapatan, yang kemudian akan digunakan untuk menghitung kapasitas riil keuangan.

3.3.1.1 Proyeksi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam hal membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Upaya peningkatan



pendapatan asli daerah adalah dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PAD Kabupaten Manggrai Timur harus mencapai Rp 138 Milyar pada akhir periode 2019-2023. Fokus Pemerintah Kabupaten Mangarai Timur dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Tren dan Proyeksi Pertumbuhan PAD
Kabupaten Manggarai Timur

No	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)
1.	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Daerah	36,69%	22,50%
a.	Pajak Daerah	37,74%	38,69%
b.	Retribusi Daerah	4,71%	21,33
c.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	12,09%	10,79%
d.	Lain-lain PAD Yang Sah	65,22%	6,82%

Memperhatikan Tabel 3.10, maka pertumbuhan dari optimalisasi Pajak Daerah sebesar 38,69 persen, pertumbuhan Retribusi Daerah sebesar 21,33 persen, pertumbuhan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan sebesar 10,79 persen. Pertumbuhan lain-lain PAD yang sah diproyeksi sebesar 6,82 persen. Proyeksi pertumbuhan PAD selama periode 2019-2023 diprediksi sebesar 22,50 persen. Proyeksi rata-rata pertumbuhan ini di atas rata-rata pertumbuhan selama periode lima tahun yang lalu, dan cukup optimis dalam menentukan pertumbuhan setiap komponen PAD.

3.3.1.1.1 Pajak Daerah

Pendapatan Asli Daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam hal membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah adalah dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fokus Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan Pajak Daerah melalui pelayanan berbasisi SOP;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
4. Peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak/retribusi daerah dan sosialisasi peraturan tentang pendapatan daerah;
5. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
6. Perhitungan potensi PAD secara akurat dan akuntabel;
7. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait
8. Meningkatkan jumlah ASN pengelola Pajak Daerah serta mengangkat pejabat fungsional seperti Penilai Pajak ,Juru Sita, OC;
9. Menigkatkatkan kapasitas pengelola Pajak Daerah dengan mengikutsertakan ASN Bidang Pengelola Pajak dalam pelbagai pelatihan dan Bimtek;
10. Menerapkan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis elektronik;
11. Menigkatan Manajemen Basis Data Wajib Pajak Daerah melalui pemutahiran Basis Data PBB secara berkala.

3.3.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa hal yang mempengaruhi pemungutan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan Retribusi Daerah melalui pelayanan berbasisi SOP;
2. Meningkatkan koordinasi lintas OPD pengelola Retribusi Daerah;

3. Penyelerasan regulasi bidang Retribusi;
4. Meningkatkan Intensifikasi dan Eksrtensifikasi agar potensi Retribusi dapat teridentifikasi secara optimal;
5. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik;
6. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

3.3.1.1.3

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, deviden dan Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga.

Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Manggarai Timur dari tahun 2014-2018 pada Bank NTT sebesar Rp 70 Milyar, dan Perda Penyertaan Modal tersebut telah berakhir di tahun 2019, dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur selama tahun 2020 – 2023 akan fokus penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan dibentuk mulai 2019.

Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan dibentuk untuk yang dapat meningkatkan laba BUMD;
2. Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
3. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD;
4. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sebagai berikut :

1. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
3. Mengoptimalkan pendapatan BLUD dengan penambahan dari BLUD SPAM, RSUD Kabupaten Manggarai Timur, dan beberapa BLUD yang akan dibentuk di tahun 2019-2023.

3.3.1.2 Proyeksi Dana Perimbangan



Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur akan

melakukan koordinasi dengan Pemerintah untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dan meningkatkan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh orang pribadi, serta menjaring wajib pajak baru di wilayah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.

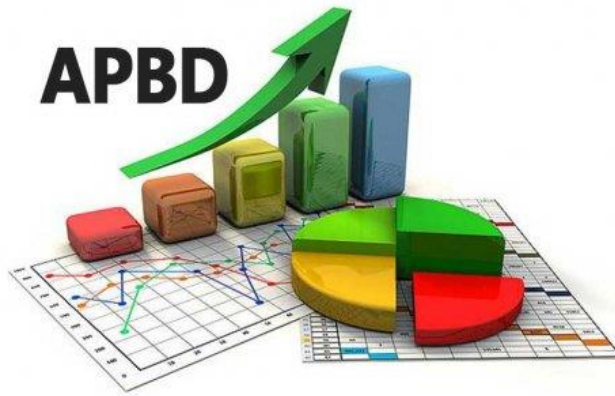
Pertumbuhan Dana Perimbangan Kabupaten Manggarai Timur 2019 s/d 2023 diproyeksikan 6,02 persen, meliputi: pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 0,57 persen, pertumbuhan Dana Alokasi Umum sebesar 4,25 persen dan pertumbuhan Dana Alokasi Khusus sebesar 10,04 persen. Dana Alokasi Khusus diproyeksikan bertumbuh cukup besar dengan harapan ke depan anggaran untuk pemenuhan SPM harus dapat dipastikan sumber pembiayaannya dari DAK, sekaligus ada peningkatan alokasi DAK untuk memperkecil kesenjangan antar wilayah, dengan alokasi untuk wilayah tertinggal meningkat cukup besar. Proyeksi pertumbuhan dana perimbangan Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019 sampai 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11
Tren dan Proyeksi Pertumbuhan PAD
Kabupaten Manggarai Timur

No	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)
1.2	Dana Perimbangan	11,56%	6,02%
a.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	4,13%	0,57%
b.	Dana Alokasi Umum	5,22%	4,25%
c.	Dana Alokasi Khusus	36,90%	10,04%

3.3.1.3

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah



Proyeksi Pendapatan Asli Daerah disusun dengan mempertimbangkan kinerja pendapatan daerah selama periode 2014-2018. Rata-rata kedenderungan (trend) pertumbuhan pendapatan daerah periode 2014-2018 dan Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 - 2023, Seluruh kebijakan Pendapatan Daerah yang telah dijabarkan akan diformulasikan sedemikian rupa, sehingga diperoleh proyeksi Pendapatan Daerah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Tren dan Proyeksi Pertumbuhan PAD
Kabupaten Manggarai Timur

No	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	38,05%	4,03%
a.	Hibah	707,27%	0,56%
b.	Dana Darurat	0,00%	-
c.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	12,60%	2,43%
d.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus Pemd Lainnya	35,40%	5%

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan komponen pendapatan di atas, maka proyeksi pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 s/d 2023 secara keseluruhan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Tren dan Proyeksi Pertumbuhan PAD
Kabupaten Manggarai Timur

No	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)
1.	PENDAPATAN	15,21%	6,66%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	36,69%	22,50%
a.	Pajak Daerah	37,74%	38,69%
b.	Retribusi Daerah	4,71%	21,33%

c.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	12,09%	10,79%
d.	Lain-lain PAD Yang Sah	65,22%	6,82%
1.2	Dana Perimbangan	11,56%	6,02%
a.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	4,13%	0,57%
b.	Dana Alokasi Umum	5,22%	4,25%
c.	Dana Alokasi Khusus	36,90%	10,04%
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	38,05%	4,03%
a.	Hibah	707,27%	0,56%
b.	Dana Darurat	0,00%	0,00%
c.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	12,60%	2,43%
d.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus Pemda Lainnya	35,40%	2,43%
e.	Bantuan Keuangan Dari Propinsi/ Pemerintah Daerah Lainnya	20,00%	5,00%

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan pendapatan di atas, maka proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 s/d 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur

No	Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	1.123.714.947.124	1.252.282.252.387	1.309.169.489.453	1.373.960.098.219	1.452.554.830.426	6,66%
a.	Pendapatan Asli Daerah	61.575.908.692	72.367.802.711	85.602.354.195	105.888.706.088	138.192.501.606	22,50%
a.1	Pajak Daerah	22.825.908.692	29.396.826.011	39.419.647.375	55.729.260.173	83.872.393.829	38,69%
a.2	Retribusi Daerah	2.072.125.000	2.512.845.000	3.048.282.750	3.699.025.238	4.490.187.707	21,33%
a.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	10.500.000.000	12.550.000.000	13.350.000.000	14.750.000.000	15.750.000.000	10,79%
a.4	Lain-lain PAD Yang Sah	26.177.875.000	27.908.131.700	29.784.424.070	31.710.420.677	34.079.920.070	6,82%
b.	Dana Perimbangan	796.026.342.000	901.862.538.076	934.255.147.938	967.843.805.445	1.002.673.362.800	6,02%
b.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	8.800.225.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	0,57%
b.2	Dana Alokasi Umum	533.974.640.000	560.673.372.000	583.100.306.880	606.424.319.155	630.681.291.921	4,25%
b.3	Dana Alokasi Khusus	253.251.477.000	332.189.166.076	342.154.841.058	352.419.486.290	362.992.070.879	10,04%
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	266.112.696.432	278.051.911.600	289.311.987.320	300.227.586.686	311.688.966.020	4,03%

c.1	Hibah	49.869.284.000	50.135.733.200	51.000.000.000	51.000.000.000	51.000.000.000	0,56%
c.2	Dana Darurat						-
c.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	18.228.004.432	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	2,43%
c.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus Pemda Lainnya	198.015.408.000	207.916.178.400	218.311.987.320	229.227.586.686	240.688.966.020	5,00%

3.3.2

Kebijakan dan Proyeksi Belanja Tahun 2019-2023

Sebagaimana diamanatkan pasal 31 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib,



urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan. Belanja Daerah pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan didasarkan atas pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun kedepan dan digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dan diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (efektivitas). Anggaran belanja dikelompokkan dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan (pencapaian kinerja). Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Kebijakan Belanja Daerah tahun 2019 hingga 2023 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2023, yaitu sebagai berikut:

1. Menitikberatkan pada pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2019 hingga tahun 2023 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang, dengan efisiensi dan efektivitas anggaran dimana dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi sektoral serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan;
3. Tolok ukur dan target kinerja. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil dengan prinsip effectiveness, efficiency serta ekonomis;
4. Optimalisasi belanja langsung. Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
 - a. Subsidi dalam mendukung pelayanan publik;
 - b. Hibah untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas;
 - c. Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial;
 - d. Bantuan keuangan;
6. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM);
7. Transparansi dan Akuntabilitas. Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan pada publik dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, maka perencanaan dan penganggaran telah menggunakan e-planning dan e-budgeting. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses keluaran dan hasil.

Tabel 3.15
Proyeksi Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur

No	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)
1	Belanja Tidak Langsung	20,49%	5,45%
a.	Belanja Pegawai	6,48%	5,00%
b.	Belanja Bunga	0,00%	0,00%
c.	Belanja Subsidi	0,00%	0,00%
d.	Belanja Hibah	70,79%	117,39%
e.	Belanja Bantuan Sosial	780,01%	-14,66%
f.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota Dan Pemerintah Desa	18,09%	10,00%
g.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	95,24%	5,00%
h.	Belanja Tidak Terduga	-120,81%	100,00%
2.	Belanja Langsung	20,62%	7,78%
a.	Belanja Pegawai	26,09%	10,07%
b.	Belanja Barang Dan Jasa	28,34%	6,81%
c.	Belanja Modal	13,96%	7,67%

Pertumbuhan belanja pegawai diproyeksikan sebesar 5 persen, di mana 2,5 persen adalah untuk gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan 10 persen untuk menampung kenaikan tunjangan kinerja baik untuk ASN maupun untuk tenaga pendidik dan kependidikan, serta kebijakan terkait belanja pegawai, seperti pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Tunjangan Hari Raya (THR), dan lain sebagainya.

Tabel 3.16
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	Rata-Rata (%)
1	Belanja Tidak Langsung	605.740.763.979,00	629.571.882.785,45	660.705.596.092,97	693.404.006.982,70	748.746.151.525,41	5,45%
1.1	Belanja Pegawai	336.100.358.289	352.905.376.203	370.550.645.014	389.078.177.264	408.532.086.128	5,00%
1.2	Belanja Hibah	8.975.600.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	25.000.000.000	117,39%
1.3	Belanja Bantuan Sosial	4.837.500.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	-14,66%
1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota Dan Pemerintah Desa	1.456.712.150	1.602.383.365	1.762.621.702	1.938.883.872	2.132.772.259	10,00%
1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	253.870.593.540	266.564.123.217	279.892.329.378	293.886.945.847	308.581.293.139	5,00%
1.6	Belanja Tidak Terduga	500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	100,00%

2.	Belanja Langsung	524.974.183.145	560.451.645.076	648.463.893.360	680.556.091.236	703.808.678.901	7,71%
2.1	Belanja Pegawai	72.340.605.500	84.067.746.761	97.269.584.004	102.083.413.685	105.571.301.835	10,07%
2.2	Belanja Barang Dan Jasa	162.800.971.171	168.135.493.523	194.539.168.008	204.166.827.371	211.142.603.670	6,84%
2.3	Belanja Modal	289.832.606.474	308.248.404.792	356.655.141.348	374.305.850.180	387.094.773.395	7,61%
Belanja Daerah		1.130.714.947.124	1.190.023.527.861	1.309.169.489.453	1.373.960.098.219	1.452.554.830.426	6,48%

3.3.3

Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2019-2023

Dalam penyertaan penganggaran Daerah, Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Pada Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2023 terdiri dari atas beberapa unsur pembentukan yakni, Penerimaan Pembiayaan Daerah, terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya; Penerimaan dari Obligasi Daerah; Penerimaan Pengembalian PMD; Penerimaan Pinjaman Daerah; dan Pengembalian Investasi Dana Bergulir. Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas: Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah; dan Pembayaran Pokok Utang. Adapun Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019 hingga tahun 2023 yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.17
Proyeksi Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Manggarai Timur

No	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)
1	Penerimaan Pembiayaan	66,05%	-18,49%
a.	SILPA	67,95%	0,00%
b.	Pencairan Dana Cadangan	0,00%	0,00%
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00%	0,00%
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00%	5,00%
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00%	0,00%
f.	Penerimaan Piutang Daerah	0,00%	5,00%
2	Pengeluaran Pembiayaan	-0,53%	9,01%
a.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00%	0,00%
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	0,00%	9,01%
c.	Pembayaran Pokok Utang	0,00%	0,00%
d.	Pemberian Pinjaman Daerah	-25,00%	0,00%

Tabel 3.15.
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	Penerimaan Pembiayaan	19.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
a.	SILPA	17.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
b.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0,00%
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0	0	0	0	0,00%
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.000.000.000	0	0	0	0	0,00%
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0	0,00%
f.	Penerimaan Piutang Daerah	1.000.000.000	0	0	0	0	0,00%
2	Pengeluaran Pembiayaan	11.250.000.000	1.500.000.000	2.250.000.000	0	0	-70,00%
a.	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0,00%
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	10.250.000.000	1.500.000.000	2.250.000.000	0	0	-68,70%
c.	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0	0,00%
d.	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000	0	0	0	0	0,00%
3	Pembiayaan Neto	7.750.000.000,00	- 1.500.000.000,00	- 2.250.000.000,00	0	0	-102,69%

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur Tahun, 2018

Selanjutnya, dilakukan analisis proyeksi pembiayaan daerah. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan.

Persoalan utama yang dihadapi pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam aspek pembiayaan adalah bagaimana meningkatkan investasi daerah yang dapat berkontribusi terhadap kenaikan pendapatan bagi daerah, optimalisasi pemanfaatan SILPA, dana cadangan. Dengan demikian, Pembiayaan Daerah Kabupaten Manggarai Timur dalam lima tahun ke depan akan diarahkan pada:

1. Menjadikan penyertaan modal pemerintah dalam BUMD dan BUMDES sebagai langkah perbaikan kinerja BUMD dan BUMDES yang bersangkutan;
2. Memberikan peluang-peluang untuk dilakukannya investasi yang akan mendatangkan pendapatan, termasuk bagi UPTD untuk mengembangkan usahanya;
3. Menyediakan pembiayaan dari dana cadangan untuk membiayai proyek-proyek tertentu yang pengerjaannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun anggaran;

4. Angka rata-rata pertumbuhan saldo kas neraca daerah dan rata-rata pertumbuhan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan serta kegiatan lanjutan;
5. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
6. Kebijakan penyelesaian kewajiban daerah;
7. Kebijakan efisiensi belanja daerah dan peningkatan pendapatan;
8. Asumsi penyerapan pendapatan rata-rata per tahun sebesar 100 persen;
9. Asumsi penyerapan belanja rata-rata per tahun berkisar antara 93,68 s.d. 96,31 persen yang antara lain dikarenakan adanya mekanisme pengadaan barang dan jasa (seperti sisa lelang, gagal lelang), harga satuan, efisiensi dan lain-lain);
10. Asumsi penyerapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan rata-rata per tahun sebesar 100 persen.

Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) hendaknya dimanfaatkan sesuai dengan amanat pasal 137 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

1. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
2. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung.

Penerimaan pembiayaan masih didominasi oleh SiLPA, dan proyeksi pertumbuhan penerimaan pembiayaan sebesar 2 persen per tahun. Tidak diperkenankan untuk memproyeksi SiLPA, namun demikian, proyeksi 2 persen tersebut mengakomodasi efisiensi, dan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan pembiayaan lainnya. Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan mengalami peningkatan cukup besar dari proyeksi tahun 2019. Hal ini untuk mengakomodasi penyertaan modal dan pola investasi untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menghasilkan pendapatan, yang belum dimulai pada tahun 2020.

3.4 Kerangka Pendanaan



Analisis Kerangka Pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung dan ke dalam pos-pos mana sumber

penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama yang nilainya didapat dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Berdasarkan analisis kinerja keuangan baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dilakukan perhitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah dan rencana penggunaannya. Perhitungan dimaksud tergambar pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Proyeksi				
		2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pendapatan	1.123.714.947.124	1.252.282.252.387	1.309.169.489.453	1.373.960.098.219	1.452.554.830.426
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	17.000.000.000	0	0	0	0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.000.000.000	0	0	0	0
	Total penerimaan	1.141.714.947.124	1.252.282.252.387	1.309.169.489.453	1.373.960.098.219	1.452.554.830.426
	Dikurangi:	616.990.763.979	631.071.882.785	662.955.596.093	693.404.006.983	748.746.151.525
	Belanja Tidak Langsung	605.740.763.979	629.571.882.785	660.705.596.093	693.404.006.983	748.746.151.525
	Pengeluaran Pembiayaan	11.250.000.000	1.500.000.000	2.250.000.000	0	0
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	524.724.183.145	621.210.369.602	646.213.893.360	680.556.091.236	703.808.678.901

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur Tahun, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dihitung rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan beserta dengan prioritas.

Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan keberbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III. Secara hierarkis, Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya, Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Manggarai Timur dari Tahun 2019-2023 dapat membiayai 3 (tiga) Rencana pengeluaran prioritas, sebagaimana penjelasan berikut :

1. Prioritas I

Prioritas I merupakan pemenuhan belanja wajib dan mengikat, pemenuhan arahan ketentuan peraturan perundangan, misalnya pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar, termasuk di dalamnya pemenuhan SPM. Program Prioritas I harus

berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada pemenuhan standar pelayanan minimal.

2. Prioritas II

Program Prioritas II merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk program prioritas perangkat daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah.

3. Prioritas III

Merupakan program prioritas di tingkat perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan prioritas dan berhubungan dengan program/kegiatan unggulan perangkat daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi perangkat daerah termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu. Prioritas III juga dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada Prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada Prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

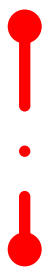
Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan keberbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III. Secara hierarkis, Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.17.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023

Uraian	Proyeksi				
	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
Kapasitas riil kemampuan keuangan	524.724.183.145	621.210.369.602	646.213.893.360	680.556.091.236	703.808.678.901
Rencana Alokasi Prioritas I	262.362.091.573	310.605.184.801	323.106.946.680	340.278.045.618	351.904.339.450
Rencana Alokasi Prioritas II	209.889.673.258	248.484.147.841	258.485.557.344	272.222.436.495	281.523.471.560
Rencana Alokasi Prioritas III	52.472.418.315	62.121.036.960	64.621.389.336	68.055.609.124	70.380.867.890

BAB 4

Permasalahan & Isu Isu Strategis Daerah



Permasalahan Pembangunan

Isu strategis

Isu Strategis Kabupaten Manggarai Timur



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS DAERAH



Rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Manggarai Timur lima tahun mendatang. Pemetaan permasalahan pembangunan yang baik, menjadi dasar bagi perumusan intervensi yang komprehensif. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan.

Dalam bab IV ini diuraikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Manggarai Timur, khususnya untuk jangka waktu 2019-2024. Komponen pembentuk isu-isu strategis di Kabupaten Manggarai Timur terdiri dari : analisis terhadap hasil pembangunan periode sebelumnya untuk mengetahui permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Manggarai Timur dan faktor penentu keberhasilannya; hasil telaah terhadap dokumen RPJPD Kabupaten Manggarai Timur; hasil telaah terhadap dokumen RPJMN 2015-2019; telaah terhadap RPJMD Provinsi NTT 2019-2024; hasil telaah isu dari dunia internasional; dan analisis yang berasal dari dunia akademik, usaha/ bisnis, sosial budaya, penemuan-penemuan teknologi, dan lain-lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.1

Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan data kondisi umum perkembangan pembangunan Kabupaten Manggarai Timur, pembangunan provinsi, pembangunan Nasional serta perkembangan global sesuai review RPJMD sebelumnya, pada bagian ini disampaikan data dan analisis atas permasalahan-permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis. Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara harapan dengan realisasi tujuan pembangunan yang dicapai dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang terkandung dalam indikator-indikator kinerja pembangunan (2014-2018). Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah yang faktor faktor itu saling terhubung satu dengan yang lain Analisis permasalahan pembangunan daerah Manggarai Timur dijelaskan dalam 4 kelompok permasalahan daerah yakni permasalahan pembangunan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi, pengembangan infrastruktur dan lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan.

4.1.1

Analisis Permasalahan Bidang Pembangunan Manusia

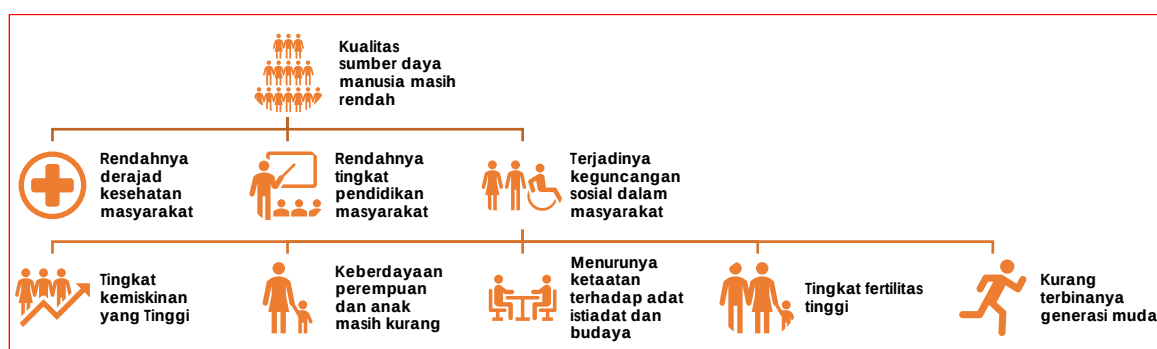


Dalam konsep pembangunan, manusia merupakan variabel sangat penting untuk diperhatikan. Kekayaan alam maupun potensi yang besar tidak akan menjadi sumber kesejahteraan jika tidak dikelola oleh manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pembangunan manusia menjadi salah satu prioritas pembangunan. Saat ini kondisi sumber

daya manusia Kabupaten Manggarai Timur masih relatif rendah. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Manggarai Timur tahun 2018 baru mencapai 59,49. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan IPM Provinsi NTT di mana pada tahun yang sama sudah mencapai angka 64,39. Jika dibandingkan dengan IPM Nasional, juga jauh lebih rendah karena pada tahun yang sama IPM Nasional sudah mencapai 71,39.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Manggarai Timur terjadi karena masih adanya permasalahan di bidang pendidikan, kesehatan dan bidang sosial kemasyarakatan. Permasalahan pada ketiga bidang itu saling terkait sebagaimana dapat dilihat pada diagram 4.2

Diagram 4.2
Analisis Permasalahan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Sumber : Analisis Data Bab II

Permasalahan di bidang pendidikan dapat dilihat dari angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Manggarai Timur. Pada tahun 2016 rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Manggarai Timur mencapai 6,44 tahun, dan meningkat menjadi 6,45 tahun pada tahun 2017, kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi 6,65 tahun. Walaupun angka rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan tren yang meningkat, namun hal tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah Provinsi NTT pada tahun 2018 yang sudah mencapai 7,26 tahun.



Pada tahun yang sama angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Manggarai sudah mencapai 6,65 tahun dan Kabupaten Ngada sudah mencapai 8,07 tahun. Selain itu, Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan tren peningkatan, namun masih berada di bawah rata-rata angka harapan lama sekolah Provinsi NTT. Pada tahun 2017 harapan lama sekolah di Kabupaten Manggarai Timur mencapai 11,04 tahun, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 11,34 tahun. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Manggarai, angka harapan lama sekolah Kabupaten Manggarai

pada tahun yang sama sudah mencapai 12,71 tahun dan Kabupaten Ngada sudah mencapai 12,68 tahun. Rendahnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kabupaten Manggarai Timur terjadi karena sarana dan prasarana, mutu dan akses pendidikan belum optimal.

Permasalahan di bidang kesehatan di Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat dari Usia Harapan Hidup (UHH). Pada tahun 2016 Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Manggarai Timur mencapai 67,39 tahun, dan pada tahun 2017 mencapai 67,4 tahun, kemudian meningkat menjadi 67,62 tahun pada tahun 2018. Bila dibandingkan dengan rata-rata Usia Harapan Hidup penduduk Provinsi NTT pada tahun yang sama 66,38 tahun, Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Manggarai Timur masih lebih rendah dibandingkan dengan Usia Harapan Hidup Provinsi dan Nasional. 71,20 tahun.



Walaupun Usia Harapan Hidup penduduk Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan tren naik dan lebih baik dibandingkan dengan rata-rata Usia Harapan Hidup penduduk Provinsi NTT, namun belum mencapai kondisi ideal. Permasalahan kesehatan di Kabupaten Manggarai Timur dapat pula dilihat dari tingginya jumlah Balita stunting. Sampai dengan tahun 2018, dari 24,956 Balita di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 3,130 Balita stunting (12,54%) dan tersebar di 9 Kecamatan dan tertinggi terdapat di Kecamatan Elar Selatan sebanyak 603 Balita. Rendahnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur terjadi karena akses dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Manggarai Timur belum optimal. Di samping itu, perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Manggarai Timur masih rendah.

Permasalahan sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat merupakan hal yang tidak bisa diabaikan karena menjadi salah satu tolak ukur suksesnya pembangunan sebuah daerah, di mana berdasarkan kondisi yang ada di Kabupaten Manggarai Timur ditemukan beberapa pemicu permasalahan sosial sebagai berikut:

1. Masih tingginya tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur terjadi sebagai akibat masih rendahnya upah kerja serta rendahnya kualitas SDM yang ada. Hal ini berdampak langsung pada makin tingginya tekanan ekonomi yang memicu lahirnya masalah-masalah sosial dalam masyarakat.
2. Pola budaya patrilineal sangat berpengaruh pada kurangnya peran perempuan baik dalam kehidupan domestik (rumah tangga), maupun kehidupan publik. Dalam lingkup

domestik dominasi pria dalam keluarga menjadi pemicu adanya tindakan yang sewenang-wenang yang mengarah pada terjadinya KDRT. Sedangkan dalam kehidupan publik, partisipasi perempuan masih sangat rendah.

3. Semakin cepatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, secara langsung telah mengikis adat istiadat dan budaya lokal. Hal ini terlihat dari kecenderungan masyarakat mengabaikan ritual, norma serta nilai budaya dan adat istiadat. Masih tingginya angka kelahiran di Kabupaten Manggarai Timur, terjadi sebagai akibat masih kurangnya pengetahuan dan akses masyarakat terhadap alat kontrasepsi KB, serta maraknya Prilaku seks bebas.
4. Kurangnya wadah dan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi minat dan bakat menjadi salah satu pemicu munculnya berbagai perilaku yang cenderung ke arah negatif. Hal ini makin diperburuk oleh minimnya kemampuan generasi muda untuk memfilterisasi pengaruh perkembangan teknologi dan informasi yang makin pesat.

Akumulasi dari berbagai persoalan sosial di atas menyebabkan terjadinya guncangan sosial yang berdampak pada terhambatnya pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur.

4.1.2

Analisis Permasalahan Pembangunan Bidang Ekonomi



Berdasar data yang telah disajikan dalam bab II, berikut diuraikan permasalahan Kabupaten Manggarai Timur pada aspek pengembangan ekonomi. Sasaran akhir dari pengembangan ekonomi yang dilakukan oleh sebuah unit pemerintahan tentunya adalah kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hingga saat ini capaian Kabupaten Manggarai Timur dalam kesejahteraan ekonomi masih relatif rendah. Menggunakan ukuran kesejahteraan

ekonomi dalam perhitungan IPM, Pengeluaran riil per capita kabupaten Manggarai Timur masih relatif rendah dibandingkan dengan Nusa Tenggara Timur (NTT) pada umumnya dan kabupaten sekitar khususnya. Tahun 2018 pengeluaran riil per capita penduduk Manggarai Timur tercatat Rp 5.809.000 percapita per tahun, jauh lebih rendah dari dari NTT yang mencapai angka Rp 7.566.00 dan jauh lebih rendah lagi dari Ngada sebagai kabupaten tetangga yang mencapai angka Rp 8.857.0000 dan Manggarai sebagai kabupaten induknya yang mencapai angka dan Rp 7.175. 000.

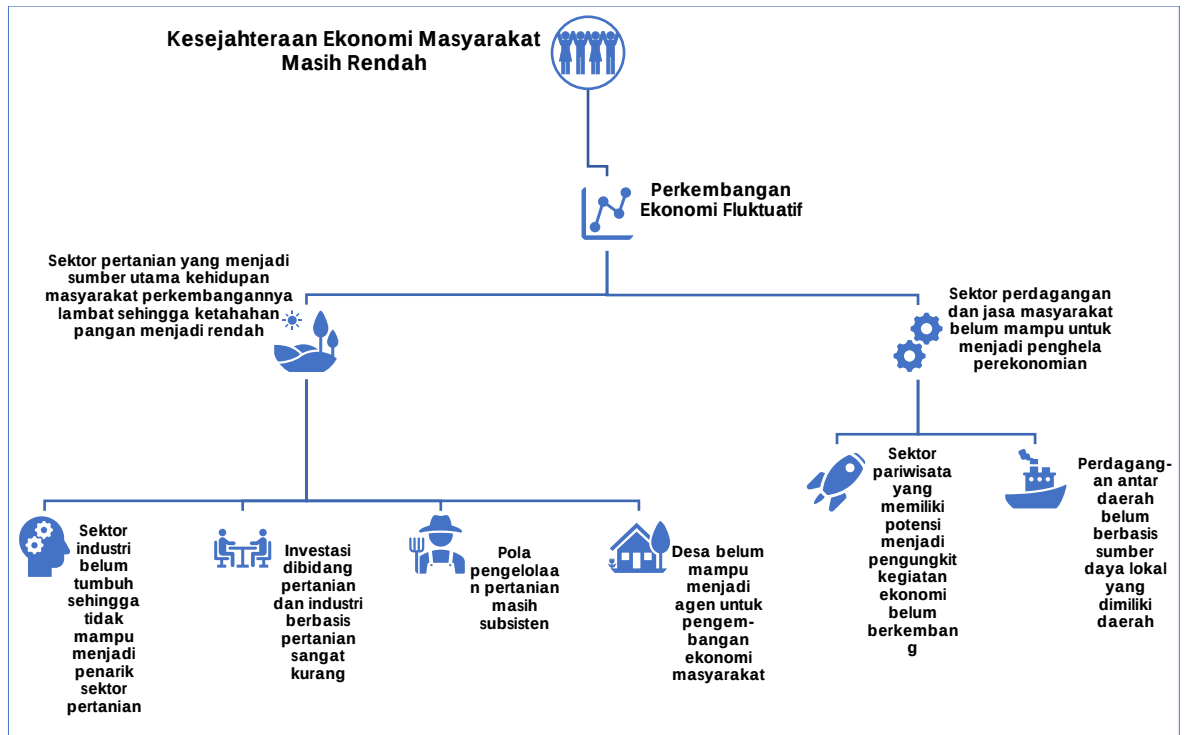


Capaian kesejahteraan yang demikian bermula dari perkembangan ekonomi Manggarai Timur yang tidak stabil. Selama 5 tahun belakangan pertumbuhan ekonomi Manggarai Timur tercatat fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi yang

fluktuatif menjadi indikasi bahwa gerak perekonomian belum mampu dikendalikan oleh masyarakat Manggarai Timur. Artinya masyarakat baru bergantung pada kemurahan alam untuk mengembangkan ekonominya. Kondisi perekonomian yang demikian itu bersumber dari berbagai aspek yang saling mempengaruhi, yang pada gilirannya membawa pada fluktuatifnya kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Keterkaitan antara berbagai permasalahan ekonomi itu dapat dilihat pada diagram 4.1 berikut.



Diagram 4.1
Analisis Permasalahan Pengembangan Ekonomi Wilayah Kabupaten Manggarai Timur



Sumber : Analisis Data Bab II

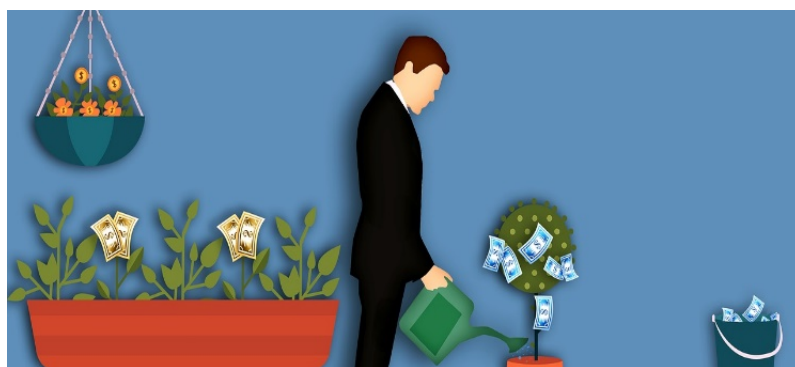
Hingga saat ini sektor pertanian merupakan sektor yang masih dominan dalam perekonomian Manggarai Timur. Hingga tahun 2018 peran sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih berada pada angka 42,95 persen. Namun demikian sektor dominan ini perkembangannya sangat lambat. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang dari tahun ke tahun hanya tumbuh sekitar 3,56 persen. Lambatnya perkembangan sektor pertanian terdeteksi bersumber dari 4 aspek yakni industri, investasi, pertanian itu sendiri dan permasalahan di desa.

Sektor industri merupakan sektor kunci untuk menarik perekonomian agar bergerak dari ciri agraris menjadi ciri industri. Ketika sektor industri belum mampu berkembang maka sektor pertanian akan terus terperangkap dalam ciri agraris bahkan subsisten. Hal inilah yang tampaknya menjadi ciri dari perekonomian Manggarai Timur. Hingga tahun 2018 peran sektor industri dalam Perekonomian baru mencapai angka 0,51 persen dengan tingkat pertumbuhan sebesar 3,82 persen. Secara idealnya agar industri mampu menjadi penghela perekonomian setidaknya memiliki peran sebesar 30%. Ketika sektor industri bergerak sangat lambat maka tidak mungkin bagi sektor ini untuk menarik sektor pertanian untuk tumbuh dan berkembang. Hingga saat ini telah



dilakukan intervensi terhadap pengembangan industri melalui koperasi dan UMKM, namun demikian tampaknya intervensi itu baru sampai pada pengembangan jumlah lembaga ekonomi yang berusaha, sedangkan outcome dari intervensi itu belum terlihat.

Sektor pertanian yang lambat tumbuh itu juga bersumber dari lemahnya investasi di bidang pertanian dan industri yang mengolah produk pertanian. Investasi secara umum tercatat dalam data Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB. Hingga tahun 2017 pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) di Manggarai Timur baru mencapai angka 3,75 persen, sebuah angka pertumbuhan yang sangat rendah untuk mampu menjadi penarik pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2013 - 2017 berfluktuasi dari 18,44 persen (2013) menjadi 3,75 persen (2017),



sementara di tahun lainnya masing-masing 17,74 persen (2014) ; 22,71 persen (2015) 1,62 persen (2016). Pertumbuhan PMTB Bangunan dan Non Bangunan ternyata cukup

kontradiktif dalam tiga tahun terakhir. PMTB Bangunan selalu bertumbuh positif walaupun cenderung melambat, berbanding terbalik dengan pada PMTB Non Bangunan yang selalu mengalami penurunan sejak tahun 2015 bahkan mencapai -19,16 persen pada tahun 2017. Data ini mengkonfirmasi bahwa investasi riil yang masuk masih sangat sedikit. Investasi baru terfokus pada bangunan. Selanjutnya pada tataran pemerintah daerah, intervensi baru dilakukan pada tataran investasi nasional dan investasi asing, sedangkan untuk investasi yang banyak dilakukan masyarakat belum pernah mendapatkan perhatian.

Selanjutnya adalah sektor pertanian itu sendiri. Sebagian besar pertanian di Manggarai Timur masih berciri subsisten. Keluarga tani mengelola pertaniannya dengan tujuan untuk mendapatkan jumlah penghasilan tertentu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya bukan berbasis pada apa yang dibutuhkan pasar sehingga menghasilkan pendapatan tinggi. Pola ini membuat pengelolaan dilakukan secara seadanya, bahkan saat tertentu justru merusak produk pertanian itu sendiri. Misalnya memetik kopi sebelum waktunya karena terdesak kebutuhan keuangan keluarga. Aspek selanjutnya adalah desa yang belum mampu menjadi basis pengembangan pertanian. Pemerintah dalam melakukan intervensi kepada petani sampai saat ini belum efektif. Sekalipun telah banyak kelompok tani yang dibina, namun demikian ternyata belum menghasilkan outcome yang baik di bidang pertanian.

Aktivitas ekonomi masyarakat berlangsung di desa desa. Ketika desa mampu berkembang dengan baik, maka aktivitas ekonomi dapat dipastikan akan tumbuh dengan

baik. Hingga saat ini desa-desa di Manggarai Timur belum sepenuhnya berdaya. Hingga tahun 2017 baru kurang dari 1% desa yang memiliki kriteria mandiri.

Pada sisi lain fluktuasi dan kecenderungan penurunan kinerja perekonomian Manggarai Timur disebabkan oleh belum berkembangnya sektor jasa masyarakat. Hingga tahun 2017 sektor jasa masih didominasi oleh jasa pemerintahan. Tidak berkembangnya jasa masyarakat bersumber dari dua aspek yakni kinerja pariwisata dan kinerja perdagangan. Potensi pariwisata yang dimiliki oleh Manggarai Timur sesungguhnya cukup



banyak, utamanya yang berciri alam dan budaya. Namun demikian hingga saat ini Manggarai Timur belum mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki tersebut, sehingga sektor ini juga belum mampu menjadi pencipta multiplier. Pada aspek pariwisata, hingga saat ini terdapat beberapa kawasan pariwisata dengan hasil jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2018

sebanyak 14.895 wisatawan. Rendahnya kunjungan wisatawan juga berkaitan dengan masih kurangnya ketersediaan pendukung wisata, misalnya ketersediaan hotel maupun restoran yang masih terbatas.

Selanjutnya pada bidang perdagangan Manggarai Timur juga belum mampu memanfaatkan potensi dari infrastruktur yang telah ada untuk mempercepat perkembangan sektor perdagangan. Sebagai contoh pelabuhan Nanga Baras hingga saat ini belum mampu menjadi sumber perdagangan daerah Manggarai Timur. Sebagian perdagangan masih menggunakan jalur darat yang relatif panjang dan mahal.



4.1.3 Analisis Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Pembangunan jangka menengah Kabupaten Manggarai Timur mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan,



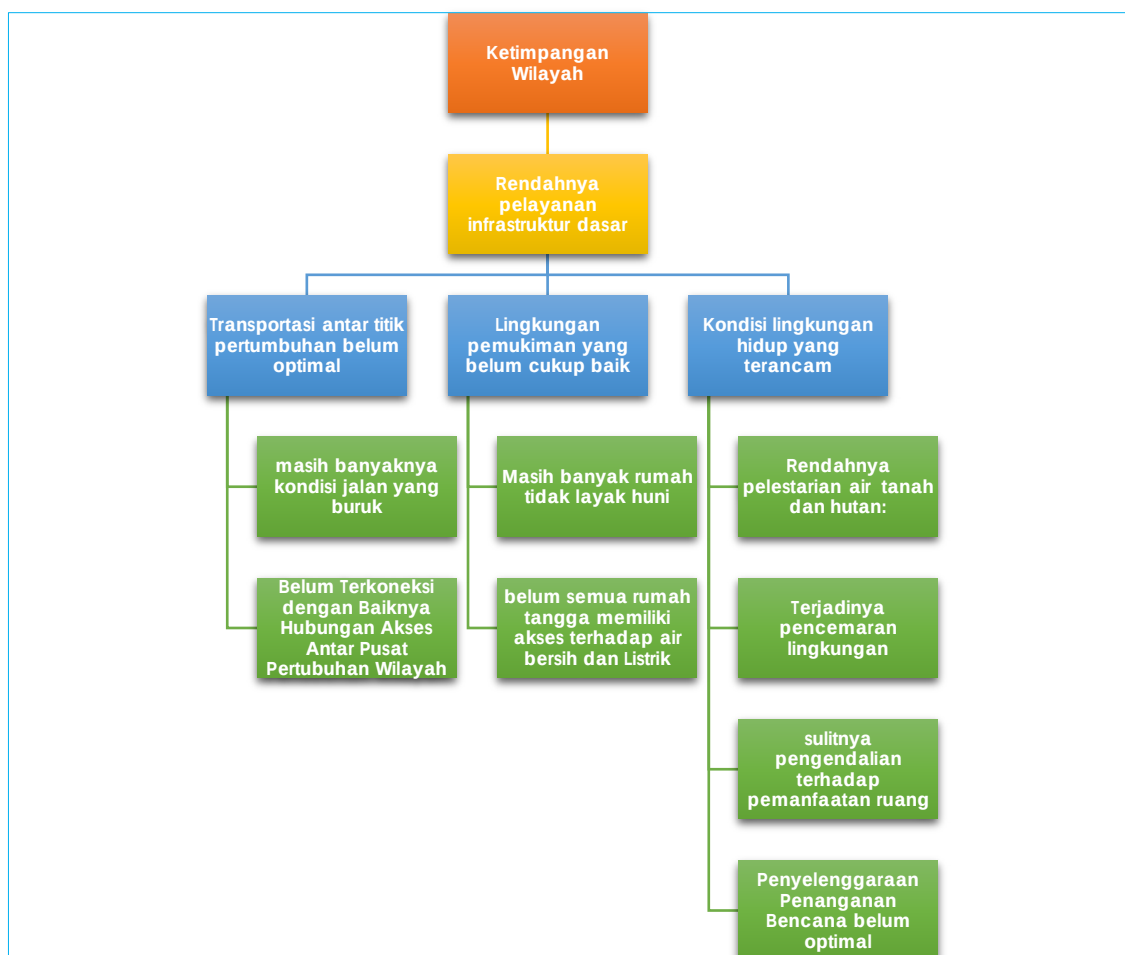
infrastruktur dan lingkungan hidup merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dimana seringkali untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, terjadi dampak terhadap lingkungan hidup baik sumber daya alamnya maupun lingkungan sosialnya.

Adanya eksploitasi lingkungan yang semakin meningkat merupakan bagian yang selama ini berjalan bersama dengan aktivitas pengembangan ekonomi, akibatnya, terjadilah pencemaran dan kemerosotan mutu lingkungan hidup serta kesenjangan sosial dalam hal peran dan perolehan manfaat pembangunan yang tidak merata bagi semua pihak. Infrastruktur adalah sistem fisik yang dikembangkan pemerintah dan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Salah satu isu utama terkait infrastruktur adalah bagaimana pembangunan dan pengembangan infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan/ketimpangan antar wilayah/kawasan, misalnya, kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, kesenjangan antar kecamatan maupun antar Desa/Kampung.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah lambatnya pertumbuhan ekonomi akibat rendahnya aksesibilitas dengan daerah sekitar dan kesenjangan antar wilayah atau ketimpangan wilayah (antar kecamatan dan antar desa). Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Manggarai Timur diharapkan mampu menciptakan pembangunan berkelanjutan dan mampu memperkecil ketimpangan antar wilayah. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, infrastruktur dan lingkungan hidup merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, terjadi pacuan pertumbuhan yang seringkali menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup maupun

lingkungan sosial. Indeks infrastruktur dan lingkungan hidup Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2018 rata-rata adalah 46,29 Persen, bila dilihat dari angka indeks ini dapat diketahui bahwa tingkat pelayanan infrastruktur yang ada sangat jauh dari angka optimal dan kedepanya dibutuhkan kinerja yang optimal untuk mendorong pelayanan infrastruktur dengan memperhatikan pola pembangunan yang berkelanjutan. Untuk melihat dan mengetahui seberapa besar ketimpangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Manggarai Timur, maka kedepanya akan dilakukan Perhitungan dengan menggunakan Metode Perhitungan Indeks Williamson, sebagai salah satu acuan dalam menata dan mengejar progress pembangunan daerah.

Diagram 4.3
Analisis Permasalahan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup



Sumber : Data Analisis Bab II



4.1.3.1

Analisis Permasalahan Infrastruktur Transportasi

Sarana dan prasarana wilayah yang mendukung aksesibilitas untuk menuju pusat-pusat pertumbuhan, pusat perekonomian dan pelayanan dasar sangat perlu dikembangkan, dimana Infrastruktur jalan dan jembatan merupakan aspek pendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan sosial. Sebagai gambaran kondisi infrastruktur Kabupaten Manggarai Timur Pada Tahun 2018, dari hasil analisis data menunjukkan bahwa angka rata-rata Indeks Infrastruktur Kabupaten Manggarai Timur adalah 45,52 % (Jalan, Jembatan, Air Baku, Irigasi dan Ketersediaan Sambungan Listrik). Secara langsung angka indeks ini menunjukkan bahwa masih sangat belum optimalnya pelayanan infrastruktur dasar di wilayah Kabupaten Manggarai Timur.

Data menunjukkan bahwa Persentase jalan dalam kondisi baik dari total panjang Jalan Kabupaten Manggarai Timur sepanjang 1281,29 km dalam 2 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 36,64 % pada tahun 2017 menjadi 38,29 Persen pada tahun 2018, namun meskipun terjadi peningkatan, namun ruas jalan yang masih dalam kondisi baik masih sangat kurang dan berada pada angka dibawah 50 Persen. Kondisi ini terjadi disebabkan belum adanya penetapan skala prioritas pembangunan infrastruktur jalan sesuai dengan peruntukannya, dimana Jalan yang memiliki utilitas tinggi diutamakan untuk dijaga dalam kondisi baik dibandingkan jalan yang memiliki utilitas rendah.



Jumlah Jembatan yang terdapat di Kabupaten Manggarai Timur adalah sebanyak 64 buah dimana berdasarkan kondisinya diketahui bahwa terdapat 87,5 % (56 buah) jembatan dengan kondisi Baik sedangkan rusak ringan 6 buah dan rusak berat 2 buah, kondisi ini menunjukkan bahwa konektifitas antar wilayah di Kabupaten Manggarai Timur sudah menunjukkan progress yang cukup baik, kedepanya perlu di tingkatkan lagi baik dari aspek kualitas maupun kuantitas sesuai dengan kebutuhan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur. Analisa data juga menunjukkan bahwa jaringan irigasi yang terdapat di wilayah Kabupaten Manggarai Timur belum cukup optimal hal ini dapat dilihat dari total luas areal tanam 27,370 Ha, hingga tahun 2018 baru 79,24 % yang dikelola sebagai areal tanam. Belum optimalnya pelayanan infrastruktur dasar ini juga ditunjukkan dengan belum optimalnya pelayanan infrastruktur sambungan listrik rumah dan ketersediaan air baku, dimana untuk sambungan listrik baru mencapai angka 25,60 % dari total 67.835 Rumah Tangga di Kabupaten Manggarai Timur.

Infrastruktur adalah sistem fisik yang dikembangkan pemerintah dan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Salah satu isu utama terkait infrastruktur adalah bagaimana pembangunan dan pengembangan infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah. Pemenuhan sarana dan

prasarana transportasi antar wilayah sangat menentukan perkembangan dan titik tumbuh suatu wilayah. Aksesibilitas masyarakat terhadap pusat pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, pemerintahan) dan pusat perekonomian (pasar) harus terlayani dengan baik dan lancar. Dari keseluruhan desa yang ada, telah terhubung dengan ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten, meskipun kondisi jalan belum kesemuanya dalam kondisi baik/mantab. Secara umum terjadi peningkatan dalam pelayanan Angkutan Jalan, hal ini dapat dilihat semakin meningkatnya jumlah arus Penumpang Angkutan Umum dimana pada tahun 2018 meningkat menjadi 30.960 Orang Penumpang dengan Rasio Ijin Trayek 0.00022 Persen dan Angkutan darat 0.019 Persen.

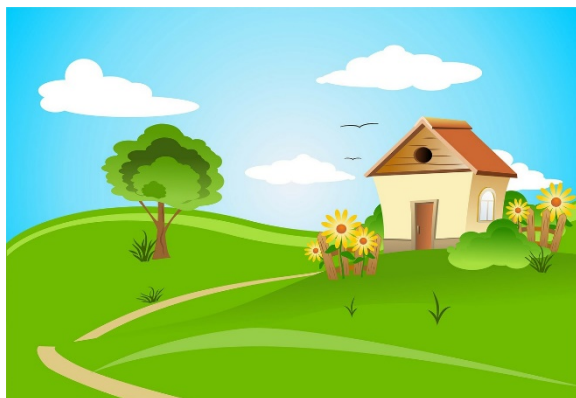


Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten dengan indikator jumlah prosentase terminal penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek terhadap total jumlah jaringan pelayanan AKDP, angkutan kota, dan angkutan harus di data dan terukur di tahun yang akan

datang. Sasarannya tersedianya jaringan prasarana angkutan jalan. Dengan Indikator yaitu prosentase tersedianya halte pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek (100%), Kedepan masih perlu ditingkatkan sub sub terminal dan halte-halte.

4.1.3.2 Analisis Kondisi Lingkungan Pemukiman

Dukungan infrastruktur untuk pemukiman diharapkan akan semakin meningkat, capaian kinerja Jumlah Rumah tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni meningkat setiap tahunnya cukup signifikan dalam penanganannya. Rasio Rumah Layak Huni dari 75,31 persen pada tahun 2017 meningkat menjadi 76,60 persen pada tahun 2018.



Kedepan perlu ditingkatkan lagi dengan mendata kembali rumah rumah yang tidak layak huni yang harus ditangani. Seiring dengan meningkatnya Rasio Rumah Layak Huni sebaliknya Rasio Rumah Tidak Layak Huni perlahan menurun dari 24,68 persen pada tahun 2017 menjadi 23,40 persen pada tahun 2018. Pada tahun

2018 total pelanggan listrik di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 17,365 KK pelanggan dimana Jika dibandingkan antara jumlah KK di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak

67,835 KK dengan jumlah pelanggan listrik, maka rasio elektrifikasi di Kabupaten Manggarai Timur baru mencapai 25,60 Persen, kondisi ini jelas menunjukkan bahwa pelayanan kebutuhan listrik masih sangat minim, sehingga di tahun yang akan datang perlu optimalisasi dalam pelayanan kelistrikan di Kabupaten Manggarai Timur.

Persentase Sarana Air Bersih Perdesaaan dan Rumah Tangga Dengan Sumber Air Minum Layak di Kabupaten Manggarai Timur Pada Tahun 2018 adalah 25,15 Persen. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih belum cukup optimal sehingga ditahun yang akan datang perlu ditingkatkan lagi hingga mencapai 100 Persen, agar masyarakat Manggarai Timur bisa menikmati akses terhadap pelayanan air bersih secara lebih optimal.

4.1.3.3 **Analisis Kondisi Lingkungan Hidup**

Eksplorasi lingkungan semakin meningkat sebagai akibat dari aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Akibatnya, terjadilah pencemaran dan kemerosotan mutu lingkungan hidup serta kesenjangan sosial dalam hal peran dan perolehan manfaat pembangunan yang tidak merata bagi semua pihak. Kerusakan lingkungan hidup juga dipicu dengan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Berdasarkan Capaian lingkungan hidup, Upaya peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) harus terus di ukur pada tahun yang akan datang melalui beberapa indeks berikut ini:

1. Indeks Kualitas Udara (IKU) untuk Kabupaten Manggarai Timur Belum terdata;
2. Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Manggarai Timur hingga tahun 2018 baru dilakukan pengukuran hanya pada 6 sungai;
3. Indeks Tutupan Hutan (ITH) belum terdata;
4. Capaian kinerja RTH dengan indikator Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/pada tahun 2018 di atas 30 Persen;
5. Penanganan sampah perkotaan yang diukur melalui prosentase sampah yang tertangani hanya mencapai 7,68 % (230,28 Meter Kubik) pada tahun 2018. Hal ini terjadi karena pengelolaan sampah masih dilakukan secara manual oleh masyarakat, baik dibakar maupun ditimbun di pekarangan rumah masing-masing. Sampai dengan tahun 2018, penanganan limbah yang diukur melalui cakupan rumah tangga belum dilaksanakan di Manggarai Timur;
6. Cakupan rumah tangga yang memiliki MCK dan Instalasi air limbah pada tahun 2018 yang berasal dari intervensi anggaran pembangunan fisik pemerintah adalah sebanyak 2.793 Unit dari total jumlah 67,835 KK Kabupaten Manggarai Timur atau sebesar 4,12 Persen;

7. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, namun dari total alokasi luas RTH Publik 15.111 Ha belum semuanya ditata dan dikelola oleh Pemerintah;
8. Berdasarkan capaian kinerja penanggulangan bencana lebih mengarahkan pada penyiapan SDM dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pada lokasi-lokasi rawan bencana. Sampai dengan tahun 2018 pemerintah Kabupaten Manggarai Timur baru menyiapkan tenaga Relawan Bencana Alam (TAGANA) Sebanyak 30 orang dengan rasio 18,87 Persen terhadap 159 Desa dan hingga saat ini dari jumlah Desa yang ada, belum ada Penyiapan Desa/Kampung tanggap darurat. Hingga saat ini Jenis pelayanan bencana yang mencakup pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana masih sangat minim dimana hingga tahun 2018 upaya pencegahan korban bencana masih hanya berupa rambu jalur evakuasi saja dan penanganan pada kasus pasca bencana, oleh karena itu penanggulangan bencana di Kabupaten Manggarai Timur belum optimal, hal ini juga tergambar dalam data Peta InaRisk Tahun 2018 dimana indeks bencana Kabupaten Manggarai Timur masih berada pada angka 166 yang berada di atas angka maksimal secara nasional 144 artinya indeks tersebut menunjukan wilayah Manggarai Timur masuk kategori rawan bencana. Sehingga kedepan masih perlu ditingkatkan lagi penanganan pencegahan bencana dan pasca bencana baik dari SDM maupun dari Peralatan mitigasi Bencana yang diperlukan.

4.1.4

Analisis Permasalahan Pembangunan Bidang Tata Kelola Pemerintahan



Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses)

dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus diatasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, reformasi birokrasi dilakukan sebagai respon sistematis dan komprehensif atas pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis yang menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.

Tata Kelola pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Konsep akuntabilitas menunjukkan pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan publik dalam mengelola berbagai urusan publik, dengan memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga negara. Prinsip akuntabilitas ini dapat direpresentasikan dengan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan urusan publik melalui laporan pelaksanaan (akuntabilitas kinerja) secara periodik. Prinsip transparansi dimaksudkan agar data/informasi kegiatan tata kelola pemerintahan dapat diakses oleh publik. Artinya ada keterbukaan dari pihak pemerintah terkait berbagai kebijakan/program/kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakannya. Sedangkan prinsip partisipatif dimaksudkan agar publik dapat berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam pembangunan daerah. Masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan perencanaan, implementasi dan evaluasi pembangunan.

Kinerja tata kelola pemerintahan direpresentasikan dengan indeks reformasi birokrasi. Namun sampai tahun 2018 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) belum mengeluarkan indeks reformasi birokrasi Kabupaten Manggarai Timur karena pemerintah Kabupaten Manggarai Timur belum melakukan penilaian mandiri atas reformasi birokrasinya. Sebagai indikator penggantinya digunakan indikator proxy (indikator antara atau indikator yang secara tidak langsung berhubungan dengan indeks reformasi birokrasi), yaitu nilai SAKIP dan Opini BPK. Nilai SAKIP Kabupaten Manggarai Timur tahun 2017 baru mencapai 52,16 (CC). Sementara itu, Opini BPK tahun 2017 juga masih pada posisi WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Kondisi ini mencerminkan bahwa tata kelola pemerintahan di Kabupaten Manggarai Timur masih rendah.

Ada beberapa permasalahan yang menyebabkan rendahnya nilai SAKIP dan Opini BPK, yaitu akuntabilitas pemerintah daerah dan kinerja pelayanan publik yang masih rendah. Rendahnya akuntabilitas pemerintah daerah di Kabupaten Manggarai Timur lebih disebabkan oleh masih rendahnya manajemen SDM Pemerintah Kabupaten Manggarai



Timur. Sumber Daya Manusia Pemerintah sebagai penyokong utama penyelenggaraan pemerintahan harus dikelola dengan baik. Secara kuantitas jumlah aparatur sipil negara yang ada sekarang masih kurang untuk mengatasi iklim dan beban kerja yang cukup padat di

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Sampai tahun 2018 jumlah ASN di Kabupaten Manggarai Timur baru mencapai 3,865 orang, padahal yang dibutuhkan sebanyak 7,154 orang. Pada sisi lain, penempatan pegawai yang ada belum sesuai dengan kompetensi dan belum berdasarkan hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Manajemen Pegawai. Dari sisi komposisi jabatan sudah cukup baik, tahun 2018 hampir 70% diduduki oleh pejabat fungsional tertentu sebanyak 2,720 pegawai. Sementara itu, jabatan struktural yang ada baru terisi sebesar 76,20%. Berdasarkan hasil analisis jabatan seharusnya ada 752 jabatan struktural yang perlu diisi, namun yang telah terisi baru 573 orang. Sebagai sebuah sistem, belum terisinya sebagian jabatan struktural tersebut tentu saja berpengaruh pada kinerja tata kelola pemerintahan. Jika jabatan struktural yang belum terisi tersebut merupakan jabatan yang sangat strategis, maka pengaruhnya terhadap tata kelola pemerintahan sangat signifikan khususnya kinerja akuntabilitas pemerintah daerah.

Komponen yang sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah adalah unsur perencanaan. Kondisi yang terjadi di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2018 adalah masih banyaknya inkonsistensi antar dokumen perencanaan khususnya dokumen perencanaan lima tahunan (RPJMD) dengan dokumen perencanaan tahunan seperti RKPD dan APBD. Konsistensi dokumen perencanaan RPJMD dengan RKPD pada tahun 2018 baru mencapai 76,96%. Hal ini yang menyebabkan akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur masih rendah. Di samping itu tingkat pengawasan Kabupaten Manggarai Timur yang juga masih rendah ditunjukkan dengan jumlah temuan yang ditindaklanjuti tahun 2018 baru mencapai 73,54% dan jumlah temuan BPK sebesar Rp. 22.071.041.315,07. Kondisi ini merupakan faktor penyumbang rendahnya akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur. Hampir setiap tahun dari tahun 2014-2017 rata-rata jumlah temuan BPK mengalami peningkatan sebesar 3,78%. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat pengawasan daerah di Kabupaten Manggarai Timur masih rendah. Ada 2 masalah yang menyebabkan rendahnya maturitas SPIP di Kabupaten Manggarai Timur, yaitu sebaran objek pengawasan belum sebanding dengan jumlah aparat pengawas terlatih, serta tingkat kepatuhan dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang masih rendah.

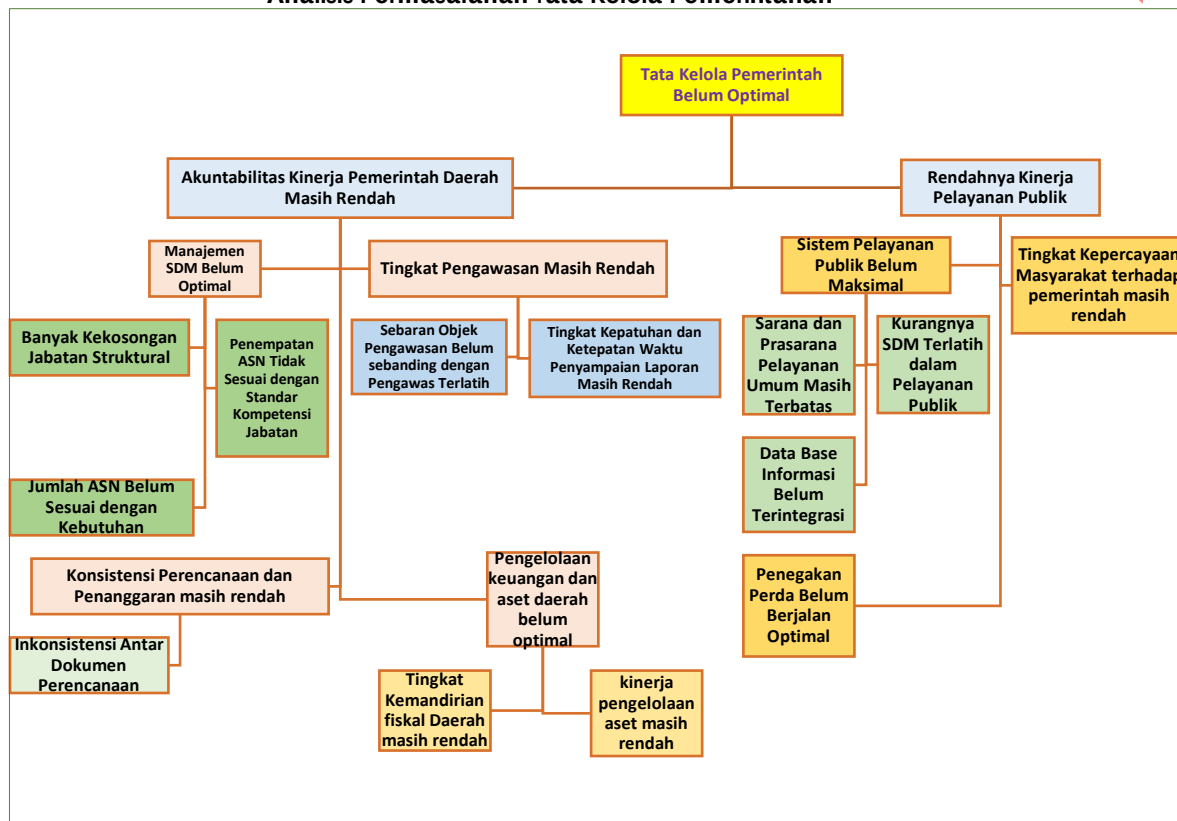
Rendahnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terjadi karena masih rendahnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah. Hingga tahun 2018 kinerja pendapatan keuangan Pemerintah Manggarai Timur masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya tingkat ketergantungan pada dana transfer Pusat untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur. Dari total APBD Kabupaten Manggarai Timur sebesar 95,71% berasal dari Dana Transfer Pusat, sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD pada tahun 2018 hanya sekitar 4,29%. Rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD terjadi karena penggalan sumber-sumber PAD belum optimal. Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur belum memiliki data base dan memutakhirkan potensi-potensi pajak daerah. Di samping itu manajemen aset di daerah juga belum tertata dengan baik. Ada banyak kendala dalam inventarisasi aset khususnya pada pencatatan aset dalam neraca. Kendala tersebut dapat dilihat dari adanya ketidaksesuaian antara aset yang dilaporkan dalam neraca dengan data dukung. Begitu pula sebaliknya, ada data dukung yang belum

tercatat dalam neraca. Kondisi ini menyebabkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Kabupaten Manggarai Timur masih sebatas WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

Faktor penyebab kedua belum optimalnya tata kelola pemerintahan di Kabupaten Manggarai Timur adalah rendahnya kinerja pelayanan publik yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan publik pemerintah adalah pelayanan perizinan. Pada tahun 2018 rata-rata lama proses perizinan di Kabupaten Manggarai Timur sekitar 6 hari. Di tempat lain proses perizinan masih lebih cepat dibandingkan dengan proses perizinan di Kabupaten Manggarai Timur. Selain itu, penegakan Perda di Kabupaten Manggarai Timur belum berjalan dengan baik, dan masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Belum maksimalnya pelayanan publik di Kabupaten Manggarai Timur terjadi karena masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, masih kurangnya jumlah SDM terlatih dalam pelayanan publik, serta data base informasi pelayanan publik belum terintegrasi. Kurangnya SDM terlatih dapat dilihat dari minimnya aparatur pemerintah yang mengikuti pelatihan dan pendidikan formal dan struktural. Pada tahun 2018 hanya 14% aparatur Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal; dan hanya 12% yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Terbatasnya jumlah aparatur terlatih menyebabkan pelayanan publik kurang berjalan dengan lancar. Hambatan tersebut diperparah dengan belum tersedianya data base yang terintegrasi. Akibatnya data yang disediakan oleh satu PD dengan PD yang lainnya berbeda satu sama lain dan pemahaman satu bidang dengan bidang lainnya tentang data berbeda satu sama lain. Permasalahan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Diagram 4.4. di bawah ini.



Diagram 4.4
Analisis Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan



Sumber : Analisis Data Bab II

Telah disajikan analisis permasalahan dalam 4 bidang, yakni ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur dan lingkungan hidup serta tata kelola pemerintahan. Dari analisis yang telah dilakukan berikut disajikan ringkasan seluruh permasalahan itu dalam bentuk tabel, sesuai dengan panduan yang diberikan oleh Pemendagri nomor 86 tahun 2017.

Tabel 4.1
Permasalahan Pembangunan

No	Permasalahan Utama	Inti Permasalahan	Akar Masalah
1.	Rendahnya kualitas sumber daya manusia	Rendahnya derajat kesehatan masyarakat	Status Kesehatan Ibu, bayi, balita, remaja, lansia belum optimal serta masih tingginya angka gizi buruk dan stunting. Beban ganda penanggulangan penyakit Mutu dan akses pelayanan kesehatan kesehatan belum optimal Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat Kurangnya peran stakeholder lain di luar sekolah

		Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Metode pembelajaran yang tidak tepat sasaran
			Materi pembelajaran yang tidak kontekstual
			Literasi guru, murid dan orang tua rendah
			Fasilitas pendidikan yang belum memadai
			Pelayanan PAUD belum maksimal
			Kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi standar
			Pelayanan PNF belum optimal
		Adanya guncangan sosial dalam masyarakat	Tingkat kemiskinan yang tinggi
			Keberdayaan perempuan dan anak yang masih kurang
			Menurunnya ketaatan terhadap adat dan budaya
			Tingkat fertilitas yang tinggi
			Kurang terbinanya generasi muda
2.	Perkembangan ekonomi fluktuatif yang berdampak ada rendahnya kesejahteraan masyarakat	Sektor pertanian yang menjadi sumber utama kehidupan masyarakat perkembangannya yang lambat	Sektor industri belum tumbuh sehingga tidak mampu menjadi penarik sektor pertanian
			Investasi di bidang pertanian dan industri berbasis pertanian sangat kurang
			Pola pengelolaan pertanian masih subsisten
			Desa belum mampu menjadi agen untuk pengembangan ekonomi masyarakat
			Ketahanan Pangan masyarakat masih rendah
			Sektor perdagangan dan jasa masyarakat belum mampu untuk menjadi penghela perekonomian
3	Rendahnya Pelayanan Infrastruktur Dasar	Konektifitas antara wilayah dan ketersediaan infrastruktur dasar belum optimal karena pelayanan infrastruktur dasar belum merata	Sektor pariwisata yang memiliki potensi menjadi pengungkit kegiatan ekonomi belum berkembang
			Perdagangan antar daerah belum berbasis sumber daya lokal yang dimiliki daerah
			Kondisi jalan yang rusak masih dominan
			Kondisi Geografis Wilayah (Jenis Tanah, Topografi, curah hujan)
			Terbatasnya Kewenangan Pengelolaan Transportasi Udara
			Kondisi jembatan yang rusak masih ada di beberapa titik lokasi
		Lingkungan Pemukiman Yang Belum Cukup Baik	Moda Transportasi yang terbatas dan belum terintegrasi
			Wilayah Yang Luas dan Sebaran Penduduk Yang Tidak Merata
			Masih banyaknya rumah tidak layak huni
			belum semua rumah tangga memiliki akses terhadap Infrastruktur air bersih dan Listrik
		Kondisi Lingkungan Hidup Yang terancam	Rendahnya pelestarian air tanah, air permukaan dan hutan yang

		berdampak pada penurunan kualitas lingkungan
		Terjadinya pencemaran lingkungan
		sulitnya pengendalian terhadap pemanfaatan ruang
		Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasca Bencana belum optimal
5. Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Masih Rendah	Manajemen SDM Belum Optimal
		Tingkat Pengawasan Masih Rendah
		Konsistensi Perencanaan dan Penanggaran masih rendah
		Pengelolaan keuangan dan aset belum optimal
	Rendahnya Kinerja Pelayanan Publik	Sistem pelayanan publik belum optimal
		Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih rendah
		Penegakan Perda belum berjalan optimal

4.2 Isu strategis

4.2.1 Isu Strategis Internal

4.2.1.1 Penelaahan RPJPD Kabupaten Manggarai Timur 2009-2029

Perencanaan pembangunan daerah adalah merupakan satu kesatuan perencanaan yang holistik dan berkesinambungan. Karena itu, penelaahan RPJPD dalam perumusan RPJMD adalah hal penting yang harus dilakukan, mengingat RPJMD ini merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan berkenaan dalam RPJPD. RPJPD Kabupaten Manggarai Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009-2029.

Kabupaten Manggarai Timur menetapkan prioritas pembangunan sesuai dengan isu-isu strategis dan kebutuhan masyarakat yang dibagi dalam 9 tahapan pembangunan sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya Infrastruktur Dasar;
2. Rendahnya Kesejahteraan Masyarakat;
3. Minimnya Jiwa Wira Usaha dan Terbatasnya Kesempatan Kerja;
4. Penurunan Kualitas Lingkungan;
5. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) Yang Belum Dikelola Maksimal;
6. Kualitas SDM Relatif Rendah;
7. Reformasi Birokrasi Belum Berjalan Optimal;
8. Masih Terjadinya Ketidakadilan Peran Gender;
9. Gangguan Kamtibmas.

Berdasarkan isu strategis dan kondisi daerah saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi Pembangunan RPJPD Kabupaten Manggarai Timur 2009-2029 adalah :

Manggarai Timur Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing

Adapun visi ini bermaksud memberdaya-gunakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki Kabupaten Manggarai Timur untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan pembangunan jangka panjang atas dasar amanat pembangunan menurut Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai visi di atas, yang memuat tujuan pembangunan yang sarat dengan makna, maka misi pembangunan merupakan usaha konkret interpretasi untuk mewujudkan visi pembangunan yang masih umum dan abstrak, maka disusunlah misi pembangunan NTT selama periode tersebut sebagai berikut :

Misi 1

Mewujudkan pembangunan yang merata, seimbang dan berkelanjutan



Pembangunan wilayah merupakan pembangunan yang bersifat holistik ataupun menyeluruh. Ada tiga aspek utama terkait pembangunan wilayah yaitu aspek ekonomi, social dan lingkungan. Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi merupakan pendorong tumbuh kembangnya perekonomian wilayah secara menyeluruh tetapi bukan merupakan satu-satunya keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti oleh pembangunan

sosial akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang bias, artinya masih ditemukan kesenjangan di tengah masyarakat. Pembangunan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan hendaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sekarang saja tetapi juga harus dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan juga dimaksudkan agar dilaksanakan dengan mempertimbangkan semua aspek termasuk kelestarian lingkungan dan resiko kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi.

Misi pertama merupakan penjabaran dari visi sejahtera yang memfokuskan pada pertumbuhan wilayah dimana masyarakat mempunyai kesamaan terhadap semua aksesibilitas yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat (sarana dan prasarana). Selain

itu pembangunan tidak hanya diprioritaskan pada wilayah yang secara geografis pada wilayah-wilayah tertinggal atau sulit dijangkau (terpencil), kawasan-kawasan pembangunan yang strategis dan pengembangan kawasan pesisir dan kelautan.

Misi 2

Mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing



Kabupaten Manggarai Timur memiliki potensi di bidang pertanian, perkebunan, pariwisata dan perikanan dan kelautan, bila seluruh potensi sumber daya yang ada dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal dan berkelanjutan serta mengembangkan

perekonomian yang memiliki daya saing dengan berbasis sumberdaya lokal melalui lembaga ekonomi produktif (Koperasi, bank desa Bumdes, dll). Pemanfaatan potensi local wilayah perdesaan dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat, maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Misi kedua ini masih merupakan penjabaran visi sejahtera yang fokus pada peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah hasil-hasil potensi daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, melalui : peningkatan pengamanan lahan sawah di daerah irigasi berproduktivitas tinggi; meningkatkan populasi hewan ternak; meningkatkan diversifikasi pangan; meningkatkan pemanfaatan sumberdaya perikanan; mengembangkan usaha pertanian terpadu dengan konsep agribisnis; meningkatkan daya saing produksi pertanian dan perikanan; penguatan sistem pemasaran dan manajemen usaha dalam mendukung pengembangan agroindustri; peningkatan nilai tambah dan manfaat hasil hutan; peningkatan partisipasi masyarakat dengan pengembangan hutan tanaman; memperkuat lembaga pertanian dan perdesaan;.



Misi 3

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia



Dalam pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang handal diindikasikan dari aspek pendidikan, kesehatan dan daya beli yang merupakan indikator dalam pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). SDM yang baik akan mendorong percepatan peningkatan daya beli. Misi ketiga Mewujudkan kualitas SDM yang

tangguh dengan prioritas mencerdaskan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui : reorientasi kebijakan pendidikan dan pelatihan; demokratisasi pendidikan bagi seluruh warga masyarakat; meningkatkan kemampuan konseptual, teknis dan manajerial; meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat terutama penduduk miskin; mengembangkan cara penyelenggaraan pendidikan dan penyuluhan kesehatan sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi; menanamkan pola hidup bersih dan sehat, pola makan gizi seimbang di lingkungan keluarga; meningkatkan upaya terpadu untuk makin menjamin kecukupan pangan dan perbaikan gizi masyarakat

Misi 4

Mewujudkan Kabupaten Manggarai Timur yang aman dan tertib

Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Manggarai Timur diarahkan dengan tetap memperhatikan keselarasan yang menjamin penciptaan ketentraman dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat sebagai perwujudan kehidupan yang aman dan demokratis. Ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi yang dibutuhkan agar interaksi sosial dapat berlangsung normal, sehingga aktivitas-aktivitas lain terkait dengan kebutuhan hidup manusia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Apabila interaksi sosial dapat berlangsung normal, maka ancaman terhadap ketentraman, keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat dapat diminimalisir, dengan memberdayakan kehidupan masyarakat yang senantiasa memperhatikan kaidah dan norma yang berlaku sehingga supremasi hukum dapat diwujudkan. Masyarakat Kabupaten Manggarai Timur memiliki keberagaman dalam aktivitas sosial serta aktivitas politik, yang membutuhkan kerangka kebijakan yang tepat sehingga setiap masyarakat memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat serta memiliki kesempatan yang sama mendapatkan perlindungan hukum.

Misi 5

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, melalui peningkatan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik; meningkatkan efektivitas pengawasan aparat; peningkatan budaya kerja aparatur yang bermoral, professional, produktif dan bertanggungjawab; peningkatan pemberdayaan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat; meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan pemerintah daerah secara efektif dan responsive; meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur; meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur; meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024 merupakan pelaksanaan pembangunan dari RPJPD periode/tahap ketiga (2019-2024).

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pembangunan RPJPD Kabupaten Manggarai Timur

INDIKATOR MAKRO		Target dan Realisasi 2017	
		Target	Realisasi
1	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	69,31	58,51
	Angka Harapan Hidup	70,40	67,40
	Angka Melek Huruf	103,84	
	Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	8,20	6,45
	Pengeluaran Riil Perkapita (Ribu Rp.)	2.333,65	5,64
2	JUMLAH PENDUDUK	286.347	263.639
3	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (%)	1,62	1,48
4	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (jiwa)	78.812	74.850
	persentase penduduk miskin	27,52	26,80
5	KETENAGAKERJAAN		
	Usia Kerja 15 tahun ke atas	140.310	185.963
	Angkatan Kerja	200.443	152.029
	Pengangguran	60.133	756
	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,30	0,5
6	PDRB BERLAKU (Juta Rp)	1.969.172,27	2.761.215.18
7	PDRB KONSTAN (Juta Rp)	522.401,07	1.837.998.80
8	PDRB PERKAPITA adh Berlaku	6.876.881	10,473.469
9	PDRB PERKAPITA adh Konstan	1.824.365	6.971.649,87
11	LAJU INFLASI	6,26	1,96
12	INVESTA (Miliar)	27,50	606
13	LAJU INVESTASI (%)	50	

4.2.2

Isu Strategis Lingkungan Eksternal

4.2.2.1

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) TPB/SDGs



Menjelang berakhirnya era *Milenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2015, Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) menyelenggarakan konferensi bertajuk pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), di Rio de Janeiro, Brazil, Juni 2012, atau yang lebih sering disebut dengan konferensi Rio+20. Pertemuan tersebut menghasilkan dokumen *the future we want* yang sangat berperan penting dalam kemunculan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Poin paling penting dari dokumen tersebut adalah diperlukannya agenda pembangunan berkelanjutan baru yang melanjutkan MDGs, namun dengan visi yang lebih luas, holistik dan bersifat universal. Sebagai tindak lanjut pertemuan Rio+20, PBB membentuk kelompok kerja khusus yang bertugas untuk menyiapkan proposal mengenai konsep pembangunan berkelanjutan pasca MDGs pada 22 Januari 2013. Tim tersebut berisikan 30 anggota, termasuk Indonesia sebagai perwakilan dari grup Asia Pasifik.

Setelah melewati negosiasi antar negara, dokumen akhir yang dihasilkan oleh tim tersebut diadopsi oleh lebih dari 150 pemimpin dunia dalam kesempatan *the UN Sustainable Development Summit*, pada 25-27 September di New York, Amerika Serikat. seluruh negara yang hadir mendeklarasikan secara bersama-sama untuk mengadopsi agenda pembangunan berkelanjutan yang baru, yakni *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development* atau yang lebih dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Sebagaimana perwakilan Indonesia yang hadir dalam pertemuan dimaksud, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyampaikan pidato terkait keikut-sertaan Indonesia di dalam agenda SDGs4. SDGs merupakan visi terhadap keadaan menyeluruh dunia pada tahun 2030 (ODI, 2015; Sachs, 2015; UN, 2015), berisikan 17 tujuan dengan total 169 indikator capaian. Kelahiran SDGs sebagai konsekuensi atas kritik tajam terhadap target-target capaiannya yang lebih kompleks dan banyak dari MDGs dimana hanya memiliki 8 sasaran dianggap belum mencakupi berbagai indikator kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. SDGs dinilai sebagai visi global yang terlalu ambisius sehingga perspektif lain beranggapan bahwa ambisiusitas ini-lah yang dibutuhkan untuk dapat “memaksa” semua pihak turut menyelesaikan tantangan pembangunan dunia yang besar, seperti ketimpangan dan kerusakan lingkungan (ODI, 2015).

Perbedaan prinsip penyusunan antara SDGs dan MDGs memberikan harapan bahwa dunia akan bertransformasi menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Prinsipnya MDGs fokus terhadap permasalahan pembangunan di negara-negara berkembang dan tertinggal, dimana negara-negara maju lebih banyak berperan sebagai pendonor (ODI, 2015; Sachs, 2015). Sisi lainnya, prinsip utama SDGs adalah berlaku universal dengan sasaran-sasaran pembangunan yang berlaku untuk semua negara tertinggal, berkembang dan maju, beserta setiap warga negaranya. Terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang diindikasikan dalam 169 indikator pembangunan, terukur secara saksama pada setiap tahapannya dan dilakukan sebagai control publik terhadap berbagai kebijakan pembangunan lintas wilayah negara maupun lintas generasi dunia.

Konsep besar terkait SDGs telah dimulai dari tiga sumber yaitu High-Level Panel of Eminent Persons (HLPEP), Open Working Group (OWG) dan Sustainable Development Solutions Network (SDSN). HLPEP yang terselenggara di Bali (2013) melahirkan 12 tujuan dan 54 target pembangunan pasca 2015, namun belum ditentukan indikator-indikator dari tujuan dan target dimaksud. Sementara OWG yang diselenggarakan di Rio de Janeiro (2012, sebelumnya) melahirkan 13 pertemuan berkelanjutan diberbagai tempat hingga mengusulkan 17 tujuan yang mencakup isu-isu pembangunan berkelanjutan, termasuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, membuat kota yang lebih berkelanjutan, memerangi perubahan iklim dan melindungi hutan. Sebanyak 17 point tujuan dimaksud kemudian terumuskan dalam SDSN yang diprakarsai SekJen PBB dan merupakan jaringan independen yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, akademisi, sektor swasta, dan LSM yang bertugas untuk mencari solusi praktis untuk tujuan pembangunan.

Perkembangan selanjutnya SDSN mengusulkan 10 tujuan dengan 30 target dan 100 indikator, diantara tujuan yang diusulkan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri kemiskinan ekstrim termasuk kelaparan
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak

3. Memastikan pembelajaran yang efektif untuk semua anak-anak dan remaja bagi kehidupan dan lingkungannya
4. Mencapai kesetaraan gender, inklusi sosial dan hak asasi manusia untuk semua
5. Mencapai kesehatan dan kesejahteraan di semua usia
6. Meningkatkan sistem pertanian dan mencapai kemakmuran pedesaan
7. Memberdayakan kota yang inklusif, produktif dan tangguh
8. Mengurangi perubahan iklim dan memastikan energi berkelanjutan
9. Menjaga keanekaragaman hayati dan memastikan pengelolaan air, lautan, hutan dan sumberdaya alam dengan baik
10. Mentransformasikan tata kelola dan teknologi untuk pembangunan berkelanjutan

Setelah mengusulkan 10 tujuan ini, SDSN pada tanggal 25 Juli 2014 mengeluarkan publikasi yang berjudul *Indicators and A Monitoring Framework For Sustainable Development Goals, Launching A Data Revolution For The SDGs*. Publikasi ini SDSN memadukan SDGs usulan OWG dan SDSN, diusulkan 17 tujuan SDGs dengan 109 indikator utama dan 111 indikator tambahan sebagaimana tersaji dalam Kajian Indikator SDGs yang diterbitkan oleh BPS.

Terkait pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis [KLHS] RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024 maka merujuk Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2018 [lampirannya menjelaskan tentang target pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB], memaparkan indikator-indikator SDGs dalam 3 [tiga] kategori, yaitu; indikator global, indikator nasional sebagai proksi indikator global, dan tambahan keterangan yang merupakan indikator global yang belum didefinisikan dan akan dikembangkan. Sejumlah indikator dimaksud akan menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen KLHS RPJMD berikut setelah mempertimbangkan keterkaitan visi-misi pembangunan yang telah disiapkan agar segala bentuk kebijakan pembangunan senantiasa mempertimbangkan aspek yang telah tegaskan dalam indikator SDGs.

4.2.2.2

Masyarakat Ekonomi ASEAN



KTT ASEAN ke-9 di Bali pada tahun 2003 menghasilkan kesepakatan Concord yang menyepakati pembentukan ASEAN Community untuk mempererat integrasi ASEAN. Dari kesepakatan tersebut terbentuk tiga komunitas dalam ASEAN Community yang disesuaikan ke dalam

tiga pilar di dalam ASEAN Vision 2021, yakni bidang keamanan politik (ASEAN Political-Security Community), ekonomi (ASEAN Economic-Security Community), dan sosial budaya (ASEAN Socio-Culture Community). MEA adalah tujuan akhir integrasi ekonomi seperti yang dicanangkan dalam ASEAN Vision 2021.

Untuk membantu terwujudnya integrasi ASEAN melalui MEA, maka disusun Blue Print MEA yang terdiri dari 4 pilar utama, yaitu : (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, dan ecommerce; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil, dan menengah; (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah, Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan ASEAN akan menjadi pasar terbukadan kesatuan yang berbasis produksi; serta mobilitas arus barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja akan bergerak bebas. Secara umum, tantangan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi MEA antara lain adalah meningkatkan daya saing produk dan sumberdaya manusia Indonesia. Indonesia masih harus mengembangkan industri yang berbasis nilai tambah. Oleh karena itu Indonesia perlu kerja keras melakukan hilirisasi produk. Dari sisi hulu, Indonesia sudah menjadi produsen yang dapat diandalkan mulai dari pertanian, kelautan dan perkebunan. Tetapi semua produk tersebut belum sampai ke hilir untuk mengurangi impor barang jadi, karena Indonesia telah memiliki bahan baku yang cukup.

Secara khusus, tantangan daerah dalam menghadapi MEA dapat dituangkan kedalam 5 (lima) strategi, yakni:

Strategi 1 : Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk-produk unggulan daerah, melalui : (1) menjalin kerjasama riset dengan universitas; (2) mendukung UKM dalam pengembangan produk dan kemasan; (3) mengembangkan produk daerah yang berorientasi ekspor. Kemudian dapat pula dilakukan dengan upaya mendorong ekspansi dan promosi produk unggulan baik barang maupun jasa, melalui : (1) memfasilitasi dan mendorong eksportir untuk mengembangkan pasar di ASEAN; (2) memberikan fasilitas promosi bagi UKM; (3) meningkatkan jaringan kerjasama dan mitra usaha dengan negara ASEAN.

Strategi 2 : Mendorong investasi daerah. Strategi ini dapat dilakukan melalui : (1) menyederhanakan prosedur, mempersingkat waktu, serta transparansi proses perijinan investasi/memulai usaha; (2) menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah melalui tata kelola investasi, kualitas sumberdaya manusia dan kualitas pelayanan dan perizinan;

(3) mengoptimalkan kinerja dan efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); (4) meningkatkan promosi sektor unggulan yang belum menjadi target investasi.

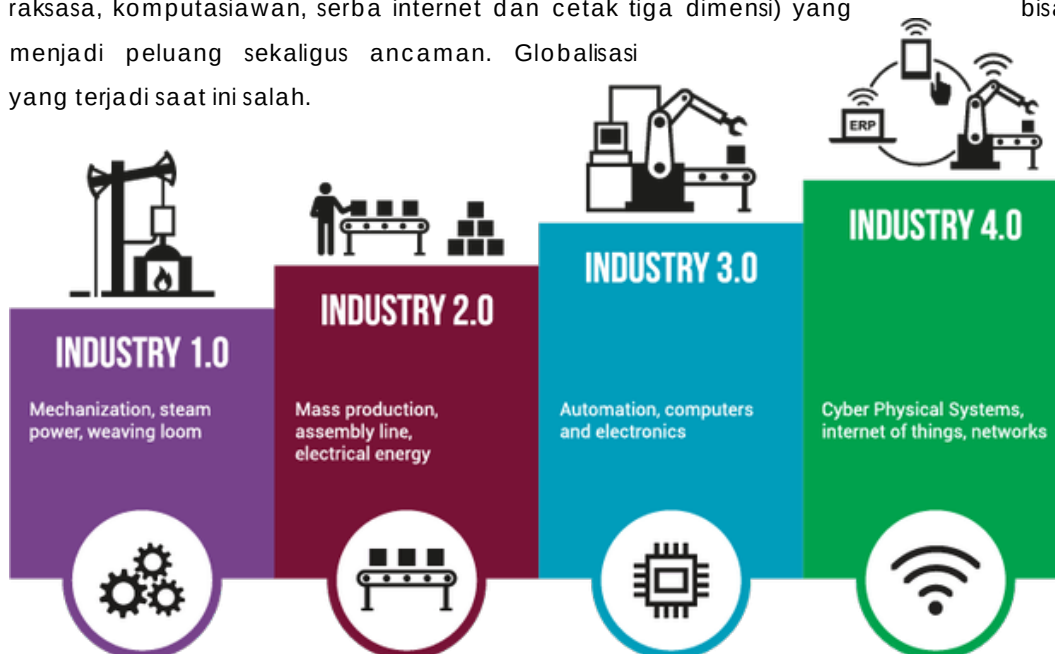
Strategi 3 : Meningkatkan daya saing sumber daya manusia daerah. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara : (1) meningkatkan utilisasi balai pelatihan tenaga kerja daerah; (2) bekerjasama dengan lembaga sertifikasi di daerah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pekerja sehingga diakui di dunia internasional.

Strategi 4 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur daerah. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara : (1) meningkatkan proporsi anggaran daerah untuk pembangunan sistem transportasi dan infrastruktur yang terintegrasi, yaitu jalan raya, pelabuhan, dan bandara, serta ketersediaan pasokan energi dan listrik untuk mendukung keterhubungan antar provinsi di Indonesia; (2) mengoptimalkan peran dan kerjasama dengan swasta dalam pengembangan infrastruktur melalui mekanisme Public-Private Partnership (PPP).

Strategi 5 : Meningkatkan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Strategi ini dapat dilakukan melalui sinkronisasi kerangka regulasi kebijakan dan program pusat dan daerah dalam menghadapi MEA.

4.2.2.3 Revolusi Industri 4.0

Era Revolusi Industri 4.0 (industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasiawan, serba internet dan cetak tiga dimensi) yang bisa menjadi peluang sekaligus ancaman. Globalisasi yang terjadi saat ini salah.



satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu). Arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan

mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya.

4.2.2.4

Masyarakat Ekonomi NTT

Melalui 7 prioritas pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur membangun strategi untuk mulai meningkatkan percepatan pembangunan ekonomi berbasis digital serta dorongan terhadap partisipasi masyarakat NTT umumnya baik itu dalam proses maupun pelaksanaan pembangunan.

Kebijakan pembangunan ini menganut dua filosofi dasar yaitu *public touch and bringing the public in*, yakni sebuah kebijakan yang sungguh-sungguh menyentuh kebutuhan publik dan juga mampu membawa masyarakat masuk kedalam ruang-ruang kebijakan atau yang dikenal dengan sebutan pembangunan partisipatif, dalam bentuk Holistik, Integratif, Tematik dan Spatial. Model kebijakan pembangunan seperti inilah yang saat ini sedang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi NTT.

Kebijakan Pembangunan Daerah dalam era keterbukaan merupakan komitmen bersama yang bersinergi dan saling menguntungkan dikarenakan pada asas pemanfaatan bersama, konsepsi dasar mengenai citra dan reputasi organisasi pemerintahan dibentuk guna menciptakan relationship yang baik antara pemerintah dan masyarakat dan swasta. Ditengah badai perubahan yang datang dan dalam pembangunan daerah Pemerintah sebagai Regulator Sustaining Innovation adalah hal yang kurang baik karena tantangan terbesar dalam pembangunan daerah saat ini adalah bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang sesuai tantangan global serta strategi dalam penanganan pengalihan jutaan pekerjaan yang akan digantikan mesin, robot, artificial, intelligence, serta perangkat computer lainnya.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan Kolaborasi dalam membangun ekonomi digital didefinisikan sebagai hubungan kerjasama yang dilakukan dengan prinsip yang sama yaitu kebersamaan dan keberlanjutan dalam pembangunan. Pemerintah secara serius mendorong dan memanfaatkan ekonomi digital yang mencakup tiga hal utama yaitu peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia. Kedua, pembangunan infrastruktur digital untuk terus ditingkatkan dan ketiga perbaikan dan peningkatan iklim investasi dalam mendukung pengembangan ekonomi digital.

Langkah awal untuk membangun kerjasama dalam bentuk tematik yang telah dimulai Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama 21 pemerintah kabupaten dan 1 pemerintah kota, di Labuan Bajo (10/6/2019), secara resmi telah mendeklarasikan Masyarakat Ekonomi NTT (ME-NTT). Dalam rumusan deklarasi tersebut, baik pemprov, pemkab/pemkot sepakat untuk mengimplementasikan ekonomi Pancasila dengan membangun ekonomi NTT. Ada empat poin deklarasi, diantaranya :

Yang pertama, disadari bahwa pembangunan masyarakat dan daerah NTT sebagai suatu entitas ekonomi sejauh ini belum terkoordinasi dan terintegrasi, sehingga

menimbulkan ketimpangan, inefisiensi dan rendahnya produktifitas. Karena itu, diperlukan cara pandang dan sistem kerja yang baru dalam semangat NTT Bangkit untuk meningkatkan kerja sama yang menciptakan daya saing dan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan daerah NTT.

Kedua, pembangunan NTT bertumpu pada pariwisata sebagai prime mover yang berbasis masyarakat dengan mengandalkan ring of beauty NTT. Melalui pembagunan “pariwisata estate” dengan penataan 5A (atraksi, aksesibilitas, akomodasi, amenitas, dan awareness) terjalin suatu mata rantai ekonomi baru yang membutuhkan jaringan kerja sama antara sektor pemerintah, swasta dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital.

Ketiga, meningkatkan keterpaduan antar sector dan wilayah atas dasar kesamaan produk, pengembangan industri pengolahan melalui kerja sama system pasar digital, peningkatan kapasitas produksi dan penjaminan mutu dengan perbankan, BUMD, BUMDes, koperasi, asosiasi, swasta dan konsumen, pemanfaatan teknologi informasi untuk penguatan kapasitas sumber daya manusia, kelambagaan, pasar dan jejaring kerja sama, serta meningkatkan kesadaran untuk menggunakan produk local hasil produksi NTT.

Keempat, untuk mendukung maksud dan tujuan Masyarakat Ekonomi NTT, hal-hal yang perlu mendapat perhatian bersama, pusat data dan informasi stok komoditi bersama NTT; pusat produksi/industri pengolahan bersama lewat pengembangana start-up variasi bisnis ekonomi digital dalam suatu kesatuan e-market place dengan pendekatan Share Economy dan On Demand Economy, pengembangan system kerja sama daerah, dukungan regulasi, asosiasi produk unggulan daerah, sumber daya manusia berkualitas, anggaran/investasi dan sumber daya pendukung lainnya.

Selanjutnya demi mendorong serta meningkatkan partisipasi masyarakat baik itu dalam proses, pelaksanaan maupun pengawasan terhadap berbagai kegiatan bidang-bidang pembangunan melalui program-program yang telah dan sementara berjalan oleh Pemerintah Provinsi NTT saat ini, merupakan program-program yang bersifat berkelanjutan serta meletakkan masyarakat sebagai pelaku utama program dan yang paling penting adalah program-program tersebut lebih berusaha untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, sedangkan kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungan



4.2.3

Penelaahan RPJMN dan RPJMD Provinsi NTT dan RPJMD Kabupaten Tetangga

Tabel 4.3
Identifikasi RPJMN dan RPJMD Provinsi NTT dan RPJMD Tetangga

No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Isu Strategis Terkait
1.	RPJMN	2015-2019	Pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industri Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) penopang pangan nasional dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis pertanian dan maritim (kelautan) melalui pengembangan industri pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung
2.	Provinsi NTT	2019-2024	Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Yang Mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Petani, Peternak dan Nelayan Yang Berkelanjutan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Masalah Sosial Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat NTT Reformasi Birokrasi
3.	Kabupaten Manggarai	2016 - 2021	Penerapan Sapta usaha Tani Belum optimal Masih rendahnya Konsumsi Pangan Yang beragam, bergizi seimbang dan Aman Rendahnya Kualitas Produksi dan Produktivitas nelayan perikanan tangkap dan budidaya Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Ternak Masih adanya Praktek Perdagangan Monopsoni dan Oligopsoni pada perdagangan Komoditi perkebunan Belum berkembangnya Industri kreatif (Home Industry) Masih Rendahnya kualitas tata kelolah koperasi Peningkatan sarana prasarana perhubungan Darat, Laut dan Udara dan Konektivitas Tol Laut Wilayah Timur dan Barat Indonesia Belum mantapnya sistem transportasi antar Desa dan antar kota dalam wilayah Kabupaten Manggarai Terbatasnya Akses Komunikasi dan Informatika Masih adanya desa -desa belum memiliki listrik sebagai Sumber penerangan utama di Kabupaten Manggarai Rendahnya Kompetensi , Produktivitas, Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Tingginya Resiko Daya Rusak Air Terhadap Kawasan Budidaya (Permukiman, Pertanian) Rendahnya cakupan layanan air minum bersih perkotaan dan perdesaan

Masih adanya Permukiman Kumuh dan Lingkungan Kumuh
Flores termasuk dalam 25 kawasan pariwisata nasional
Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia serta Percepatan Perbaikan Status Gizi Masyarakat
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan serta Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang berkualitas lewat Pemenuhan Ketersediaan Farmasi, Alkes, Pengawasan Obat dan Makanan, dan SDM Kesehatan
Peningkatan Manajemen, Penelitian dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Pengembangan JKN dan Peningkatan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan
Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk
Akses dan Kualitas Pelayanan KB belum optimal
Kesadaran KB yang terlambat (setelah memiliki anak > 3)
Jumlah Keluarga Sejahtera masih rendah
Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan dalam rangka mendukung pembangunan pendidikan nasional
Peningkatan mutu dan daya saing SDM dalam rangka memasuki Era Pasar Bebas
Belum terwujudnya kota Ruteng sebagai kota bers
Menurunnya debit air minum
Meningkatnya pencemaran Tanah, Air dan Udara yang disebabkan oleh adanya Usaha/kegiatan
Belum tersedianya informasi mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup
Masih luasnya kawasan kritis di dalam kawasan Hutan dan luar kawasan hutan
Belum optimalnya patroli Rutin/Terpadu pengamanan hutan dan Penyuluhan
Pengelolaan pertambangan yang belum mendukung pelestarian lingkungan dan berbasis tata ruan
Ketidakpastian informasi perubahan iklim
70,45% wilayah kabupaten Manggarai berada pada kemiringan lebih dari 40 derajat menyebabkan Manggarai kategori rawan bencana
Meningkatnya kepadatan penduduk dengan aktifitasnya
Masih tingginya Lahan yang belum memiliki sertifikat
Percepatan Pelayanan dokumen Kependudukan dan pencatatan Sipil
Belum Optimalnya Penanganan Penduduk yang Ilegal dan Beridentitas ganda
Masih rendahnya kesetaraan Gender
Meningkatnya kasus KDRT, Kekerasan terhadap Perempuan dan anak dan Eksploitasi perdagangan perempuan dan anak
Rumah layak huni bagi KK miskin

			Masih rendahnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
			Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
			Masih rendahnya kapasitas Aparatur Desa
			Masih rendahnya kontribusi PADes terhadap APBDes
			Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
			Pengelolaan Administrasi Keuangan pada SKPD, sekolah dan Pemerintah Desa
			Rendahnya kesadaran tindak lanjut temuan SKPD
			Penerapan Teknologi Informasi (SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD)
			Rendahnya Rasio Kontribusi PAD terhadap APBD
			Rendahnya Kualifikasi SDM Aparatur sesuai tuntutan Undang-undang ASN
			Masih rendahnya tertib Administrasi Kepegawaian
			Belum Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
			Belum Optimalnya Koordinasi Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan Penanaman Modal
			Belum optimalnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Satu Pintu
			Tingginya Tingkat Kepadatan penduduk
4.	Kabupaten Ngada	2016 - 2021	Disparitas Antar Wilayah
			Ketersediaan Pangan, Ketersediaan Air dan Energi
			Sumber Daya Mineral
			Penataan Ruang dan Pemukiman
			Pendidikan
			Kesehatan
			Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Pariwisata
			Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Ekonomis
			Penanggulangan Kemiskinan

4.3

Isu Strategis Kabupaten Manggarai Timur

Visi Kabupaten Manggarai Timur adalah Mewujudkan Masyarakat Manggarai Timur, Yang Sejahtera, Berdaya dan Berbudaya (MATIM SEBER), Visi ini merupakan kerangka acuan untuk melakukan kegiatan pembangunan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai Timur. Isu strategis pembangunan Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019-2024 merupakan aspek global dalam penentuan kebijakan umum pembangunan jangka menengah berdasarkan permasalahan pembangunan. Isu-isu strategis Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019-2024 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Isu-isu Strategis Pembangunan Kabupaten Manggarai Timur 2019-2024

No	Isu-isu Strategis Pembangunan
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kabupaten Manggarai Timur, Melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Kesehatan, Peningkatan Mutu Dan Kualitas Pendidikan dan Mengatasi Guncangan Sosial Masyarakat.
2.	Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Melalui Peningkatan Produktifitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Yang Berkesinambungan
3.	Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan
4.	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik yang Optimal

4.3.1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kabupaten Manggarai Timur Melalui Pelayanan Kesehatan, Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidikan dan Mengatasi Guncangan Sosial Masyarakat

Manusia sebagai sumber daya pada mulanya diartikan tenaga kerja manusia ditinjau secara fisiknya saja. Dengan kemampuan fisiknya manusia berusaha mengambil manfaat materi yang tersedia dilingkungannya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak sedikitnya jumlah penduduk serta unsur-unsur yang berkaitan dengan jumlah dalam batas tertentu merupakan potensi dalam bidang pembangunan. Dengan jumlah penduduk yang banyak merupakan sumber daya manusia untuk melakukan pembangunan.

Bangsa yang sedang membangun melalui pembangunan nasional yang berusaha meningkatkan hasilnya di segala bidang kehidupan. Pembangunan nasional akan lebih bermakna sejauh pembangunan itu mampu mewujudkan tujuan hakiki kebudayaan. Sumber daya manusia sebagai pendukung pembangunan adalah perilaku produktif dari manusia dalam bentuk tindakan nyata, sikap dan pengetahuan yang kondusif bagi terjadinya perubahan-perubahan dari tradisi, sikap dan fikiran dalam menghadapi hari depan dan perubahan dalam arti pembaharuan.

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pembangunan. Oleh karena itu dalam melaksanakan pembangunan suatu wilayah atau negara perlu diketahui keadaan sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut. Semakin lengkap dan tepat data mengenai sumber daya manusia yang tersedia, semakin mudah dan tepat pula perencanaan pembangunan yang di buat. Menurut GBHN, penduduk Indonesia, salah satu modal dasar pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang tinggi (tingkat pendidikan, kesehatan dan gizi) akan menjadi modal pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, kebijakan dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia perlu diarahkan untuk mencapai jumlah penduduk yang menguntungkan serta kualitas tertentu yang diharapkan dapat mencapai sasaran pembangunan tertentu.

Agar menjadi sumber daya manusia yang tangguh penduduk harus mempunyai kualitas yang memadai sehingga dapat menjadi modal pembangunan yang efektif. Tanpa adanya peningkatan kualitas, jumlah penduduk yang besar akan menimbulkan berbagai masalah dan menjadi beban pembangunan. Analisis mengenai kualitas sumber daya manusia selalu merujuk kepada indikator yang dapat menggambarkan kualitas sumberdaya manusia yang meliputi tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan indeks mutu hidup.

Sampai saat ini, kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Manggarai Timur masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat ditunjukkan melalui tiga faktor utama penentu HDI (Human Development Indeks) yang dikembangkan UNDP, Kualitas penduduk dalam bidang pendidikan sangat penting untuk diketahui, sebab dapat menggambarkan kemampuan penduduk dalam menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di bidang pendidikan salah satu masalah yang dihadapi Kabupaten Manggarai Timur adalah kualitas pendidikan yang masih rendah. Untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk, dapat dilakukan dengan cara memperhatikan data Angka Harapan Lama Sekolah. Sampai dengan tahun 2017 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Manggarai Timur adalah 11.04 tahun. Semakin tinggi Angka Harapan Lama Sekolah penduduk berarti kualitas penduduk di daerah yang bersangkutan semakin baik.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya kondisi tersebut di Kabupaten Manggarai Timur, antara lain :

1. Biaya pendidikan relatif mahal sehingga tidak dapat dijangkau oleh semua penduduk terutama penduduk yang mempunyai penghasilan rendah.
2. Sarana dan prasarana pendidikan yang masih belum memadai dan proporsional, terutama untuk sekolah lanjutan (SMP dan SMA). Keterbatasan daya tampung di SMP dan SMA, menyebabkan lulusan SD tidak tertampung semuanya di tingkat yang lebih atas. Idealnya, kalau pemerintah telah menetapkan kebijaksanaan wajib belajar sembilan tahun, proporsi SD dan SMP harus seimbang. Oleh karena itu, pemerintah harus terus berusaha secara maksimal untuk menyediakan layanan pendidikan yang murah dan berkualitas.
3. Rendahnya kualitas sarana fisik
Banyak sekolah-sekolah yang gedung-gedungnya telah rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap dan banyak yang rusak, laboratorium tidak standart, serta pemakaian teknologi informasi tidak memadai. Bahkan yang lebih parah masih ada sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, dan tidak memiliki laboratorium.
4. Kualitas guru.
Kompetensi guru di Provinsi NTT secara umum dan khususnya di Manggarai Timur belum optimal. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagai mana tertuang dalam pasal 39 UU No.20/2003, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil

pembelajaran, melakukan bimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Kesehatan penduduk merupakan faktor penting yang perlu ditingkatkan. Kondisi kesehatan di Kabupaten Manggarai Timur masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari Usia Harapan Hidup yang rendah, Angka Kematian Ibu dan Bayi masih tinggi, dan jumlah Balita Stunting, serta gizi buruk masih banyak. Selain itu, tingginya angka kejadian penyakit karena perubahan iklim dan pemanasan global, sehingga menyebabkan meningkatnya insidensi penyakit tropis seperti penyakit demam berdarah. Mutu dan akses pelayanan kesehatan yang belum optimal yang menyebabkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dasar masih sulit. Rendahnya tingkatnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih sehat. Terjadinya guncangan sosial di masyarakat sebagai akibat dari akumulasi permasalahan-permasalahan sosial antara lain disebabkan oleh tingkat kemiskinan yang tinggi, keberdayaan perempuan dan anak yang masih rendah, lunturnya ketaatan terhadap budaya, tingkat fertilitas yang tinggi, dan kurang terbinanya generasi muda.

4.3.2 Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang Berkesinambungan

Salah satu indikator sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah perkembangan penduduk miskin. Berkurangnya jumlah penduduk miskin dapat diartikan bahwa pendapatan penduduk semakin meningkat. Hingga tahun 2017 peran sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih berada pada angka 45,39 persen. Namun demikian perkembangannya sangat lambat. Lambatnya perkembangan sektor pertanian terdeteksi bersumber dari 4 aspek yakni industri, investasi, pertanian itu sendiri dan permasalahan di desa. Menurut BPS (2018) pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 76.370 jiwa atau setara dengan 27,71% dari total jumlah penduduk 276.620 jiwa dan menurun menjadi 74.850 jiwa atau setara dengan 26,80% pada tahun 2017 dari total jumlah penduduk 280.118 jiwa. Sementara pengeluaran riil per kapita penduduk Kabupaten Manggarai Timur adalah Rp. 564.3000 per bulan atau setara dengan Rp. 18.810 per hari dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 299.530. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur ikut dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan pekerjaan. Pada tahun 2017 jumlah angkatan kerja Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 151.273 jiwa, yang terdiri atas 76.348 jiwa laki-laki dan 74.925 jiwa perempuan. Dari jumlah tersebut ada 0,50% atau setara dengan 756 jiwa yang menganggur, yang terdiri atas 555 jiwa laki-laki dan 201 jiwa perempuan. Pemerintah dalam periode lima tahun yang akan datang perlu menciptakan lapangan kerja baru baik disektor Pertanian, Perkebunan, peternakan maupun sector Pertanian supaya dapat menampung angkatan kerja yang menganggur. Selain itu, ketersediaan lapangan kerja dan diikuti dengan ketersediaan tenaga kerja dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian suatu daerah. Untuk meningkatkan produksi pertanian Pemerintah Daerah perlu terus membangun infrastruktur irigasi untuk mengairi lahan

budidaya pertanian. Luas lahan budidaya pertanian di Kabupaten Manggarai Timur sampai dengan tahun 2017 adalah 25.200 Ha. Sejak tahun 2009 hingga tahun 2017 Pemerintah telah membangun sebanyak 366 Daerah Irigasi, dengan total panjang 13.961,56 Meter. Perlu ada upaya lebih lanjut terutama membangun jaringan irigasi tersier dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian.

4.3.3 Pembangunan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan

Pertumbuhan pembangunan Infrastruktur dasar yang merata di seluruh Wilayah Kabupaten Manggarai Timur akan memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan social dan ekonomi masyarakat, dimana berdasarkan hasil perhitungan pembangunan infrastruktur dasar Manggarai Timur pada tahun 2018, kondisi pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar baru mencapai angka rata-rata 71,13% Persen. Kondisi ini menunjukkan masih belum optimalnya kinerja pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur. Oleh karena itu di masa yang akan datang kinerja pemerintah perlu ditingkatkan agar kebutuhan infrastruktur dasar dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Manggarai Timur.

Sejalan dengan isu strategis Propinsi NTT, Kabupaten Manggarai Timur dalam Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan juga harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekologi yang ada. Sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Pembangunan ekonomi yang tidak memerhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menimbulkan permasalahan pembangunan dikemudian hari. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekosistem pendukung kehidupannya.

4.3.4 Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik Yang Optimal

Rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan merupakan salah satu sorotan yang seringkali diarahkan kepada pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur. Rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan terjadi karena masih terbatasnya kuantitas dan kualitas (kompetensi dan profesionalitas) SDM ASN, dan belum maksimalnya sistem pengelolaan SDM ASN. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan reformasi birokrasi atau penataan kembali birokrasi di Kabupaten Manggarai Timur. Reformasi birokrasi bertujuan untuk mengubah secara signifikan elemen-elemen birokrasi seperti kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik, yang dilakukan secara sadar untuk memosisikan birokrasi kembali dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan yang dinamis. Perubahan tersebut dilakukan untuk melaksanakan tugas, peran dan fungsi birokrasi secara tepat, cepat dan konsisten guna menghasilkan manfaat sesuai yang diamanatkan konstitusi. Perubahan ke arah yang lebih baik merupakan cerminan dari

seluruh kebutuhan yang bertitik tolak dari fakta adanya peran birokrasi pada saat ini yang masih jauh dari harapan publik. Oleh karena itu, reformasi birokrasi merupakan sebuah upaya Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur selama lima tahun ke depan untuk mencapai *good governance*, yang kemudian diharapkan berakibat pada perubahan kehidupan masyarakat Manggarai Timur yang dilayani oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.

Upaya mewujudkan reformasi birokrasi di Kabupaten Manggarai Timur dilakukan melalui penataan kembali sistem tata kelola pemerintahannya, yang mencakup penataan kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik. Penataan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pencapaian visi-misi Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024. Di bawah ini adalah beberapa penyebab reformasi birokrasi di Kabupaten Manggarai Timur belum berjalan optimal:

1. Manajemen Sumber Daya Manusia belum optimal.
Permasalahan di bidang manajemen Sumber Daya Manusia berhubungan dengan jabatan-jabatan yang belum terisi (masih lowong); jumlah ASN belum sesuai kebutuhan; penempatan ASN belum sesuai dengan standar kompetensi jabatan;
2. Tingkat pengawasan masih rendah.
Rendahnya tingkat pengawasan ini terjadi karena sebaran objek pengawasan jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah aparatur pengawas yang terlatih.
3. Konsistensi antardokumen perencanaan dan penganggaran masih rendah.
Hubungan antardokumen perencanaan seharusnya konsisten satu sama lain. Dokumen RPJMD mesti konsisten terjabarkan dalam RKPD, Restra, Renja dan APBD. Namun, kenyataannya hubungan antardokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur belum sepenuhnya konsisten. Akibatnya tujuan pembangunan yang termuat dalam dokumen RPJMD belum terwujud secara maksimal.
4. Pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal.
Keuangan dan aset daerah Manggarai Timur belum dikelola secara optimal karena tingkat kepatuhan dan ketepatan waktu PD dalam menyampaikan laporan keuangan dan pendataan aset masih rendah.
5. Sistem pelayanan publik masih belum optimal.
Belum optimalnya sistem pelayanan publik di Kabupaten Manggarai Timur terjadi karena tingkat kemandirian fiskal daerah masih rendah, sarana dan prasarana pelayanan umum masih terbatas, dan jumlah SDM terlatih dalam pelayanan publik masih rendah.
6. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih rendah.
Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah dapat dilihat dari protes masyarakat terhadap kebijakan publik pemerintah. Misalnya, Pemerintah telah mengatur penertiban ternak supaya tidak dibiarkan secara liar, tetapi masyarakat tidak mengindahkannya. Pemerintah juga telah mengatur pola pemanfaatan ruang, tetapi masyarakat tidak mengindahkannya. Pemerintah telah menyediakan pasar sebagai tempat jual-beli, namun masyarakat seringkali menjual barang dagangannya pada lokasi-lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
7. Penegakan perda belum berjalan optimal.

BAB 5

Visi, Misi, Tujuan & Sasaran



Visi

Misi

Keselarasan Visi-Misi RPJMD dan Visi-Misi RPJPD

Tujuan dan Sasaran



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN



Pada bagian ini disajikan visi, misi, janji kerja, tujuan dan sasaran untuk pembangunan Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019-2024. Visi, misi dan janji kerja yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019-2024 merupakan visi, misi dan janji kerja dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode tahun 2019-2024. Sedangkan tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu kepemimpinan Bupati bersama Wakil Bupati. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

5.1 Visi



capai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction);

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa kriteria suatu rumusan visi, adalah :

1. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin di

2. Menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah;
3. Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan kebijakan, strategi dan program (articulative);
4. Disertai dengan penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan di daerah, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di daerah; dan
5. Sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Adapun visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Timur tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

MEWUJUTKAN MASYARAKAT MANGGARAI TIMUR YANG SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERDAYA (MATIM SEBER)

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

“SEBER”

SEBER merupakan sebuah akronim dari Sejahtera, Berdaya dan Berbudaya. Dalam bahasa Manggarai, kata SEBER diartikan sebagai rajin dan ulet. SEBER juga mengandung makna budaya kerja dan etos kerja. Pemerintah bersama masyarakat didorong untuk memiliki budaya kerja yang berorientasi pada hasil maksimal dan unggul. Maksimal dan unggul bermakna pembangunan yang adil dan merata serta terpenuhinya hak-hak dasar bagi segenap warga masyarakat Manggarai Timur.

“SEJAHTERA”

Sejahtera adalah harapan setiap manusia. Sejahtera dimaksudkan sebagai suatu kondisi masyarakat dengan keterpenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Selain itu, pendidikan, kesehatan dan keamanan juga merupakan bagian dari harapan masyarakat yang harus dipenuhi dalam kehidupan bersama.

“BERBUDAYA”

Kebudayaan adalah cerminan harkat dan martabat manusia yang perlu dijunjung oleh setiap masyarakat. Nilai-nilai budaya Manggarai merupakan penuntun tingkah laku bagi setiap masyarakat untuk menjadi penyelaras kehidupan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan lahiriah dan batiniah dan menumbuhkan jati diri dan kepribadian bangsa.

“BERDAYA”

Peningkatan standar hidup masyarakat ke arah hidup yang lebih baik sangat tergantung dorongan dari diri sendiri untuk maju; untuk menggunakan potensi dan kompetensi yang ada dalam diri sendiri dan lingkungan sekitarnya; untuk meyakinkan diri sehingga pantas dan layak melakukan sesuatu. Atas dasar itu pencapaian kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan adalah pemberdayaan dan peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidupnya ke arah yang lebih baik.

5.2 Misi



Misi merupakan rumusan mengenai upaya dan tahapan yang diyakini dapat dilakukan dalam mencapai visi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yang menjelaskan bahwa kriteria rumusan misi adalah:

1. Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah;
2. Disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah; dan
3. Disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui tujuh misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi 1

Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan ketrampilan, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat



Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi syarat mutlak untuk melaksanakan pembangunan. Setiap manusia dituntut kompetensi individunya untuk berinovasi guna memacu pembangunan ekonomi di segala bidang. Meningkatkan kualitas SDM merupakan

investasi manusia jangka panjang, karena setiap orang menempuh jalur pendidikan tidak secara otomatis menjadikan dirinya berkualitas. Masih diperlukan proses dalam dunia kerjanya menuju ke jenjang yang lebih ahli atau berkualitas. Saat ini SDM di Manggarai Timur masih belum memiliki kualitas yang dapat mendukung laju pertumbuhan ekonomi secara

maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, dari masalah pendidikan, kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Pembangunan ekonomi suatu daerah melibatkan faktor-faktor yang berperan penting, salah satunya adalah sumber daya manusia (SDM). Keadaan SDM suatu daerah sangat mempengaruhi pembangunan ekonomi daerah tersebut. Untuk dapat mempercepat tingkat pembangunan ekonomi maka diperlukan SDM yang unggul diberbagai bidang. Terdapat empat upaya peningkatan sumberdaya manusia (SDM), yaitu : (1) Peningkatan kualitas hidup yang meliputi baik kualitas manusianya seperti jasmani, rohani, dan keuangan, maupun kualitas kehidupannya seperti perumahan dan pemukiman yang sehat; (2) Peningkatan kualitas SDM yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya; (3) Peningkatan kualitas SDM yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai IPTEK yang berwawasan lingkungan, serta (4) Pengembangan regulasi yang meliputi kelembagaan dan perangkat hukum yang mendukung peningkatan kualitas SDM. Secara operasional, upaya peningkatan kualitas SDM dilaksanakan melalui berbagai sektor pembangunan, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kependudukan, tenaga kerja, dan sektor-sektor pembangunan lainnya. Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang

Misi 2

Mengembangkan ekonomi unggulan berbasis pertanian berkelanjutan, pariwisata berbasis masyarakat, industri kecil, koperasi dan UMKM Serta Mewujudkan pembangunan desa berbasis budaya lokal

Misi ini menjelaskan bahwa konsep pembangunan ekonomi Kabupaten Manggarai Timur kedepannya dalam rangka menjawab Misi Mengembangkan ekonomi unggulan berbasis pertanian, pariwisata berbasis

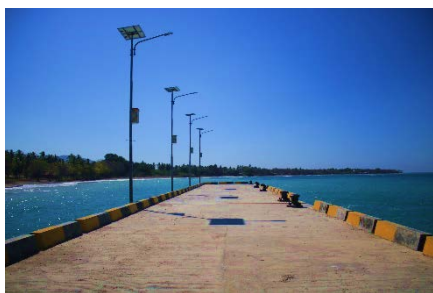


masyarakat, industri kecil, koperasi dan UMKM Serta Mewujudkan pembangunan desa berbasis budaya lokal menuju desa mandiri dan Menciptakan iklim investasi dan dunia usaha yang berwawasan lingkungan, adil dan pro rakyat antara lain dengan cara: meningkatkan produktifitas pertanian melalui pemanfaatan teknologi tepat guna dan peningkatan sumberdaya petani, Pariwisata berbasis masyarakat dengan cara melibatkan langsung masyarakat lokal baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program – program pariwisata. Masyarakat lokal menjadi pemanfaat utama dari kegiatan pariwisata (contoh; wisata petualang, wisata budaya, kampung adat dll). Pada sektor

industri kecil, Koperasi dan UMKM dapat diintervensi melalui program peningkatan kapasitas para pelaku industri kecil, misalnya memberi pelatihan kepada pengrajin industri makanan dan minuman, pengrajin meubelair, pengrajin kayu dan rotan, pengrajin alat – alat rumah tangga dan kerajinan tangan. Iklim investasi merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Iklim usaha atau investasi yang kondusif adalah iklim yang mendorong seseorang melakukan investasi dengan biaya dan resiko serendah mungkin dan menghasilkan keuntungan jangka panjang. Dalam upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dapat diintervensi melalui: Peningkatan Infrastruktur, meliputi ketersediaan akses jalan, jembatan, pelabuhan, sarana telekomunikasi, perangkat hukum, sistem asuransi dan perbankan; birokrasi Biaya perijinan dan administrasi yang berkaitan dengan pendirian perusahaan adalah factor yang diperhatikan Investor.

Misi 3

Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah yang berbasis lingkungan hidup untuk memudahkan akses ke pelayanan dasar dan mendukung` prioritas ekonomi unggulan



Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi masyarakat serta meningkatkan aksesibilitas antar pusat pertumbuhan wilayah, peningkatan kuantitas dan kualitas

infrastruktur ini harus mempertimbangkan daya dukung dan ekologi wilayah sebagai bagian dari pola pembangunan yang berkelanjutan demi meningkatkan kualitas kesejahteraan social dan ekonomi masyarakat Manggarai Timur.

Misi 4

Mewujudkan kabupaten ramah perempuan dan layak anak



Dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender, perlu diberikan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua aspek kehidupan, dimana kontribusi perempuan ini salah satunya dapat diukur dari partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah, swasta dan aspek lainnya. Pemberdayaan perempuan merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat. Meningkatnya

kesetaraan Gender ini diharapkan akan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan daerah Kabupaten Manggarai Timur. Anak merupakan aset masa depan bangsa yang menjadi elemen penting bagi keberlanjutan masa depan bangsa, oleh karena itu semua akses kenyamanan bagi keberlangsungan pertumbuhan seorang anak harus dibuka seluas-luasnya, agar masa tumbuh kembang anak terjamin demi terjaganya kualitas kehidupan manusia kini dan nanti.

Misi 5

Menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif, efisien dan terpercaya melayani masyarakat



Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Manggarai Timur, sehingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, reformasi birokrasi dilakukan sebagai respon sistematis dan komprehensif atas pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis yang menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat

5.3

Keselarasan Visi-Misi RPJMD dan Visi-Misi RPJPD

Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah tidak terlepas dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Visi jangka menengah adalah bentuk dari sebuah visi antara menuju visi jangka panjang. Misi yang dibawa/diemban dalam jangka menengah adalah misi antara yang mendukung misi jangka panjang. Visi jangka panjang Kabupaten Manggarai timur adalah **“Manggarai Timur Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing”** **“Mewujudkan Masyarakat Manggarai Timur, yang Sejahtera, Berdaya dan Berbudaya”**, diwujudkan melalui visi jangka menengah yaitu **“Mewujudkan Masyarakat Manggarai Timur, yang Sejahtera, Berbudaya dan Berdaya”**



Tabel 5.1
Keselarasan Misi, Visi RPJMD Kabupaten Manggarai Timur 2019-2024
Dengan Visi, Misi RPJPD Kabupaten Manggarai Timur 2009-2029

Visi RPJPD 2009-2029		Visi RPJMD 2019-2024
Manggarai Timur sejahtera, Maju dan Berdaya saing	Sesuai Dengan	Mewujudkan Masyarakat Manggarai Timur, Yang Sejahtera, Berbudaya dan Berdaya
Mewujudkan pembangunan yang merata, seimbang dan berkelanjutan		Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan ketrampilan, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat
Mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing		Mengembangkan ekonomi unggulan berbasis pertanian, pariwisata berbasis masyarakat, industri kecil, koperasi dan UMKM Serta Mewujudkan pembangunan desa berbasis budaya lokal menuju desa mandiri dan Menciptakan iklim investasi dan dunia usaha yang berwawasan lingkungan, adil dan pro rakyat
Mewujudkan kemandirian social dan Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia		Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah yang berbasis lingkungan hidup untuk memudahkan akses ke pelayanan dasar dan mendukung` prioritas ekonomi unggulan
Mewujudkan Kabupaten Manggarai Timur yang aman dan tertib		Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan perempuan dan mewujudkan kabupaten layak anak
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik		Menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif, efisien dan terpercaya melayani masyarakat

5.4 Tujuan dan Sasaran



Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non-pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran pembangunan disusun untuk mencapai tujuan strategis masing-masing misi yang menunjukkan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan dan selanjutnya menjadi dasar penetapan program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Manggarai Timur 2019-2024. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih, juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Ini disebabkan sasaran pembangunan jangka menengah merupakan sarana untuk melaksanakan dan mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang 2009-2029 melalui RPJMD tahun 2019-2024. Pemetaan tujuan, sasaran dan indikator masing-masing misi sebagai berikut :

Tabel 5.2
Indikator Kunci Utama RPJMD Kabupaten Manggarai Timur pada Tahun 2019-2024

Indikator	Satuan	Target Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Manusia	Poin	59,81	61,11	62,11	63,71	65,01
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7	7,5	8	8,5	9
Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,5	12	12,5	13	13,5
Usia Harapan Hidup	Tahun	68,5	69	69,5	70	70,5

Presentase Penurunan Prevalensi Stunting	Persen	31,28	25,71	20,14	14,57	9
Persentase PMKS	Persen	25,78	22,10	17,19	13,50	9,82
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,77	6,48	7,56	8,42	9,91
PDRB Perkapita	Rp. Juta	11,5	12,5	13,6	14,8	16,1
Pengeluaran Perkapita	Rp. Juta	6,07	6.3	6.6	6.9	7.2
Indeks Gini	Poin	0.3	0,29	0,28	0,27	0,26
Inflasi	Persen	<2	<2	<2	<2	<2
Pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Dalam PDRB	Persen	3,65	3,73	3,82	3,91	3,99
Pertumbuhan sektor industri pengolahan Dalam PDRB	Persen	3,90	3,98	4,07	4,15	4,23
Skor PPH	Poin	80	81	82	84	84
Pertumbuhan Omset Koperasi Likang Telu	Persen	10	10	10	10	10
Pertumbuhan sektor jasa masyarakatan, penyediaan akomodasi dan makan minum Dalam PDRB	Persen	7,73	7,77	7,82	7,86	7,91
Pertumbuhan sektor perdagangan Dalam PDRB	Persen	7,85	7,89	7,93	7,97	8,01
Pertumbuhan Penanaman Modal Tetap Bruto	Persen	4	4,25	4,5	4,75	5
Indeks Williamson	Poin	0.3	0,29	0,28	0,27	0,26
Indeks Infrastruktur	Persen	45,75	47,04	48,31	49,59	52,90
Indeks Lingkungan Hidup	Persen	27,71	38,97	50,18	60,52	69,04
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Persen	70	70	70	70	70
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai SAKIP	Nilai	B	B	BB	BB	A
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	80	80	80	80	80



Tabel 5.3
Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kodisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	2023		
<u>Misi I :</u> Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan ketrampilan, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat												
<u>Misi IV :</u> Mewujudkan kabupaten ramah perempuan dan layak anak												
	Meningkatkan Kualitas SDM	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	59,49	59,81	61,11	62,11	63,71	65,01	65,01	
			Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,65	7	7,5	8	8,5	9	9	
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,34	11,5	12	12,5	13	13,5	13,5	
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	67,62	68,5	69	69,5	70	70,5	70,5	
			Presentase Penurunan Prevalensi Stunting	Persen	47,28	31,28	25,71	20,14	14,57	9	9	
			Menurunnya Permasalahan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase PMKS	Persen	26,21	25,78	22,10	17,19	13,50	9,82	9,82
<u>Misi II :</u> Mengembangkan ekonomi unggulan berbasis pertanian berkelanjutan, pariwisata berbasis masyarakat, industri kecil, koperasi dan UMKM Serta Mewujudkan pembangunan desa berbasis budaya lokal												
	Meningkatkan Kinerja Pembangunan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,08	5,77	6,48	7,56	8,42	9,91	9,91	
			PDRB Perkapita	Rp. Juta	10.558	11,5	12,5	13,6	14,8	16,1	16,1	
			Pengeluaran Perkapita	Rp. Juta	5,809	6,07	6.3	6.6	6.9	7.2	7.2	
			Indeks Gini	Poin	N/A	0.3	0,29	0,28	0,27	0,26	0,26	
			Inflasi	Persen	1.70	<2	<2	<2	<2	<2	<2	

	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Dalam PDRB	Persen	Rata-Rata 2014 – 2018 Sebesar 3,56	3,65	3,73	3,82	3,91	3,99	Rata-Rata Pertumbuhan Sebesar 3,99
		Pertumbuhan sektor industri pengolahan Dalam PDRB	Persen	Rata-Rata 2014 – 2018 Sebesar 3,82	3,90	3,98	4,07	4,15	4,23	Rata-Rata Pertumbuhan Sebesar 4,23
		Skor PPH	Poin	76,50	80	81	82	84	84	84
		Pertumbuhan Omset Koperasi Likang Telu	Persen	N/A	10	10	10	10	10	10
	Meningkatnya pertumbuhan sektor jasa	Pertumbuhan sektor jasa kemasyarakatan, penyediaan akomodasi dan makan minum Dalam PDRB	Persen	Rata-Rata 2014 – 2018 Sebesar 7,68	7,73	7,77	7,82	7,86	7,91	Rata-Rata Pertumbuhan Sebesar 7,91
		Pertumbuhan sektor perdagangan Dalam PDRB	Persen	Rata-Rata 2014 – 2018 Sebesar 7,80	7,85	7,89	7,93	7,97	8,01	Rata-Rata Pertumbuhan Sebesar 8,01
		Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif	Persen	N/A	4	4,25	4,5	4,75	5	5
	Misi 3 Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah yang berbasis lingkungan hidup untuk memudahkan akses ke pelayanan dasar dan mendukung` prioritas ekonomi unggulan									
	Mengurangi ketimpangan wilayah	Indeks Williamson	Poin	N/A	0.3	0,29	0,28	0,27	0,26	0,26
		Terwujudnya pelayanan Infrastruktur Dasar yang merata	Indeks Infrastruktur	Persen	36,52	45,75	47,04	48,31	49,59	52,90

Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Lestari	Indeks Lingkungan Hidup	Persen	16,46	27,71	38,97	50,18	60,52	69,04	69,04
Misi 5 Menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif, efisien dan terpercaya melayani masyarakat										
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan inovatif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Persen	N/A	70	70	70	70	70	70
		Opini BPK	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai SAKIP	Nilai	CC	B	B	BB	BB	A	A
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	N/A	80	80	80	80	80	80

BAB 6

Strategi, Arah Kebijakan & Program Pembangunan Daerah



Strategi Pembangunan

Arah Kebijakan

Program Pembangunan Daerah

6



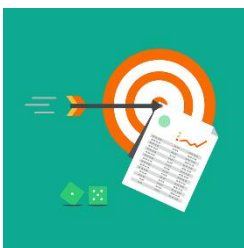
BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Manggarai Timur 2019-2024. Strategi dan arah kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran dari visi misi tersebut. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran masing-masing misi akan dilaksanakan dengan berpedoman pada strategi umum yang menjadi landasan utama pembangunan Kabupaten Manggarai Timur 2019-2024.

6.1 Strategi Pembangunan



Strategi pembangunan merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Strategi pembangunan

dilaksanakan melalui analisis lingkungan strategis internal dan analisis lingkungan strategis eksternal dengan mengidentifikasi kekuatan (strength), kelemahan (weakness), kesempatan (opportunity), dan ancaman (threat). Strategi akan memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran misi pembangunan dengan mempedomani target pembangunan nasional, maka disusun strategi pembangunan selama lima tahun yang dapat dilihat pada Tabel 6.1



Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Manggarai Timur

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi I : Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan ketrampilan, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat Misi IV : Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan perempuan dan mewujudkan kabupaten layak anak		
Meningkatkan Kualitas SDM	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan pendidikan formal, informal/nonformal
		Peningkatan kualitas guru, siswa dan pemuda
		Mengembangkan pembelajaran yang kontekstual
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Revitalisasi kelompok-kelompok pemuda
		Peningkatan kualitas dan kuantitas dokter
		Peningkatan mutu tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, layanan dan aksesibilitas pelayanan
Menurunnya Permasalahan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		Mendorong Prilaku hidup bersih dan sehat dengan melibatkan partisipasi masyarakat
		Mengembangkan system informasi data PMKS berbasis digital
		Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan anak
		Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, sarana dan prasarana dan

		jaringan antar stakeholder dalam pemenuhan lapangan pekerjaan
		Pemberdayaan kawasan transmigrasi
Misi II :		
Mengembangkan ekonomi unggulan berbasis pertanian, pariwisata berbasis masyarakat, industri kecil, koperasi dan UMKM Serta Mewujudkan pembangunan desa berbasis budaya lokal menuju desa mandiri dan Menciptakan iklim investasi dan dunia usaha yang berwawasan lingkungan, adil dan pro rakyat		
Meningkatkan Kinerja Pembangunan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peningkatan produksi Pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Ramah lingkungan
		Peningkatan industri berbasis pertanian
		Pengembangan desa berbasis potensi lokal desa
		Penguatan jaringan perdagangan dan pemasaran
	Meningkatnya pertumbuhan sektor jasa	Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat
		Memperkuat pelabuhan laut untuk perdagangan antar pulau komoditi ternak dan komoditi pertanian lain
	Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif	Menciptakan iklim investasi yang kondusif
		Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Misi III		
Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah yang berbasis lingkungan hidup untuk memudahkan akses ke pelayanan dasar dan mendukung` prioritas ekonomi unggulan		
Mengurangi ketimpangan wilayah	Terwujudnya pelayanan Infrastruktur Dasar yang merata	Meningkatkan Status dan Kualitas jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, air minum, drainase, dan perumahan
		Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi
		Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu
Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Lestari	Meningkatkan pengelolaan LH dan ekowisata
		Meningkatkan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana
		Pengendalian tata ruang
		Menyediakan prasarana sampah daur ulang
Misi 5		
Menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif, efisien dan terpercaya melayani masyarakat		
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan inovatif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang didukung oleh penguatan kelembagaan
		Penguatan perencanaan pemerintah daerah melalui e smart (E aovernment)

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Mensinkronisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai regulasi
	Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah dengan memperkuat kapasitas sumberdaya aparatur
	Mengembangkan kemitraan pemerintah daerah dengan semua stakeholder dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
	Meningkatkan kualitas SDM Pemerintah melalui pemanfaatan teknologi telekomunikasi dan informasi
	Mengembangkan kerja sama dengan pemangku kepentingan yang terkait dalam mendukung infrastruktur dasar telekomunikasi dan informasi
	Penguatan peran lembaga adat dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah
	Membangun sistem pelayanan publik yang berbasis kearifan lokal

6.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi yang telah ditetapkan. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan yang dilaksanakan selama lima tahun dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 6.1
Arah Pembangunan Nasional, Pembangunan Provinsi NTT dan Pembangunan Kabupaten Manggarai Timur

Arahan RPJMN 2020-2024 mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing

Visi RPJPD Provinsi NTT 2005-2025 “Nusa Tenggara Timur yang maju, mandiri, adil dan makmur dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia”

Visi RPJPD Kabupaten Manggarai Timur 2009-2029
Manggarai Timur Sejahtera, Maju Dan Berdaya Saing



Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Manggarai Timur

Arah Kebijakan				
Tahun ke 1	Tahun ke 2	Tahun ke 3	Tahun ke 4	Tahun ke 5
Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Berbasis Partisipasi Masyarakat Untuk Meningkatkan Konektifitas Antar Wilayah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Optimalisasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produk Ekonomi Dengan Mengembangkan Potensi Unggulan Lokal Menuju Industri Berbasis Pertanian	Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Lokal	Pengangrustakaan Budaya Berbasis Penguatan Modal Sosial Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Percapita Masyarakat Matim

6.3 Program Pembangunan Daerah

Misi, sasaran dan program dirumuskan dengan merujuk pada penelaahan Bab II, III, IV dan V, sehingga dapat diperoleh indikator strategis program yang dapat dipedomani perangkat daerah untuk menyusun dokumen turunan selanjutnya. Untuk penanganan program khusus yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah terpilih dalam lima tahun ke depan, akan ditindaklanjuti dengan menjabarkan makna Matim Seber dalam uraian berikut :

Tabel 6.3
Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Manggarai Timur

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2018	2019		2020		2021		2022		2023		
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
Misi I : Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan ketrampilan, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat														
Misi IV : Mewujudkan kabupaten ramah perempuan dan layak anak														
1. Meningkatkan Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	59,49	59,81	209.816	61,11	217.901	62,11	227.815	63,71	241.816	65,01	255.900	
a. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,65	7	83.003	7,5	87.250	8	92.335	8,5	97.600	9	102.700	Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga; Dinas Perpustakaan & Kearsipan; Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda; Kecamatan
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,34	11,5		12	12,5		13		13,5			
Program Sekolah Bahagia														
b. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	67,62	68,5	113.189	69	115.731	69,5	120.000	70	128.016	70,5	137.000	Dinas Kesehatan; Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda; Kecamatan Dinas Kesehatan; Dinas Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Sosial; Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan; Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa; Dinas Pertanian; Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan; Dinas Komunikasi & Informatika; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
	Presentase Penurunan Prevalensi Stunting	Persen	47,28	31,28		25,71		20,14		14,57		9		

													Daerah;Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Kecamatan, Desa
Program Manggarai Timur sehat													
					13.624		14.920		15.480		16.200	16.200	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi, Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga; Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kecamatan
c. Menurunnya Permasalahan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase PMKS	Persen	26,21	25,78		22,10		17,19		13,50		9,82	
Program peningkatan kesejahteraan PMKS berbasis partisipasi masyarakat													
Misi II :													
Mengembangkan ekonomi unggulan berbasis pertanian berkelanjutan, pariwisata berbasis masyarakat, industri kecil, koperasi dan UMKM Serta Mewujudkan pembangunan desa berbasis budaya lokal													
1. Meningkatkan Kinerja Pembangunan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,08	5,77	40.553	6,48	63.950	7,56	74.500	8,42	92.700	9,91	115.500
	PDRB Perkapita	Rp. Juta	10.558	11.5		12.5		13.6		14.8		16.1	
	Pengeluaran Perkapita	Rp. Juta	5.809	6.07		6.3		6.6		6.9		7.2	
	Indeks Gini	Poin	N/A	0,3		0,29		0,28		0,27		0,26	
	Inflasi	Presen	1,70	<2		<2		<2		<2		<2	
a. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Dalam PDRB	Pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Dalam PDRB	Persen	3,56	3,73	32.502	3,82	52.200	3,91	61.750	3,99	79.500	3,99	101.500
	Skor PPH	Poin	76,50	80		81		82		84		84	
	Pertumbuhan sektor industri pengolahan Dalam PDRB	Persen	3,82	3,90		3,98		4,07		4,15		4,23	
	Pertumbuhan Omset Koperasi Likang Telu	Persen	N/A	10		10		10		10		10	
Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Perikanan													Dinas Pertanian; Dinas Peternakan; Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda; Kecamatan
Program Koperasi Likang telu													

b.	Meningkatnya pertumbuhan sektor jasa	Pertumbuhan sektor jasa kemasyarakatan, penyediaan akomodasi dan makan minum Dalam PDRB	Persen	7,68	7,73	6,30	7,77	9.250	7,82	10.000	7,86	10.200	7,91	10.200	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda, Kecamatan
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	7,80	7,85		7,89		7,93		7,97		8,01		
Program community based tourism															
c.	Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif	Pertumbuhan Penanaman Modal Tetap Bruto	Persen	N/A	4	1.133	4,25	2.500	4,5	2.750	4,75	3.000	5	3.000	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda, Kecamatan
Program penciptaan iklim investasi yang kondusif															
Misi 3															
Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah yang berbasis lingkungan hidup untuk memudahkan akses ke pelayanan dasar dan mendukung` prioritas ekonomi unggulan															
1.	Mengurangi ketimpangan wilayah	Indeks Williamson	Poin	N/A	0,3	213.306	0,29	228.800	0,28	248.242	0,27	265.500	0,26	288.987	
a.	Terwujudnya pelayanan infrastruktur Dasar yang merata	Indeks Infrastruktur	Persen	36,52	45,75	201.295		221.800		241.142		257.500		280.987	Dinas Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan; Dinas Komunikasi & Informatika; Dinas Perhubungan, Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda; Kecamatan
							47,04		48,31		49,59		52,90		
Program Infrastruktur Tuntas															
b.	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Lestari	Indeks Lingkungan Hidup	Persen	16,46	27,71	12.011	38,97	7.000	50,18	7.100	60,52	8.000	69,04	8.000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan; Dinas Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Lingkungan Hidup, Badan

													Penanggulangan Bencana Daerah, Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda;Kecamatan
Program Ramah dan cinta lingkungan													
Misi 5													
Menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif, efisien dan terpercaya melayani masyarakat													
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan inovatif				64.318		62.800		64.760		66.450	69.100	
	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Persen	N/A	70		70		70		70		70	
a.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah				17.313		17.200		17.200		17.200	17.200	Badan Keuangan, Bappelitbangda, Inspektorat, Bagian Organisasi Setda; Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda; Kecamatan
	Opini BPK	OPINI	WDP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	
	Nilai SAKIP	NILAI	CC	B		B		BB		BB		A	Semua OPD
Program pengembangan sistem akuntabilitas pemerintah daerah													
b.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik				47.005		45.600		47.560		49.250	51.900	Rumah Sakit Daerah (dan Turunannya), Dinas Kependudukan dan Capil, Dinas Penanaman Modal Perijinan terpadu Satu Pintu,Bagian Organisasi Setda
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Persen	N/A	80		80		80		80		80	
Program sistem pelayanan publik berbasis kearifan lokal													

BAB 7

Kerangka Pendanaan Pembangunan & Program Perangkat Daerah



Kerangka Pendanaan

Program Perangkat Daerah



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kerangka pendanaan pembangunan dan program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan
Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024

No	Kapasitas Rill/Belanja	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	
	Kapasitas Rill Keuangan	524.974.183.145	621.210.369.602	646.213.893.360	680.556.091.236	703.808.678.901	7,77%
	Belanja	1.130.714.947.124,00	1.252.282.252.387,20	1.309.169.489.453,32	1.373.960.098.218,98	1.452.554.830.426,01	6,49%
1	Belanja Tidak Langsung	605.740.763.979,00	629.571.882.785,45	660.705.596.092,97	693.404.006.982,70	748.746.151.525,41	5,45%
1.1	Belanja Pegawai	336.100.358.289	352.905.376.203	370.550.645.014	389.078.177.264	408.532.086.128	5,00%
1.2	Belanja Hibah	8.975.600.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	25.000.000.000	117,39%
1.3	Belanja Bantuan Sosial	4.837.500.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	-14,66%

1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota Dan Pemerintah Desa	1.456.712.150	1.602.383.365	1.762.621.702	1.938.883.872	2.132.772.259	10,00%
1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	253.870.593.540	266.564.123.217	279.892.329.378	293.886.945.847	308.581.293.139	5,00%
1.6	Belanja Tidak Terduga	500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	100,00%
2.	Belanja Langsung	524.974.183.145	622.710.369.602	648.463.893.360	680.556.091.236	703.808.678.901	7,78%
2.1	Belanja Pegawai	72.340.605.500	93.406.555.440	97.269.584.004	102.083.413.685	105.571.301.835	10,41%
2.2	Belanja Barang Dan Jasa	162.800.971.171	186.813.110.881	194.539.168.008	204.166.827.371	211.142.603.670	6,81%
2.3	Belanja Modal	289.832.606.474	342.490.703.281	356.655.141.348	374.305.850.180	387.094.773.395	7,67%
Belanja Daerah		1.123.714.947.124,00	1.252.282.252.387	1.309.169.489.453	1.373.960.098.219	1.452.554.830.426	6,66%

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Manggarai Timur

Kode Program	Bidang Urusan Pemerintah Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhr Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023					
					2018	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target		Rp (Juta)
	NON URUSAN						-		41.714		43.000		39.000		38.000		161.714	
1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	-	100	41.714	100	43.000	100	39.000	100	38.000	100	161.714	Semua OPD	
1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100		100		100		100		100					
1.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100		100		100		100		100					
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					402.376		459.078		477.063		508.254		524.578		2.371.380		
1,01	PENDIDIKAN					81.165		81.550		84.812		89.053		92.615		429.194		
	Program Peningkatan Kapasitas SDM	Persentase ASN yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas															Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
	Program Wajar DIKDAS 9 Tahun	APK	%	138	100													
		APM	%	98,38	100													
		APS	%	95	100													
		Angka Putus Sekolah	%	0,25	0,20													
		Angka Kelulusan	%	99,90	100													
		Angka Melanjutkan	%	90,57	100													
		APK	%	108	100													
		APM	%	84,69	86,5													
		APS	%	NA	100													

268 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024
Manggarai Timur Sejahtera, Berbudaya dan Berdaya

		Angka Putus Sekolah	%	0,19	0		0		0		0		0		0		
		Angka Kelulusan	%	99,63	100		100		100		100		100		100		
		Angka Melanjutkan	%	74,64	100		100		100		100		100		100		
1.01.01.26	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Persentasi Guru yang bersertifikat	%	16,93	18,71		26,54		34,35		42,17		50		50		
		Rasio Guru/Murid SD	ratio	1/16	1/20		1/24		1/26		1/28		1/30		1/30		
		Rasio Guru/Murid SMP	ratio	1/15	1/15		1/17		1/19		1/21		1/25		1/25		
1.01.01.27	Program BOS	Persentase Pelaksanaan Program BOS	%		100		100		100		100		100		100		
1.02	KESEHATAN					113.189		113.000		117.520		123.396		127.098		594.203	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	%														
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	%	80	90												
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Angka Stunting	%	47,28	31,28												
		Persentase balita gizi buruk	%	0,33	0,29												
		AKI	Per 100 Ribu KH	169	0												
		AKB	Per Seribu KH	8,1	0												
		Persentase bayi kelahiran hidup yang dapat imunisasi lengkap	%	88,97	100												
		Persentase Penanganan Penyakit Tidak Menular	%	80	100												
		Persentase Penanganan Penyakit Menular	%	100	100												
	Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	24,14	58,62												
		Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	%	0	0												
		Persentase Desa STBM	%	24,4	35												
		Persentase Masyarakat (RT) PHBS	%	30	35												

Dinas Kesehatan

	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Cakupan Ketercapaian Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya															
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata	Cakupan Ketercapaian Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata	unit	0	0												
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan Ketercapaian Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	26,26	30												
		Jumlah Dokter	rasio	1/13.365	1/13.365												
1.02.01.33	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase bayi kelahiran hidup yang dapat imunisasi lengkap	%	88,97	100	100		100		100		100		100		100	
		Persentase Penanganan Penyakit Tidak Menular	%	80	100	100		100		100		100		100		100	
		Persentase Penanganan Penyakit Menular	%	100	100	100		100		100		100		100		100	
1.02.01.34	Program Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	24,14	58,62	86		100		100		100		100		100	
		Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	%	0	0	0		0		100		100		100		100	
		Cakupan Pelayanan Dasar Kesehatan Masyarakat Miskin	%	26,26	30	40		50		60		70		70		70	
		Rasio puskesmas, poliklinik, puskesmas per satuan penduduk	Rasio	1/1726	1/1726	1/1694		1/1686		1/1679		1/1672		1/1672		1/1672	
		Persentase Pencapaian SPM Kesehatan	%	N/A	100	100		100		100		100		100		100	
1.02.01.35	Program Kesehatan Masyarakat	Persentase Angka Stunting	%	47,28	31,28	25,71		20,14		14,57		9		9		9	
		AKI	Per 100 Ribu KH	169	0	0		0		0		0		0		0	
		AKB	Per Seribu KH	8,1	0	0		0		0		0		0		0	

		Persentase balita gizi buruk	%	0,33	0,29		0,25		0,20		0,15		0,10		
		Persentase Desa STBM	%	24,4	35		40		45		55		65		65
		Persentase Masyarakat (RT) PHBS	%	30	35		40		45		55		65		65
1.02.01.36	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Kesehatan	Jumlah Dokter	rasio	1/13.365	1/13.365		1/10.906		1/9270		1/8105		1/7234		1/7234
		Jumlah Rumah Sakit	unit	0	0		1		0		1		0		2
		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	%	80	90		100		100		100		100		100
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					193.303		234.025		242.703		262.176		269.554	1.201.762
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	%	38,29	46,09										
		Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	%	88	89,84										
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan														
	Program Pembinaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi														
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmagaan														
	Program Pembangunan Saluran Drainase														
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase Sawah Yang Terairi Irigasi Teknis	%	55,45	55,45										
	Program Pengembangan Kinerja dan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Tingkat Ketersediaan Air Baku	%	N/A	56,07										
		Persentase Ketersediaan air minum	%	25,15	31,68										
1.03.01.31	Program Pengembangan, Pembangunan dan	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	%	38,29	46,09		53,90		61,70		69,51		77,31		77,31

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	%	88	89,84		92,19		94,53		96,88		99,22		99,22		
1.03.01.32	Program Pengembangan, Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase Sawah Yang Terairi Irigasi Teknis	%	55,45	55,45		60,41		64,58		69,15		73,72		73,72		
		Persentase Tingkat Ketersediaan Air Baku	%	N/A	56,07		56,66		57,24		57,83		58,41		58,41		
		Persentase Pencapaian SPM Pekerjaan Umum	%	N/A	100		100		100		100		100		100		
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh																
	Program Perencanaan Tata Ruang																
	Program Pemanfaatan Ruang	Prosentase Ijin Yang Taat Terhadap Tata Ruang	%	20	40												
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang																
1.05.02.18	Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Prosentase Ijin Yang Taat Terhadap Tata Ruang	%	20	40		60		70		80		90		90		
1.03	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					2.124		24.485		25.709		26.995		28.344		107.657	
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	%	76,60	77,14												
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Kawasan Pemukiman Yang Sehat	%	N/A	5												
		Prosentase RT yg dialiri Listrik	%	25,60	40,34												
1.04.01.21	Program Pengembangan Kawasan Pemukiman	Persentase Rumah Layak Huni	%	76,60	77,14		77,67		78,21		78,74		79,18		79,18		
		Persentase Kawasan Pemukiman Yang Sehat	%	N/A	5		10		15		20		25		25		
		Prosentase Ketersediaan Air Minum	%	25,15	31,68		38,21		44,74		51,27		57,80		57,80		

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

		Persentase Pencapaian SPM Perumahan Rakyat	%	N/A	100		100		100		100		100			
1.14.01.19	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenaga Listrik	Persentase RT yg dialiri Listrik	%	25,60	40,34		55,78		70,52		85,26		100		100	
1,03	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					3.731		2.650		2.783		2.922		3.068		15.153
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Masyarakat yang Paham tentang Kewaspadaan dan Deteksi Dini	%	N/A	100											
	Program Pemeliharaan Kantantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penanganan Konflik Sosial	%	100	100											
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Masyarakat yang Paham tentang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	%	N/A	100											
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Paham tentang Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	%	N/A	100											
		Persentase Lembaga Adat yang Dibina	%	N/A	0											
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam															
1.19.01.23	Program Penguatan Ketahanan Bangsa, Ideologi, Kewaspadaan dan Penguatan Politik Dalam Negeri	Persentase Penanganan Konflik Sosial	%	100	100		100		100		100		100		100	
		Persentase Masyarakat yang Paham tentang Kewaspadaan dan Deteksi Dini	%	N/A	100		100		100		100		100		100	
		Persentase Masyarakat yang Paham tentang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	%	N/A	100		100		100		100		100		100	

Kesbangpol

		Persentase Masyarakat yang Paham tentang Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	%	N/A	100		100		100		100		100		100		
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan																Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Pemeliharaan Kontribmas dan Tindakan Kriminal																
	Program Peningkatan Pemahaman dan Penegakan Perda dan Perbup	Persentase Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah	%	100	100												
		Persentase Pencapaian SPM TRANSTIBUMLINMAS	%	N/A	100												
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran																
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																
1.19.03.16	Program Pemeliharaan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Pencapaian SPM TRANSTIBUMLINMAS	%	N/A	100		100		100		100		100		100		
1.06	SOSIAL					1.520		2.458		2.581		2.710		2.845		12.114	
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan	%	2,03	80												Dinas Sosial

	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah KUBE PMKS yang mendapat bantuan	Kelompok	0	0												
		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang aktif	Lembaga	3	0												
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial																
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma																
1.13.01.22	Program Perlindungan, Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan	%	2,03	80	80		80		80		80		80			
		Persentase Pencapaian SPM Sosial	%	N/A	100	100		100		100		100		100			
1.13.01.23	Program Pemberdayaan Sosial	Jumlah KUBE PMKS yang mendapat bantuan	Kelompok	0	0	20		20		20		20		80			
1.13.01.24	Program Peningkatan Kelembagaan Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang aktif	Lembaga	3	0	1		1		2		1		8			
1.07	SUB URUSAN TRANSTIBUMLINMAS PENANGGULANGAN BENCANA					7.344		910		956		1.003		1.053		11.266	
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	POIN	0,30	0,30												Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.20.11.32	Program Penanggulangan Resiko Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	POIN	0,30	0,30	0,35		0,40		0,45		0,50		0,50			
2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					31.299		32.422		34.043		35.745		37.533		171.042	
2.01	TENAGA KERJA					2.493		1.654		1.737		1.824		1.915		9.622	

	Program Peningkatan Kesempatan Kerja																
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan tenaga kerja yang ditempatkan / yang mendapatkan pekerjaan	%	75	80												
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan																
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan																
1.14.01.18	Program Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan tenaga kerja yang ditempatkan / yang mendapatkan pekerjaan	%	75	80		85		90		95		100		100		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					-		250		263		276		289		1.078	
1.11.01.20	Program Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	Skor pencapaian kabupaten layak anak	Poin	0	45		300		500		600		700		700		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
		Persentase angkatan kerja perempuan	%	83	84		85		86		87		88		88		
2.03	PANGAN					653		900		945		992		1.042		4.532	
2.01.04.14	Program Peningkatan Kelangkaan Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	Skor PPH	76,50	80		81		82		84		84		84		Dinas Kelangkaan Pangan dan Kelautan
2.04	PERTANAHAN					-		1.840		1.932		2.029		2.130		7.931	
1.09.01.19	Program Pengelolaan Kawasan Budidaya	Persentase Kawasan Budidaya yang Bersertifikat	%	12,12	14,12		16,12		18,12		20,12		22,12		22,12		Dinas Pertanahan
2.05	LINGKUNGAN HIDUP					4.665		2.150		2.258		2.370		2.489		13.932	

	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur															
	Program Pengembangan Kinerja dan Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah Perkotaan yang Dikelola	%	7,08	26,14											
		Jumlah Kelompok 3R	Kelompok	0	0											
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup															
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Mata Air yang Terpelihara	%	N/A	58,89											
		Prosentase Luas Areal HTR Yang Dikelola	%	71,33	78,50											
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Luas Areal RTH Yang di Kelola	%	10	32,50											
1.08.01.25	Program Pengecilan dan Pemanfaatan Sampah	Persentase Jumlah Sampah Perkotaan yang Dikelola	%	7,08	26,14	44,61		63,07		81,54		100		100		
		Jumlah Kelompok 3R	Kelompok	0	0	44		44		44		44		176		
1.08.01.26	Program Pelestarian Lingkungan Hidup	Persentase Luas Areal RTH Perkotaan Yang di Kelola	%	10	32,50	55,00		77,50		100		100		100		
		Prosentase Luas Areal HTR Yang Dikelola	%	71,33	78,50	85,67		92,83		100		100		100		
		Persentase Mata Air yang Terpelihara	%	N/A	58,89	72,60		86,30		100		100		100		
2.06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					2.394		2.000		2.100		2.205		2.315		11.014
	Program Penataan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK) Non Fisik	Persentase Penataan Administrasi Kependudukan	%	92	94											
		Rata-rata Lama Pelayanan Administrasi Kependudukan	Hari	5	3											
		Persentase Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	%	53,36	80											

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

		Rata-rata Lama Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Hari	5	3												
1.10.01.15	Program Penataan Sistem Administrasi Kependudukan Terpadu	Persentase Penataan Administrasi Kependudukan	%	92	94		96		98		100		100		100		
		Rata-rata Lama Pelayanan Administrasi Kependudukan	Hari	5	3		1		1		1		1		1		
1.10.01.16	Program pelayanan pencatatan sipil	Persentase Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	%	53,36	80		90		100		100		100		100		
		Rata-rata Lama Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Hari	5	3		1		1		1		1		1		
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					2.629		2.500		2.625		2.756		2.894		13.404	
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Pertumbuhan omset BUMDES	%	N/A	44												
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah BUMDES aktif dan produktif	Bumdes/ Desa	8	33												
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Berkurangnya jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Desa	58	50												
		Persentase Lembaga Adat yang Dibina	%	N/A	0												
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa																
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan																
	Program Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa dan Kelurahan																

Dinas Pemberda-
yaan
Masyarakat
Dan Desa

	Program Pemekaran Wilayah Desa dan Kelurahan																
1.22.01.20	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah BUMDES aktif dan produktif	Bumdes/ Desa	8	33		50		50		26		0		159		
		Pertumbuhan omset BUMDES	%	N/A	10		10		10		10		10		10		
		Persentase Lembaga Adat yang Dibina	%	N/A	0		25		25		25		25		100		
1.22.01.21	Program pembinaan pembangunan dan pemerintahan desa	Berkurangnya jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Desa	58	50		40		25		10		0		0		
2.08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					8.653		8.000		8.400		8.820		9.261		43.134	
	Program Keluarga Berencana	Angka Contraceptive Prevelesi Rate (CPR)	%	70	80												Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	Program Pelayanan Kontrasepsi	Dependensi Rasio	%	79	70												
1.12.01.25	Program KB dan Pengendalian Penduduk	Dependensi Rasio	%	70	70		68		66		65		63		63		
		Angka Contraceptive Prevelesi Rate (CPR)	%	79	80		80		82		84		86		86		
2.09	PERHUBUNGAN					2.181		1.700		1.785		1.874		1.968		9.508	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																Dinas Perhubungan
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase Pertumbuhan jumlah izin trayek angkutan jalan	%	N/A	10												
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas																
1.07.01.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Pertumbuhan jumlah izin trayek angkutan jalan	%	N/A	10		10		10		10		10		50		

2.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					1.358		1.550		1.628		1.709		1.794		8.039	
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Penduduk Yang menjangkau Akses Informasi, komunikasi dan telekomunikasi	%	38,89	51,11												
		Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Terpublikasi	%	100	100												
	Program Kerja Sama Informasi dengan Mass Media																
	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah																
1.25.01.19	Program Peningkatan Infrastruktur Komunikasi dan Informasi	Persentase Penduduk Yang menjangkau Akses Informasi, komunikasi dan telekomunikasi	%	38,89	51,11		63,33		75,58		87,78		100		100		
1.25.01.20	Program Pelayanan Informasi Media Baru, Perfilman dan Media Percetakan	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Terpublikasi	%	100	100		100		100		100		100		100		
2.11	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					2.516		4.430		4.652		4.884		5.128		21.610	
	Program Penciptaan Iklim Kecil Menengah yang Kondusif																
	Program Pengembangan Kewirausahaan Keunggulan Kompetitif UKM	Persentase pertumbuhan UKM	%	1430 UMK	5												
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Pertumbuhan Omset Koperasi Likang Telu	%	Rp 84.296 (Juta)	5												

1.15.01.19	Program pengembangan Koperasi dan UKM	Persentase Pertumbuhan Omset Koperasi Likang Telu	% Terhadap 3 Jenis Koperasi Likang Telu	Rp 84.296 (Juta)	10		35		35		35		35		Rp 177.275 (Juta)		
		Persentase pertumbuhan UKM	%	1430 UKM	5		5		5		5		5		2146 UMK		
2.12	PENANAMAN MODAL					1.132		1.750		1.838		1.929		2.026		8.675	
	Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Lokal pada Kegiatan Investasi di Kabupaten Manggarai Timur	%	N/A	75												
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Total Nilai realisasi investasi (PMDN/PMA)	Milyar	606	50												
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Rata-Rata Lama Proses Perzinan (Hari)	Hari	Hari	6,24												
	Program Pengendalian Penanaman Modal dan Pelayanan Data Informasi																
1.14.01.18	Program Pengembangan Pelayanan Perzinan	Rata-Rata Lama Proses Perzinan (Hari)	Hari	6,24	6,24		5		5		5		5		5		
1.14.01.19	Program Pengembangan Penanaman Modal	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Lokal pada Kegiatan Investasi di Kabupaten Manggarai Timur	%	N/A	75		75		75		75		75		75		
		Total Nilai realisasi investasi (PMDN/PMA)	Milyar	606	50		200		300		400		500		1.450		
2.13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					788		1.250		1.313		1.378		1.447		6.176	
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang aktif	Org	0	3												
		Jumlah wirausaha muda	Org	N/A	40												
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga																

Dinas
Penanaman
Modal Dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu

Dinas
Pendidikan,
Pemuda dan
Olahraga

	Program Pembinaan dan Pemasyarakat Olah Raga	Jumlah Cabang Olah Raga Berprestasi	Cabang Olah Raga	N/A	1												
1.18.01.22	Program Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang aktif	Orang	0	3		4		4		5		5		21		
		Jumlah wirausaha muda	Orang	N/A	40		50		50		50		50		240		
		Jumlah Cabang Olah Raga Berprestasi	Cabang Olah Raga	N/A	0		2		1		1		1		5		
2.14	STATISTIK dan Persandian					-		450		473		496		521		1.940	
1.23.01.16	Program pengelolaan statistik dan persandian	Persentase data sektoral yang terpublikasikan sesuai standar data dan meladala	%	N/A	100		100		100		100		100		100		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase PD yang Menggunakan Sistem Persandian	%	8,11	8,11		13,51		18,92		24,32		29,73		29,73		
2.16	KEBUDAYAAN					315		500		525		551		579		2.470	
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Keg	N/A	1												Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya																
	Program Pengembangan Kerja Sama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Unit	N/A	11												
1.17.01.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Keg	N/A	1		1		1		1		1		5		
		Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Unit	10	11		20		20		20		20		20		
2.17	PERPUSTAKAAN					1.522		1.248		1.310		1.376		1.445		6.901	
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase PD yang telah diakuisi kearsipannya	%	0	0												Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Koleksi Buku	11752	13252											
		Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul Buku	6245	6845											
		Pustakawan	Orang	1	0											
1.26.01.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Koleksi Buku	11752	13252		14.252		14.752		15.252		15.552		15.552	
		Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul Buku	6245	6845		7.345		7.595		7.845		7.995		7.995	
		Pustakawan	Orang	1	0		0		1		0		0		2	
2.18	KEARSIPAN					-		250		263		276		289		1.078
1.24.01.15	Program perbaikan sistem kearsipan	Persentase PD yang telah diokuisi kearsipannya	%	0	0		4,44		24,44		44,44		66,67		66,67	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	URUSAN PILIHAN					33.205		43.095		45.188		48.293		50.707		220.488
3.01	KELAUTAN DAN PERIKANAN					3.578		3.072		3.164		3.322		3.488		16.625
	Program Pengembangan Budaya Perikanan	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	%	0,53	4											Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	%	-50,76	5											
	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan															
2.05.01.25	Program Peningkatan Produksi Perikanan	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	%	0,53	4		4		4		4		4		Rata-Rata Pertumbuhan 3,96 %	
		Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	%	-50,76	5		10		25		30		35		Rata-Rata Pertumbuhan 23,69 %	
3.02	PARIWISATA					5.222		5.530		5.807		6.097		6.402		29.057

	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Yang Di Kelola	Obyek	3	0														
		Jumlah Desa Wisata Berbasis Masyarakat	Desa	0	1														
	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata																		
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata																		
2.04.01.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Yang Di Kelola	Destinasi	3	0		3		2		2		3			10			
2.04.01.18	Program Pariwisata Berbasis Masyarakat	Jumlah Desa Wisata Berbasis Masyarakat	Desa	0	1		2		2		2		2			10			
3.03	PERTANIAN					22.095		25.000		24.250		28.088		29.492		130.924			
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani																		
	Program Peningkatan penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan	Indeks Infrastruktur Pertanian	Indeks	984,00%	44,53%														
	Program Peningkatan Produksi pertanian/Perkebunan	Persentase Pertumbuhan Produksi tanaman pangan	%	9,84	11														
		Persentase Pertumbuhan produksi hortikultura	%	N/A	4														
		Persentase Pertumbuhan produksi perkebunan	%	N/A	10														
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan																		
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak	Persentase Ternak Sehat	%	N/A	100														

Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan

Dinas Pertanian

	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase Pertumbuhan Produksi Peternakan	%	1,14	25												
		Pertumbuhan Harga Ternak	%	5,28	3												
	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	Persentase Produk Pertanian dan perkebunan Yang Sudah Dikelola pascapanennya	%	N/A	6												
2.01.01.25	Program Peningkatan produksi	Persentase Pertumbuhan Produksi tanaman pangan	%	9,84	11		11		11		11		11		11		
		Persentase Pertumbuhan produksi hortikultura	%	N/A	4		4		4		4		4		4		
		Persentase Pertumbuhan produksi perkebunan	%	N/A	10		10		10		10		10		10		
2.01.01.26	Program Peningkatan Nilai Tambah Pertanian Dan Perkebunan	Persentase Produk Pertanian dan perkebunan Yang Sudah Dikelola pascapanennya	%	N/A	6		6		6,5		6,5		6,5		6,5		
2.01.01.27	Program Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pertanian	Indeks Infrastruktur Pertanian	Indeks	37,02%	44,53%		51,01%		55,06%		64,82%		71,30%		71,30%		
3.03	PETERNAKAN					-		6.093		6.398		7.037		7.389		26.917	
2.01.01.21	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Ternak Sehat	%	N/A	100		100		100		100		100		100		Dinas Peternakan
2.01.01.22	Program peningkatan produksi dan hasil peternakan	Persentase Pertumbuhan Produksi Peternakan	%	1,14	25		25		25		25		25		25		
		Pertumbuhan Harga Ternak	%	5,28	3		3		3		3		3		3		
3.06	PERDAGANGAN					1.405		1.750		1.838		1.929		2.026		8.948	
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan																Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Pertumbuhan Harga Sembako Di Pasar Manggarai Timur	%	13,10	2												
		Pertumbuhan Volume Ekspor Regional Barang dan Jasa	%	5,43	5,93												

2.06.01.20	Program Pengembangan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Harga Sembako Di Pasar Manggarai Timur	%	13,10	2		2		2		2		2		2		
		Pertumbuhan Volume Ekspor Regional Barang dan Jasa	%	5,43	5,93		6,43		6,93		7,43		7,93		7,93		
3.07	PERINDUSTRIAN					737		1.500		1.575		1.654		1.736		7.202	
	Program Peningkatan Kapasitas IPTEM Sistem Produksi																
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Pertumbuhan nilai produksi Industri	%	11,01	11												
		Persentase industri pengolahan hasil- hasil pertanian, perkebunan kelautan dan perikanan	% terhadap Tahun 2018	762 Unit	15												
		Jumlah jenis Industri pengolahan produk lokal yang direpacking dan di-rebranding	Jenis	N/A	0												
	Program Penataan Struktur Industri																
2.07.01.16	Program Pengembangan Industri Kecil	Persentase Pertumbuhan nilai produksi Industri	%	11,01	11		11		11		11		11		11		
		Persentase industri pengolahan hasil- hasil pertanian, perkebunan kelautan dan perikanan	% terhadap Tahun 2018	762 Unit	15		15		15		15		15		15		
		Jumlah jenis Industri pengolahan produk lokal yang direpacking dan di-rebranding	Jenis	N/A	0		1		1		1		0		3		
3.08	TRANSMIGRASI					168		150		158		165		174		815	
2.08.01.18	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Kawasan transmigrasi	kawasan	1	1		1		1		1		1		1		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	URUSAN PENUNJANG					17.312		15.401		16.171		16.980		19.092		84.955	
4.1	PERENCANAAN					4.639		4.300		4.515		4.741		6.241		24.436	

	Program Perencanaan Tata Ruang																	
	Program Pemanfaatan Ruang																	
	Program Pengembangan Kota - Kota Menengah dan Besar																	
	Program Pengembangan Data/Informasi	Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	%	N/A	100													
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Yang Berkualitas	%	N/A	100													
		Persentase perencanaan yang tepat waktu sesuai peraturan perundangan yang berlaku	%	N/A	100													
		Persentase evaluasi hasil dokumen perencanaan pembangunan tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku	%	N/A	100													
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	76,96	79,96													
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	76,96	79,96													
	Program Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	76,96	79,96													
	Program Pengembangan Penelitian Pembangunan Daerah	Jumlah Kajian/penelitian	Dokumen	5	0													

Badan
Perencanaan
Pembangunan,
Penelitian dan
Pengemba-
ngan Daerah

1.06.01.23	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Yang Berkualitas	%	N/A	100		100		100		100		100				
		Persentase perencanaan yang tepat waktu sesuai peraturan perundangan yang berlaku	%	N/A	100		100		100		100		100				
		Persentase evaluasi hasil dokumen perencanaan pembangunan tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku	%	N/A	100		100		100		100		100				
		Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	%	N/A	100		100		100		100		100				
1.06.01.24	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	76,96	79,96		82,96		85,96		88,96		91,96			91,96	
1.06.01.25	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	76,96	79,96		82,96		85,96		88,96		91,96			91,96	
1.06.01.26	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	76,96	79,96		82,96		85,96		88,96		91,96			91,96	
4.2	KEUANGAN					5.955		3.401		3.571		3.750		3.937		20.614	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																Badan Keuangan
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	100	100												
		Persentase aset yang dilaporkan di neraca	%	100	100												
		Persentase peningkatan pendapatan daerah	%	-42,36	24,38												
1.20.05.17	Program pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	100	100		100		100		100		100			100	

1.20.05.29	Program pengelolaan Aset Daerah	Persentase aset yang dilaporkan di neraca	%	100	100		100		100		100		100		100		
1.20.05.29	Program peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	%	-42,36	24,38		15,60		17,13		22,43		30,16		21,33		
4.3	KEPEGAWAIAN					3.817		3.500		3.675		3.859		4.052		18.902	
	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS																
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi	%	30	40												
	Program Pendidikan Kedinasan																
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase ASN yang Mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Karier	%	86,64	100												
		Fasilitasi pembinaan KORPRI	Kali	2	2												
1.21.02.18	Program peningkatan Standar Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi	%	30	40		50		60		70		80		80		
1.21.02.19	Program pembinaan dan pengembangan ASN	Persentase ASN yang Mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Karier	%	86,64	100		100		100		100		100		100		
		Fasilitasi pembinaan KORPRI	Kali	2	2		2		2		2		2		10		
4.5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					-		700		735		772		810		3.017	
1.04.01.26	Program Pengembangan Penelitian Daerah	Jumlah Kajian/penelitian	Dokumen	5	0		2		3		4		5		19		
4.6	PENGAWASAN					2.901		3.500		3.675		3.859		4.052		17.986	

	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan	%	73,54	75													
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Nilai Kapabilitas APIP (Level 1-5)	Level	N/A	3													
1.20.07.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Nilai Kapabilitas APIP (Level 1-5)	Level	N/A	3		3		3		3		3		3			
1.20.07.28	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Berbasis Risiko	Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan	%	73,54	75		80		85		90		95		95			
4.8	KEWILAYAHAN					15.435		18.900		19.845		20.837		21.879		96.8%		
4.8.1	KECAMATAN					15.435		18.900		19.845		20.837		21.879		96.8%		
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan	Persentase Tercapainya IKU Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	100	100													
		Persentase Capaian Program Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan																
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan	Persentase Capaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	%	100	100													
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan																	
	Program Penyelesaian Konflik Masyarakat																	
1.20.09.31	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Tercapainya IKU Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	100	100		100		100		100		100		100			

		Persentase Capaian Program Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	%	100	100		100	100		100		100		100							
1.20.09.32	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Capaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	%	100	100		100	100		100		100		100							
5	URUSAN PENDUKUNG					25.328	10.600		10.902	11.447		12.019		70.297							
5.1	SEKRETARIAT DAERAH					15.481	7.600		7.752	8.140		8.547		47.519							
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Bidang Kehumasan dan Protokol)	Persentase Tugas Kepala Daerah yang Terasilitasi dengan baik	%	100	100																
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Tugas Kepala Daerah yang Terasilitasi dengan baik	%	100	100																
	Program Kerja Sama Informasi dan Mass Media																				
1.20.03.16	Program peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Tugas Kepala Daerah yang Terasilitasi dengan baik	%	100	100												100	100	100	100	100
1.20.03.17	Program peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Protokol Daerah	Persentase Tugas Kepala Daerah yang Terasilitasi dengan baik	%	100	100												100	100	100	100	100
	Program Fasilitasi Kebijakan Pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Sasaran Bidang Perekonomian	%	N/A	100																

	Program Koordinasi dan Pembinaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Capaian Pengendalian Inflasi Daerah	%	1,70	<2												
1.20.03.18	Program Koordinasi dan Pembinaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Capaian Kinerja Sasaran Bidang Perekonomian	%	N/A	100		100		100		100		100		100		Bagian Ekonomi dan Pembangunan
		Persentase Capaian Pengendalian Inflasi Daerah	%	1,70	<2		<2		<2		<2		<2		<2		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																
	Program Pelayanan Pemilihan Penyediaan Barang/Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa daerah yang tepat waktu	%	100	100												
1.20.03.19	Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase pengadaan barang dan jasa daerah yang tepat waktu	%	100	100		100		100		100		100		100		ULP
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		%	100	100												
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase capaian kinerja sasaran bidang Reformasi Birokrasi	%	100	100												
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik																
1.20.03.20	Program Koordinasi Ketatalaksanaan Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi	Persentase capaian kinerja sasaran bidang Reformasi Birokrasi	%	100	100		100		100		100		100		100		Bagian Organisasi

	Program Peningkatan Pengawasan Internal Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah																	
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Pelayanan Hukum Daerah	%	100	100													
1.20.03.21	Program Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Indeks Pelayanan Hukum Daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Bagian Hukum
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial																	
	Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Capaian Kinerja Sasaran Bidang SDM	%	100	100													
	Program Peningkatan Kualitas Kerukunan Hidup Umat Beragama																	
1.20.03.22	Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Capaian Kinerja Sasaran Bidang SDM	%	100	100		100		100		100		100		100		100	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru																	
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan																	
	Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja penyelenggaraan tata kelola Pemerintah Daerah	%	100	100													

1.20.03.23	Program Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan, Perbatasan, Kependudukan, dan Otonomi Daerah	Capaian Kinerja penyelenggaraan tata kelola Pemerintah Daerah	%	100	100		100		100		100		100		100		
	Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Persentase Capaian Kinerja Sasaran Bidang Pembangunan	%	100	100												
1.20.03.24	Program Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Sasaran Bidang Pembangunan	%	100	100		100		100		100		100		100		
5.1	SEKRETARIAT DPRD					9.847		3.000		3.150		3.308		3.473		22.777	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Perda Inisiatif yang Ditetapkan	Perda	1	0												
		Jumlah Perda Usulan dan Reguler yang Ditetapkan	Perda	40	5												
1.20.04.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Perda Inisiatif yang Ditetapkan	Perda	1	0		2		2		2		2		8		
		Jumlah Perda Usulan dan Reguler yang Ditetapkan	Perda	40	5		5		5		5		5		25		



BAB 8

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Kunci



**KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH****8.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijabarkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Dalam Permendagri 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa IKU diambil dari indikator sasaran daerah dan Indikator Kinerja Kunci adalah IKU ditambah semua indikator program.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat impact yang diukur setiap tahunnya. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat/warga Kabupaten Manggarai Timur terkait pembangunan manusia, ketertiban, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja. Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain pengarusutamaan gender, kualitas lingkungan hidup, perumahan, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (sustainable growth) didukung oleh pertumbuhan volume komoditi keluar masuk Kabupaten Manggarai Timur, serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan. Indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama (key performance indicators) berdasarkan uraian tersebut di atas sebagai alat ukur menilai kinerja organisasi, maka indikator kinerja daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah. 2. Menggunakan indikator pencapaian program pembangunan yang diharapkan. 3. Memfokuskan pada hal-hal utama, kearifan lokal yang penting dan sinergi dengan pembangunan antar jenjang pemerintahan. 4. Terkait dengan penanggungjawab pelaksanaan pembangunan daerah.

Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana Tabel 8.1 dan 8.2.

8.2 Indikator Kinerja Utama

Tabel 8.1
Indikator Kinerja Utama

Indikator	Satuan	Target Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Manusia	Poin	59,81	61,11	62,11	63,71	65,01
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7	7,5	8	8,5	9
Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,5	12	12,5	13	13,5
Usia Harapan Hidup	Tahun	68,5	69	69,5	70	70,5
Presentase Penurunan Prevalensi Stunting	Persen	31,28	25,71	20,14	14,57	9
Persentase PMKS	Persen	25,78	22,10	17,19	13,50	9,82
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,77	6,48	7,56	8,42	9,91
PDRB Perkapita	Rp. Juta	11,5	12,5	13,6	14,8	16,1
Pengeluaran Perkapita	Rp. Juta	6,07	6,3	6,6	6,9	7,2
Indeks Gini	Poin	0,3	0,29	0,28	0,27	0,26
Inflasi	Persen	<2	<2	<2	<2	<2
Pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Dalam PDRB	Persen	3,65	3,73	3,82	3,91	3,99
Pertumbuhan sektor industri pengolahan Dalam PDRB	Persen	3,90	3,98	4,07	4,15	4,23
Skor PPH	Poin	80	81	82	84	84
Pertumbuhan Omset Koperasi Likang Telu	Persen	10	10	10	10	10
Pertumbuhan sektor jasa kemasyarakatan, penyediaan	Persen	7,73	7,77	7,82	7,86	7,91

akomodasi dan makan minum Dalam PDRB						
Pertumbuhan sektor perdagangan Dalam PDRB	Persen	7,85	7,89	7,93	7,97	8,01
Pertumbuhan Penanaman Modal Tetap Bruto	Persen	4	4,25	4,5	4,75	5
Indeks Williamson	Poin	0,3	0,29	0,28	0,27	0,26
Indeks Infrastruktur	Persen	45,75	47,04	48,31	49,59	52,90
Indeks Lingkungan Hidup	Persen	27,71	38,97	50,18	60,52	69,04
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Persen	70	70	70	70	70
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai SAKIP	Nilai	B	B	BB	BB	A

8.3 Indikator Kinerja Daerah

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

N O	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhr Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1	Indeks Pembangunan Manusia	59,49	59,81	61,11	62,11	63,71	65,01	65,01
1.2	Pertumbuhan Ekonomi	5,08	5,77	6,48	7,56	8,42	9,91	9,91
1.3	PDRB Perkapita	10.558	11,5	12,5	13,6	14,8	16,1	16,1
1.4	Pengeluaran Perkapita	5,809	6,07	6.3	6.6	6.9	7.2	7.2
1.5	Indeks Gini	N/A	0.3	0,29	0,28	0,27	0,26	0,26
1.6	Inflasi	1,70	<2	<2	<2	<2	<2	<2
1.7	Indeks Williamson	N/A	0,3	0,29	0,28	0,27	0,26	0,26
1.8	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	N/A	70	70	70	70	70	70
Kesejahteraan Sosial								
2.1	Rata-rata Lama Sekolah	6,65	7	7,5	8	8,5	9	9
2.2	Harapan Lama Sekolah	11,34	11,5	12	12,5	13	13,5	13,5
2.3	Usia Harapan Hidup	67,62	68,5	69	69,5	70	70,5	70,5
2.4	Presentase Penurunan Prevalensi Stunting	47,28	31,28	25,71	20,14	14,57	9	9
2.5	Persentase PMKS	26,21	25,78	22,10	17,19	13,50	9,82	9,82

2.6	Pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Dalam PDRB	Rata-Rata 2014 – 2018 Sebesar 3,56	3,65	3,73	3,82	3,91	3,99	Rata-Rata Pertumbuhan Sebesar 3,99
2.7	Pertumbuhan sektor industri pengolahan Dalam PDRB	Rata-Rata 2014 – 2018 Sebesar 3,82	3,90	3,98	4,07	4,15	4,23	Rata-Rata Pertumbuhan Sebesar 4,23
2.8	Skor PPH	76,50	80	81	82	84	84	84
2.9	Pertumbuhan Omset Koperasi Likang Telu	N/A	10	10	10	10	10	10
2.10	Pertumbuhan sektor jasa kemasyarakatan, penyediaan akomodasi dan makan minum Dalam PDRB	Rata-Rata 2014 – 2018 Sebesar 7,68	7,73	7,77	7,82	7,86	7,91	Rata-Rata Pertumbuhan Sebesar 7,91
2.11	Pertumbuhan sektor perdagangan Dalam PDRB	Rata-Rata 2014 – 2018 Sebesar 7,80	7,85	7,89	7,93	7,97	8,01	Rata-Rata Pertumbuhan Sebesar 8,01
2.12	Pertumbuhan Penanaman Modal Tetap Bruto	N/A	4	4,25	4,5	4,75	5	5
2.13	Indeks Infrastruktur	36,52	45,75	47,04	48,31	49,59	52,90	52,90
2.14	Indeks Lingkungan Hidup	16,46	27,71	38,97	50,18	60,52	69,04	69,04
2.15	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.16	Nilai SAKIP	CC	B	B	BB	BB	A	A
2.17	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	80	80	80	80	80	80
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Pelayanan Urusan Wajib								
Terkait Pelayanan Dasar								
1.	Urusan Pendidikan							
1.1	APK PAUD	17,85	100	100	100	100	100	100
1.2	Angka kelulusan paket A/B/C	0	100	100	100	100	100	100
1.3	Persentase Pencapaian SPM Pendidikan	0	100	100	100	100	100	100
1.4	APK	138	100	100	100	100	100	100
1.5	APM	98,38	100	100	100	100	100	100
1.6	APS	95	100	100	100	100	100	100
1.7	Angka Putus Sekolah SD	0,25	0,20	0,15	0,12	0,10	0,05	0,05
1.8	Angka Kelulusan	99,90	100	100	100	100	100	100
1.9	Angka Melanjutkan	90,57	100	100	100	100	100	100
1.10	APK	108	100	100	100	100	100	100

1.11	APM	84,69	86,5	88,3	91,4	93	95	95
1.12	APS	NA	100	100	100	100	100	100
1.13	Angka Putus Sekolah SMP	0,19	0	0	0	0	0	0
1.14	Angka Kelulusan	99,63	100	100	100	100	100	100
1.15	Angka Melanjutkan	74,64	100	100	100	100	100	100
1.16	Persentasi Guru yang bersertifikat	16,93	18,71	26,54	34,35	42,17	50	50
1.17	Rasio Guru/Murid SD	1/16	1/20	1/24	1/26	1/28	1/30	1/30
1.18	Rasio Guru/Murid SMP	1/15	1/15	1/17	1/19	1/21	1/25	1/25
2 Urusan Kesehatan								
2.1	Persentase bayi kelahiran hidup yang dapat imunisasi lengkap	88,97	100	100	100	100	100	100
2.2	Persentase Penanganan Penyakit Tidak Menular	80	100	100	100	100	100	100
2.3	Persentase Penanganan Penyakit Menular	100	100	100	100	100	100	100
2.4	Persentase Puskesmas Terakreditasi	24,14	58,62	86	100	100	100	100
2.5	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	0	0	0	0	100	100	100
2.6	Cakupan Pelayanan Dasar Kesehatan Masyarakat Miskin	26,26	30	40	50	60	70	70
2.7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1/172 6	1/172 6	1/169 4	1/168 6	1/167 9	1/167 2	1/1672
2.8	Persentase Pencapaian SPM Kesehatan	N/A	100	100	100	100	100	100
2.9	Presentase Angka Stunting	47,28	31,28	25,71	20,14	14,57	9	9
2.10	AKI	169	0	0	0	0	0	0
2.11	AKB	8,1	0	0	0	0	0	0
2.12	Persentase balita gizi buruk	0,33	0,29	0,25	0,20	0,15	0,10	0,10
2.13	Presentase Desa STBM	24,4	35	40	45	55	65	65
2.14	Presentase Masyarakat (RT) PHBS	30	35	40	45	55	65	65
2.15	Jumlah Dokter	1/13.36 5	1/13.36 5	1/10.90 6	1/9270	1/8105	1/7234	1/7234

2.16	Jumlah Rumah Sakit	0	0	1	0	1	0	2
2.17	Presentasi ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	80	90	100	100	100	100	100
3.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
3.1	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	38,29	46,09	53,90	61,70	69,51	77,31	77,31
3.2	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	88	89,84	92,19	94,53	96,88	99,22	99,22
3.3	Persentase Sawah Yang Terairi Irigasi Teknis	55,45	55,45	60,41	64,58	69,15	73,72	73,72
3.4	Persentase Tingkat Ketersediaan Air Baku	N/A	56,07	56,66	57,24	57,83	58,41	58,41
3.5	Persentase Pencapaian SPM Pekerjaan Umum	N/A	100	100	100	100	100	100
3.6	Prosentase Ijin Yang Taat Terhadap Tata Ruang	20	40	60	70	80	90	90
4	Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman							
4.1	Persentase Rumah Layak Huni	76,60	77,14	77,67	78,21	78,74	79,18	79,18
4.2	Persentase Kawasan Pemukiman Yang Sehat	N/A	5	10	15	20	25	25
4.3	Persentase Ketersediaan air minum	25,15	31,68	38,21	44,74	51,27	57,80	57,80
4.4	Persentase Pencapaian SPM Perumahan Rakyat	N/A	100	100	100	100	100	100
4.5	Prosentase RT yg dialiri Listrik	25,60	40,34	55,78	70,52	85,26	100	100
5	Urusan Ketentraman, Kertertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat							
5.1	Persentase Penanganan Konflik Sosial	100	100	100	100	100	100	100
5.2	Persentase Masyarakat yang Paham tentang Kewaspadaan dan Deteksi Dini	N/A	100	100	100	100	100	100
5.3	Persentase Masyarakat yang Paham tentang Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	N/A	100	100	100	100	100	100

5.4	Persentase Masyarakat yang Paham tentang Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	N/A	100	100	100	100	100	100
5.5	Persentase Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah	100	100	100	100	100	100	100
5.6	Persentase Pencapaian SPM TRANSTIBUMLINMAS	N/A	100	100	100	100	100	100
6	Urusan Sosial							
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan	2,03	80	80	80	80	80	80
6.2	Persentase Pencapaian SPM Sosial	N/A	100	100	100	100	100	100
6.3	Jumlah KUBE PMKS yang mendapat bantuan	0	0	20	20	20	20	80
6.4	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang aktif	3	0	1	1	2	1	8
7	SUB URUSAN TRANSTIBUMLINMAS PENANGGULANGAN BENCANA							
7.1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,50
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
8	Urusan Tenaga Kerja							
8.1	Persentase peserta pelatihan tenaga kerja yang ditempatkan / yang mendapatkan pekerjaan	75	80	85	90	95	100	100
9	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana							
9.1	Skor pencapaian kabupaten layak anak	0	45	300	500	600	700	700
9.2	Persentase angkatan kerja perempuan	83	84	85	86	87	88	88
10	Urusan Pangan							
10.1	Ketersediaan Pangan Utama	76,50	80	81	82	84	84	84
11	Urusan Pertanahan							
11.1	Persentase Kawasan Budidaya yang Bersertifikat	12,12	14,12	16,12	18,12	20,12	22,12	22,12
12	Urusan Lingkungan Hidup							

12.1	Persentase Jumlah Sampah Perkotaan yang Dikelola	7,08	26,14	44,61	63,07	81,54	100	100
12.2	Jumlah Kelompok 3R	0	0	44	44	44	44	176
12.3	Persentase Luas Areal RTH Yang di Kelola	10	32,50	55,00	77,50	100	100	100
12.4	Prosentase Luas Areal HTR Yang Dikelola	71,33	78,50	85,67	92,83	100	100	100
12.5	Persentase Mata Air yang Terpelihara	N/A	58,89	72,60	86,30	100	100	100
13	Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil							
13.1	Persentase Penataan Administrasi Kependudukan	92	94	96	98	100	100	100
13.2	Rata-rata Lama Pelayanan Administrasi Kependudukan	5	3	1	1	1	1	1
13.3	Persentase Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	53,36	80	90	100	100	100	100
13.4	Rata-rata Lama Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	5	3	1	1	1	1	1
14	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
14.1	Jumlah BUMDES aktif dan produktif	8	33	50	50	26	0	159
14.2	Pertumbuhan omset BUMDES	N/A	10	10	10	10	10	10
14.3	Persentase Lembaga Adat yang Dibina	N/A	0	25	25	25	25	100
14.4	Berkurangnya jumlah Desa Sangat Tertinggal	58	50	40	25	10	0	0
15	Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
15.1	Dependensi Rasio	70	70	68	66	65	63	63
15.2	Angka Contraceptive Prevelesi Rate (CPR)	79	80	80	82	84	86	86
16	Urusan Perhubungan							
16.1	Persentase Pertumbuhan jumlah izin trayek angkutan jalan	N/A	10	10	10	10	10	50
17	Urusan Komunikasi Dan Informatika							

17.1	Persentase Penduduk Yang menjangkau Akses Informasi, komunikasi dan telekomunikasi	38,89	51,11	63,33	75,58	87,78	100	100
17.2	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Terpublikasi	100	100	100	100	100	100	100
18	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah							
18.1	Persentase Pertumbuhan Omset Koperasi Likang Telu	Rp 84.296 (Juta)	10	35	35	35	35	Rp 177.275 (Juta)
18.2	Persentase pertumbuhan UKM	1430 UMK	10	10	10	10	10	2146 UMK
19	Urusan Penanaman Modal							
19.1	Rata-Rata Lama Proses Perzinan (Hari)	6,24	6,24	5	5	5	5	5
19.2	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Lokal pada Kegiatan Investasi di Kabupaten Manggarai Timur	N/A	75	75	75	75	75	75
19.3	Total Nilai realisasi investasi (PMDN/PMA)	606	50	200	300	400	500	1.450
20	Urusan Kepemudaan Dan Olahraga							
20.1	Jumlah Organsiasi Kepemudaan yang aktif	0	3	4	4	5	5	21
20.2	Jumlah wirausaha muda	N/A	40	50	50	50	50	240
20.3	Jumlah Cabang Olah Raga Berprestasi	N/A	0	2	1	1	1	5
21	Urusan Statistik							
21.1	Persentase data sektoral yang terpublikasikan sesuai standar data dan metadata	N/A	100	100	100	100	100	100
21.1	Persentase PD yang Menggunakan Sistem Persandian	8,11	8,11	13,51	18,92	24,32	29,73	29,73
22	Urusan Kebudayaan							
22.1	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	N/A	1	1	1	1	1	5

22.1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	10	11	20	20	20	20	20
23	Urusan Perpustakaan							
23.1	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	11.752	13.252	14.252	14.752	15.252	15.552	15.552
23.2	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	6.245	6.845	7.345	7.595	7.845	7.995	7.995
23.3	Pustakawan	1	0	0	1	0	0	2
24	Urusan Kearsipan							
24.1	Persentase PD yang telah diakuisi kearsipannya	0	0	4,44	24,44	44,44	66,67	66,67
	Urusan Pilihan							
25	Urusan Kelautan Dan Perikanan							
25.1	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	0,53	4	4	4	4	4	4
25.1	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	-50,76	5	10	25	30	35	35
26	Urusan Pariwisata							
26.1	Jumlah Destinasi Pariwisata Yang DI Kelola	3	0	3	2	2	3	10
26.2	Jumlah Desa Wisata Berbasis Masyarakat	0	1	2	2	2	2	10
27	Urusan Pertanian							
27.1	Persentase Pertumbuhan Produksi tanaman pangan	9,84	11	11	11	11	11	11
27.2	Persentase Pertumbuhan produksi hortikultura	N/A	4	4	4	4	4	4
27.3	Persentase Pertumbuhan produksi perkebunan	N/A	10	10	10	10	10	10
27.4	Persentase Produk Pertanian dan perkebunan Yang Sudah Dikelola pascapanennya	N/A	6	6	6,5	6,5	6,5	6,5
27.5	Indeks Infrastruktur Pertanian	37,02	44,53	51,01	55,06	64,82	71,30	71,30
27.6	Persentase Ternak Sehat	N/A	100	100	100	100	100	100
27.7	Persentase Pertumbuhan Produksi Peternakan	1,14	25	25	25	25	25	25

27.8	Pertumbuhan Harga Ternak	5,28	3	3	3	3	3	3
29	Urusan Perdagangan							
29.1	Persentase Pertumbuhan Harga Sembako Di Pasar Manggarai Timur	13,10	2	2	2	2	2	2
29.2	Pertumbuhan Volume Ekspor Regional Barang dan Jasa	5,43	5,93	6,43	6,93	7,43	7,93	7,93
30	Urusan Perindustrian							
30.1	Persentase Pertumbuhan nilai produksi Industri	11,01	11	11	11	11	11	11
30.2	Persentase industri pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan kelautan dan perikanan	762 Unit	15	15	15	15	15	15
30.3	Jumlah jenis Industri pengolahan produk lokal yang direpacking dan di-rebranding	N/A	0	1	1	1	0	3
31	Urusan Transmigrasi							
31.1	Kawasan transmigrasi	1	1	1	1	1	1	1
	Urusan Penunjang							
32	Urusan Perencanaan							
32.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan Yang Berkualitas	N/A	100	100	100	100	100	100
32.2	Persentase perencanaan yang tepat waktu sesuai peraturan perundangan yang berlaku	N/A	100	100	100	100	100	100
32.3	Persentase evaluasi hasil dokumen perencanaan pembangunan tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku	N/A	100	100	100	100	100	100
32.4	Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	N/A	100	100	100	100	100	100

32.5	Presentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	76,96	79,96	82,96	85,96	88,96	91,96	91,96
32.6	Presentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	76,96	79,96	82,96	85,96	88,96	91,96	91,96
32.7	Presentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	76,96	79,96	82,96	85,96	88,96	91,96	91,96
33	Urusan Keuangan							
33.1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	100	100	100	100	100	100	100
33.2	Prosentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Antar RKPD dengan KUA PPAS/APBD	76,96	100	100	100	100	100	100
33.3	Persentase aset yang dilaporkan di neraca	100	100	100	100	100	100	100
33.4	Persentase peningkatan pendapatan daerah	-42,36	24,38	15,60	17,13	22,43	30,16	21,33
34	Urusan Kepegawaian							
34.1	Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi	30	40	50	60	70	80	80
34.2	Persentase ASN yang Mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Karier	86,64	100	100	100	100	100	100
34.3	Fasilitasi pembinaan KORPRI	2	2	2	2	2	2	10
35	Urusan Penelitian dan Pengembangan							
35.1	Jumlah Kajian/penelitian	5	0	2	3	4	5	19
36	Urusan Pengawasan							
36.1	Nilai Kapabilitas	N/A	3	3	3	3	3	3

APIP (Level 1-5)							
36.2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan	73,54	75	80	85	90	95
37	Urusan Kewilayahan						
37.1	Persentase Tercapainya IKU Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	100	100	100	100	100
37.2	Persentase Capaian Program Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100	100	100	100	100	100
37.3	Persentase Capaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100	100	100	100	100	100
Urusan Pendukung							
38	Urusan Sekretariat Daerah						
38.1	Persentase Tugas Kepala Daerah yang Terasilitasi dengan baik	100	100	100	100	100	100
38.2	Persentase Tugas Kepala Daerah yang Terasilitasi dengan baik	100	100	100	100	100	100
38.2	Persentase Capaian Kinerja Sasaran Bidang Perekonomian	N/A	100	100	100	100	100
38.3	Persentase Capaian Pengendalian Inflasi Daerah	1,70	<2	<2	<2	<2	<2
38.4	Persentase pengadaan barang dan jasa daerah yang tepat waktu	100	100	100	100	100	100
38.5	Persentase capaian kinerja sasaran bidang Reformasi Birokrasi	100	100	100	100	100	100
38.6	Indeks Pelayanan Hukum Daerah	100	100	100	100	100	100
38.7	Persentase Capaian Kinerja Sasaran Bidang SDM	100	100	100	100	100	100
38.8	Capaian Kinerja penyelenggaraan	100	100	100	100	100	100

	tata kelola Pemerintah Daerah							
38.9	Persentase Capaian Kinerja Sasaran Bidang Pembangunan	100	100	100	100	100	100	100
40	Urusan Sekretariat DPRD							
40.1	Jumlah Perda Inisiatif yang Ditetapkan	1	0	2	2	2	2	8
40.2	Jumlah Perda Usulan dan Reguler yang Ditetapkan	40	5	5	5	5	5	25

BAB 9

Penutup



Kaidah Pelaksanaan

9



Rana Mese Matim
RanaPhoto

BAB IX

PENUTUP



Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Manggarai Timur dalam periode 2019-2024 perlu memperhatikan beberapa kaidah, sehingga menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan turunan lainnya, untuk dapat dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur bagaimana perencanaan tahunan pada saat RPJMD akan berakhir periodenya.

9.1 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RPJMD Kabupaten Manggarai Timur dalam periode 2019-2024 merupakan pedoman bagi pemerintah KABUPATEN dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun dan sebagai dokumen yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah se-Kabupaten Manggarai Timur dalam menyusun dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bupati dan Wakil Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Manggarai Timur dalam periode 2019-2024 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
2. Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024 kepada masyarakat.

3. Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2019-2024 bekerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dunia usaha serta masyarakat.
4. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 berpedoman pada RPJMD Tahun 2019-2024 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
5. Penyusunan RKPD Kabupaten Manggarai Timur pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Manggarai Timur mulai Tahun 2019 sampai dengan 2024.
6. DPRD berkewajiban membahas KUA PPAS yang diajukan oleh Bupati dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Manggarai Timur 2019-2024.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Manggarai Timur melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024.

9.2 PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang dilaksanakan pada Tahun 2024. Sebagaimana diketahui, tahun 2024 adalah tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Manggarai Timur. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka penyusunan RKPD Tahun 2025 pada saat belum ada RPJMD baru, berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Manggarai Timur 2009-2029, RKP Tahun 2025, dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD, yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan Tahun 2024, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional dan Provinsi, dan lain-lain.

Lampiran RPJMD

Tujuan dan Sasaran

- Definsi Program Pembangunan Daerah Kedalam Program Perangkat Daerah
- Tujuan Dan Sasaran Daerah, Tujuan Dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah Dan Program
- Program, Outcome Dan Rumus



Tabel 1
Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Strategis Daerah	Indikator Program Strategis Daerah
Meningkatkan Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah	Program Sekolah bahagia	Rasio sekolah yang telah menerapkan sekolah bahagia
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Program Manggarai Timur sehat	Usia Harapan Hidup
		Menurunnya Tingkat Kerawanan Sosial	Persentase penurunan PMKS	Program peningkatan kesejahteraan PMKS berbasis partisipasi masyarakat	Persentase penurunan PMKS
Meningkatkan Kinerja Pembangunan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal	Pertumbuhan Ekonomi				
	PDRB Perkapita				
	Pengeluaran Perkapita				
	Indeks Gini				
	Inflasi				
		Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Dalam PDRB Pertumbuhan sektor industri pengolahan Dalam PDRB Skor PPH	Program Pengembangan Pertanian, Pekebunan, Peternakan dan Perikanan	Persentase nilai produk industri berbasis pertanian dan perkebunan
			Pertumbuhan Omset Koperasi Likang Telu	Program Koperasi Likang telu	Omset per koperasi Likang Telu
		Meningkatnya pertumbuhan sektor jasa	Pertumbuhan sektor jasa kemasyarakatan, penyediaan akomodasi dan makan minum Dalam PDRB Pertumbuhan sektor perdagangan Dalam PDRB	Program community based tourism	Jumlah destinasi wisata yang dijalankan dengan basis masyarakat
		Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif	Pertumbuhan Penanaman Modal Tetap Bruto	Program penciptaan iklim investasi yang kondusif	Tingkat penyerapan tenaga kerja investasi nasional
Mengurangi ketimpangan wilayah	Indeks Williamson	Terwujudnya pelayanan Infrastruktur Dasar yang merata	Indeks Infrastruktur	Program Infrastruktur Tuntas	Indeks infrastruktur
		Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Lestari	Indeks Lingkungan Hidup	Program Ramah dan cinta lingkungan	Persentase desa yang telah memiliki kelompok yang menyelenggarakan

					3R
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Opini BPK	Program pengembangan sistem akuntabilitas pemerintah daerah	
			Nilai SAKIP		
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Program sistem pelayanan publik berbasis kearifan lokal	



Tabel 2

Definsi Program Pembangunan Daerah Kedalam Program Perangkat Daerah

Misi 1 dan Misi 2	<i>Program Sekolah bahagia</i>	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan PNF
		Program Pembinaan SD
		Program Pembinaan SMP
		Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
		Program BOS
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
		Program Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan
		Program Pengembangan Nilai Budaya
	<i>Program Manggarai Timur sehat</i>	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Program Pelayanan Kesehatan
		Program Kesehatan Masyarakat
		Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Kesehatan
		Program KB dan Pengendalian Penduduk
	<i>Program peningkatan kesejahteraan PMKS berbasis partisipasi masyarakat</i>	Program Perlindungan, Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Sosial
		Program Pemberdayaan Sosial
		Program Peningkatan Kelembagaan Sosial
		Program Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
		Program Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
Misi 3	<i>Program Pengembangan Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan</i>	Program Peningkatan produksi
		Program Peningkatan Nilai Tambah Pertanian Dan Perkebunan
		Program Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pertanian
		Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak
		Program peningkatan produksi dan hasil peternakan
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Produksi Perikanan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
	<i>Program Koperasi Likang telu</i>	Program Pengembangan Koperasi
		Program Pengembangan Industri Kecil
		Program Pengembangan Perdagangan
	<i>Program community based tourism</i>	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
		Program Pariwisata Berbasis Masyarakat

	<i>Program penciptaan iklim investasi yang kondusif</i>	Program Pengembangan Penanaman Modal
Misi 4	<i>Program Infrastruktur Tuntas</i>	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
		Program Pengembangan, Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Sumber Daya Air
		Program Pengembangan Kawasan Pemukiman
		Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan
		Program Pengelolaan Kawasan Budidaya
		Program Peningkatan Infrastruktur Komunikasi dan Informasi
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenaga Listrik
		Program Penanggulangan Resiko Bencana
		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
		Program Pengedalian dan Pemanfaatan Sampah
		Program Pelestarian Lingkungan Hidup
	<i>Program Ramah dan cinta lingkungan</i>	
Misi 5	<i>Program pengembangan sistem akuntabilitas pemerintah daerah</i>	Program pengelolaan keuangan daerah
		Program peningkatan Pendapatan Asli Daerah
		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Berbasis Risiko
		Program Koordinasi Ketatalaksanaan Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi
		Program Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan, Perbatasan, Kependudukan, dan Otonomi Daerah
		Program Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam
		Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan
		Program Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
		Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
		Program peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Program peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Protokol Daerah
		Program Koordinasi dan Pembinaan Pembangunan Perekonomian dan

		Sumber Daya Alam
		Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
		Program peningkatan Standar Kompetensi ASN
		Program pembinaan dan pengembangan ASN
		Program Pengembangan Penelitian Daerah
		Program pengelolaan statistik dan persandian
		Program perbaikan sistem kearsipan
	<i>Program sistem pelayanan publik berbasis kearifan lokal</i>	Program Pelayanan Informasi Media Baru, Perfilman dan Media Percetakan
		Program Pengembangan Pelayanan Perizinan
		Program Penataan Sistem Administrasi Kependudukan Terpadu
		Program pelayanan pencatatan sipil
		Program Penguatan Ketahanan Bangsa, Ideologi, Kewaspadaan dan Penguatan Politik Dalam Negeri
		Program Pemeliharaan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal
		Program pembinaan pembangunan dan pemerintahan desa
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah



Tabel 3

Tujuan Dan Sasaran Daerah, Tujuan Dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah Dan Program

Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD	Program	Indikator Program	Urusan/ OPD
Meningkatkan Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah							
				Meningkatkan kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah	Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan PNF	APK PAUD Angka kelulusan paket A/B/C Persentase Pencapaian SPM Pendidikan	Pendidikan
								Program Pembinaan SD	APK	
									APM	
									APS	
									Angka Putus Sekolah	
									Angka Kelulusan	
									Angka Melanjutkan	
								Program Pembinaan SMP	APK	
									APM	
									APS	

										Angka Putus Sekolah								
										Angka Kelulusan								
										Angka Melanjutkan								
									Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Presentasi Guru yang bersertifikat								
													Rasio Guru/Murid SD					
													Rasio Guru/Murid SMP					
									Program BOS	Presentase Pelaksanaan Program BOS								
												Meningkatkan Literasi	Pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan	Meningkatnya Minat dan Kegemaran Membaca	Pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Perpustakaan
																	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	
		Jumlah Pustakawan																
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup															
				Meningkatkan Derajat	Usia Harapan	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Usia Harapan Hidup	Program Pencegahan	Presentasi Bayi Kelhairan	Kesehatan								

				Kesehatan Masyarakat	Hidup	Masyarakat		dan Pengendalian Penyakit	Hidup yang dapat Imunisasi Lengkap	
									Persentase Penanganan Penyakit Tidak Menular	
									Persentase Penanganan Penyakit Menular	
								Program Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Terakreditasi	
									Presentasi Rumah Sakit Terakreditasi	
									Cakupan Pelayanan Dasar Kesehatan Masyarakat Miskin	
									Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	
									Persentase Pencapaian SPM Kesehatan	
									Program Kesehatan Masyarakat	Presentasi Angka Stunting
										AKI
AKB										

									Peresntasi Balita Gizi Brk	
									Presentasi Desa STBM	
									Presentase Masyarakat (RT) PHBS	
									Jumlah Dokter	
									Jumlah Rumah Sakit	
									Persentasi Ketersedian Obat dan Vaksin di Puskesmas	
		Menurunnya Tingkat Kerawanan Sosial	Persentase penurunan PMKS							
				Menurunkan Tingkat Kerawanan Sosial	Persentase penurunan PMKS	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase Penurunan PMKS	Program Perlindungan, Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan	Sosial
									Persentase Pencapaian SPM Sosial	
								Program Pemberdayaan Sosial	Jumlah KUBE PMKS yang mendapatkan bantuan	
								Program Peningkatan kelembagaan sosial	Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	



						Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Program Pelatihan dan penempatan tenaga kerja	Persentase peserta pelatihan tenaga kerja yang ditempatkan / yang mendapatkan pekerjaan	Tenaga Kerja
						Meningkatnya Pemberdayaan Keluarga	Jumlah Keluarga Peserta Transmigrasi	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Kawasan transmigrasi	Transmigrasi
						Meningkatnya Keberdayaan Perempuan Kesejahteraan Anak, dan keluarga serta pengendalian penduduk dan menurunkan angka kelahiran total	Total Fertility Rate (TFR)	Program KB dan Pengendalian Penduduk	Angka Contraceptive Prevelesi Rate (CPR)	Pengendalian Penduduk dan KB
							Pertumbuhan Penduduk		Dependency Ratio	
							Indeks Pemberdayaan Gender	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	Skor pencapaian kabupaten layak anak	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
							IKKA (Indeks Komposit Kesejahteraan Anak)		Persentase Angkatan Kerja Perempuan	
						Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	Jumlah Pemuda Berprestasi	Program Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang aktif	Kepemudaan Dan Olah Raga
									Jumlah wirausaha muda	
									Jumlah Cabang Olah Raga Berprestasi	
						Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam seni budaya	Jumlah Atraksi Budaya	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kebudayaan

									Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	
						Meningkatnya capain kinerja sasaran bidang SDM	Persentase Capaian Kinerja Sasaran Bidang SDM	Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Capaian Kinerja Sasaran Bidang SDM	Bagian Kesra Setda
Meningkatkan Kinerja Pembangunan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, Koperasi dan UMKM	Pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan							
	PDRB Per-Kapita									
	Pengeluaran Per Kapita									
	Indeks Gini									
	Inflasi									
				Meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan	Produktivitas Sektor Pertanian dan Perkebunan	Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian dan perkebunan	Produktifitas Sektor pertanian (Rp/Ha)	Program Peningkatan produksi	Persentase Pertumbuhan Produksi tanaman pangan Persentase Pertumbuhan produksi hortikultura Persentase Pertumbuhan produksi perkebunan	Pertanian
								Program peningkatan nilai tambah pertanian dan perkebunan	Presentase Produk Pertanian dan perkebunan Yang Sudah Dikelola Pascapanennya	

				Meningkatkan Ketahanan Pangan	Stok Pangan	Meningkatnya ketersediaan dan keanekaragaman pangan	Skor PPH	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan pangan utama	Pangan
			Pertumbuhan Omset Koperasi Likang Telu							
				Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Koperasi dan UKM	Pertumbuhan Omset Koperasi Likang Telu dan UKM	Meningkatnya kinerja Koperasi Likang Telu dan UKM	Pertumbuhan Omset Koperasi Likang Telu	Program pengembangan Koperasi dan UKM	Pertumbuhan Omset Koperasi Persentase pertumbuhan UKM	Koperasi, dan UKM
		Meningkatnya pertumbuhan sektor jasa	Pertumbuhan sektor jasa kemasyarakatan, penyediaan akomodasi dan makan minum							
				Meningkatkan Sektor Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Meningkatnya kinerja bidang pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pariwisata Berbasis Masyarakat	Jumlah Destinasi Pariwisata Yang DI Kelola Jumlah Desa Wisata Berbasis Masyarakat	Pariwisata
				Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan	Pertumbuhan sektor Industri dan perdagangan	Meningkatnya kinerja bidang Industri dan perdagangan	Pertumbuhan sektor Industri dan perdagangan	Program pengembangan industri kecil	Persentase Pertumbuhan nilai produksi Industri Persentase industri pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan kelautan dan perikanan	Industri dan Perdagangan

									Jumlah jenis Industri pengolahan produk lokal yang direpacking dan di-rebranding	
								Program Pengembangan Perdagangan	Pertumbuhan Harga Sembako di pasar Manggarai timur	
									Pertumbuhan Volume Ekspor Regional Barang dan Jasa	
		Terwujudnya iklim investasi dan usaha yang kondusif	Pertumbuhan Penanaman Modal Tetap Bruto							
				Mewujudkan iklim investasi dan usaha yang kondusif	Pertumbuhan Penanaman Modal Tetap Bruto	Meningkatnya Iklim Investasi yang kondusif	Pertumbuhan investor PMA dan PMDN	Program pengembangan penanaman modal	Persentase penyerapan tenaga lokal pada kegiatan investasi di Kabupaten Manggarai Timur	Penanaman Modal
									Total nilai realisasi investasi investasi PMDN/PMA	
						Meningkatnya capaian kinerja sasaran bidang ekonomi	Persentase Capaian Kinerja Sasaran Bidang Perekonomian	Program Koordinasi dan Pembinaan Pembangunan Perekonomian	Persentase Capaian Kinerja Sasaran Bidang Perekonomian	Bagian Ekonomi Setda

								dan Sumber Daya Alam	Persentase Capaian Pengendalian Inflasi Daerah	
Mengurangi Ketimpangan Wilayah	Indeks Williamson	Terwujudnya Pelayanan Infrastruktur Dasar yang Merata	Indeks Infrastruktur							
				Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar	Indeks Infrastruktur Jalan, Jembatan, Irigasi, Air Baku, Listrik dan Ketersediaan Air Minum	Program Pengembangan, Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Prosentasi Jalan Dalam Kondisi Baik	Pekerjaan Umum
									Prosentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	
								Program Pengembangan, Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Sumber Daya Air	Prosentasi Sawah Yang Terairi Irigasi	
									Prosentase Tingkat Ketersediaan Air Baku	
									Persentase Pencapaian SPM Pekerjaan Umum	
						Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi, komunikasi, telekomunikasi	Indeks Akses Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi	Program Peningkatan Infrastruktur Komunikasi dan Informasi	Prosentase Penduduk Yang menjangkau Akses Informasi, komunikasi dan telekomunikasi	Kominfo



						Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Prasarana Perhubungan	Prosentase Jumlah orang / barang yang terangkut angkutan umum	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Prosentase Pertumbuhan jumlah trayek angkutan jalan	Perhubungan
				Meningkatkan Capaian Kinerja Sasaran Bidang Infrastruktur	Persentase Capaian Kinerja Sasaran Bidang infrastruktur	Meningkatnya capain kinerja sasaran bidang infrastruktur	Persentase Capaian Kinerja Sasaran Bidang infrastruktur	Program Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Sasaran Bidang Pembangunan	Setda/ Bagian Ekonomi dan Pembangunan
Meningkatnya Mutu Lingkungan Hidup	Indeks Lingkungan Hidup	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Lestari	Indeks Lingkungan Hidup							
				Mewujudkan Lingkungan Hidup Yang Lestari dan Tangguh Bencana	Indeks Lingkungan Hidup	Meningkatnya permukiman yang layak huni	Indeks Kualitas Lingk. Perumahan (Rumah Layak Huni, RT yg dialiri Listrik, RLH, Prosentase Kawasan Pemukiman Yg Sehat)	Program Pengembangan Kawasan Pemukiman	Prosentase Rumah Layak Huni Prosentasi Kawasan Pemukiman Yang Sehat Prosentase Ketersediaan Air Minum Persentase Pencapaian SPM Perumahan Rakyat	Pemukiman dan Perumahan
								Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenaga Listrikian	Prosentase RT yg dialiri Listrik	
								Program Pengelolaan Kawasan Budidaya	Prosentase Luas Lahan Bersertifikat	Pertanahan

						Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukannya	Prosentase Ijin Yang Taat Terhadap Tata Ruang	Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Prosentase Ijin Yang Taat Terhadap Tata Ruang	Penataan Ruang
						Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Sampah yang di olah,RTH HTR dan Mata Air Yang Terpelihara	Program Pengedalian dan Pemanfaatan Sampah	Prosentase Jumlah Sampah Perkotaan Yang Di Kelola	Lingkungan Hidup
									Jumlah Kelompok 3R	
								Program Pelestarian Lingkungan Hidup	Prosentase Luas Areal RTH Yang di Kelola	
									Prosentase Luas Areal HTR Yang Dikelola	
								Prosentase Mata Air Yang Terpelihara		
					Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Mengurangi Resiko Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Program Penanggulan gan Resiko Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah
Terwujud nya Tata Kelola Pemerin-tahan Dan Pelaya-nan Publik Yang Bersih Transpa-ran Dan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Mening- katnya akuntab- ilitas Pemerin- tah Daerah	OPINI BPK							

Inovatif													
				Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah	capaian peningkatan pendapatan daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan Pendapatan dan aset daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan			
					capaian pengelolaan keuangan			Program Pengelolaan Aset Daerah	Persentase aset yang dilaporkan di neraca				
					capaian pengelolaa an aset			Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah				
				capaian pengawasan	Meningkatnya kapasitas pengawasan inspektorat	Maturitas SPIP	Program Peningkatan Profesionalism e Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Nilai Kapabilitas APIP (Level 1 – 5)	INSPEKTORAT				
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Berbasis Risiko				Persentase tindak lanjut hasil temuan						
			Nilai SAKIP										
						Meningkatka n Akuntabilitas Perencanaa n Pembangunan dan Kelitbangan Daerah	Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Kelitbangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan	Persentase Kajian/Penelit ian yang Ditindaklanjuti	Program pengembangan penelitian daerah	Jumlah Kajian/ penelitian	Perencanaan Pembanguna n, Penelitian dan Pengembang an Daerah	
Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Yang Berkualitas											



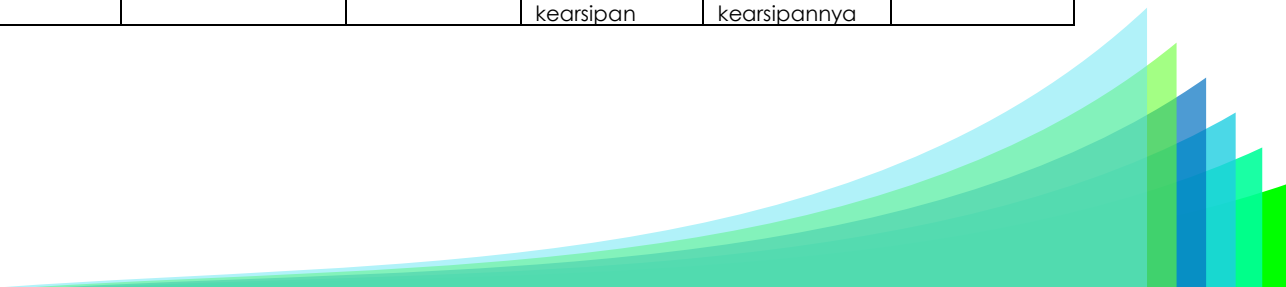
								Daerah	Persentase perencanaan yang tepat waktu sesuai peraturan perundangan yang berlaku	
									Persentase evaluasi hasil dokumen perencanaan pembangunan tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku	
									Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	
								Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
								Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
								Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	



				Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Program peningkatan Standar Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi	BKPSDM
				Program pembinaan dan pengembangan ASN	Persentase ASN yang Mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Karier					
					Fasilitasi pembinaan KORPRI					
				Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD, Opini BPK dan SAKIP Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai LPPD, Opini BPK dan SAKIP Pemerintah Daerah	Program Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan, Perbatasan, Kependudukan, dan Otonomi Daerah	Capaian koordinasi penyelenggaraan tata kelola Pemerintah Daerah	Sektda/Tapem
				Program Koordinasi Ketatalaksanaan Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi	Persentase Capaian Pengendalian Ketatalaksanaan Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi	Setda/Organisasi				
							Program Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Indeks Pelayanan Hukum Daerah	Setda/Hukum	



								Program peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Tugas Kepala Daerah yang Terasilitasi dengan baik	Setda/Umum
								Program peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Protokol Daerah	Persentase Tugas Kepala Daerah yang Terasilitasi dengan baik	Setda/Humaspro
								Program Koordinasi dan Pembinaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Capaian Pengendalian Pelaksanaan Perekonomian Daerah	Setda/Ekonomi dan Pembangunan
								Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Cakupan koordinasi penanganan Kesejahteraan Masyarakat	Setda/Kesra
								Program Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Setda/Ekonomi dan Pembangunan
								Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase pengadaan barang dan jasa daerah yang tepat waktu	Setda/ULP
								Program perbaikan sistem kearsipan	Persentase PD yang telah diakuisi kearsipannya	Kearsipan



								Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Capaian Program Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kecamatan
									Persentase Tercapainya IKU Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	
								Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Capaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Mengoptimalkan Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan	Capaian Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan	Optimalnya Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan	Capaian Prolegda Yang Tepat Waktu	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Perda Inisiatif yang Ditetapkan	Sekretariat Dewan
									Jumlah Perda Usulan dan Reguler yang Ditetapkan	
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah	IKM Daerah							
				Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal	IKM	Meningkatnya Sistem Pelayanan Publik Berbasis Kearifan Lokal	IKM	Program Pengembangan Pelayanan Perizinan	Rata-Rata Lama Proses Perizinan (Hari)	DPMPTSP



				Meningkatkan Kinerja Pelayanan Adnibistrasi Penduduk dan Pencatatan Sipil	IKM	Meningkatnya Sistem Pelayanan Publik Berbasis Kearifan Lokal	IKM	Program Penataan Sistem Administrasi Kependudukan Terpadu	Persentase Penataan Administrasi Kependudukan	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
								Rata-rata Lama Pelayanan Administrasi Kependudukan		
							Program pelayanan pencatatan sipil	Persentase Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil		
							Rata-rata Lama Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil			
				Meningkatkan Pelayanan Ketertiban dan Keamanan	Menurunnya Angka Kriminalitas	Meningkatnya Pelayanan Ketertiban dan Keamanan	Tingkat Kepatuhan terhadap Perda	Program Pemeliharaan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Kepatuhan terhadap PERDA	Polisi Pamong Praja
								Persentase Pencapaian SPM TRANSTIBUM-LINMAS		
				Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Politik	Indeks Demokrasi Daerah	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham tentang kesatuan bangsa dan Politik	Persentase Masyarakat yang Paham tentang Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penguatan Ideologi, Kewaspadaan dan Penguatan Politik Dalam Negeri	Persentase Penanganan Konflik Sosial	KESBANGPOL
								Persentase Masyarakat yang Paham tentang Kewaspadaan dan Deteksi Dini		

									Persentase Masyarakat yang Paham tentang Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	
									Persentase Masyarakat yang Paham tentang Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	
				Menyediakan Data/ Informasi Sektoral	Data/ Informasi Sektoral	Tersedianya Data/Informasi Sektoral	Data/ Informasi Sektoral	Program Pelayanan Informasi Media Baru, Perfilman dan Media Percetakan	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Terpublikasi	Komunikasi dan Informatika
								Program pengelolaan statistik dan persandian	Persentase data sektoral yang terpublikasikan sesuai standar data dan metadata	
						Meningkatnya capaian kinerja sasaran bidang Reformasi Birokrasi	Persentase capaian kinerja sasaran bidang Reformasi Birokrasi	Program Koordinasi Ketatalaksanaan Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi	Persentase capaian kinerja sasaran bidang Reformasi Birokrasi	
									Jumlah PD yang Menggunakan Sistem Persandian	Setda/ Organisasi



Tabel 4
Keterangan 1, 2 dan 3

No	Sumber Tabel	Penjelasan
Indikator Tujuan		
1	Indeks Pembangunan Manusia	Perhitungan Oleh BPS
2	Pertumbuhan Ekonomi	Perhitungan Oleh BPS
3	PDRB Perkapita	Perhitungan Oleh BPS
4	Pengeluaran Perkapita	Perhitungan Oleh BPS
5	Indeks Gini	Perhitungan Oleh Bappeda
6	Inflasi	Perhitungan Oleh Bagian Ekonomi Setda dan Bappeda
7	Indeks Williamson	Perhitungan Oleh Bappeda
8	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Perhitungan Oleh Inspektorat dan Bagian Organisasi
Program Pembangunan Daerah		
1	Program Sekolah bahagia	
2	Program Manggarai Timur sehat	
3	Program peningkatan kesejahteraan PMKS berbasis partisipasi masyarakat	
4	Program Pengembangan Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	
5	Program Koperasi Likang telu	
6	Program community based tourism	
7	Program penciptaan iklim investasi yang kondusif	
8	Program Infrastruktur Tuntas	
9	Program Ramah dan cinta lingkungan	
10	Program pengembangan sistem akuntabilitas pemerintah daerah	
11	Program sistem pelayanan publik berbasis kearifan lokal	
Indikator Program Staretegis Daerah		
1	Rasio sekolah yang telah menerapkan sekolah bahagia	Perhitungan Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rumus: $\frac{P1}{P2}$ Keterangan: P1 = Jumlah Sekolah Yang Menerapkan Konsep Sekolah Bahagia P2 = Target Sekolah Dimana P1 :

		a. Partisipasi lintas sektor (Pelibatan Orang Tua, Pemangku Kebijakan dan Masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah); b. Sekolah Ramah Anak; c. Pendidikan Karakter Kontekstual; d. Pembelajaran yang menyenangkan; e. Pengembangan minat dan bakat anak berbasis kecerdasan majemuk.
2	Usia Harapan Hidup	Perhitungan Oleh Dinas Kesehatan
3	Persentase penurunan PMKS	Perhitungan Oleh Dinas Sosial
4	Persentase nilai produk industri berbasis pertanian dan perkebunan	Rumus : $\frac{P1}{P2} \times 100\%$ Keterangan: P1 = Nilai produk industri yang asalnya dari sektor pertanian, cth Kopi yang Sudah diolah menjadi bubuk, pisang yang sudah dilah menjadi kripik dst P2 = Nilai sektor industri di PDRB
5	Omset per koperasi Likang Telu	Rumus : $\frac{(\sum Omset P1, P2, P3 Tahun n - \sum Omset P1, P2, P3 Tahun (n - 1))}{\sum Omset P1, P2, P3 Tahun (n - 1)} \times 100\%$ Dimana : P1 : Jumlah Omset (Rp) Koperasi Produsen P2 : Jumlah Omset (Rp) Koperasi Konsumen P3 : Jumlah Omset (Rp) Koperasi Simpan pinjam
6	Jumlah destinasi wisata yang dijalankan dengan basis masyarakat	Rumus : Jelas
7	Tingkat penyerapan tenaga kerja investasi nasional	Rumus: $\frac{P1}{P2}$ Keterangan: P1 = Jumlah Investasi Nasional P2 = Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja

8	Indeks infrastruktur	$\frac{P1 + P2 + P3 + P4 + P5}{5} \times 100\%$ Dimana P 1 : Prosentasi Jalan Dalam Kondisi Baik P2 : Prosentase Jembatan Dalam Kondisi Baik P3 : Prosentasi Sawah Yang Terairi Irigasi P4 : Prosentase Tingkat Ketersediaan Air Baku P5 : Prosentase RT yg dialiri Listrik
9	Persentase desa yang telah memiliki kelompok yang menyelenggarakan 3R	Rumus : $\frac{P1}{P2}$ Keterangan: P1 = Jumlah Kelompok 3R P2 = Jumlah Desa
Indikator Sasaran Daerah		
1	Rata-rata Lama Sekolah	Perhitungan Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Harapan Lama Sekolah	Perhitungan Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Usia Harapan Hidup	Perhitungan Oleh Dinas Kesehatan
4	Presentase Penurunan Prevalensi Stunting	Perhitungan Oleh Dinas Kesehatan
5	Persentase penurunan PMKS	Perhitungan Oleh Dinas Sosial
6	Pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Dalam PDRB	Perhitungan Oleh BPS dan Dinas Terkait, Bappeda
7	Pertumbuhan sektor industri pengolahan Dalam PDRB	Perhitungan Oleh BPS dan Dinas Koprindag, Bappeda
8	Skor PPH	Perhitungan Oleh Dinas Pangan
9	Pertumbuhan Omset Koperasi Likang Telu	Perhitungan Oleh Dinas Koperindag
10	Pertumbuhan sektor jasa kemasyarakatan, penyediaan akomodasi dan makan minum Dalam PDRB	Perhitungan Oleh BPS dan Dinas Terkait, Bappeda
11	Pertumbuhan sektor perdagangan Dalam PDRB	Perhitungan Oleh BPS dan Dinas Koprindag, Bappeda
12	Pertumbuhan Penanaman Modal Tetap Bruto	Perhitungan Oleh BPS dan Dinas Terkait, Bappeda
13	Indeks Infrastruktur	Perhitungan Oleh Bappeda
14	Indeks Lingkungan Hidup	Perhitungan Oleh Bappeda
15	Opini BPK	Opini Diberikan Oleh BPK dan di Support Data Oleh Badan Keuangan
16	Nilai SAKIP	Penilaian Oleh Kemen-PANRB dan di Support Data oleh Bagian Organisasi
17	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Perhitungan Oleh Bagian Organisasi Setda

Tabel 5
Indikator Sasaran OPD dan Rumus

Indikator Sasaran OPD		Rumus Perhitungan
A	Pembangunan Manusia	
1	Rata-rata Lama Sekolah	Rumus $MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{lama sekolah penduduk ke } - i)$ Dimana : $\frac{1}{P_{15+}} = \text{Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Ke atas}$ lama sekolah penduduk ke - i = - Tidak Pernah sekolah sama dengan =0 - Masih Sekolah di SD sampe dengan S1= Konversi Ijazah terakhir + kelas terakhir -1 - Masih sekola di S2/S3 = konversi Ijazah terakhir +1 - Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir - Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat dikelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir -1
2	Harapan Lama Sekolah	Formula → $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: HLS_a^t : Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t : Jumlah penduduk usia i pada tahun t i : Usia (a, a + 1, ..., n) FK : Faktor koreksi pesantren
3	Pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan	Rumus: Jelas
4	Usia Harapan Hidup	Rumus $\frac{\sum P \text{ Tahun } n}{P1 \text{ Tahun } n}$

		Dimana : P : Jumlah total umur orang yang meninggal P1: Jumlah Orang Yang meninggal
5	Persentase Penurunan PMKS	Rumus: $\frac{(\sum P Tahun (n - 1) - \sum P Tahun n)}{\sum P Tahun (n - 1)} \times 100\%$ Keterangan: P = Jumlah PMKS
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Rumus: $\frac{P1}{P2} \times 100\%$ Keterangan: P1 = Jumlah Angkatan Kerja P2 = Jumlah Penduduk Usia Kerja
7	Jumlah Keluarga Peserta Transmigrasi	Rumus: Jelas
8	Total Fertility Rate (TFR)	Rumus : $TFR = 5 \sum ASFR$ $ASFRi = \frac{bi \times K}{pif}$ TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pif = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i = 2 untuk kelompok umur 20-24,.....,

		$I = 7$ untuk kelompok umur 45-49) K = bilangan konstanta biasanya 1000
9	Pertumbuhan Penduduk	Rumus : Jelas
10	Indeks Pemberdayaan Gender	Rumus : Koordinasi Dinas BP2KB Dengan BPS
11	IKKA (Indeks Komposit Kesejahteraan Anak)	Rumus : oleh kementerian pemberdayaan perempuan
12	Jumlah Pemuda Berprestasi	Rumus : Jelas
13	Jumlah Atraksi Budaya	Rumus : Jelas
14	Persentase Capaian Kinerja Sasaran Bidang SDM	Rumus: $\frac{P1}{P2} \times 100\%$ Keterangan: P1 = target Capaian Sasaran OPD Bidang SDM P2 = target Sasaran OPD Bidang SDM
B	Pengembangan Ekonomi Wilayah	
1	Produktifitas Sektor pertanian (Rp/Ha)	Rumus : $\frac{P1}{P2}$ Keterangan: P1 = Nilai sektor pertanian di PDRB P2 = Luas Areal Pertanian
2	Pertumbuhan Nilai tambah produksi ternak	Rumus : $P1 = \frac{\text{Nilai Produk Peternakan Tahun } t - \text{Nilai Produk Peternakan Tahun } t - 1}{\text{Nilai Produk Peternakan Tahun } t - 1} \times 100\%$ P1 = Nilai Produk Peternakan Dimana : Nilai Produk Peternakan merupakan (Jumlah Produksi Peternakan x Harga Produk Peternakan)

		Cth : Jumlah Sapi X Harga Sapi + Jumlah Babi X Harga Babi + Jumlah Ayam X Harga Ayam Dst...
3	Pertumbuhan nilai tambah perikanan	Rumus : $P1 = \frac{\text{Nilai Produk Perikanan Tahun } t - \text{Nilai Produk Perikanan Tahun } t - 1}{\text{Nilai Produk Perikanan Tahun } t - 1} \times 100\%$ P1 = Nilai Produk Perikanan Dimana : Nilai Produk Peternakan merupakan (Jumlah Produksi Perikanan x Harga Produk Perikanan) Cth : Jumlah Perikanan Tangkap (Jenis1,2,3 dst..) X Harga Perikanan Tangkap (Jenis1,2,3 dst..) + Jumlah Perikanan Budidaya (Jenis1,2,3 dst..) + Jumlah Perikanan Budidaya (Jenis1,2,3 dst..)
4	Persentase Desa yang maju	Rumus : Jelas
5	Skor PPH	Rumus : Perhitungan Oleh Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Kelautan
6	Pertumbuhan Omset Koperasi Likang Telu	Rumus : $\frac{(\sum \text{Omset } P1, P2, P3 \text{ Tahun } n - \sum \text{Omset } P1, P2, P3 \text{ Tahun } (n - 1))}{\sum \text{Omset } P1, P2, P3 \text{ Tahun } (n - 1)} \times 100\%$ Dimana : P1 : Jumlah Omset (Rp) Koperasi Produsen P2 : Jumlah Omset (Rp) Koperasi Konsumen P3 : Jumlah Omset (Rp) Koperasi Simpan pinjam
7	Presentase pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	Rumus $\frac{(\sum P \text{ Tahun } n - \sum P \text{ Tahun } (n - 1))}{\sum P \text{ Tahun } (n - 1)} \times 100\%$ Dimana : P : Jumlah Wisatawan
8	Pertumbuhan sektor Industri dan perdagangan	Rumus: $\frac{P1 + P2}{2}$ Keterangan: P1 = Pertumbuhan Sektor Industri Dalam PDRB P2 = Pertumbuhan Sektor Perdagangan Dalam PDRB
9	Pertumbuhan investor PMA dan PMDN	Rumus :

		jelas
10	Persentase Capaian Kinerja Sasaran Bidang Perekonomian	Rumus: $\frac{P1}{P2} \times 100\%$ Keterangan: P1 = target Capaian Sasaran OPD Bidang Ekonomi P2 = target Sasaran OPD Bidang Ekonomi
C Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		
1	Indeks Infrastruktur	$\frac{P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6}{6} \times 100\%$ Dimana P 1 : Prosentasi Jalan Dalam Kondisi Baik P2 : Prosentase Jembatan Dalam Kondisi Baik P3 : Prosentasi Sawah Yang Terairi Irigasi P4 : Prosentase Tingkat Ketersediaan Air Baku P5 : Prosentase Ketersediaan Air Minum P6 : Listrik
2	Indeks Akses Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi	Rumus : $\frac{P1}{P2} \times 100\%$ Dimana P1 : Jumlah Media Informasi, Komunikasi dan telekomunikasi daerah P2 : Jumlah Media Informasi, Komunikasi dan telekomunikasi (TV, Radio, Koran/Majalah, Medsos)
3	Prosentase Jumlah orang / barang yang terangkut angkutan umum	Rumus : $\frac{P1}{P2} \times 100\%$ P1 : Jumlah angkutan darat

		P2 : Jumlah Penumpang Angkutan
4	Indeks Kualitas Lingk. Perumahan(Rumah Layak Huni,RT yg dialiri Listrik,RLH, Prosentase Kawasan Pemukiman Yg Sehat)	Rumus : $\frac{P1 + P2 + P3}{3} \times 100\%$ Dimana P1 : Prosentase Rumah Layak Huni P2 : Prosentasi Kawasan Pemukiman Yang Sehat P3 : Prosentase RT yg dialiri Listrik
5	Prosentase Ijin Yang Taat Terhadap Tata Ruang	Rumus : $\frac{P1}{P2} \times 100\%$ Dimana P1 : Jumlah Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Iji P2 : Jumlah Ijin Pemanfaatan Ruang
6	Indeks Sampah yang di olah,RTH , HTR dan Mata air yang terpelihara	Rumus : $\frac{P1 + P2 + P3 + P4}{4} \times 100\%$ Dimana : P1 : Prosentase Jumlah Sampah Yang Diolah P2 : Prosentase Luas Areal RTH Yang di Kelola P3 : Prosentase Luas Areal HTR P4 : Prosentase Mata Air Yang Terpelihara
7	Indeks Ketahanan Daerah	Rumus : Jelas
8	Persentase Capaian Kinerja Sasaran Bidang infrastruktur	Rumus: $\frac{P1}{P2} \times 100\%$

		Keterangan: P1 = target Capaian Sasaran OPD Bidang Infrastruktur P2 = target Sasaran OPD Bidang Infrastruktur
D	Tata Kelola Pemerintahan	
1	Indeks Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Rumus : $\frac{P1 + P2 + P3}{3} \times 100\%$ Dimana : P1 : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah P2 : Persentase aset yang dilaporkan di neraca P3 : Persentase peningkatan pendapatan daerah
2	Maturitas SPIP	Perhitungan dilakukan oleh Inspektorat
3	Persentase Kajian/Penelitian yang Ditindaklanjuti	Perhitungan dilakukan oleh Bappedalitbangda
4	Persentase Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan	Perhitungan dilakukan oleh Bappedalitbangda
5	Indeks Profesionalitas ASN	Perhitungan dilakukan oleh BKPSDM
6	Nilai LPPD, Opini BPK dan SAKIP Pemerintah Daerah	Perhitungan dilakukan oleh Sekterariat Daerah
7	Capaian Prolegda Yang Tepat Waktu	Perhitungan dilakukan oleh Sekterariat DPRD
8	IKM DPMPTSP	Perhitungan dilakukan oleh Bagian Organisasi Setda
9	IKM DISDUKCAPIL	Perhitungan dilakukan oleh Bagian Organisasi Setda
10	Tingkat Kepatuhan terhadap Perda	Perhitungan dilakukan oleh Satuan POL PP
11	Persentase Masyarakat yang Paham tentang Kesatuan Bangsa dan Politik	Rumus: $\frac{P1}{P2} \times 100\%$ Keterangan: P1 = Masyarakat yang Paham tentang Kesatuan Bangsa dan Politik P2 = Jumlah Penduduk Sosialisasi
12	Data/Informasi Sektoral	Rumus: $\frac{P1}{P2} \times 100\%$ Keterangan: P1 = Jumlah data sektoral yang tersedia P2 = Jumlah data sektoral keseluruhan

13	Persentase capaian kinerja sasaran bidang Reformasi Birokrasi	Rumus: $\frac{P1}{P2} \times 100\%$ Keterangan: P1 = target Capaian Sasaran OPD Bidang Reformasi Birokrasi P2 = target Sasaran OPD Bidang Reformasi Birokrasi



Tabel 6
Program, Outcome Dan Rumus

Indikator Program OPD			
Pelayanan Urusan Wajib			
Terkait Pelayanan Dasar			
Urusan Pendidikan			
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan PNF	APK PAUD	Rumus: $\frac{\text{Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak}}{\text{Jumlah anak usia 4 – 6 Tahun}} \times 100\%$
		Angka kelulusan paket A/B/C	Rumus: $\frac{\text{Jumlah lulusan pada paket A/B/C}}{\text{Jumlah siswa paket A/B/C pada tahun n}} \times 100\%$
		Persentase Pencapaian SPM Pendidikan	Rumus : Berpedoman Pada Petunjuk Teknis Permendagri Terkait SPM Pendidikan
2	Program Pembinaan SD	APK SD/MI	Rumus: $\frac{\text{Jumlah Siswa pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah anak usia 7 – 12 Tahun}} \times 100\%$
		APM SD/MI/Paket A	Rumus: $\frac{\text{Jumlah siswa usia 7 – 12 Tahun dijenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7 – 12 Tahun}} \times 100\%$
		APS SD/MI	Rumus: $\frac{\text{Jumlah murid usia 7 – 12 Thn yang Masih Bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 thn}} \times 100\%$
		Angka Putus Sekolah SD/MI	Rumus: $\frac{\text{Jumlah murid usia 7 – 12 Thn yang Tidak Bersekolah Lagi}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7 – 12 Thn yang Sedang Bersekolah}} \times 100\%$

3		Angka Kelulusan SD/MI	Rumus: $\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$
		Angka Melanjutkan	Rumus: $\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$
	Program Pembinaan SMP	APK SMP	Rumus: $\frac{\text{Jumlah Siswa pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah anak usia 13 – 15 Tahun}} \times 100\%$
		APM SMP	Rumus: $\frac{\text{Jumlah siswa usia 13 – 15 Tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13 – 15 Tahun}} \times 100\%$
		APS SMP	Rumus: $\frac{\text{Jumlah murid usia 13 – 15 Thn yang Masih Bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 thn}} \times 100\%$
		Angka Putus Sekolah SMP	Rumus: $\frac{\text{Jumlah murid usia 13 – 15 Thn yang Tidak Bersekolah Lagi}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13 – 15 Thn yang Sedang Bersekolah}} \times 100\%$
		Angka Kelulusan SMP	Rumus: $\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$
		Angka Melanjutkan SMP	Rumus:

			$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs Tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$
4	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Persentasi Guru yang bersertifikat	Rumus: $\frac{\text{Jumlah Guru yang Bersertifikat}}{\text{Jumlah Guru}} \times 100\%$
		Rasio Guru/Murid SD	Rumus: $\frac{\text{Jumlah Guru SD/MI}}{\text{Jumlah Murid SD/MI}} \times 100\%$
		Rasio Guru/Murid SMP	Rumus: $\frac{\text{Jumlah Guru SMP/MTs}}{\text{Jumlah Murid SMP/MTs}} \times 100\%$
5	Program BOS	Presentase Pelaksanaan Program BOS	Rumus : Jelas
Urusan Kesehatan			
5	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase bayi kelahiran hidup yang dapat imunisasi lengkap	Rumus: $\frac{\text{Jumlah Bayi Kelahiran Hidup yang Mendapat Imunisasi Lengkap}}{\text{Jumlah Bayi Kelahiran Hidup}} \times 100\%$
		Persentase Penanganan Penyakit Tidak Menular	Rumus: $\frac{\text{Jumlah Penyakit Tidak Menular yang Ditangani}}{\text{Jumlah Penyakit Menular dan Tidak Menular yang Ditemukan}} \times 100\%$
		Persentase Penanganan Penyakit Menular	Rumus: $\frac{\text{Jumlah Penyakit Menular yang Ditangani}}{\text{Jumlah Penyakit Menular dan Tidak Menular yang Ditemukan}} \times 100\%$
6	Program Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Terakreditasi	Rumus: $\frac{\text{Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi}}{\text{Jumlah Puskesmas}} \times 100\%$

		Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	Rumus: $\frac{\text{Jumlah Rumah Sakit yang Terakreditasi}}{\text{Jumlah Rumah Sakit}} \times 100\%$
		Cakupan Pelayanan Dasar Kesehatan Masyarakat Miskin	Rumus: $\frac{\text{Jumlah Masyarakat Miskin yang Mendapat Pelayanan Dasar Kesehatan}}{\text{Jumlah Masyarakat Miskin}} \times 100\%$
		Rasio puskesmas, poliklinik, puskesmas per satuan penduduk	Rumus: $\frac{\text{Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1.000$
		Persentase Pencapaian SPM Kesehatan	Rumus : Berpedoman Pada Petunjuk Teknis Permendagri Terkait SPM Kesehatan
7	Program Kesehatan Masyarakat	Presentasi Angka Stunting	Rumus: $\frac{\text{Jumlah Bayi/Balita Stunting}}{\text{Jumlah Bayi/Balita}} \times 100\%$
		AKI	Rumus: $\frac{\text{Jumlah Ibu Hamil yang Meninggal Karena Hamil/Bersalin dan Nifas di suatu Wilayah Tertentu Selama Satu Tahun}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup di Wilayah Tersebut dan pada Kurun Waktu yang Sama}} \times 100.000 \text{ KH}$
		AKB	Rumus: $\frac{D0-\leq 1 \text{ bln}}{\sum \text{Lahir Hidup}} \times 1000 \text{ KH}$ Keterangan: D0-≤1bln = Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu. ΣLahir Hidup = Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu.
		Persentase balita Gizi Buruk	Rumus: $\frac{\text{Jumlah Balita Gizi Buruk}}{\text{Jumlah Balita}} \times 100\%$
		Persentase Desa STBM	Rumus:

			$\frac{Jumlah\ Desa\ STBM}{Jumlah\ Desa} \times 100\%$
		Presentase Masyarakat (RT) ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Rumus: $\frac{Jumlah\ RT\ ber - PHBS}{Jumlah\ RT} \times 100\%$
8	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Kesehatan	Jumlah Dokter	Rumus: $\frac{Jumlah\ Dokter}{Jumlah\ Penduduk} \times 1.000$
		Jumlah Rumah Sakit	Rumus: jelas $\frac{Jumlah\ Rumah\ Sakit}{Jumlah\ Penduduk} \times 1.000$
		Presentasi ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Rumus: $\frac{Jumlah\ Kumulatil\ item\ obat\ indikator\ yang\ tersedia\ di\ (n)puskesmas}{jumlah\ (n)Puskemas\ yang\ melapor} \times 100\%$
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
9	Program Pengembangan, Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	Rumus : $\frac{P\ Tahun\ n}{P1\ Tahun\ n} \times 100\%$ Dimana : P : Panjang Jalan Kondisi Baik P1 : Total Panjang Jalan
		Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	Rumus : $\frac{P\ Tahun\ n}{P1\ Tahun\ n} \times 100\%$ Dimana : P : Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Baik P1 : Total Jumlah Jembatan
10	Program Pengembangan, Pembangunan dan	Persentase Sawah Yang Terairi Irigasi Teknis	Rumus : $\frac{P\ Tahun\ n}{P1\ Tahun\ n} \times 100\%$

	Rehabilitasi Infrastruktur Sumber Daya Air		Dimana : P : Luas Areal Sawah Yang di Kelola P1 : Luas Areal Sawah
		Persentase Tingkat Ketersediaan Air Baku	Rumus : $\frac{P \text{ Tahun } n}{P1 \text{ Tahun } n} \times 100\%$ Dimana : P : Jumlah Sumber Air Baku Yang Terpelihara P1 : Jumlah Sumber Air Baku
		Persentase Pencapaian SPM Pekerjaan Umum	Rumus : Berpedoman Pada Petunjuk Teknis Permendagri Terkait SPM PUPR
11	Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Prosentase Ijin Yang Taat Terhadap Tata Ruang	Rumus : $\frac{P \text{ Tahun } n}{P1 \text{ Tahun } n} \times 100\%$ Dimana : P : Jumlah Usaha Yg Taat Terhadap Tata Ruang P1 : Jumlah Ijin Pemanfaatan Ruang
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
12	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	Rumus : $\frac{P \text{ Tahun } n}{P1 \text{ Tahun } n} \times 100\%$ Dimana : P : Jumlah Rumah Layak Huni P1 : Total Rumah
		Persentase Kawasan Permukiman Yang Sehat	Rumus : $\frac{P \text{ Tahun } n}{P1 \text{ Tahun } n} \times 100\%$ Dimana : P : Jumlah Permukiman Yang Sehat P1 : Total Permukiman
		Prosentase Ketersediaan Air Minum	Rumus : $\frac{P \text{ Tahun } n}{P1 \text{ Tahun } n} \times 100\%$ Dimana :

			P : Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Bersih P1 : Jumlah RT Kabupaten
		Persentase Pencapaian SPM Perumahan Rakyat	Rumus : Berpedoman Pada Petunjuk Teknis Permendagri Terkait SPM Perumahan Rakyat
13	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenaga Listrik	Persentase RT yg dialiri Listrik	Rumus : $\frac{P \text{ Tahun } n}{P1 \text{ Tahun } n} \times 100\%$ Dimana : P : Jumlah Sambungan Listrik RT P1 : Total RT
Ketentraman, Keterlibatan Umum, Dan Perlindungan Masyarakat			
14	Program Penguatan Ideologi, Kewaspadaan dan Penguatan Politik Dalam Negeri	Persentase Penanganan Konflik Sosial	Rumus: $= \frac{P}{P1} \times 100\%$ Keterangan: P = Jumlah Kasus Konflik Sosial yang terselesaikan. P1 = Jumlah Seluruh Kasus Konflik Sosial.
		Persentase Masyarakat yang Paham tentang Kewaspadaan dan Deteksi Dini	Rumus: $= \frac{P}{P1} \times 100\%$ Keterangan: P = Jumlah Masyarakat yang Paham tentang Kewaspadaan dan Deteksi Dini P1 = Jumlah Seluruh Masyarakat
		Persentase Masyarakat yang Paham tentang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Rumus: $= \frac{P}{P1} \times 100\%$ Keterangan: P = Jumlah Masyarakat yang Paham tentang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan P1 = Jumlah Seluruh Masyarakat
		Persentase Masyarakat yang Paham tentang Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Rumus: $= \frac{P}{P1} \times 100\%$ Keterangan: P = Jumlah Masyarakat yang Paham tentang Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) P1 = Jumlah Seluruh Masyarakat
15	Program Pemeliharaan dan	Persentase Kepatuhan terhadap Peraturan	Rumus:

	Keterlibatan Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	Daerah	$= \frac{P}{P1} \times 100\%$ Keterangan: P = Jumlah Kepatuhan terhadap PERDA P1 = Jumlah Seluruh PERDA
		Persentase Pencapaian SPM TRANSTIBUMLINMAS	Rumus : Berpedoman Pada Petunjuk Teknis Permendagri Terkait SPM TRANSTIBUMLINMAS
Sosial			
16	Program Perlindungan, Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan	Rumus: $\frac{\text{Jumlah PMKS yang Tertangani}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100\%$
		Persentase Pencapaian SPM Sosial	Rumus : Berpedoman Pada Petunjuk Teknis Permendagri Terkait SPM Sosial
17	Program Pemberdayaan Sosial	Jumlah KUBE PMKS yang mendapat bantuan	Rumus: $= \frac{P}{P1} \times 100\%$ Keterangan: P = Jumlah KUBE PMKS Yang DiBantu P1 = Jumlah Seluruh KUBE
18	Program Peningkatan Kelembagaan Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang aktif	Rumus : Jelas
SUB URUSAN TRANSTIBUMLINMAS PENANGGULANGAN BENCANA			
19	Program Penanggulangan Resiko Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Rumus Di Lakukan Perhitungan Oleh BPBD
Tenaga Kerja			
20	Program Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peserta pelatihan tenaga kerja yang ditempatkan / yang mendapatkan pekerjaan	Rumus: $= \frac{P}{P1} \times 100\%$ Keterangan: P = Jumlah peserta pelatihan tenaga kerja P1 = Jumlah peserta pelatihan tenaga kerja yang ditempatkan / yang mendapatkan pekerjaan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			

21	Program Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	Skor pencapaian kabupaten layak anak	Rumus : Perhitungan Oleh Dinas Terkait
		Persentase angkatan kerja perempuan	Rumus: $\frac{\text{Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan}}{\text{jumlah angkatan kerja perempuan}} \times 100\%$
Pangan			
22	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	Rumus : Ada/Tidak
Pertanahan			
23	Program Pengelolaan Kawasan Budidaya	Persentase Kawasan Budidaya yang Bersertifikat	Rumus : $\frac{P \text{ Tahun } n}{P1 \text{ Tahun } n} \times 100\%$ Dimana : P : Luas Lahan Bersertifikat P1 : Luas Lahan Kawasan Budidaya
Lingkungan hidup			
24	Program Pengendalian dan Pemanfaatan Sampah	Persentase Jumlah Sampah Perkotaan yang Dikelola	Rumus : $\frac{P \text{ Tahun } n}{P1 \text{ Tahun } n} \times 100\%$ Dimana : P : Jumlah Sampah Yang diolah P1 : Jumlah Sampah Yang di Hasilkan
		Jumlah Kelompok 3R	Rumus : Jelas
25	Program Pelestarian Lingkungan Hidup	Persentase Luas Areal RTH Yang di Kelola	Rumus : $\frac{P \text{ Tahun } n}{P1 \text{ Tahun } n} \times 100\%$ Dimana : P : Luas RTH Yang Dikelola P1 : Luas RTH
		Prosentase Luas Areal HTR Yang Dikelola	Rumus : $\frac{P \text{ Tahun } n}{P1 \text{ Tahun } n} \times 100\%$ Dimana : P : Luas HTR yang dikelola

			P1 : Luas HTR Kabupaten
		Persentase Mata Air yang Terpelihara	Rumus : $\frac{P \text{ Tahun } n}{P1 \text{ Tahun } n} \times 100\%$ Dimana : P : Mata Air yang Terpelihara P1 : Jumlah Seluruh Mata Air
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
26	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Penataan Administrasi Kependudukan	Rumus: $= \frac{P}{P1} \times 100\%$ Keterangan: P = Jumlah Penataan Administrasi Kependudukan P1 = Jumlah Seluruh Penataan Administrasi Kependudukan
		Rata-rata Lama Pelayanan Administrasi Kependudukan	Rumus : Jelas
27	Program pelayanan pencatatan sipil	Persentase Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Rumus: $= \frac{P}{P1} \times 100\%$ Keterangan: P = Jumlah Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil P1 = Jumlah Seluruh Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil
		Rata-rata Lama Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Rumus : Jelas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
28	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah BUMDES aktif dan produktif	Rumus : Jumlah Bumdes Yang Terbentuk Dan Berbadan Hukum Serta Produktif
		Pertumbuhan omset BUMDES	Rumus : $\frac{(\sum \text{Omset } P1 \text{ Tahun } n - \sum \text{Omset } P1 \text{ Tahun } (n - 1))}{\sum \text{Omset } P1 \text{ Tahun } (n - 1)} \times 100\%$ Dimana : P1 : Jumlah Omset (Rp) Bumdes
		Persentase Lembaga Adat yang Dibina	Rumus: $= \frac{P}{P1} \times 100\%$

			Keterangan: P = Jumlah Lembaga Adat yang Dibina P1 = Jumlah Lembaga Adat Yang Ada
29	Program pembinaan pembangunan dan pemerintahan desa	Berkurangnya jumlah Desa Sangat Tertinggal	Rumus : Jelas
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana			
30	Program KB dan Pengendalian Penduduk	Dependensi Rasio	Rumus: $= \frac{P}{P1} \times 100\%$ Keterangan: P = Jumlah Penduduk Non Produktif (Usia 0-14 dan 65+) P1 = Jumlah Penduduk Usia produktif (Usia 15-64)
		Angka Contraceptive Prevelesi Rate (CPR)	Rumus: $= \frac{P}{P1} \times 100\%$ Keterangan: P = Jumlah Peserta KBaktif Di Suatu Wilayah Kerja Pada Kurun Waktu Tertentu P1 = Jumlah Seluruh PUS Di Suatu Wilayah Kerja Pada Kurun Waktu Tertentu
Perhubungan			
31	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Pertumbuhan jumlah izin trayek angkutan jalan	Rumus $\frac{(P Tahun n - P Tahun (n - 1))}{P Tahun (n - 1)} \times 100\%$ Dimana : P : Jumlah trayek
Komunikasi Dan Informatika			
32	Program Peningkatan Infrastruktur Komunikasi dan Informasi	Persentase Penduduk Yang menjangkau Akses Informasi, komunikasi dan telekomunikasi	Rumus : $\frac{P Tahun n}{P1 Tahun n} \times 100\%$ Dimana : P : Jumlah Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Informasi,Komunikasi dan Telekomunikasi P1 : Total Jumlah Penduduk
33	Program Pelayanan Informasi Media	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Rumus: $= \frac{P}{P1} \times 100\%$

	Baru, Perfilman dan Media Percetakan	yang Terpublikasi	Keterangan: P = Jumlah Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Terpublikasi P1 = Jumlah Seluruh Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah			
34	Program pengembangan Koperasi dan UKM	Persentase Pertumbuhan Omset Koperasi Likang Telu	Rumus : $\frac{(\sum Omset P1, P2, P3 Tahun n - \sum Omset P1, P2, P3 Tahun (n - 1))}{\sum Omset P1, P2, P3 Tahun (n - 1)} \times 100\%$ Dimana : P1 : Jumlah Omset (Rp) Koperasi Produsen P2 : Jumlah Omset (Rp) Koperasi Konsumen P3 : Jumlah Omset (Rp) Koperasi Simpan pinjam
		Persentase pertumbuhan UKM	Rumus : $\frac{(\sum P Tahun n - \sum P Tahun (n - 1))}{\sum P Tahun (n - 1)} \times 100\%$ Dimana : P : Jumlah UKM P2 : Jumlah Omset (Rp) Koperasi Konsumen P3 : Jumlah Omset (Rp) Koperasi Simpan pinjam
Penanaman Modal			
35	Program Pengembangan Pelayanan Perizinan	Rata-Rata Lama Proses Perzinan (Hari)	Rumus : Jelas
36	Program Pengembangan Penanaman Modal	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Lokal pada Kegiatan Investasi di Kabupaten Manggarai Timur	Rumus: $\frac{P Tahun n}{P1 Tahun n} \times 100\%$ Dimana : P : Jumlah Tenaga Kerja Lokal Yang Di Berdayakan P1 : Jumlah Seluruh Kegiatan Investasi Di Kabupaten Manggarai Timur
		Total Nilai realisasi investasi (PMDN/PMA)	
Kepemudaan dan Olahraga			
37	Program Peningkatan Peran Serta Pemuda	Jumlah Organsiasi Kepemudaan yang aktif	Rumus: $= \frac{P}{P1} \times 100\%$

	dalam Pembangunan		Keterangan: P = Jumlah Organsiasi Kepemudaan yang aktif P1 = Jumlah Seluruh Organsiasi Kepemudaan
		Jumlah wirausaha muda	Rumus: $= \frac{P}{P1} \times 100\%$ Keterangan: P = Jumlah wirausaha muda P1 = Jumlah Seluruh Wirausaha
		Jumlah Cabang Olah Raga Berprestasi	Rumus: $= \frac{P}{P1} \times 100\%$ Keterangan: P = Jumlah Cabang Olah Raga Berprestasi P1 = Jumlah Seluruh Cabang Olah Raga
Statistik dan Persandian			
38	Program pengelolaan statistik dan persandian	Persentase data sektoral yang terpublikasikan sesuai standar data dan metadata	Rumus: $= \frac{P}{P1} \times 100\%$ Keterangan: P = Jumlah Data Sektoral yang Terpublikasikan P1 = Jumlah Seluruh Data Sektoral
		Persentase PD yang Menggunakan Sistem Persandian	Rumus: $= \frac{P}{P1} \times 100\%$ Keterangan: P = Jumlah PD yang Menggunakan Sistem Persandian P1 = Jumlah Seluruh PD
Kebudayaan			
39	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Rumus : Jelas
		Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Rumus: $= \frac{P}{P1} \times 100\%$ Keterangan:

			P = Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan P1 = Jumlah Seluruh Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya
Perpustakaan			
40	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Rumus : Jelas
		Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Rumus : Jelas
		Pustakawan	Rumus : Jelas
Kearsipan			
41	Program perbaikan sistem kearsipan	Persentase PD yang telah diakuisi kearsipannya	Rumus: $= \frac{P}{P1} \times 100\%$ Keterangan: P = Jumlah Perangkat Daerah yang telah diakuisi P1 = Jumlah Seluruh OPD
URUSAN PILIHAN			
Kelautan dan Perikanan			
42	Program Peningkatan Produksi Perikanan	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	Rumus : $R = \frac{P1+P2+\dots+Pn}{Pn}$ Dimana : R = Rata-rata persentase pertumbuhan produksi perikanan tangkap $P1 = \frac{\text{Rasio Produksi Perikanan Tangkap 1 Tahun Berjalan} - \text{Rasio Produksi Perikanan Tangkap 1 Tahun Lalu}}{\text{Rasio Produksi Perikanan Tangkap 1 Tahun Lalu}} \times 100\%$ $P2 = \frac{\text{Rasio Produksi Perikanan Tangkap 2 Tahun Berjalan} - \text{Rasio Produksi Perikanan Tangkap 2 Tahun Lalu}}{\text{Rasio Produksi Perikanan Tangkap 2 Tahun Lalu}} \times 100\%$

			$\frac{P_n}{\text{Rasio Produksi Perikanan Tangkap n Tahun Berjalan} - \text{Rasio Produksi Perikanan Tangkap n Tahun Lalu}} \times 100\%$
		Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	Rumus : $R = \frac{P_1 + P_2 + \dots + P_n}{P_n}$ Dimana : R = Rata-rata persentase pertumbuhan produksi perikanan budidaya $\frac{P_1}{\text{Rasio Produksi Perikanan Budidaya 1 Tahun Berjalan} - \text{Rasio Produksi Perikanan Budidaya 1 Tahun Lalu}} \times 100\%$ $\frac{P_2}{\text{Rasio Produksi Perikanan Budidaya 2 Tahun Berjalan} - \text{Rasio Produksi Perikanan Budidaya 2 Tahun Lalu}} \times 100\%$ $\frac{P_n}{\text{Rasio Produksi Perikanan Budidaya n Tahun Berjalan} - \text{Rasio Produksi Perikanan Budidaya n Tahun Lalu}} \times 100\%$
Pariwisata			
43	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Yang Dikelola	Rumus: $= \frac{P}{P_1} \times 100\%$ Keterangan: P = Jumlah Destinasi Pariwisata Yang Dikelola P1 = Jumlah Target Destinasi Pariwisata
44	Program Pariwisata Berbasis Masyarakat	Jumlah Desa Wisata Berbasis Masyarakat	Rumus: $= \frac{P}{P_1} \times 100\%$ Keterangan: P = Jumlah Desa Wisata Berbasis Masyarakat P1 = Jumlah Target Desa Wisata Berbasis Masyarakat
Pertanian			

45	Program Peningkatan produksi	Persentase Pertumbuhan Produksi tanaman pangan	Rumus : $R = \frac{P_1 + P_2 + \dots + P_n}{P_n}$ Dimana : R = Rata-rata persentase pertumbuhan produksi per Komodoti tanaman pangan $P_1 = \frac{\text{Rasio Produksi Tahun Berjalan Komoditi 1} - \text{Rasio Produksi Tahun Lalu Komoditi 1}}{\text{Rasio Produksi Tahun Lalu Komoditi 1}} \times 100\%$ $P_2 = \frac{\text{Rasio Produksi Tahun Berjalan Komoditi 2} - \text{Rasio Produksi Tahun Lalu Komoditi 2}}{\text{Rasio Produksi Tahun Lalu Komoditi 2}} \times 100\%$ $P_n = \frac{\text{Rasio Produksi Tahun Berjalan Komoditi n} - \text{Rasio Produksi Tahun Lalu Komoditi n}}{\text{Rasio Produksi Tahun Lalu Komoditi n}} \times 100\%$
		Persentase Pertumbuhan produksi hortikultura	Rumus : $R = \frac{P_1 + P_2 + \dots + P_n}{P_n}$ Dimana : R = Rata-rata persentase pertumbuhan produksi per komoditi tanaman hortikultura $P_1 = \frac{\text{Rasio Produksi Tahun Berjalan Komoditi 1} - \text{Rasio Produksi Tahun Lalu Komoditi 1}}{\text{Rasio Produksi Tahun Lalu Komoditi 1}} \times 100\%$ $P_2 = \frac{\text{Rasio Produksi Tahun Berjalan Komoditi 2} - \text{Rasio Produksi Tahun Lalu Komoditi 2}}{\text{Rasio Produksi Tahun Lalu Komoditi 2}} \times 100\%$ $P_n = \frac{\text{Rasio Produksi Tahun Berjalan Komoditi n} - \text{Rasio Produksi Tahun Lalu Komoditi n}}{\text{Rasio Produksi Tahun Lalu Komoditi n}} \times 100\%$
		Persentase Pertumbuhan produksi perkebunan	Rumus : $R = \frac{P_1 + P_2 + \dots + P_n}{P_n}$ Dimana :

			R = Rata-rata persentase pertumbuhan produksi per komoditi perkebunan $P_1 = \frac{\text{Rasio Produksi Tahun Berjalan Komoditi 1} - \text{Rasio Produksi Tahun Lalu Komoditi 1}}{\text{Rasio Produksi Tahun Lalu Komoditi 1}} \times 100\%$ $P_2 = \frac{\text{Rasio Produksi Tahun Berjalan Komoditi 2} - \text{Rasio Produksi Tahun Lalu Komoditi 2}}{\text{Rasio Produksi Tahun Lalu Komoditi 2}} \times 100\%$ $P_n = \frac{\text{Rasio Produksi Tahun Berjalan Komoditi n} - \text{Rasio Produksi Tahun Lalu Komoditi n}}{\text{Rasio Produksi Tahun Lalu Komoditi n}} \times 100\%$
46	Program Peningkatan Nilai Tambah Pertanian Dan Perkebunan	Persentase Produk Pertanian dan perkebunan Yang Sudah Dikelola pascapanennya	Rumus : $\frac{P}{P_1} \times 100$ Dimana : P = Jumlah Hasil olahan produk pertanian dan perkebunan P1 = total produksi pertanian dan perkebunan
47	Program Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pertanian	Indeks Infrastruktur Pertanian	Rumus : $\frac{(R_1 + R_2 + R_3 + R_4)}{4} \times 100$ Dimana : R1 : Jumlah jalan usaha tani terhadap luas sawah fungsional R2 : Jumlah irigasi terhadap luas sawah fungsional R3 : Jumlah penyuluh terhadap jumlah petani R4 : Jumlah kelompok tani yang memiliki Alsintan terhadap jumlah kelompok tani
Peternakan			
48	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Ternak Sehat	Rumus: $\frac{(\sum \text{Produksi P Sehat Tahun } n)}{(\sum \text{Produksi P Tahun } n)} \times 100\%$ Dimana : P : (Sapi, Kerbau, Kuda, Babi, Kambing, Domba, Ayam Kampung, Ayam Ras, Itik/Bebek, anjing)
49	Program peningkatan produksi dan hasil peternakan	Persentase Pertumbuhan Produksi Peternakan	Rumus : $R = \frac{P_1 + P_2 + \dots + P_n}{P_n}$ Dimana :

			R = Rata-rata persentase pertumbuhan produksi peternakan $P_1 = \frac{\text{Rasio Produksi Tahun Berjalan Ternak 1} - \text{Rasio Produksi Tahun Lalu Ternak 1}}{\text{Rasio Produksi Tahun Lalu Ternak 1}} \times 100\%$ $P_2 = \frac{\text{Rasio Produksi Tahun Berjalan Ternak 2} - \text{Rasio Produksi Tahun Lalu Ternak 2}}{\text{Rasio Produksi Tahun Lalu Ternak 2}} \times 100\%$ $P_n = \frac{\text{Rasio Produksi Tahun Berjalan Ternak n} - \text{Rasio Produksi Tahun Lalu Ternak n}}{\text{Rasio Produksi Tahun Lalu Ternak n}} \times 100\%$
		Pertumbuhan Harga Ternak	Rumus: $\frac{(\sum P \text{ Tahun } n - \sum P \text{ Tahun } (n - 1))}{\sum P \text{ Tahun } (n - 1)} \times 100\%$ Dimana : P : Rp (Sapi, Kerbau, Kuda, Babi, Kambing, Domba, Ayam Kampung, Ayam Ras, Itik/Bebek)
Perdagangan			
50	Program Pengembangan Perdagangan	Persentase Pertumbuhann Harga Sembako Di Pasar Manggarai Timur	Rumus : $R = \frac{P_1 + P_2 + \dots + P_n}{P_n}$ Dimana : R = Rata-rata persentase pertumbuhan harga sembako $P_1 = \frac{\text{Harga Sembako Jenis 1 Berjalan} - \text{Harga Sembako Jenis 1 Tahun Lalu}}{\text{Harga Sembako Jenis 1 Tahun Lalu}} \times 100\%$ $P_2 = \frac{\text{Harga Sembako Jenis 2 Berjalan} - \text{Harga Sembako Jenis 2 Tahun Lalu}}{\text{Harga Sembako Jenis 2 Tahun Lalu}} \times 100\%$ $P_n = \frac{\text{Harga Sembako Jenis n Berjalan} - \text{Harga Sembako Jenis n Tahun Lalu}}{\text{Harga Sembako Jenis n Tahun Lalu}} \times 100\%$
		Pertumbuhan Volume Ekspor Regional	Rumus :

		Barang dan Jasa	Dimana : R = Volume Ekspor Regional Barang dan Jasa $P_1 = \frac{R(n-1) - R_{Tahun\ n}}{R(n-1)} \times 100\%$
Perindustrian			
51	Program Pengembangan Industri Kecil	Persentase Pertumbuhan nilai produksi Industri	Rumus : $\frac{P_1}{P_2} \times 100\%$ Keterangan: P1 = Nilai produk industri yang asalnya dari sektor pertanian dan perkebunan, cth Kopi yang Sudah diolah menjadi bubuk, pisang yang sudah dilah menjadi kripik dst P2 = Nilai sektor industri di PDRB
		Persentase industri pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan kelautan dan perikanan	Rumus : Dimana : R = Jumlah industri pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan kelautan dan perikanan $P_1 = \frac{R(n-1) - R_{Tahun\ n}}{R(n-1)} \times 100\%$
		Jumlah jenis Industri pengolahan produk lokal yang direpacking dan di-rebranding	Rumus : Dimana : R = Jumlah jenis Industri pengolahan produk lokal yang direpacking dan di-rebranding $P_1 = \frac{R(n-1) - R_{Tahun\ n}}{R(n-1)} \times 100\%$
Transmigrasi			
52	Program Pengembangan	Kawasan transmigrasi	Rumus :

	Wilayah Transmigrasi		Jelas
URUSAN PENUNJANG			
Perencanaan			
53	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Yang Berkualitas	Rumus : Jelas
		Persentase perencanaan yang tepat waktu sesuai peraturan perundangan yang berlaku	Rumus : Jelas
		Persentase evaluasi hasil dokumen perencanaan pembangunan tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku	Rumus : Jelas
		Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Rumus : Jelas
54	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Presentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Rumus: $= \frac{P}{P1} \times 100\%$ Keterangan: P1 = Jumlah Program Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam P = Pencapaian Program Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
55	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Presentase Ketercapaian Program Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rumus: $= \frac{P}{P1} \times 100\%$ Keterangan: P1 = Jumlah Program Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia P = Pencapaian Program Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
56	Program Perencanaan	Presentase Ketercapaian Program	Rumus:

	Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	$= \frac{P}{P1} \times 100\%$ Keterangan: P1 = Jumlah Program Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan P = Pencapaian Program Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Keuangan			
57	Program pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Rumus: $IPKD = \frac{\sum(P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6)}{6} \times 100\%$ Keterangan: IPKD = Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah P1 = Persentase Penyerapan Anggaran P2 = Persentase Ketepatan Penggunaan Anggaran sesuai Mata Anggaran Kegiatan P3 = Persentase Kesesuaian Usulan Anggaran dengan yang Ditetapkan P4 = Persentase Ketepatan Penyampaian SPJ Pertanggungjawaban P5 = Persentase Ketepatan OPD Menyampaikan Laporan Keuangan P6 = Prosentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Antar KUA PPAS dan APBD
58	Program pengelolaan Aset Daerah	Persentase aset yang dilaporkan di neraca	Rumus: $PA = \frac{\sum(P1 + P2 + P3)}{3} \times 100\%$ Keterangan: PA = Persentase Aset yang dilaporkan di neraca P1 = Persentase Kesesuaian Pengadaan Barang dengan SIRUP P2 = Persentase Aset yang Dimanfaatkan P3 = Persentase Aset yang Dinilai
59	Program peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan pendapatan daerah	Rumus: $= \frac{(P \text{ Tahun } n - P \text{ Tahun } (n-1))}{P \text{ Tahun } (n-1)}$ Keterangan: P Tahun n = Jumlah Pendapatan Tahun yang Dihitung P Tahun (n-1) = Jumlah Pendapatan Tahun Lalu.
Kepegawaian			

60	Program peningkatan Standar Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi	Rumus: $= \frac{P}{P1} \times 100\%$ Keterangan: P = Jumlah ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi P1 = Jumlah Seluruh ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi
61	Program pembinaan dan pengembangan ASN	Persentase ASN yang Mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Karier	Rumus: $= \frac{P}{P1} \times 100\%$ Keterangan: P = Jumlah ASN yang Mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Karier P1 = Jumlah Seluruh ASN
		Fasilitasi pembinaan KORPRI	Rumus : Jelas
Penelitian dan Pengembangan			
62	Program Pengembangan Penelitian Daerah	Jumlah Kajian/penelitian	Rumus : Jelas
Pengawasan			
63	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Nilai Kapabilitas APIP (Level 1-5)	Nilai Kapabilitas APIP (Level 1-5) dikeluarkan oleh lembaga BPK kepada APIP yang telah mengikuti tes kompetensi.
64	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Berbasis Risiko	Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan	Rumus: $= \frac{P}{P1} \times 100\%$ Keterangan: P = Jumlah Hasil Temuan yang Ditindaklanjuti P1 = Jumlah Seluruh Hasil Temuan
KEWILAYAHAN			
Kecamatan			
65	Program Penyelenggaraan	Persentase Tercapainya IKU	Rumus :

	Pemerintahan Kecamatan	Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Pemerintah Kecamatan Memastikan Ketercapaian IKU di Wilayahnya
		Persentase Capaian Program Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Rumus: $= \frac{\sum(P1 + P2 + P3 + \dots + Pn)}{Pn} \times 100\%$ Dimana : P1, P2, P3, ..., Pn = Capaian Program Pemerintah Daerah di Kecamatan Pn = Jumlah Program Pemerintah Daerah di Kecamatan
66	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Capaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rumus: $= \frac{P}{P1} \times 100\%$ Keterangan: P = Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan P1 = Jumlah Target Pembangunan Sarana dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan
URUSAN PENDUKUNG			
Sekretariat Daerah			
67	Program peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Tugas Kepala Daerah yang Terfasilitasi dengan baik	Rumus: $= \frac{P}{P1} \times 100\%$ Keterangan: P = Jumlah Tugas Kepala Daerah yang Terfasilitasi dengan baik P1 = Jumlah Seluruh Tugas Kepala Daerah
68	Program peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Protokol Daerah	Persentase Tugas Kepala Daerah yang Terfasilitasi dengan baik	Rumus: $= \frac{P}{P1} \times 100\%$ Keterangan: P = Jumlah Tugas Kepala Daerah yang Terfasilitasi dengan baik P1 = Jumlah Seluruh Tugas Kepala Daerah
69	Program Koordinasi dan Pembinaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Capaian Kinerja Sasaran Bidang Perekonomian	Rumus: $= \frac{P}{P1} \times 100\%$ Keterangan: P = Persentase capaian kinerja sasaran OPD bidang ekonomi

			P1 = Persentase target sasaran OPD bidang ekonomi
		Persentase Capaian Pengendalian Inflasi Daerah	Rumus: $= \text{Laju Inflasi Tahun } n = \frac{IHK_n - IHK_0}{IHK_0} \times 100\%$ Keterangan: IHK_n = Indeks Harga Konsumen pada tahun n IHK₀ = Indeks Harga Konsumen pada tahun dasar atau tahun sebelumnya.
70	Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase pengadaan barang dan jasa daerah yang tepat waktu	Rumus: $= \frac{P}{P1} \times 100\%$ Keterangan: P = Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa Daerah yang Tepat Waktu P1 = Jumlah Seluruh Pengadaan Barang dan Jasa Daerah
71	Program Koordinasi Ketatalaksanaan Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi	Persentase capaian kinerja sasaran bidang Reformasi Birokrasi	Rumus: $= \frac{\sum(P1 + P2 + \dots + Pn)}{Pn}$ Keterangan: P₁ + P₂ + ... + P_n = Capaian OPD Koordinasi P_n = Jumlah OPD Koordinasi
72	Program Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Indeks Pelayanan Hukum Daerah	Rumus : Jelas Sesuai Petunjuk Teknis
73	Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Capaian Kinerja Sasaran Bidang SDM	Rumus: $= \frac{P}{P1} \times 100\%$ Keterangan: P = Persentase capaian kinerja sasaran OPD bidang SDM P1 = Persentase target sasaran OPD bidang SDM
74	Program Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan, Perbatasan, Kependudukan, dan Otonomi Daerah	Capaian Kinerja penyelenggaraan tata kelola Pemerintah Daerah	Rumus: $= \frac{\sum(P1 + P2 + \dots + Pn)}{Pn} \times 100\%$ Keterangan: P₁ + P₂ + ... + P_n = Capaian OPD Koordinasi P_n = Jumlah OPD Koordinasi

75	Program Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Sasaran Bidang Pembangunan	Rumus: $= \frac{P}{P1} \times 100\%$ Keterangan: P = Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah P1 = Jumlah Pembangunan Daerah
Sekretariat DPRD			
75	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Perda Inisiatif yang Ditetapkan	Rumus: $= \frac{P}{P1} \times 100\%$ Keterangan: P = Jumlah Perda Inisiatif yang Ditetapkan P1 = Jumlah Target Perda Inisiatif yang Ditetapkan
		Jumlah Perda Usulan dan Reguler yang Ditetapkan	Rumus: $= \frac{P}{P1} \times 100\%$ Keterangan: P = Jumlah Perda Usulan dan Reguler yang Ditetapkan P1 = Jumlah Target Perda Usulan dan Reguler yang Ditetapkan



